



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

2026



Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi





REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan seluruh proses penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. **KEM-PPKF merupakan dokumen negara yang memiliki peran strategis dalam memberikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan.**

Penyusunan dokumen ini merupakan amanat Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan pentingnya landasan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam proses penganggaran negara. Sebagai bagian dari proses penganggaran, KEM-PPKF juga harus disusun dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2).

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan KEM-PPKF senantiasa mempertimbangkan kondisi dan tantangan perekonomian terkini, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul di masa yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, arah dan strategi kebijakan dalam KEM-PPKF didesain untuk merespons dinamika perekonomian dan mengatasi tantangan guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

KEM-PPKF Tahun 2026 disusun oleh Pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan amanat UUD Tahun 1945 pasal 33, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini selaras dan konsisten dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Penyusunan KEM-PPKF Tahun 2026 ini dilakukan dalam situasi dunia yang mengalami perubahan dahsyat dan fundamental. Globalisasi yang dahulu mengedepankan kerja sama, kini bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarbangsa di segala bidang. Kebijakan proteksionisme, eskalasi perang dagang, serta ketegangan geopolitik—seperti konflik Rusia-Ukraina dan dinamika di Timur Tengah—telah mengubah lanskap tata kelola global. Disrupsi rantai pasok dan kebijakan tarif agresif AS-Tiongkok turut memperparah ketidakpastian ekonomi dunia.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah berupaya memitigasi risiko, melalui negosiasi dan deregulasi untuk menjaga iklim investasi dan perdagangan. Pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk meredam gejolak dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi dunia usaha dan masyarakat, dengan

tetap menjaga APBN sehat dan kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam rangka menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen PDB. APBN terus dijaga tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi fiskal dalam rangka mobilisasi pendapatan yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan. Harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah juga menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan belanja yang semakin efisien dan produktif, layanan publik yang semakin berkualitas, serta kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan.

Akhirnya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk seluruh anggota DPR RI, kebijakan yang tertuang dalam KEM-PPKF 2026 diharapkan menjadi pedoman dalam menavigasi ekonomi, meredam gejolak di tengah ketidakpastian global, sekaligus melaksanakan agenda pembangunan dalam mewujudkan **Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera** untuk semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap langkah perjuangan ini.

Jakarta, Mei 2026

Pemerintah Republik Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR BOKS	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB II DINAMIKA DAN PROSPEK PEREKONOMIAN.....	 5
2.1. Kondisi Ekonomi Global.....	5
2.2.1. Perkembangan Ekonomi Global.....	5
2.2.2. Prospek Ekonomi Global	10
2.2. Kondisi Perekonomian Domestik.....	11
2.2.1. Sektor Riil.....	11
2.2.2. Sektor Eksternal.....	20
2.2.3. Sektor Moneter dan Pasar Keuangan.....	24
2.3. Capaian Kinerja Fiskal.....	28
2.3.1. Kinerja Makro Fiskal.....	28
2.3.2. Capaian Sasaran Pembangunan.....	31
 BAB III STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL JANGKA MENENGAH	 35
3.1. Tantangan Ekonomi Jangka Menengah	37
3.1.1. Tantangan Ekonomi Global.....	37
3.1.2. Tantangan Ekonomi Domestik	39
3.2. Tantangan Fiskal Jangka Menengah	41
3.3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah.....	42
3.4. Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Jangka Menengah.....	44
3.5. Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah.....	47
3.5.1. Ketahanan Pangan	48
3.5.2. Ketahanan Energi	51
3.5.3. Makan Bergizi Gratis.....	56
3.5.4. Program Pendidikan.....	57
3.5.5. Program Kesehatan.....	60
3.5.6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM.....	62
3.5.7. Pertahanan Semesta.....	63

3.5.8.	Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.....	64
3.6.	Kerangka Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah	67
3.6.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur Makro Fiskal.....	67
3.6.2.	Sasaran Pembangunan Nasional.....	71
BAB IV	ARAH DAN STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL TAHUN 2026.....	73
4.1.	Strategi Ekonomi Makro Tahun 2026.....	73
4.1.1.	Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun.....	74
4.1.2.	Inflasi.....	74
4.1.3.	Indonesian Crude-oil Price	75
4.1.4.	Lifting Migas.....	75
4.1.5.	Pertumbuhan Ekonomi	76
4.2.	Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2026.....	76
4.3.	Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026	80
4.3.1.	Kebijakan Pendapatan Negara	80
4.3.2.	Kebijakan Belanja Negara.....	99
4.3.3.	Kebijakan Defisit dan Pembiayaan.....	118
4.4.	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	123
BAB V	HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2026	124
5.1.	Peluang dan Tantangan Wilayah	125
5.2.	Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan Tahun 2026.....	126
5.2.1.	Ketahanan Pangan	126
5.2.2.	Program Pendidikan.....	128
5.2.3.	Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah.....	129
5.2.4.	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM.....	131
5.2.5.	Akselerasi Investasi	133
5.3.	Bauran Kebijakan Fiskal Kewilayahan.....	134
5.3.1.	Pendapatan Daerah	134
5.3.2.	Belanja Daerah.....	135
5.3.3.	Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD	135
BAB VI	PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2026	139
6.1.	Perkembangan Kebijakan Belanja Negara TA 2024	139
6.1.1.	Realisasi Belanja K/L Per Jenis Belanja	139
6.1.2.	Realisasi Anggaran Beberapa Agenda Pembangunan yang Bersifat Prioritas	140

6.1.3.	Perkembangan Kebijakan Strategis Lainnya yang Menjadi Perhatian Khusus	143
6.2.	Perkembangan Kebijakan Belanja TA 2025.....	144
6.3.	Pokok-pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026	147
6.3.1.	Kebijakan Umum Belanja K/L.....	147
6.3.2.	Kebijakan Khusus Belanja K/L	148
6.3.3.	Kebijakan Belanja K/L Menurut Jenis Belanja	151
6.4.	Pagu Indikatif Transfer ke Daerah TA 2026.....	157
BAB VII	RISIKO FISKAL TAHUN 2026	163
7.1.	Risiko Ekonomi Makro	163
7.1.1.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Penerimaan Perpajakan	163
7.1.2.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Utang.....	164
7.2.	Risiko Program Prioritas	165
7.2.1.	Risiko Kebijakan Ketahanan Energi.....	166
7.2.2.	Risiko dan Upaya Mitigasi Program Pembiayaan Perumahan	166
7.2.3.	Risiko dan Upaya Mitigasi Pelaksanaan Program Pengembangan Koperasi Merah Putih	167
7.2.4.	Risiko Belanja Negara	167
7.2.5.	Risiko Pembiayaan Utang	168
7.3.	Risiko Kontingensi.....	168
7.3.1.	Risiko Kontingensi Penjaminan.....	168
7.3.2.	Kontingensi Non-Penjaminan	170
7.4.	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	172
7.5.	Risiko Fiskal Daerah.....	174
7.5.1.	Risiko Implementasi Belanja Daerah yang Belum Sepenuhnya Efisien	174
7.5.2.	Risiko Pinjaman Daerah	175
LAMPIRAN		176
1.	Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan TA 2026	176
2.	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 Berdasarkan Program	265

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah.....	70
Tabel 2. Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)	70
Tabel 3. Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah	71
Tabel 4. Daftar Regulasi Untuk Percepatan Pembangunan Nasional	145
Tabel 5. Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026.....	153
Tabel 6. Pagu Indikatif Transfer ke Daerah TA 2026	157

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2024 & Q1 2025.....	7
Grafik 2. Perkembangan Kinerja Manufaktur dan Jasa	7
Grafik 3. Perkembangan Harga Komoditas, 2024 dan 2025.....	8
Grafik 4. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Triwulanan Beberapa Negara,2022- 2025 (%).....	9
Grafik 5. Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023 - 2026 (% , yoy)	10
Grafik 6. Inflasi Global, 2023 - 2026 (% , yoy)	10
Grafik 7. Volume Perdagangan Global, 2023 - 2026 (% , yoy).....	11
Grafik 8. Pertumbuhan Ekonomi, 2020 - 2025 (% , yoy).....	12
Grafik 9. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2021-2025 (% ,yoy).....	13
Grafik 10. Pertumbuhan Komponen Produksi, 2021-2025 (% , yoy)	16
Grafik 11. Perkembangan Inflasi Indonesia, 2021 - 2024 (%).....	19
Grafik 12. Perkembangan Neraca Pembayaran, 2021 - 2024 (USD miliar).....	20
Grafik 13. Transaksi Berjalan, 2021 - 2024 (USD miliar)	21
Grafik 14. Neraca Perdagangan Barang, 2021 - 2024 (USD miliar).....	22
Grafik 15. Neraca Transaksi Modal dan Finansial, 2021 - 2024 (USD miliar).....	23
Grafik 16. Perkembangan Cadangan Devisa	24
Grafik 17. Perkembangan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan M2, 2021 - 2025 (%)	25
Grafik 18. Perkembangan DPK dan Kredit, 2019-2024 (%).....	26
Grafik 19. Rasio DPK dan Kredit per PDB, 2019-2024 (%).....	26
Grafik 20. Indikator Kinerja Perbankan Bank Umum, 2021 - 2024 (%).....	27
Grafik 21. Rasio Pendapatan Negara, 2021-2024 (%).....	29
Grafik 22. Perkembangan Defisit Anggaran, 2021 - 2024 (% PDB).....	30
Grafik 23. Perkembangan Keseimbangan Primer, 2021 - 2024 (% PDB).....	30
Grafik 24. Perkembangan Rasio Utang, 2021 - 2024 (% PDB).....	31
Grafik 25. Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2021-2025 (Rp triliun)	83
Grafik 26. Perkembangan PNBPN, 2021-2025 (Rp triliun)	89
Grafik 27. Perkembangan PNBPN SDA, 2021-2025 (Rp triliun)	89
Grafik 28. Perkembangan PNBPN SDA Migas, 2021 -2025 (Rp triliun).....	90
Grafik 29. Perkembangan PNBPN SDA Nonmigas, 2021-2025 (Rp triliun)	90

Grafik 30. Perkembangan PNBPN KND, 2021-2025 (Rp triliun)	93
Grafik 31. Perkembangan PNBPN Lainnya, 2021-2025 (Rp triliun).....	93
Grafik 32. Perkembangan PNBPN BLU, 2021-2025 (Rp triliun).....	98
Grafik 33. Penerimaan Hibah, 2021-2025 (Rp triliun).....	98
Grafik 34. Perkembangan Belanja Negara, 2021-2025 (Rp triliun)	100
Grafik 35. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2021-2025 (Rp triliun)	101
Grafik 36. Perkembangan Anggaran Subsidi, 2021–2025 (Rp triliun).....	103
Grafik 37. Perkembangan Anggaran Subsidi Energi, 2021–2025 (Rp triliun).....	103
Grafik 38. Perkembangan Anggaran Subsidi Nonenergi, 2021-2025 (Rp triliun)	106
Grafik 39. Perkembangan Transfer ke Daerah, 2021-2025 (Rp triliun).....	110
Grafik 40. Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2021-2025 (Rp triliun)	111
Grafik 41. Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2021-2025 (Rp triliun).....	111
Grafik 42. Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2021-2025 (Rp triliun).....	112
Grafik 43. Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, 2021-2025 (Rp triliun)	112
Grafik 44. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2021-2025 (Rp triliun).....	113
Grafik 45. Perkembangan Dana Desa, 2021-2025 (Rp triliun).....	113
Grafik 46. Perkembangan Dana Insentif Fiskal, 2021-2025 (Rp triliun)	114
Grafik 47. Perkembangan Defisit, 2021 – 2025 (% PDB)	119
Grafik 48. Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2021 – 2025 (Rp triliun).....	119
Grafik 49. Perkembangan Pembiayaan Utang, 2021 – 2025 (Rp triliun).....	119
Grafik 50. Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2021 – 2025 (Rp triliun).....	121
Grafik 51. Perkembangan Pemberian Pinjaman, 2021 - 2025 (Rp triliun)	121
Grafik 52. Perkembangan Kewajiban Penjaminan, 2021 – 2025 (Rp triliun).....	122
Grafik 53. Perkembangan Pembiayaan Lainnya, 2021 – 2025 (Rp triliun)	122
Grafik 54. Pemetaan Kondisi Kesejahteraan di Indonesia Tahun 2024.....	131
Grafik 55. Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2020-2024* (Rp triliun).....	136
Grafik 56. Realisasi Pembiayaan Utang Daerah (PUD) dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, 2020-2024* (Rp triliun)	136
Grafik 57. Kurva Area Pola Belanja Daerah	174

DAFTAR BOKS

Boks 1. Upaya Peningkatan Akses Layanan Publik Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.....	33
Boks 2. Peningkatan Peran Global Indonesia melalui OECD dan BRICS.....	40
Boks 3. Transisi Energi dan Nilai Ekonomi Karbon	53
Boks 4. Danantara untuk Penguatan Tata Kelola BUMN serta Akselerasi Investasi	65
Boks 5. Hilirisasi Berbasis SDA untuk Akselerasi Ekonomi.....	81
Boks 6. Implikasi Pajak Minimum Global di Indonesia: Insentif Pajak Baru dan Penolakan Trump.....	85
Boks 7. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan: Langkah Menuju Ekonomi Inklusif	117
Boks 8. Penerapan Strategi Kewilayahan untuk Meningkatkan Desa Mandiri.....	132

DAFTAR SINGKATAN

1.	3T	:	Tertinggal, Terdepan, Terluar
2.	ABS	:	<i>Automatic Blocking System</i>
3.	ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
4.	AHU	:	Administrasi Hukum Umum
5.	AI	:	<i>Artificial Intelligence</i>
6.	Almatsus	:	Alat dan Material Khusus
7.	Alsintan	:	Alat dan Mesin Pertanian
8.	Alutsista	:	Alat Utama Sistem Senjata
9.	AP	:	<i>Administered Price</i>
10.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11.	APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12.	APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
13.	APK	:	Angka Partisipasi Kasar
14.	AS	:	Amerika Serikat
15.	ASEAN	:	<i>The Association of Southeast Asian Nation</i>
16.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
17.	ATHG	:	Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan
18.	ATK	:	Alat Tulis Kantor
19.	BBM	:	Bahan Bakar Minyak
20.	BBN	:	Bahan Bakar Nabati
21.	BEPS	:	<i>Base Erosion and Profit Shifting</i>
22.	BGN	:	Badan Gizi Nasional
23.	BI	:	Bank Indonesia
24.	BIN	:	Badan Intelijen Negara
25.	BKC	:	Barang Kena Cukai
26.	BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
27.	BLK	:	Balai Latihan Kerja
28.	BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
29.	BLU	:	Badan Layanan Umum
30.	BMN	:	Barang Milik Negara
31.	BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
32.	BoE	:	<i>Bank of England</i>
33.	BOP	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
34.	BPPD	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan
35.	BPD PKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
36.	BPI Danantara	:	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
37.	BPP	:	Belanja Pemerintah Pusat
38.	BPS	:	Badan Pusat Statistik
39.	BULOG	:	Perusahaan Umum (d/h Badan Urusan Logistik)
40.	BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
41.	BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
42.	BUN	:	Bendahara Umum Negara

43.	BVK	:	Bebas Visa Kunjungan
44.	CAR	:	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
45.	CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
46.	CEISA	:	<i>Customs Excise Information System and Automation</i>
47.	CEOR	:	<i>Chemical Enhanced Oil Recovery</i>
48.	CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
49.	CKG	:	Cek Kesehatan Gratis
50.	CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i>
51.	CPP	:	Cadangan Pangan Pemerintah
52.	CRM-IRE	:	<i>Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine</i>
53.	Dais DIY	:	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
54.	DAK	:	Dana Alokasi Khusus
55.	Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
56.	DBH	:	Dana Bagi Hasil
57.	Dekon	:	Dekonsentrasi
58.	DEN	:	Dewan Energi Nasional
59.	DHE	:	Devisa Hasil Ekspor
60.	DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
61.	DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
62.	DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
63.	DKI Jakarta	:	Daerah Keistimewaan Ibu Kota Jakarta
64.	DMO	:	<i>Domestic Market Obligation</i>
65.	DMTT	:	<i>Domestic Minimum Top-up Tax</i>
66.	DOB	:	Daerah Otonom Baru
67.	DPK	:	Dana Pihak Ketiga
68.	DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
69.	DSP4	:	Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak
70.	DST	:	<i>Digital Services Tax</i>
71.	DTI	:	Dana Tambahan Infrastruktur
72.	DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
73.	DTPPFM	:	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
74.	DTSEN	:	Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional
75.	EBT	:	Energi Baru Terbarukan
76.	ECB	:	<i>European Central Bank</i>
77.	ECI	:	<i>Economic Complexity Index</i>
78.	EOR	:	<i>Enhanced Oil Recovery</i>
79.	ERI	:	<i>Electronic Registration and Identification</i>
80.	ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
81.	ESG	:	<i>Environmental Social Governance</i>
82.	ETM	:	<i>Energy Transition Mechanism</i>
83.	FDI	:	<i>Foreign Direct Investment</i>
84.	FFR	:	<i>Federal Funds Rate</i>
85.	FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
86.	FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
87.	FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

88.	G20	:	<i>The Group of Twenty</i>
89.	Gapoktan	:	Gabungan Kelompok Tani
90.	Gbps	:	<i>Gigabits Per Second</i>
91.	GEI	:	<i>Government Effectiveness Index</i>
92.	GIR	:	<i>GloBE Information Return</i>
93.	GKP	:	Gabah Kering Panen
94.	GKG	:	Gabah Kering Giling
95.	GRK	:	Gas Rumah Kaca
96.	GVC	:	<i>Global Value Chain</i>
97.	GW	:	<i>Giga Watt</i>
98.	Ha	:	Hektar
99.	HCI	:	<i>Human Capital Index</i>
100.	HET	:	Harga Eceran Tertinggi
101.	HGBT	:	Harga Gas Bumi Tertentu
102.	HKPD	:	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
103.	HPP	:	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
104.	HPP	:	Harga Pembelian Pemerintah
105.	ICOR	:	<i>Incremental Capital Output Ratio</i>
106.	ICP	:	<i>Indonesian Crude-oil Price</i>
107.	IGT	:	Informasi Geospasial Tematik
108.	IIR	:	<i>Income Inclusion Rules</i>
109.	IK	:	Indeks Kesehatan
110.	IKFD	:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
111.	IKN	:	Ibu Kota Nusantara
112.	IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
113.	IMM	:	Indeks Modal Manusia
114.	Inpres	:	Instruksi Presiden
115.	IP	:	Indeks Pertanaman
116.	IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
117.	IPPU	:	<i>Industrial Processes and Product Use</i>
118.	ISP	:	<i>Internet Service Provider</i>
119.	ISR	:	Izin Stasiun Radio
120.	IT	:	<i>Information Technology</i>
121.	JBT	:	Jenis BBM Tertentu
122.	JETP	:	<i>Just Energy Transition Partnership</i>
123.	JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
124.	K/L	:	Kementerian/Lembaga
125.	KB	:	Keluarga Berencana
126.	KB	:	Kawasan Berikat
127.	KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
128.	Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
129.	Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
130.	Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
131.	Kemenristekdikti	:	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

132.	Kementerian ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
133.	Kementerian PPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
134.	KEM-PPKF	:	Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
135.	Kg	:	Kilogram
136.	KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
137.	KL	:	Kiloliter
138.	Km	:	Kilometer
139.	KND	:	Kekayaan Negara yang Dipisahkan
140.	KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
141.	KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
142.	KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
143.	KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
144.	KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
145.	KRL	:	Kereta Rel Listrik
146.	KSPP	:	Kawasan Sentra Produksi Perikanan
147.	KSPP	:	Kawasan Sentra Produksi Pangan
148.	KUA	:	Kredit Usaha Alsintan
149.	KUA-PPAS	:	Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
150.	KTI	:	Kawasan Timur Indonesia
151.	KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
152.	LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
153.	LNPRT	:	Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
154.	LNSW	:	Lembaga National Single Window
155.	LPDB-KUMKM	:	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian UMKM
156.	LPEI	:	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
157.	LPEM FEB-UI	:	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Indonesia
158.	LPG	:	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
159.	LRT	:	<i>Light Rail Transit</i>
160.	M1	:	Uang Beredar Sempit
161.	M2	:	Uang Beredar Luas
162.	Masyarakat KP	:	Masyarakat Kelautan dan Perikanan
163.	MBG	:	Makan Bergizi Gratis
164.	MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
165.	MDI-I	:	<i>Multidimensional Deprivation Index-Indonesia</i>
166.	Migas	:	Minyak dan Gas
167.	MIP-PNBP	:	Mitra Instansi Pengelola PNBP
168.	MPP	:	Mal Pelayanan Publik
169.	MRT	:	<i>Mass Rapid Transit</i>
170.	Nakes	:	Tenaga Kesehatan
171.	NEK	:	Nilai Ekonomi Karbon
172.	NIK	:	Nomor Induk Kependudukan

173.	NIM	:	Net Interest Margin
174.	NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
175.	NPL	:	Non-Performing Loan
176.	NPP	:	Narkotika Psikotropika dan Prekursor
177.	NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
178.	NRKB	:	Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
179.	NTB	:	Neraca Transaksi Berjalan
180.	NTMF	:	Neraca Transaksi Modal dan Finansial
181.	NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
182.	NTP	:	Nilai Tukar Petani
183.	NZE	:	<i>Net Zero Emissions</i>
184.	ODS	:	<i>One Day Service</i>
185.	OECD	:	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
186.	OPEC+	:	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus</i>
187.	OSS-RBA	:	<i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i>
188.	Otsus	:	Otonomi Khusus
189.	P2SK	:	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
190.	P3B	:	Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
191.	P3KE	:	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
192.	PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
193.	PAT	:	Pajak Air Tanah
194.	PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
195.	PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
196.	PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
197.	PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
198.	PDB	:	Produk Domestik Bruto
199.	PDN	:	Pinjaman Dalam Negeri
200.	PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
201.	Pemilu	:	Pemilihan Umum
202.	PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
203.	PENA	:	Pahlawan Ekonomi Nusantara
204.	Perlinsos	:	Perlindungan Sosial
205.	Perpres	:	Peraturan Presiden
206.	PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
207.	PHTC	:	Program Hasil Terbaik Cepat
208.	Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
209.	PIP	:	Program Indonesia Pintar
210.	PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
211.	PISA	:	<i>Programme for International Student Assessment</i>
212.	PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
213.	PKH	:	Program Keluarga Harapan
214.	P-KP	:	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
215.	PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
216.	PLN	:	Pinjaman Luar Negeri

217.	PLT	:	Pembangkit Listrik Tenaga
218.	PMA	:	Penanaman Modal Asing
219.	PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
220.	PMI	:	<i>Purchasing Managers' Index</i>
221.	PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
222.	PMN	:	Penyertaan Modal Negara
223.	PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
224.	PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
225.	PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
226.	PoD	:	<i>Plan of Development</i>
227.	Pokdakan	:	Kelompok Pembudidaya Ikan
228.	POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
229.	PP	:	Peraturan Pemerintah
230.	PPH	:	Pajak Penghasilan
231.	PPKE	:	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
232.	PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
233.	PPN DTP	:	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
234.	PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
235.	PSN	:	Proyek Strategis Nasional
236.	PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
237.	PSPE	:	Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
238.	PT	:	Perguruan Tinggi
239.	PTM	:	Penyakit Tidak Menular
240.	PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
241.	PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
242.	Rbph	:	Ribu barel per hari
243.	Rbsmph	:	Ribu barel setara minyak bumi per hari
244.	Regident Ranmor	:	Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
245.	Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi
246.	Renstra	:	Rencana Strategis
247.	RKFD	:	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
248.	RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
249.	RM	:	Rupiah Murni
250.	RMP	:	Rupiah Murni Pendamping
251.	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
252.	RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
253.	RUEN	:	Rencana Umum Energi Nasional
254.	RUKN	:	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
255.	RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
256.	SAKP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
257.	SAKTI	:	Sistem Informasi Terintegrasi
258.	SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
259.	Sarpras	:	Sarana dan prasarana
260.	SBN	:	Surat Berharga Negara

261.	SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
262.	SBUM	:	Subsidi Bantuan Uang Muka
263.	SD	:	Sekolah Dasar
264.	SDA	:	Sumber Daya Alam
265.	SDG	:	<i>Sustainable Development Goal</i>
266.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
267.	Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok
268.	SIGNAL	:	Samsat Digital Nasional
269.	SIMBARA	:	Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara
270.	SIMKIM	:	Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
271.	SIRG	:	Sistem Informasi Resi Gudang
272.	SKCK	:	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
273.	SMA	:	Sekolah Menengah Atas
274.	SMF	:	Sarana Multigriya Finansial
275.	SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
276.	SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
277.	SMV	:	<i>Special Mission Vehicles</i>
278.	SNI	:	Standar Nasional Indonesia
279.	SPHP	:	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
280.	SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
281.	SPPG	:	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
282.	SPPT SNI	:	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia
283.	SPT	:	Surat Pemberitahuan Tahunan
284.	SRG	:	Sistem Resi Gudang
285.	SSRG	:	Skema Subsidi Resi Gudang
286.	STCK	:	Surat Tanda Coba Kendaraan
287.	STNK	:	Surat Tanda Nomor Kendaraan
288.	Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
289.	SWF	:	<i>Sovereign Wealth Funds</i>
290.	TA	:	Tahun Anggaran
291.	TADAT	:	<i>Tax Administration Diagnostic Assessment Tool</i>
292.	TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
293.	TB	:	Tuberkulosis
294.	TCF	:	<i>Trillion Cubic Feet</i>
295.	TCKB	:	Tanda Coba Kendaraan Bermotor
296.	THR	:	Tunjangan Hari Raya
297.	THT	:	Tunjangan Hari Tua
298.	TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
299.	TKD	:	Transfer ke Daerah
300.	TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
301.	TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
302.	TNKB	:	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
303.	TP	:	Tugas Pembantuan
304.	TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir

305.	TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
306.	TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
307.	TPIP	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
308.	TPPAS	:	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
309.	TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
310.	TPST3R	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>
311.	TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
312.	TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
313.	UHH	:	Umur Harapan Hidup
314.	UMi	:	Ultra Mikro
315.	UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
316.	UNDP	:	<i>United Nations Development Program</i>
317.	UNICEF	:	<i>United Nations Children's Fund</i>
318.	USD	:	<i>United States Dollar</i>
319.	UST	:	<i>United States Treasury</i>
320.	USTR	:	<i>United States Trade Representatives</i>
321.	UTPR	:	<i>Undertaxed Payment Rules</i>
322.	UU	:	Undang-Undang
323.	UUD	:	Undang-Undang Dasar
324.	VA	:	<i>Volt-Ampere</i>
325.	WB	:	Wajib bayar
326.	WEO	:	<i>World Economic Outlook</i>
327.	WF	:	<i>Waterflood</i>
328.	Wisman	:	Wisatawan Mancanegara
329.	Wisnas	:	Wisatawan Nasional
330.	YoY	:	<i>Year on Year</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan

KEM-PPKF 2026

Dokumen Pembicaraan Pendahuluan
Penyusunan RAPBN 2026
antara Pemerintah dan DPR

Tema:
Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

**Didesain untuk Meredam Gejolak,
Sekaligus Mendukung Agenda Pembangunan**

**Kebijakan Tarif Agresif AS Memicu
Tatanan Global Berubah Dramatis**

- Deglobalisasi, Proteksionisme menguat
- Ekspor melemah
- Investasi asing melambat
- Rantai pasok terganggu
- Harga komoditas volatile
- Nilai tukar dan suku bunga tertekan

Sebagai Shock Absorber

**Mengemban Amanah untuk Memenuhi
Harapan Rakyat**

- Melindungi segenap bangsa Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia,

Sebagai Agent of Development

APBN TERUS DIJAGA TETAP SEHAT DAN KREDIBEL

**Kesiapsiagaan Kebijakan Fiskal dalam Meredam Gejolak dan
Mendukung Agenda Pembangunan**



**Uncertainty Sangat Tinggi
(Selalu Waspada)**

Lanskap Ekonomi Global **berubah dramatis**;
Risiko ketidakpastian ini **dialami oleh seluruh negara (bukan hanya Indonesia)**;
Ketidakpastian **sangat tinggi** namun juga perlu jeli menangkap peluang.



**Strategi Meredam Gejolak
(Siap Melindungi Rakyat
dan Ekonomi)**

Stabilisasi ekonomi (diplomasi ekonomi dan politik: negosiasi perdagangan, investasi, deregulasi), kolaborasi fiskal, moneter dan sektor keuangan
Melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat (paket kebijakan ekonomi, mitigasi PHK, Perlinsos);
Menjaga APBN Aman (defisit, utang terkendali dan fiscal buffer & fleksibilitas)



**Momentum Berbenah
(Reformasi Struktural)**

Momentum **penguatan kolaborasi dan kerjasama antar negara** (perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, politik)
Momentum konsolidasi untuk penguatan **daya saing dan daya tahan ekonomi**.

MEWUJUDKAN CITA-CITA MULIA LINTAS GENERASI

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan,
- untuk memajukan kesejahteraan umum,
- mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pasal 33 UUD 1945

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



"Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!"

"Cita-cita kita adalah melihat wong cilik bisa tersenyum dan hidup sejahtera."

"Mari kita hentikan dendam dan kebencian. Bangun kerukunan dan gotong-royong, inilah kepribadian bangsa Indonesia."

(Pidato Presiden, 20 Oktober 2024)



MEWUJUDKAN INDONESIA TANGGUH, MANDIRI, DAN SEJAHTERA

TANTANGAN



Tatanan Global Berubah Total

- Perang dagang/tarif
- Proteksionisme
- Geopolitik
- Volatilitas harga komoditas
- Perlambatan pertumbuhan



Ekonomi Domestik Dinamis

- Tekanan terhadap Kurs & pasar modal
- Tekanan Suku bunga
- Perlambatan Ekspor
- Perlambatan Pertumbuhan



Tantangan Struktural

- Transisi Demografi
- Perubahan Iklim
- Digitalisasi Ekonomi
- Optimalisasi SDA dan SDM

STRATEGI RESPONSIF

STRATEGI JANGKA PENDEK: "Menjaga Daya Tahan Ekonomi dan Melindungi Rakyat"



Stabilisasi Ekonomi

- Diplomasi Ekonomi (Negosiasi Perdagangan & Investasi, Deregulasi)
- Kolaborasi Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan



Melindungi Dunia Usaha dan Daya Beli Masyarakat

- Insentif Fiskal
- Perlindungan Sosial
- Subsidi & Kompensasi



Pengamanan APBN

- Efisiensi dan Rekonstruksi Belanja
- Pengendalian Defisit dan Utang
- Optimalisasi Pendapatan
- Ketahanan Fiskal: *fiscal buffer* & fleksibilitas

STRATEGI JANGKA MENENGAH: "Mendukung Agenda Pembangunan Secara Optimal"



Ketahanan Pangan



Program Kesehatan



Ketahanan Energi



Pembangunan Desa, Koperasi, UMKM



Makan Bergizi Gratis



Pertahanan Semesta



Program Pendidikan



Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2025-2026

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar (Rp/USD)	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per tahun)
APBN 2025	5,2	2,5	16.000	7,0	82	605	1.005
KEM PPKF 2026	5,2 - 5,8	1,5 - 3,5	16.500 - 16.900	6,6 - 7,2	60 - 80	600 - 605	953 - 1.017

POSTUR MAKRO FISKAL 2025-2026

Uraian (% PDB)	APBN 2025	KEM PPKF 2026	
		Batas Bawah	Batas Atas
Pendapatan Negara Dan Hibah	12,36	11,71	12,22
Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,45
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76
Hibah	0,002	0,002	0,003
Belanja Negara	14,89	14,19	14,75
Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,86
Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89
Keseimbangan Primer	(0,26)	(0,18)	(0,22)
Defisit Anggaran	(2,53)	(2,48)	(2,53)
Pembiayaan	2,53	2,48	2,53

SASARAN PEMBANGUNAN 2025-2026

Indikator	APBN 2025	KEM PPKF 2026
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	6,5 - 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 5,00	4,44 4,96
Gini Rasio (Indeks)	0,379 0,382	0,377 0,380
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,57

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan KEM-PPKF 2026 memiliki makna strategis sebagai arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pertama yang disusun oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dokumen ini semakin menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045—menjadi Bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan semangat di dalam mewujudkannya. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa upaya mencapai visi tersebut tidak mudah. Perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi global maupun domestik.

Tantangan tersebut meliputi dinamika ekonomi dan geopolitik global, perubahan iklim, isu ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk merespons lanskap perekonomian global yang tengah mengalami perubahan cepat dan penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, situasi di Timur Tengah, serta dampak perubahan iklim menimbulkan risiko stagflasi dan ketimpangan ekonomi global.

Situasi paling mendasar yang dihadapi di dalam penyusunan KEM-PPKF 2026 adalah perubahan tatanan global. Globalisasi bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara, ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, orientasi “*inward looking*”, dan prinsip “*my country first*”. Kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun sejak pasca-Perang Dunia II mulai runtuh, sementara blok perdagangan dan investasi ditinggalkan. Akibatnya, rantai pasok global terganggu, risiko dan biaya transaksi meningkat, serta ekspor-impor melemah. Volatilitas global memicu arus ke luar modal asing, menekan nilai tukar, mendorong inflasi, dan memaksa sejumlah negara untuk mempertahankan suku bunga di level yang tetap tinggi.

Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025 terhadap 145 negara mitra dagang tersebut mencerminkan kembalinya praktik proteksionisme ekstrem yang pernah diterapkan AS 125 tahun lalu, bahkan menyerupai era Merkantilisme abad ke-16 hingga ke-18. Dalam dua pekan pertama bulan Mei 2025 terakhir, tercatat kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya negosiasi AS-Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons negara-negara bervariasi, dari negosiasi bilateral hingga retaliasi tarif. Peran lembaga multilateral yang dibentuk untuk memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa dagang juga tidak berjalan secara efektif. Dinamika ini mencerminkan ketidakpastian global yang terus berlanjut akibat persaingan ekonomi, perdagangan, keuangan, hingga potensi konflik militer antarnegara.

Memburuknya perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global semakin menekan perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Perang tarif antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini tidak hanya memengaruhi perdagangan bilateral mereka, tetapi juga memberikan efek rambatan (*spillover effects*) ke seluruh dunia. Beberapa negara mulai mengalami kontraksi pada triwulan I, seperti Korea Selatan. Sebagian negara lain membukukan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, misalnya AS, Spanyol, Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Situasi penuh ketidakpastian saat ini sebenarnya membuka peluang bagi Indonesia untuk membuka akses pasar ekspor baru dengan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi untuk relokasi industri. Ketidakpastian global ini juga menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan mengakselerasi reformasi struktural, seperti peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, deregulasi, dan transformasi digital. Kondisi global saat ini juga menjadi momen untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan pusat dan daerah guna mendorong akselerasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Guna menghadapi ketidakpastian global sekaligus melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah akan memperkuat stabilitas ekonomi domestik melalui penguatan diplomasi dan kolaborasi antarnegara. Pemerintah akan mendorong negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang lebih progresif, terbuka, dan adil, baik melalui perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk dalam kerangka kerja sama regional seperti *The Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) dan Indo-Pasifik. Di saat yang sama, reformasi struktural terus dijalankan, baik melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan perbaikan ekosistem investasi, maupun peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, guna menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan likuiditas sektor riil, koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan terus ditingkatkan.

Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan ekonomi dan fiskal yang responsif dan inklusif guna melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Insentif dan paket kebijakan fiskal, serta dukungan pembiayaan akan diberikan pada sektor-sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, program perlindungan sosial juga akan terus diperkuat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan jaring pengaman untuk kelompok rentan guna menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.

Kebijakan fiskal akan dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga keberlanjutan fiskal (*prudent and sustainable*). Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta mengelola rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara terkendali. APBN difungsikan secara optimal sebagai instrumen *countercyclical* untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran dalam merespons kebutuhan strategis. Efisiensi dan efektivitas belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi.

Dengan demikian, APBN sebagai instrumen fiskal harus dirancang tetap ekspansif, terarah dan terukur. Kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk menjaga

stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, peningkatan investasi dan ekspor, penguatan inovasi dan kualitas SDM, serta daya saing dan ketahanan nasional serta pemerataan kesejahteraan. Kebijakan fiskal juga ditujukan untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin sehat melalui peningkatan pendapatan negara (mobilisasi pendapatan), belanja yang lebih produktif dan efisien, serta pembiayaan yang inovatif dan *prudent*.

Sebagai dokumen kebijakan, KEM-PPKF Tahun 2026 disusun secara sistematis dan terstruktur. Secara garis besar, dokumen ini mencakup: *Pertama*, Pendahuluan yang berisi gambaran besar dan struktur dokumen KEM-PPKF Tahun 2026. *Kedua*, Dinamika dan Prospek Perekonomian. *Ketiga*, Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah. *Keempat*, Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2026. *Kelima*, Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Tahun 2026. *Keenam*, Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026. *Ketujuh*, Risiko Fiskal Tahun 2026.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

DINAMIKA DAN PROSPEK PEREKONOMIAN

2.1. Kondisi Ekonomi Global

2.2.1. Perkembangan Ekonomi Global

Situasi ekonomi global 2024 – 2025 masih menghadapi tantangan, dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antarnegara serta ketidakpastian yang meningkat di awal 2025. Sepanjang tahun 2024, negara-negara Asia, seperti India, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Indonesia tumbuh solid di tengah situasi ekonomi global yang volatil. Pertumbuhan India didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, meski menghadapi tantangan besar dalam mentransformasi sektor informal untuk mendukung kinerja manufaktur dan infrastruktur. Ekonomi Tiongkok tumbuh sesuai target Pemerintah Pusat sebesar 5 persen, dengan penguatan ekspor dan permintaan domestik sebagai dampak dari stimulus ekonomi pada triwulan akhir 2024. Di sisi lain, perekonomian negara-negara Eropa mulai membaik, sejalan dengan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat inflasi yang mendekati target *European Central Bank* (ECB). Meski demikian, Jerman yang merupakan perekonomian terbesar di Eropa terus mengalami pelemahan sepanjang tahun 2024, terutama akibat pelemahan permintaan domestik, tingginya harga energi, berkurangnya permintaan luar negeri terutama dari Tiongkok, serta kondisi politik domestik yang mempengaruhi investasi. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat mencatat pertumbuhan solid yang didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, meski di tengah inflasi yang tinggi dan suku bunga yang masih relatif tinggi.

Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat memasuki 2025, seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di AS, terutama terkait kebijakan tarif. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal oleh AS pada 2 April 2025 memicu gejolak signifikan pada pasar keuangan global. Tarif impor tinggi yang diterapkan AS pada mitra dagangnya, yang kemudian direspon dengan tindakan retaliasi oleh Tiongkok, telah memicu peningkatan tensi perdagangan internasional. Hanya sepekan setelah diumumkan, tepatnya pada 9 April 2025 AS mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari dan memberlakukan tarif sementara 10 persen untuk negara-negara selain Tiongkok. Sementara itu, Meksiko dan Kanada juga tetap dikenai tarif 25 persen. Satu bulan kemudian, tepatnya pada 12 Mei 2025, terjadi perubahan arah kebijakan kembali, di mana AS dan Tiongkok sepakat menunda penerapan sanksi tarif baru dan memangkas beban tarif timbal balik secara signifikan, yaitu dari 145 persen menjadi 30 persen untuk impor AS dari Tiongkok, serta dari 125 persen menjadi 10 persen untuk impor Tiongkok dari AS. Meski kesepakatan ini di satu sisi menjadi sinyal positif bagi de-eskalasi perang dagang, perubahan

kebijakan yang cepat dan drastis ini mencerminkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, dengan kemungkinan tensi dagang kembali menjadi eskalatif masih perlu diwaspadai.

Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025. Beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini, Korea Selatan, misalnya mengalami kontraksi 0,1 persen yoy, pertama kali sejak akhir tahun 2020. Malaysia, yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9 persen yoy di triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4 persen yoy. Demikian pula Singapura yang menjadi *hub* bagi perdagangan dan investasi global, mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan hingga 5 persen yoy menjadi hanya 3,8 persen yoy. Perekonomian AS, hanya tumbuh 2 persen yoy, sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5 persen yoy bahkan sempat mencapai pertumbuhan 3 persen yoy di triwulan kedua tahun lalu.

Bagi Indonesia, transmisi dampak terjadi melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur arus modal. Dari jalur perdagangan, tarif AS berpotensi menurunkan ekspor Indonesia langsung ke AS maupun secara tidak langsung melalui penurunan permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia (khususnya Tiongkok dan negara tujuan ekspor Indonesia) yang selanjutnya memicu penurunan harga komoditas global. Hal ini berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan negara, kemampuan negara melakukan belanja, serta peningkatan beban utang.

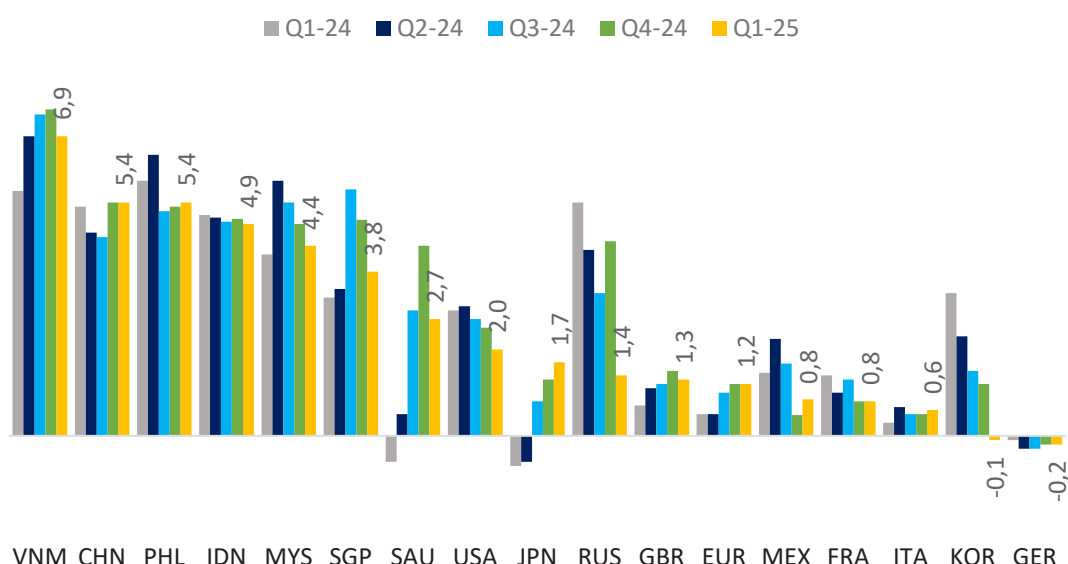
Selain itu, gangguan permintaan global dapat menyebabkan kelebihan pasokan barang, terutama dari Tiongkok, yang mencari pasar alternatif AS. Indonesia berpotensi menghadapi lonjakan impor barang konsumsi, sehingga perlu kewaspadaan melalui instrumen kebijakan yang mengamankan industri dalam negeri. Namun demikian, kelebihan pasokan bahan baku juga dapat menciptakan peluang dari penurunan biaya produksi yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, apabila keran impor dibuka secara selektif dan strategis.

Dari jalur arus modal, ketidakpastian global meningkatkan volatilitas sektor keuangan. Sentimen negatif di pasar keuangan telah memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang ke aset *safe haven* seperti emas dan obligasi Eropa dan Jepang. Tekanan arus modal keluar ini menyebabkan depresiasi rupiah, yang selanjutnya dapat meningkatkan biaya impor dan berisiko mendorong inflasi domestik.

Kinerja sektor manufaktur dan jasa juga relatif fluktuatif sepanjang tahun 2024 dan kontraktif pasca pengumuman tarif AS. Performa sektor manufaktur masih lemah terutama pada negara-negara Eropa. Para pengamat memperkirakan bahwa perbaikan performa sektor manufaktur di Eropa tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Negara-negara Eropa masih harus bertumpu dengan performa yang masih positif dari sektor jasa. Amerika Serikat juga didominasi pelemahan sektor manufaktur sepanjang tahun 2024. Tiongkok mengalami perbaikan performa sektor manufaktur selama tahun 2024. Peningkatan performa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan penggunaan peralatan berskala besar dan teknologi tinggi, serta proyeksi peningkatan konsumsi dan investasi dalam negeri yang didukung oleh berbagai stimulus kebijakan dari pemerintah terutama sejak semester kedua 2024. Di antara negara-negara *The Group of Twenty* (G20), India masih mencatatkan ekspansi yang konsisten kuat sepanjang tahun

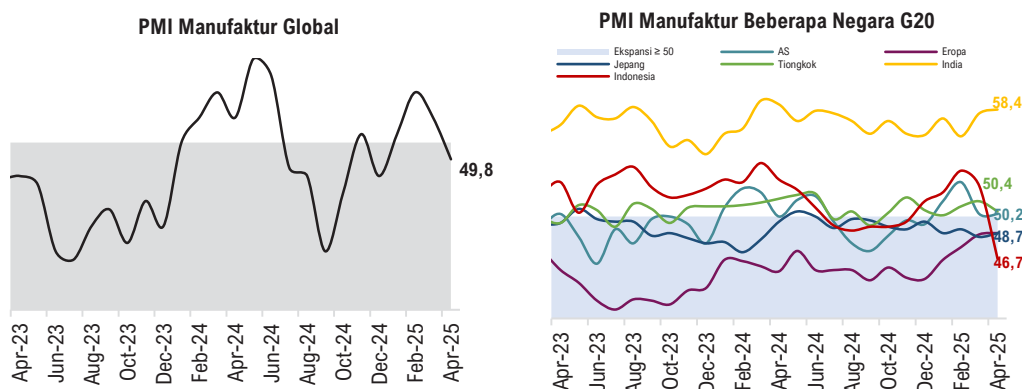
2024 dengan capaian tertinggi yaitu dengan level *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur sebesar 59,1. Berbeda dengan sektor manufaktur global, sektor jasa secara umum menunjukkan performa yang lebih baik. Namun demikian, Jepang cenderung mengalami pelemahan sektor jasa di mana angka PMI Jasa terendah di 2024 sebesar 49,4. Pelemahan permintaan domestik dan global menjadi penyebab utama, dan kenaikan konsumsi rumah tangga yang tidak memberikan dampak signifikan. Aktivitas manufaktur global mengalami kontraksi pada April 2025, terutama dipicu oleh peningkatan tensi dagang yang mengganggu permintaan ekspor. Di antara negara G20 dan ASEAN-6 hanya sekitar 30,4 persen negara mengalami ekspansi aktivitas manufaktur, sedangkan sisanya berada di zona kontraksi.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2024 & Q1 2025
Beberapa Negara ASEAN-6& G20



Sumber: Bloomberg

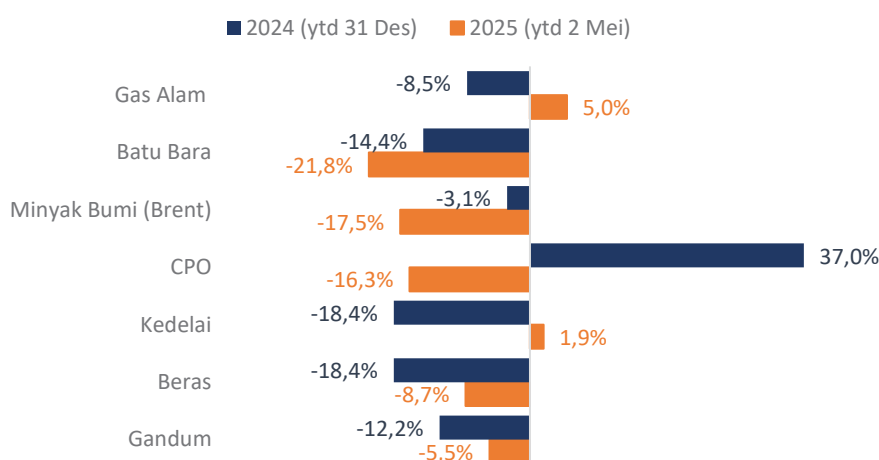
Grafik 2. Perkembangan Kinerja Manufaktur dan Jasa



Sumber: Bloomberg, IHS Markit

Harga komoditas secara bertahap turun ke level yang lebih rendah dibandingkan periode 2022-2023, dan semakin tertekan pasca eskalasi perang dagang. Harga minyak cenderung bertahan di level rendah bahkan ketika *Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus* (OPEC+) melakukan pemangkasan produksi. Sejalan dengan minyak, harga batu bara dan gas alam juga mengalami tren koreksi, terutama dipicu oleh penurunan permintaan energi global akibat prospek pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas. Berlanjutnya penurunan harga komoditas energi global dibayangi oleh risiko eskalasi perang dagang yang dapat memicu gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga. Selain itu, pergerakan harga komoditas energi juga dipengaruhi oleh tren transisi menuju energi terbarukan dan dekarbonisasi. Pada komoditas pangan, tren pergerakan harga lebih bervariasi, meski dengan kecenderungan harga di level rendah. *Crude Palm Oil* (CPO) mengalami tren peningkatan akibat kekhawatiran atas berkurangnya pasokan akibat fenomena El-Nino yang terjadi pada 2024, meski peningkatan tersebut kemudian tertahan di tahun 2025 akibat proyeksi penurunan permintaan global. Sementara itu, harga beras yang sempat mengalami kenaikan drastis sebagai dampak berkurangnya panen akibat El-Nino di awal 2024, juga telah mengalami moderasi harga seiring dengan pasokan yang mulai ternormalisasi. Pada komoditas logam mineral, tren pergerakan harga juga lebih bervariasi, terutama dipicu oleh dinamika permintaan-penawaran industri konstruksi, otomotif, dan energi terbarukan, serta faktor geopolitik dan regulasi. Selain itu, spekulasi pasar, perubahan biaya produksi, dan fluktuasi nilai tukar juga turut memengaruhi pergerakan harga.

Grafik 3. Perkembangan Harga Komoditas, 2024 dan 2025



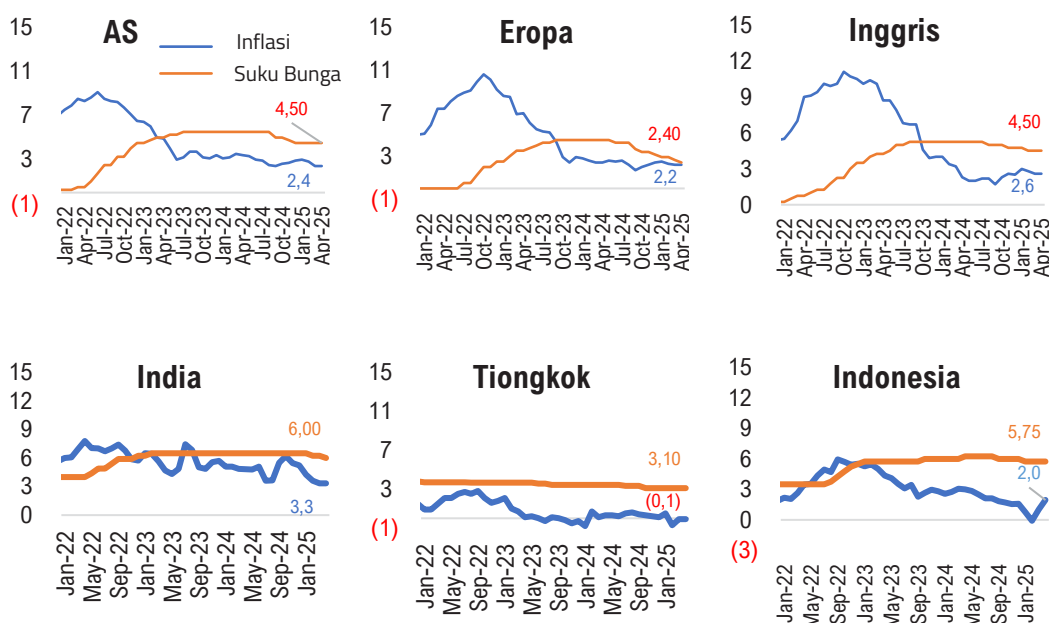
Sumber: Bloomberg

Tren penurunan inflasi berlanjut sepanjang tahun 2024, namun beberapa negara kembali mengalami kenaikan inflasi di penghujung 2024 hingga awal 2025. Di AS, inflasi sempat mencapai titik terendah dalam tiga tahun terakhir pada Agustus 2024, sebelum kemudian naik ke level 3,0 persen pada Januari 2025 dan kini bertahan di level 2,4 persen pada Maret 2025. Di zona Eropa, inflasi menunjukkan tren penurunan hingga mencapai titik terendahnya pada September 2024, di level 1,7 persen, kemudian kembali naik ke level 2,5 persen pada Januari 2025 dan turun ke level 2,2 persen pada April 2025. Inflasi di Inggris juga turun signifikan dari rata-rata 7,4 persen pada 2023 menjadi 2,5 persen

sepanjang 2024 dan kini berada di level 2,6 persen pada Maret 2025. Di Tiongkok, inflasi sepanjang 2024 stabil di level yang sangat rendah (mendekati 0 persen) bahkan beberapa kali sempat mengalami deflasi dan berada di level 0,1 persen pada Maret 2025, mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Sementara itu, di India inflasi menurun dari rata-rata 5,7 persen pada 2023 menjadi 5,0 persen di 2024, dan per Maret 2025 telah berada di level 3,3 persen. Meski secara umum berada dalam tren menurun, eskalasi tensi dagang yang ditunjukkan melalui perang tarif sejak awal 2025 berpotensi mendorong kenaikan inflasi, tidak hanya di negara-negara yang terlibat perang tarif secara langsung, melainkan juga negara-negara mitra dagang yang terhubung melalui rantai pasok global.

Melandainya inflasi global memberi ruang bagi bank sentral di berbagai negara untuk melonggarkan kebijakan moneter, namun eskalasi tensi dagang dapat meningkatkan kompleksitas kebijakan moneter di berbagai negara. Sejak triwulan III 2024, The Fed menurunkan suku bunga sebesar 100 basis poin dari 5,50 persen yang bertahan sejak 2023 hingga berada di level 4,50 persen hingga April 2025. Meski pasar memperkirakan the Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga hingga 100 bps pada tahun 2025 (naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya total 50 bps), kebijakan tarif agresif AS memicu dilema kebijakan the Fed, antara memangkas suku bunga untuk stimulus ekonomi atau mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, *European Central Bank* (ECB) juga memangkas suku bunga dari 4,5 persen menjadi 2,4 persen pada April 2025. *Bank of England* (BoE) mengikuti langkah serupa dengan tiga kali pemotongan suku bunga, dari 5,25 persen menjadi 4,5 persen hingga April 2025. Di negara berkembang, Tiongkok menurunkan suku bunganya dua kali pada 2024, dari 3,45 persen menjadi 3,35 persen, dan akhirnya bertahan di 3,10 persen hingga April 2025. Sementara itu, India telah menurunkan suku bunga dari level 6,50 persen sejak April 2023 ke 6,0 persen di 2025 seiring dengan inflasi yang telah kembali ke target 4 persen dan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat.

Grafik 4. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Triwulanan Beberapa Negara, 2022 - 2025 (%)

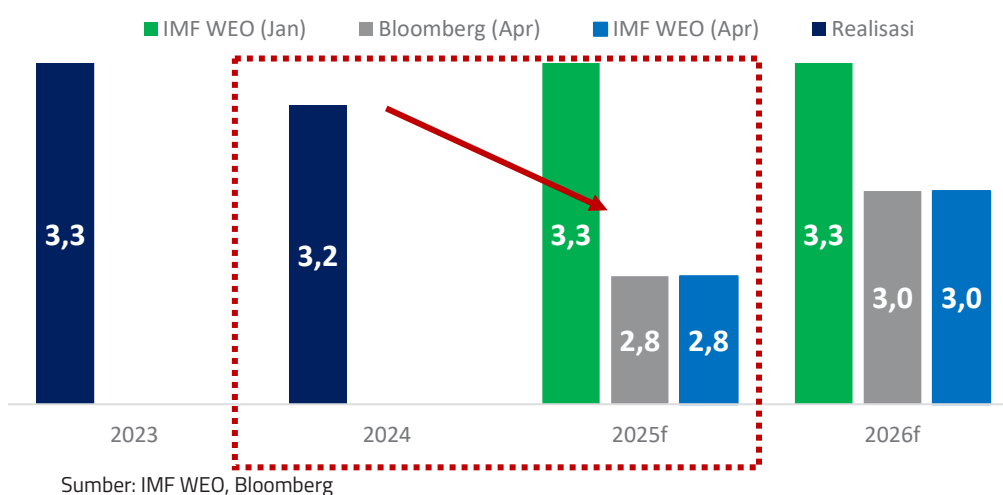


Sumber: Bloomberg

2.2.2. Prospek Ekonomi Global

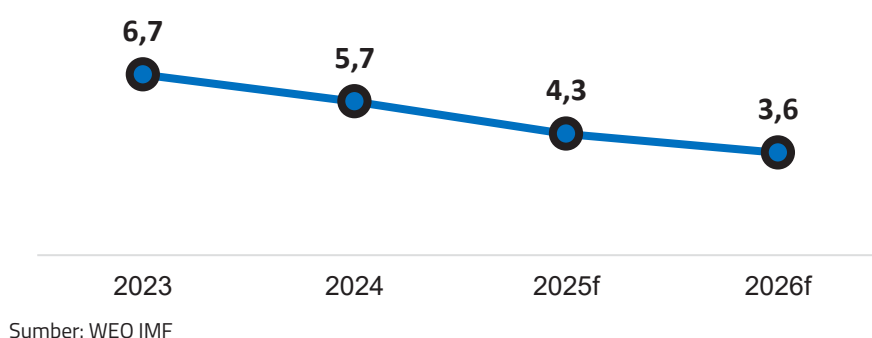
Perekonomian global tahun 2026 diproyeksikan masih akan lemah. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,2 persen pada 2024 ke 2,8 persen di 2025 dan 3,0 persen di 2026. Angka ini turun cukup jauh dari proyeksi sebelumnya, masing-masing sebesar 0,5 poin persentase dan 0,3 poin persentase. Angka proyeksi pertumbuhan ini tetap di bawah rata-rata pertumbuhan global tahunan pada periode 2000–2019 sebesar 3,7 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global ini dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen.

Grafik 5. Pertumbuhan Ekonomi Global, 2023 - 2026 (% , yoy)



Moderasi inflasi diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2025-2026 meski dengan laju yang lebih lambat, terutama akibat faktor geopolitik serta eskalasi tensi dagang. Dalam WEO April 2025, inflasi global diperkirakan oleh *International Monetary Fund* (IMF) akan turun menjadi 4,3 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026. Laju penurunan inflasi global pada proyeksi IMF di bulan April lebih tinggi masing-masing sebesar 0,1 bps dibanding proyeksi Januari. Di AS, inflasi diperkirakan mendekati target 2 persen namun tetap sedikit lebih tinggi, sementara di zona Eropa penurunan inflasi diperkirakan akan lebih *on-track*, sedangkan di Tiongkok inflasi rendah masih diperkirakan berlanjut.

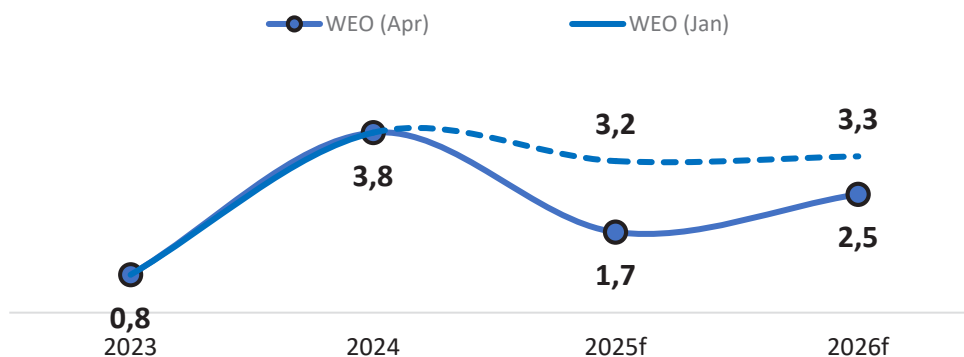
Grafik 6. Inflasi Global, 2023 - 2026 (% , yoy)



Pelonggaran moneter global yang dimulai sejak paruh kedua 2024 diperkirakan masih berlanjut meski suku bunga diperkirakan masih tetap lebih tinggi dibanding periode tahun 2010-an. Pemangkasan suku bunga di AS diperkirakan akan turun dengan laju yang lebih lambat dibanding perkiraan sebelumnya, sehingga kembali memicu sentimen *high for longer*, sejalan dengan kebijakan-kebijakan Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan mendorong inflasi. Hal ini selanjutnya memicu apresiasi dolar AS serta kenaikan imbal hasil obligasi AS yang juga dapat membatasi pelonggaran moneter di negara berkembang. Di sisi lain, negara maju di zona Eropa diperkirakan akan memangkas suku bunga dengan laju yang lebih cepat dibanding AS akibat progres pengendalian inflasi yang relatif lebih *on-track* dan pertumbuhan ekonomi yang sangat lemah. Perbedaan dinamika inflasi antara AS dengan negara-negara lainnya dapat memicu divergensi kebijakan moneter di berbagai negara, yang selanjutnya memperlebar kesenjangan suku bunga kebijakan antara AS dan negara-negara lainnya. Perbedaan kebijakan moneter antarnegara juga dapat memicu pergerakan signifikan pada nilai tukar dan arus modal, terutama di negara berkembang.

Perdagangan global diproyeksikan tumbuh melambat sepanjang 2025-2026. Sebagaimana diilustrasikan oleh Grafik 7, IMF memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan akan turun dari 3,8 persen pada 2024 menjadi 1,7 persen pada 2025 dan 2,5 persen pada 2026. Penurunan volume perdagangan ini diakibatkan oleh meningkatnya restriksi perdagangan dan lemahnya pertumbuhan output serta investasi. Eskalasi perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif perdagangan yang agresif oleh AS sejak awal tahun 2024 juga berisiko memicu instabilitas perdagangan internasional.

Grafik 7. Volume Perdagangan Global, 2023 - 2026 (% , yoy)



Sumber: WEO IMF

2.2. Kondisi Perekonomian Domestik

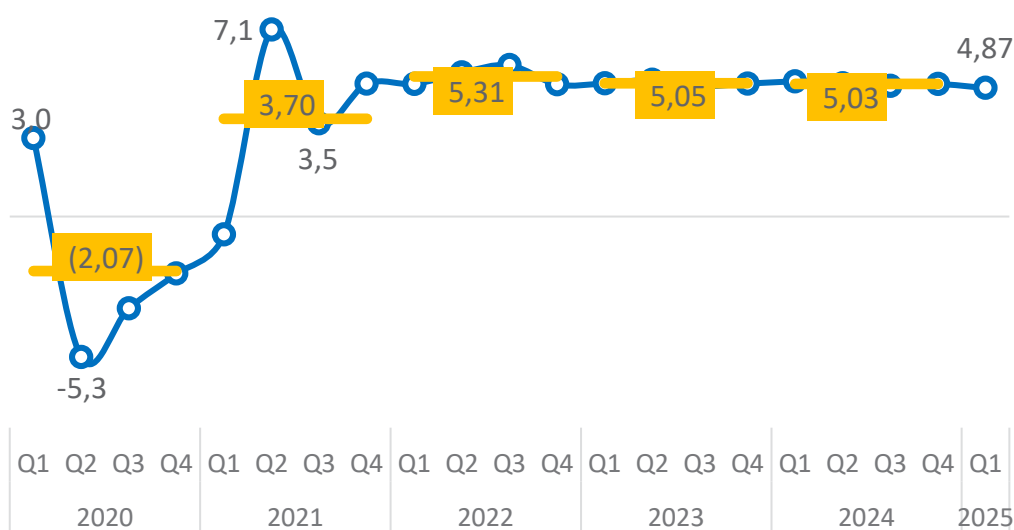
2.2.1. Sektor Riil

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan momentum pertumbuhan yang kuat. Pada 2024, perekonomian Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta peningkatan investasi dan aktivitas manufaktur. Capaian ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2024 merupakan periode yang penuh tantangan dan dinamika, baik dari sisi global maupun domestik. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, serta optimalisasi APBN

sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Grafik 8. Pertumbuhan Ekonomi, 2020 - 2025 (% , yoy)



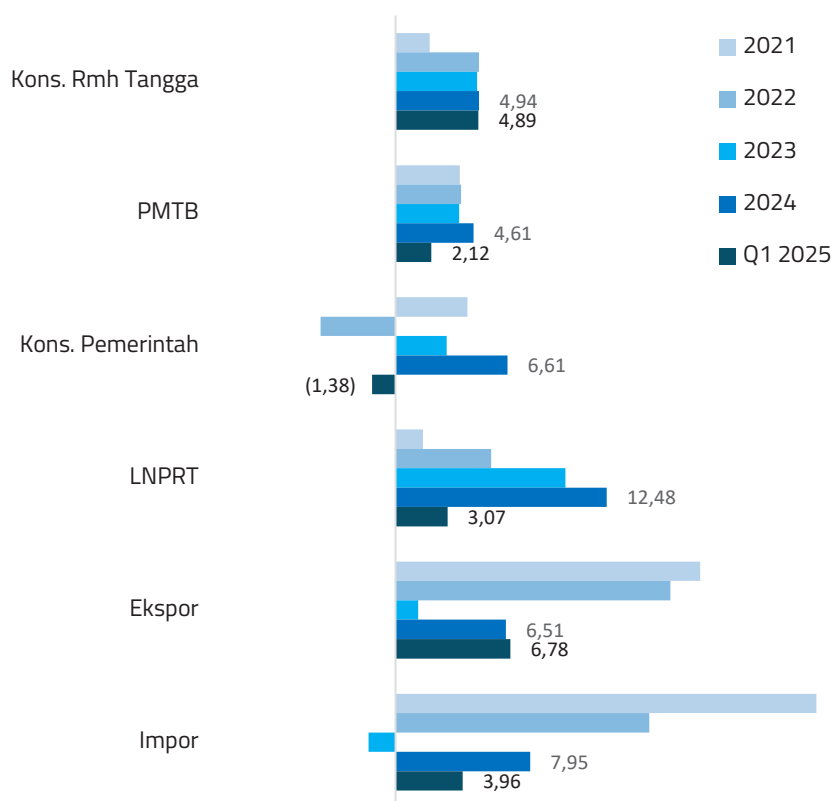
Sumber: BPS

Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen (yoy) pada Triwulan I 2025, sesuai estimasi Pemerintah mempertimbangkan ketidakpastian global terutama akibat perang tarif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, turut ditopang peran Pemerintah melalui stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta intervensi harga pangan. Investasi tumbuh membukukan pertumbuhan moderat sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi akibat high base effect pemilu 2024, meskipun belanja meningkat di akhir triwulan. Ekspor masih stabil ditopang oleh ekspor sawit yang mencakup 36 persen dari total ekspor, diikuti baja hasil hilirisasi (6,6 persen). Dari sisi produksi, pertanian menjadi penopang dengan pertumbuhan melampaui 10 persen terutama didukung distribusi pupuk yang semakin baik sehingga petani dapat mengoptimalkan momentum panen raya. Industri pengolahan yang menjadi andalan melalui hilirisasi juga tumbuh solid.

Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga kembali menguat dengan pertumbuhan 4,94 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,82 persen, dengan kontribusi mencapai 54 persen terhadap PDB nasional. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan mobilitas masyarakat menopang capaian pertumbuhan tersebut. Peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 4,79 juta pada 2024 turut menjadi pendorong peningkatan konsumsi. Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga mencatat pertumbuhan yang tinggi, sebesar 6,06 persen pada kuartal IV 2024 dan mencapai 12,48

persen secara kumulatif sepanjang tahun. Kenaikan ini didorong oleh tingginya aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta berbagai ajang olahraga nasional yang turut mendorong aktivitas perekonomian.

Grafik 9. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2021-2025 (%yoy)



Sumber: BPS

Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh stabil dan terjaga pada tahun 2025. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen (yoy). Kinerja positif ini diharapkan terus menguat dengan berbagai kebijakan strategis Pemerintah. Program-program prioritas, antara lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sektor perumahan dan insentif kendaraan listrik serta *hybrid*, diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan konsumsi masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keberlanjutan investasi pada proyek-proyek strategis yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dengan mengalokasikan anggaran pada subsidi, program perlindungan sosial, dan insentif fiskal. Bauran kebijakan ini juga diperkuat dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) tumbuh 6,6 persen, tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2024, kontribusi P-KP terhadap PDB

mencapai 7,4 persen. Program-program Pemerintah untuk pemenuhan layanan publik dan kesejahteraan yang diarahkan ke dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pendorong pertumbuhan P-KP. Struktur belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial menjadi penopang utama dalam pelaksanaan program-program Pemerintah tersebut. Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan realisasi belanja pegawai mencapai 12,6 persen, menguat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,6 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Sementara itu, belanja barang dan jasa tumbuh mencapai 17,9 persen dan belanja bantuan sosial tumbuh 11,8 persen terutama belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial.

Kinerja P-KP pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh positif. Kebijakan tersebut seiring berbagai kebijakan perekonomian yang didukung Belanja Pemerintah, diantaranya pembentukan K/L baru, prioritas penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pelaksanaan program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seperti program MBG. Di samping itu, keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. RKP ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Sampai dengan triwulan I 2025, konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 1,38 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh *high-base effect* belanja di triwulan I 2024.

Di tengah berbagai dinamika global dan tahun politik nasional, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh 4,61 persen sepanjang tahun 2024. Tren pertumbuhan investasi ini konsisten meningkat dalam empat tahun terakhir. Hal ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, serta kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Dilihat dari komponennya, investasi masih ditopang oleh bangunan dengan andil 74,48 persen. Ke depan komponen investasi dengan daya ungkit yang lebih tinggi seperti mesin dan kendaraan diharapkan akan terus meningkat seiring kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan berbagai sektor prioritas lainnya. Dari sisi sektor swasta, geliat investasi yang menguat tecermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh 20,82 persen dengan total nilai Rp1.714 triliun, melebihi target capaian investasi langsung yang ditetapkan.

Kinerja investasi yang terus tumbuh menguat diproyeksikan akan berlanjut pada 2025. Pemerintah terus memelihara iklim investasi yang kondusif melalui berbagai reformasi kebijakan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif dan berdaya saing. Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah memberikan insentif yang mendorong investasi di sektor dan kawasan tertentu, serta insentif untuk pengembangan SDM dan riset. Optimalisasi potensi *Sovereign Wealth Funds* (SWF) juga dilakukan dengan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk percepatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh entitas milik negara guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat daya saing global. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional diharapkan secara langsung mendukung investasi dan melalui efek multiplier mengakselerasi aktivitas

penanaman modal sektor swasta. Pada triwulan I 2025, investasi tumbuh 2,12 persen (yoy) seiring dengan langkah observatif investor menghadapi gejala global di awal tahun.

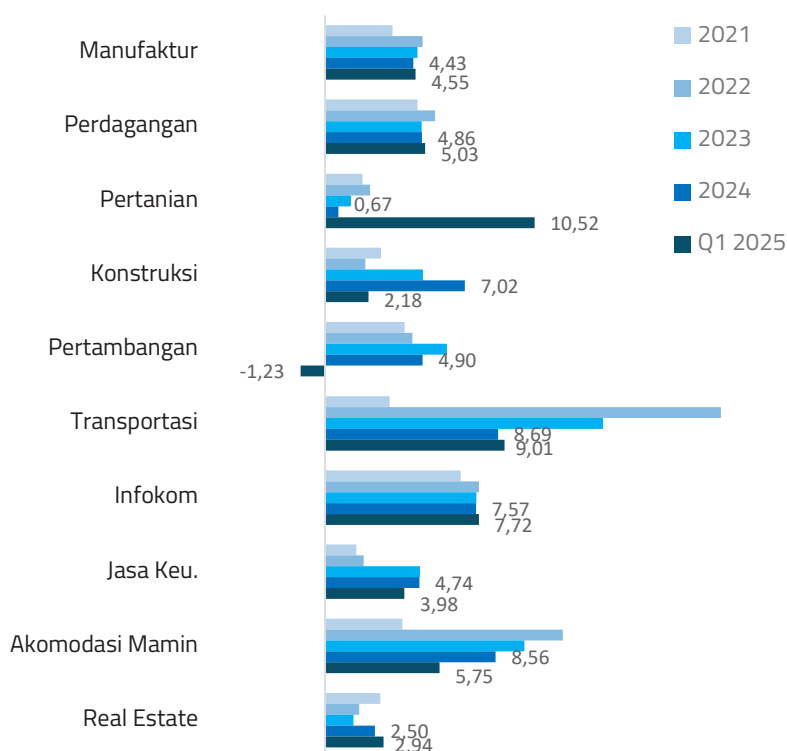
Di tengah tantangan perdagangan global, ekspor barang dan jasa riil Indonesia mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, ekspor riil tumbuh sebesar 6,51 persen, jauh melampaui capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 1,3 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor barang sebesar 5,81 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari ekspor barang non minyak dan gas (migas) yang tumbuh 6,13 persen. Di sisi jasa, pertumbuhan mencapai 14,20 persen sejalan dengan lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang meningkat 19,05 persen. Peningkatan ekspor barang dan jasa ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia di pasar global relatif masih baik dan dengan peningkatan tersebut sekaligus menguatkan peran sektor ekspor dalam menopang perekonomian nasional di tengah dinamika perdagangan internasional yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian.

Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa riil juga mengalami pertumbuhan positif. Impor barang dan jasa tahun 2024 tumbuh sebesar 7,95 persen, tumbuh signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang berkontraksi sebesar 1,60 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh impor barang yang tumbuh sebesar 8,15 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari impor barang nonmigas yang tumbuh sebesar 9,01 persen, dimana tahun sebelumnya berkontraksi sebesar 4,50 persen. Peningkatan impor barang nonmigas terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor industri. Sementara itu, impor jasa tumbuh sebesar 6,67 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 11,99 persen.

Kinerja ekspor-impor riil Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh positif di tengah perdagangan global yang semakin melambat. Produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada triwulan I 2025, ekspor dan impor secara riil masing-masing tumbuh sebesar 6,78 persen (yoy) dan 3,96 persen (yoy).

Dari sisi produksi, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2024 tumbuh positif di seluruh sektor. Sektor-sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan tetap menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian. Pencapaian ini tidak hanya menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun juga menguatkan fundamental perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kebijakan reformasi struktural, peningkatan investasi, serta sinergi yang erat antara Pemerintah dan pelaku ekonomi terus dioptimalkan untuk mendorong potensi masing-masing sektor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Kinerja sisi produksi didorong oleh Sektor Manufaktur yang tumbuh sebesar 4,43 persen pada tahun 2024. Kinerja tersebut ditopang oleh Industri berbasis hilirisasi seperti industri logam dasar yang mampu tumbuh sebesar 13,34 persen, utamanya berasal dari peningkatan permintaan ekspor untuk produk turunan komoditas nikel. Di sisi lain, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 5,90 persen, disebabkan meningkatnya permintaan produk turunan sawit.

Grafik 10. Pertumbuhan Komponen Produksi, 2021-2025 (% , yoy)

Sumber: BPS

Sektor Manufaktur akan tetap menjadi penopang utama pada tahun 2025. Sektor tersebut diperkirakan tumbuh stabil dan berperan besar dalam struktur PDB nasional. Prospek positif datang dari hilirisasi, insentif ekspor, dan transformasi industri 4.0. Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong industri kendaraan listrik, logistik, dan barang konsumsi. Pada triwulan I 2025, Sektor Manufaktur tumbuh sebesar 4,55 persen (yoy) ditopang oleh hilirisasi dan aktivitas produksi domestik lainnya.

Sektor Pertanian kembali mengalami moderasi pada tahun 2024, dengan tumbuh sebesar 0,67 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 1,31 persen. Perlambatan tersebut terutama dikarenakan penurunan kinerja Subsektor Tanaman Pangan yang berkontraksi sebesar 0,21 persen. Selain itu, Subsektor Perkebunan dan Subsektor Perikanan juga mengalami moderasi dengan tumbuh masing-masing sebesar 2,78 persen dan 0,68 persen. Faktor musim dan cuaca menjadi pendorong utama pergerakan Sektor Pertanian. Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi Sektor Pertanian masih di atas 11 persen terhadap PDB.

Sektor Pertanian diproyeksikan menguat di tahun 2025. Penguatan ini mulai tecermin pada triwulan I 2025, di mana sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 dan tumbuh kuat sebesar 10,52 persen (yoy). Langkah nyata Pemerintah melalui penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan memangkas lebih dari 145 regulasi berhasil menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk. Kebijakan yang sejalan dengan perkembangan cuaca, berkontribusi terhadap

meningkatnya produktivitas pertanian khususnya beras. Data BPS menunjukkan, produksi beras nasional periode Januari – Maret 2025 meningkat 51 persen secara yoy. Penguatan kinerja sektor pertanian pada tahun 2025 juga sejalan dengan laporan United States Department of Agriculture (USDA) *outlook* pada April 2025, yang memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Produksi beras tersebut diperkirakan mencapai 34,6 juta ton (beras giling), tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33,03 juta ton.

Sektor Pertambangan masih menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2024, sektor ini tumbuh sebesar 4,90 persen, terutama didorong oleh Subsektor Pertambangan Biji Logam yang tumbuh 8,30 persen seiring dengan peningkatan produksi tembaga dan nikel. Sementara, Subsektor Pertambangan Batubara dan Pertambangan Lainnya masing-masing tumbuh 6,82 persen dan 6,27 persen sejalan dengan peningkatan permintaan ekspor atas komoditas tambang. Di sisi lain, Subsektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi mengalami kontraksi sebesar 0,78 persen dikarenakan gangguan operasional akibat cuaca ekstrem, tertundanya kegiatan eksplorasi, serta keterlambatan proyek-proyek strategis.

Sektor Pertambangan diperkirakan masih menghadapi dinamika yang beragam. Pemerintah mendorong eksplorasi, hilirisasi berkelanjutan, dan adopsi teknologi untuk memperkuat sektor ini. Pada triwulan I 2025, Sektor Pertambangan terkontraksi sebesar 1,23 persen (yoy) seiring dengan penurunan harga komoditas pertambangan global. Selain itu, penurunan *output* pada sektor ini merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya aktivitas hilirisasi, sehingga secara sektoral, *output* yang telah mengalami proses produksi lanjutan dicatat sebagai aktivitas pada sektor industri pengolahan yang lebih hilir, tidak lagi dicatatkan sebatas pada *output* dari aktivitas pertambangan yang masih ada di sisi hulu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sektor Konstruksi telah memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Kinerja sektor ini terus menunjukkan peningkatan sejak 2021 hingga mencapai pertumbuhan 7,02 persen di tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, baik yang didanai Pemerintah maupun investasi swasta. Pembangunan jalan tol, bendungan, kawasan industri, serta kawasan pariwisata menjadi faktor utama yang menopang lonjakan kinerja sektor ini. Selain itu, peningkatan impor bahan baku konstruksi yang tumbuh 5 persen dan impor besi baja sebesar 1,4 persen pada 2024 juga mengkonfirmasi tingginya aktivitas konstruksi dalam negeri. Tren ini mengindikasikan adanya potensi investasi yang kuat serta kepercayaan pasar terhadap prospek Sektor Konstruksi dalam jangka menengah.

Sektor Konstruksi tetap berada dalam jalur ekspansi. Meski ada sedikit moderasi dari puncak pertumbuhan 2024, pada triwulan I 2025 sektor ini tumbuh 2,18 persen (yoy). Kinerja ditopang oleh belanja modal pemerintah dan keberlanjutan proyek strategis.

Sektor Perdagangan menunjukkan kinerja yang cukup terjaga dalam perekonomian nasional. Dengan kontribusi sebesar 13,07 persen terhadap PDB pada tahun 2024, sektor ini merupakan sektor terbesar kedua setelah Sektor Manufaktur. Pada tahun 2024, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan ini didorong Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 5,95 persen, didorong pertumbuhan produksi domestik dan aktivitas impor. Sementara itu, Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya mengalami kontraksi

dengan pertumbuhan 0,05 persen akibat tekanan dari sisi permintaan dan perubahan preferensi konsumen terhadap kendaraan baru maupun bekas.

Sektor Perdagangan diperkirakan terus tumbuh. Pertumbuhan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy), didorong oleh permintaan selama Ramadan, peningkatan suplai domestik, dan impor barang konsumsi.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terus menunjukkan peran signifikan dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi 2,6 persen pada 2024. Pada 2024, sektor ini tumbuh sebesar 8,7 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Kedua subsektor, yaitu Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Subsektor Penyediaan Makan Minum tumbuh positif, masing-masing 8,7 persen dan 8,5 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Maraknya penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional di berbagai daerah juga berdampak pada peningkatan tingkat okupansi hotel, restoran, serta bisnis kuliner. Selain itu, pemulihan ekonomi turut meningkatkan daya beli dan minat masyarakat untuk berwisata serta mengakses layanan perhotelan dan makanan-minuman, sehingga semakin memperkuat ekspansi sektor ini.

Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh solid. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada triwulan I 2025, sektor ini tumbuh sebesar 5,75 persen (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai dukungan Pemerintah untuk mendorong daya beli dan aktivitas masyarakat, antara lain melalui PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

Kebijakan hilirisasi mendorong konvergensi pertumbuhan antarwilayah di Indonesia pada tahun 2024. Hal ini tecermin dari pertumbuhan kawasan timur Indonesia yang tumbuh di atas pertumbuhan agregat. Wilayah Sulawesi dan Maluku Papua berhasil tumbuh masing-masing sebesar 7,12 persen dan 7,81 persen, didorong oleh kinerja industri berbasis hilirisasi komoditas. Sementara itu, wilayah Jawa dan Sumatera yang masih menjadi kontributor utama ekonomi nasional mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,92 persen dan 4,45 persen. Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Bali Nusa tumbuh masing-masing sebesar 5,52 persen dan 4,92 persen.

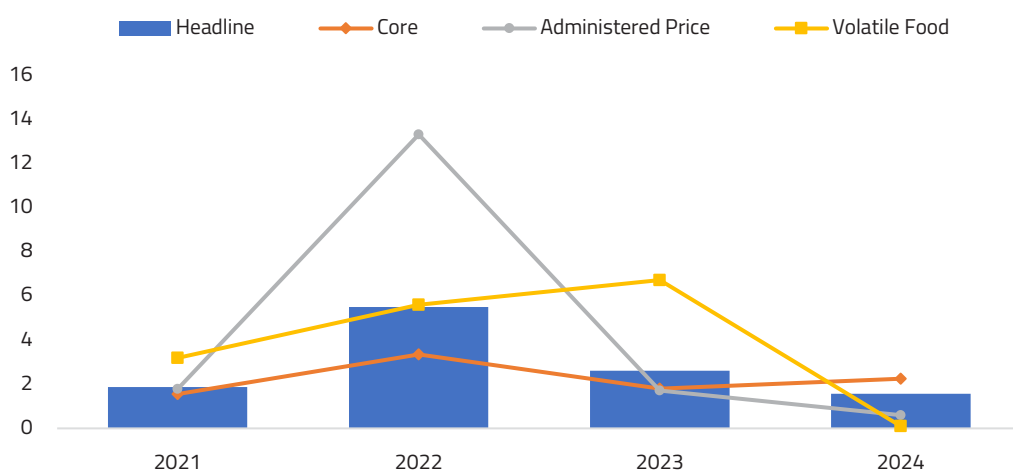
Pada triwulan I 2025, seluruh wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,40 persen (yoy) yang didorong oleh sektor-sektor berbasis hilirisasi. Wilayah Jawa dan Sumatera tumbuh masing-masing sebesar 4,99 persen dan 4,85 persen, terutama karena meningkatnya aktivitas domestik selama bulan Ramadan. Kalimantan tumbuh 4,32 persen didorong oleh Sektor Manufaktur dan Perdagangan. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan 3,12 persen didorong oleh Sektor Pertanian. Adapun wilayah Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,69 persen, seiring moderasi aktivitas pertambangan. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang merata di berbagai wilayah, meskipun dengan dorongan yang berbeda-beda sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Menghadapi ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh resilien. Kinerja ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional yang solid, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali. Stabilitas harga ini menjadi penopang utama daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan

konsumsi domestik. Di saat yang sama, iklim investasi yang semakin kondusif sebagai hasil dari reformasi kebijakan struktural memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan sektor-sektor produktif. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional pada tahun 2025 ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Di sisi lain, inflasi yang terkendali telah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tercatat dua kali berada di luar sasaran yakni pada tahun 2021 (1,9 persen yoy) akibat pandemi, serta pada tahun 2022 yaitu 5,5 persen, yang disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga energi dan tekanan harga komoditas secara global. Seiring meredanya tekanan harga, inflasi dalam tren penurunan dan kembali berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan hingga mencapai 1,6 persen (yoy) di tahun 2024, atau terendah sepanjang sejarah.

Grafik 11. Perkembangan Inflasi Indonesia, 2021 - 2024 (%)



Sumber: BPS

Harga komoditas pangan terjaga mendukung tren penurunan inflasi. Harga pangan mengalami normalisasi pasca mengalami tekanan akibat El Nino di tahun 2023 yang memengaruhi produksi pertanian. Harga pangan mengalami tren naik pada tahun 2023 hingga awal 2024. Komoditas yang terganggu terutama beras, yang harganya mengalami peningkatan rata-rata hingga 12,2 persen pada tahun 2023 dan rata-rata 11,7 persen pada tahun 2024. Seiring dampak El Nino yang telah termoderasi, peningkatan harga pangan mulai melambat, mendekati harga acuannya. Kegiatan stabilisasi pasokan yang intensif di berbagai daerah, seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, juga menjadi kunci dalam stabilitas harga pangan di 2024.

Komponen *administered price* (AP) dalam tren penurunan sementara komponen inti menunjukkan penguatan. Inflasi AP dalam tren turun sejak akhir 2023, setelah dampak dari penyesuaian kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) mereda. Sementara di tahun 2024, inflasi AP tercatat cukup rendah didukung oleh harga komoditas energi yang tetap stabil sepanjang tahun. Di sisi lain, inflasi inti mengalami penguatan sejak tahun 2023. Penguatan ini lebih didominasi oleh transmisi dari kondisi global, yang ditunjukkan dengan

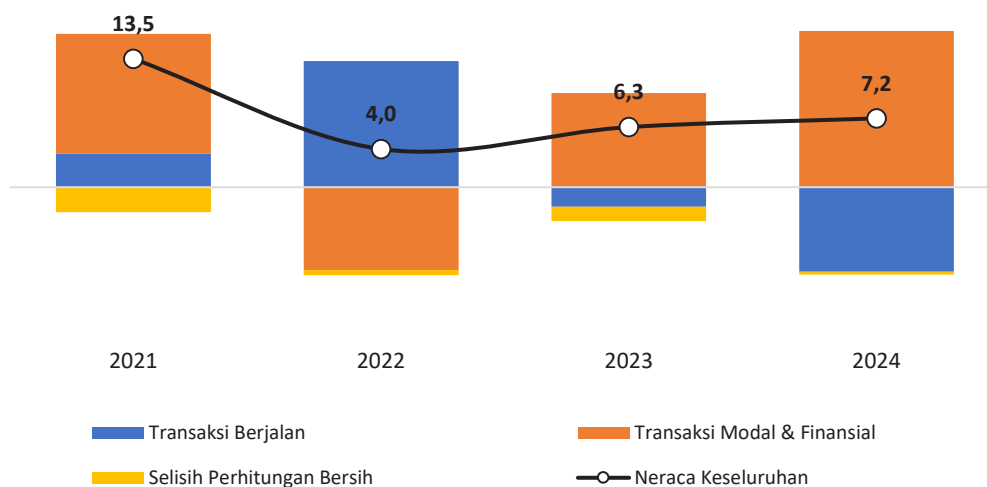
tingginya andil komoditas emas perhiasan yang mencapai 0,34 persen terhadap inflasi utama. Pergerakan kelompok utama cukup stabil kecuali kelompok perawatan pribadi yang dalam tren meningkat.

Pada tahun 2025 inflasi diperkirakan mencapai 2,5 persen didukung oleh tingkat permintaan yang terjaga. Pada triwulan I 2025, inflasi sempat berada di luar rentang sasaran karena adanya stimulus diskon listrik untuk mendukung daya beli. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut bersifat sementara. Hingga April 2025, inflasi sudah kembali dalam rentang sasaran, mencapai 2,0 persen (yoy), didukung oleh harga pangan dan energi yang terkendali. Inflasi inti di level 2,5 persen, mengindikasikan daya beli masyarakat masih dapat menopang aktivitas ekonomi. Inflasi kelompok *volatile food* terjaga rendah di 0,64 persen dan *administered price* pada level 1,25 persen, didukung koordinasi kebijakan pengendalian inflasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan Bank Indonesia. Meskipun demikian, risiko transmisi dari ketidakpastian global pada inflasi domestik perlu tetap diwaspadai. Kebijakan yang antisipatif jelang hari besar keagamaan, seperti Idulfitri dan Tahun Baru juga perlu tetap dilaksanakan untuk menjaga tingkat harga yang stabil.

Harga pangan di tahun 2025 juga diharapkan tetap stabil di didorong oleh cuaca yang lebih kondusif dan fokus Pemerintah dalam penguatan pasokan pangan dalam negeri. Namun demikian, disrupsi jangka pendek dari beberapa program nasional seperti program MBG terhadap pasokan nasional tetap perlu dikelola secara hati-hati. Penguatan cadangan pangan diharapkan dapat menjadi *buffer* dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga. Koordinasi TPIP-TPID yang kuat dalam upaya pengendalian inflasi di pusat dan daerah terus didorong untuk mengurangi disparitas harga antarwaktu antardaerah.

2.2.2. Sektor Eksternal

Grafik 12. Perkembangan Neraca Pembayaran, 2021 – 2024 (USD miliar)

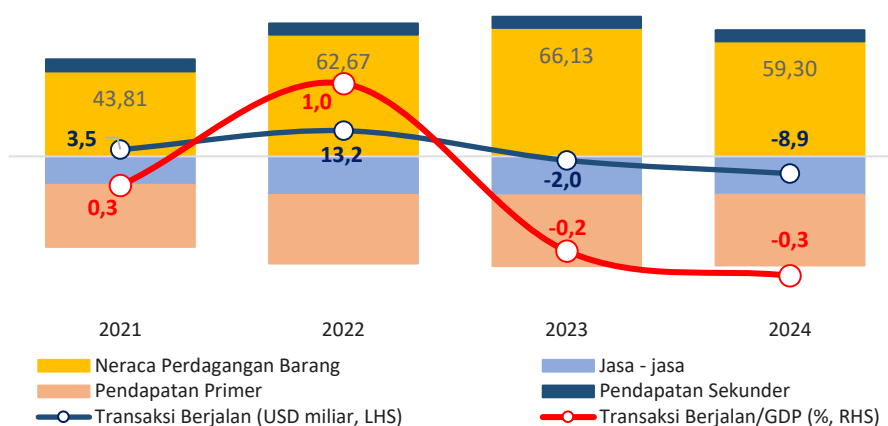


Sumber: Bank Indonesia

Ketahanan sektor eksternal masih tetap terjaga, ditopang oleh neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat, namun perlu diwaspadai dinamika perang dagang. Dalam periode 2021-2024, NPI konsisten mencatatkan surplus meskipun dihadapkan pada tekanan ketidakpastian ekonomi dan keuangan global. Dalam tahun 2024 NPI mencatatkan surplus sebesar USD7,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus tahun 2023 sebesar USD6,3 miliar, terutama ditopang oleh menguatnya surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF), yang didorong oleh aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio, seiring dengan melebarnya defisit pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB). Memasuki tahun 2025, situasi global di tengah tensi perang dagang yang meningkat menyusul kebijakan *liberation tariff* AS perlu diwaspadai efeknya yang berisiko memoderasi kinerja sektor eksternal. Situasi tersebut juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk membuka akses pasar ekspor baru dengan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi, dalam upaya menjaga ketahanan sektor eksternal, baik melalui NTB maupun NTMF.

Keseimbangan neraca transaksi berjalan relatif melemah. Setelah mencatatkan surplus dalam tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar USD3,5 miliar (0,3 persen dari PDB) dan USD13,2 miliar (1,0 persen dari PDB), kinerja NTB mengalami penurunan sejak tahun 2023 dan berlanjut hingga akhir tahun 2024, dengan mencatatkan defisit masing-masing sebesar USD2,0 miliar (0,2 persen dari PDB) dan USD8,9 miliar (0,6 persen dari PDB). Pelebaran defisit NTB terutama didorong oleh penurunan surplus neraca perdagangan, kenaikan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer di tengah kenaikan surplus neraca pendapatan sekunder. Dalam tahun 2025 NTB diperkirakan masih defisit dan terjaga rendah, meskipun di tengah eskalasi perang dagang yang berdampak pada kinerja ekspor, impor dan aliran modal Indonesia.

Grafik 13. Transaksi Berjalan, 2021 – 2024 (USD miliar)

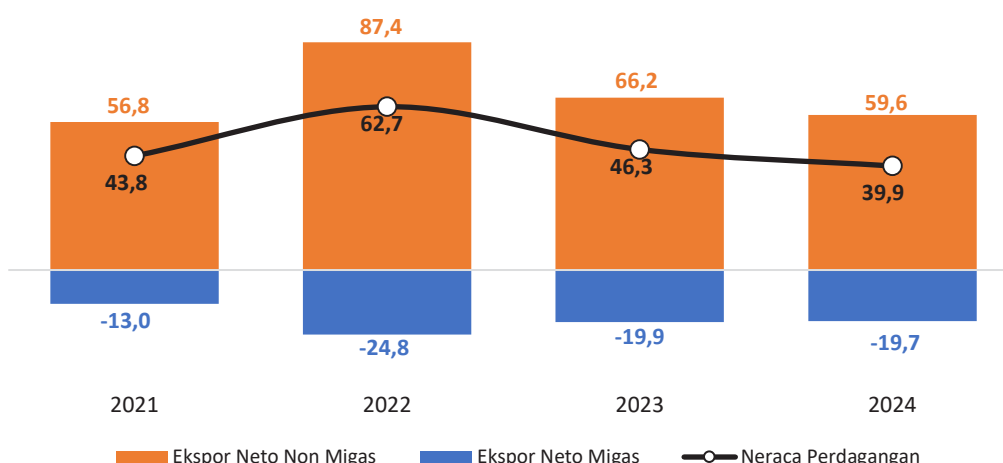


Sumber: Bank Indonesia

Neraca perdagangan barang mencatatkan surplus, namun cenderung menurun. Pergerakan harga komoditas dan permintaan global memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan barang dalam periode 2021-2024. Kenaikan harga komoditas di pasar global akibat gangguan rantai pasok dunia (*global value chains*) serta

fragmentasi politik dan ekonomi memberikan andil yang cukup kuat terhadap surplus perdagangan barang tahun 2021 dan 2022, yang tercatat masing-masing sebesar USD43,8 miliar dan USD62,7 miliar. Dalam tahun 2023 neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar USD46,3 miliar, turun dibandingkan tahun 2022, karena pengaruh perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas internasional yang dibarengi dengan meningkatnya tensi geopolitik. Penurunan surplus neraca perdagangan barang terus berlanjut hingga mencapai USD39,9 miliar tahun 2024, akibat peningkatan ekspor nonmigas yang lebih rendah dibandingkan peningkatan impor nonmigas seiring dengan membaiknya perekonomian dan menguatnya permintaan domestik. Dalam triwulan I 2025 neraca perdagangan barang masih mencatatkan surplus yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Dengan eskalasi perang dagang, capaian ini diharapkan dapat menahan kinerja neraca perdagangan barang tetap positif sepanjang tahun 2025.

Grafik 14. Neraca Perdagangan Barang, 2021 – 2024 (USD miliar)



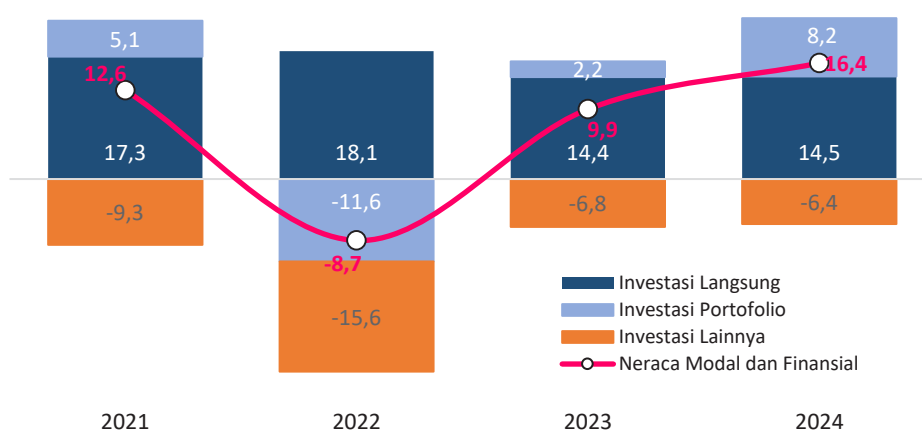
Sumber: Bank Indonesia

Neraca jasa masih mencatatkan defisit. Dalam periode 2021 – 2024 kinerja neraca jasa masih mengalami defisit dengan tren menaik. Secara umum defisit neraca jasa sangat dominan dipengaruhi oleh jasa transportasi dan jasa perjalanan. Jasa transportasi sebagai penyumbang defisit neraca terbesar menunjukkan tren meningkat selama periode tersebut, terutama akibat peningkatan pembayaran transportasi barang (*freights*) dan penumpang. Kenaikan defisit neraca jasa yang lebih dalam selama periode tersebut tertahan oleh perbaikan surplus jasa perjalanan yang didorong oleh peningkatan penerimaan dari perjalanan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia yang lebih besar dibandingkan pembayaran jasa perjalanan ke luar negeri (wisatawan nasional/Wisnas). Dalam tahun 2024 neraca jasa mencatatkan defisit USD18,7 miliar, lebih tinggi dibanding defisit tahun sebelumnya sebesar USD17,7 miliar, selain dipengaruhi oleh kenaikan defisit jasa transportasi, juga oleh jasa lainnya seperti jasa asuransi dan jasa keuangan lainnya. Defisit neraca jasa dapat diimbangi dengan kenaikan surplus jasa perjalanan, seiring dengan kenaikan jumlah kunjungan wisman hingga mencapai 13,9 juta orang, bertambah 2,2 juta orang dari jumlah wisman tahun sebelumnya. Jumlah wisman ini lebih besar dari jumlah kunjungan wisnas yang mencapai sebanyak 8,9 juta orang, bertambah sebanyak 1,4 juta dari tahun sebelumnya, terutama karena peningkatan jumlah jemaah haji dan umroh.

Neraca pendapatan primer masih defisit, sementara neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus. Dalam periode 2021 – 2024, neraca pendapatan primer mengalami defisit, yang bersumber dari pembayaran kompensasi tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan peningkatan penerimaan kompensasi tenaga kerja serta pembayaran imbal hasil atas investasi asing dalam bentuk bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan hasil investasi penduduk di luar negeri. Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder konsisten mencatatkan surplus, bersumber dari penerimaan neto pendapatan sekunder Pemerintah dan transfer lainnya, serta penerimaan dari transfer personal melalui remitansi pekerja migran Indonesia. Dalam tahun 2024 remitansi pekerja migran Indonesia mencapai USD15,7 miliar, meningkat dari remitansi tahun sebelumnya sebesar USD14,2 miliar, seiring dengan kenaikan jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 257 ribu orang dari tahun sebelumnya hingga mencapai 3,9 juta orang.

Neraca transaksi modal dan finansial menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Dalam periode 2021 – 2024 NTMF secara umum menunjukkan kinerja positif dan terus membaik. Setelah mencatatkan defisit sebesar USD8,7 miliar pada tahun 2022, dalam tahun-tahun selanjutnya NTMF kembali menunjukkan surplus masing-masing sebesar USD9,9 miliar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi sebesar USD16,4 miliar pada tahun 2024. Perbaikan kinerja NTMF didukung oleh investasi langsung yang konsisten surplus sejalan dengan masih terjaganya iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Perbaikan kinerja NTMF terutama pada tahun 2024 juga ditopang oleh surplus investasi lainnya, yang didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri (PLN) pemerintah dan swasta. Surplus NTMF sedikit tertahan akibat arus keluar investasi portofolio yang lebih besar seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

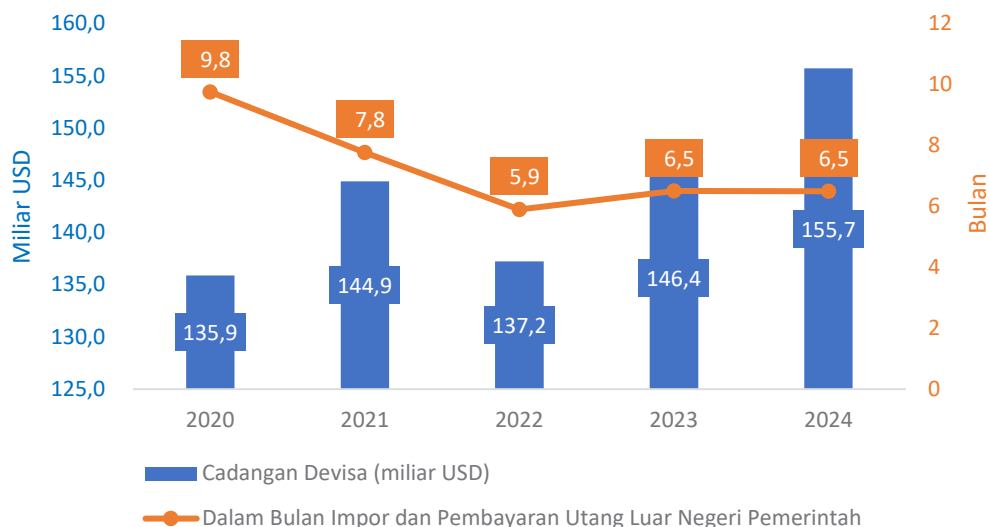
Grafik 15. Neraca Transaksi Modal dan Finansial, 2021 – 2024 (USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia

Cadangan devisa meningkat dan berada di atas *threshold*. Secara keseluruhan, dengan kinerja NPI tersebut, posisi cadangan devisa dalam periode 2021 – 2024 memperlihatkan tren meningkat, hingga mencapai USD155,7 miliar pada akhir tahun 2024. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional dengan *threshold* 3 bulan impor.

Grafik 16. Perkembangan Cadangan Devisa

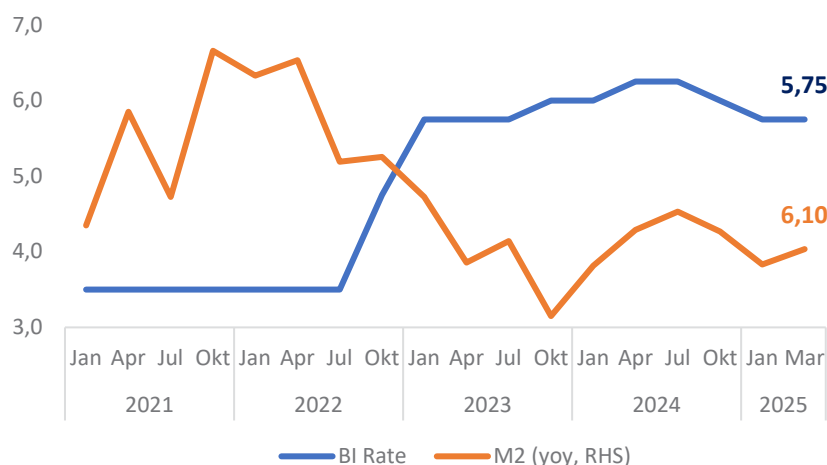


Sumber: Bank Indonesia

Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari SDA akan berperan penting dalam peningkatan cadangan devisa ke depannya. DHE SDA mencakup pendapatan dari ekspor komoditas seperti minyak, gas, dan mineral yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, DHE SDA dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi cadangan devisa negara. Pada triwulan pertama tahun 2025, diperkirakan cadangan devisa akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekspor SDA yang stabil dan kebijakan Pemerintah yang mendukung pengelolaan devisa secara efektif, terutama dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam per 1 Maret 2025.

2.2.3. Sektor Moneter dan Pasar Keuangan

Tendensi kebijakan pelonggaran moneter yang mulai terjadi di berbagai negara juga berdampak bagi Indonesia. Sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2024, Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan moneter ketat melalui kenaikan suku bunga acuan guna menstabilkan tingkat inflasi. Namun, berkaca pada tingkat inflasi yang relatif terjaga serta nilai tukar yang stabil pada kondisi fundamentalnya, Bank Indonesia pun mulai menurunkan suku bunga acuannya per September 2024 sebesar 25 bps. Kebijakan ini masih terus dilanjutkan dengan penurunan kembali suku bunga sebesar 25 bps pada Januari 2025, sehingga BI-Rate berada di tingkat 5,75 persen per April 2025. Bank Indonesia sendiri diprediksi masih akan menurunkan BI-Rate pada 2025 seiring dengan berlanjutnya kebijakan pelonggaran moneter oleh The Fed. Namun, penurunan ini mungkin tidak sebesar prediksi awal karena tingkat inflasi inti di Amerika Serikat yang berada pada level cukup tinggi, sehingga The Fed akan lebih berhati-hati. Selain itu, tingkat nilai tukar Rupiah ke depan juga akan berpengaruh signifikan bagi keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga, terutama akibat eskalasi pada ketidakpastian global akibat penerapan tarif perdagangan oleh AS.

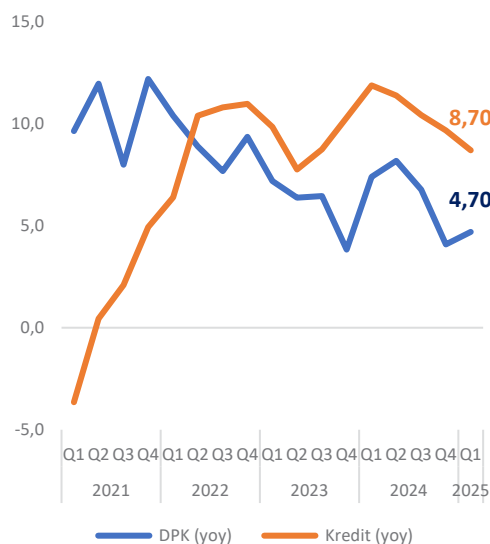
Grafik 17. Perkembangan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia dan M2, 2021 – 2025 (%)

Sumber: Bank Indonesia

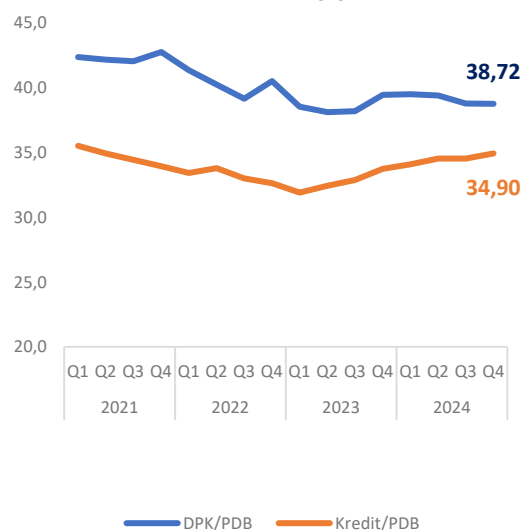
Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia relatif berdampak sangat terbatas bagi pertumbuhan uang beredar luas (M2). Setelah tumbuh tinggi pada 2021-2022, pertumbuhan M2 secara konstan tumbuh melambat pada 2023 akibat melemahnya uang beredar sempit (M1), terutama pada uang kartal. Meski sempat mencatatkan peningkatan hingga pertengahan 2024, pertumbuhan M2 kembali melambat yang disebabkan rendahnya pertumbuhan uang kuasi, dimana hal ini terlihat dari penurunan tingkat tabungan maupun simpanan berjangka. Pada tahun 2025, M2 diperkirakan kembali tumbuh meningkat sejalan dengan penurunan lebih lanjut suku bunga acuan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Peningkatan pada pertumbuhan M2 diharapkan dapat mendorong kenaikan input maupun output sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2025.

Kinerja intermediasi perbankan secara umum masih melanjutkan perkembangan positif di tengah kebijakan pelonggaran moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Penyaluran kredit perbankan terus tumbuh sejak tahun 2021 dan terus menunjukkan peningkatan sampai dengan akhir tahun 2022 meskipun terdapat peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia. Tren positif ini masih berlanjut dimana penyaluran kredit mampu tumbuh stabil di level 10 persen sepanjang 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan menuju 9 persen pada akhir 2024 akibat melambatnya pertumbuhan kredit modal kerja. Tingginya pertumbuhan kredit juga terlihat pada rasio kredit per PDB yang secara konstan naik mendekati level 35 persen. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, dengan besarnya kemungkinan penurunan BI-Rate pada 2025, pertumbuhan kredit diprediksi akan melanjutkan tren positifnya.

Adapun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) relatif menunjukkan tren perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mencatatkan pertumbuhan tinggi pada periode Covid-19, DPK secara konstan melambat pada periode 2022-2023 akibat penurunan pada giro serta tabungan. Meskipun sempat meningkat pada semester I 2024, DPK kembali mengalami perlambatan sepanjang semester II 2024 yang disebabkan menurunnya

Grafik 18. Perkembangan DPK dan Kredit, 2019-2024 (%)

Sumber: Bank Indonesia

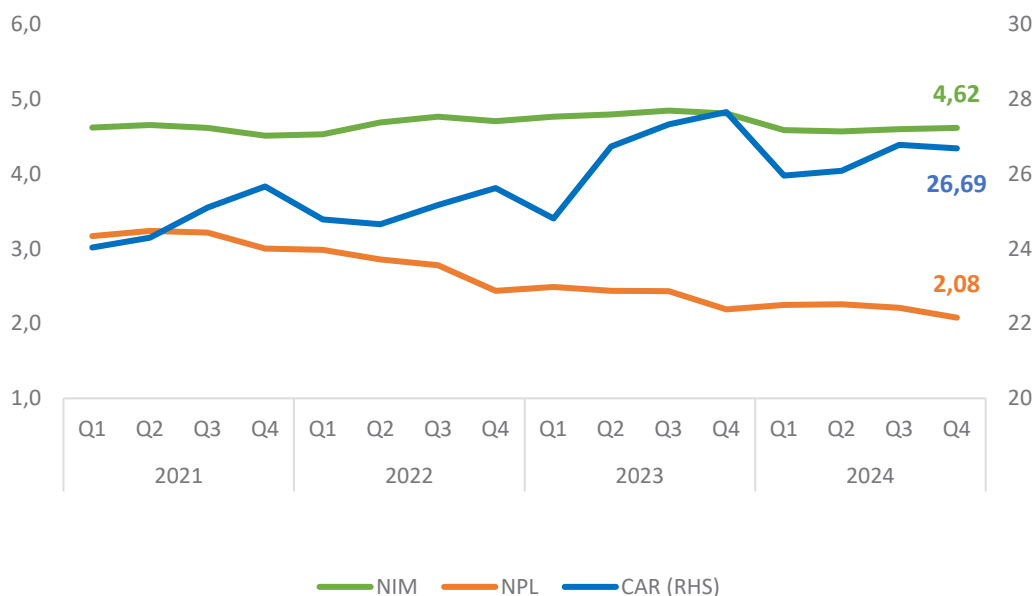
Grafik 19. Rasio DPK dan Kredit per PDB, 2019-2024 (%)

Sumber: Bank Indonesia

pertumbuhan simpanan berjangka. Hal ini juga terlihat dari kontraksi pada pertumbuhan DPK perseorangan yang konsisten mencapai 2 persen pada periode November 2024 hingga Januari 2025. Ini merupakan indikasi bahwa individu saat ini cenderung memegang uang kartal untuk konsumsi atau kemungkinan lainnya mereka memiliki preferensi untuk beralih ke instrumen investasi lainnya, misalnya emas dan perhiasan. Tren perlambatan pada DPK ini juga tecermin pada penurunan rasio DPK/PDB yang saat ini sudah berada di level 38 persen (turun dari 42 persen pada 2021). Risiko terkait indikator DPK perlu diwaspadai mengingat potensi penurunan BI-Rate akan berdampak pada perlambatan DPK lebih lanjut yang dapat meningkatkan risiko likuiditas. Selain itu, semakin beragamnya instrumen investasi non-bank dengan imbal hasil lebih menarik juga dapat mendorong terjadinya *shifting* yang akan menyebabkan penurunan pada DPK.

Sektor perbankan terus menunjukkan resiliensi di tengah pelonggaran kebijakan moneter yang mulai dilakukan Bank Indonesia. Tingkat profitabilitas perbankan mencatatkan perkembangan positif yang tecermin dari stabilnya Net Interest Margin (NIM) di kisaran 4,5-4,9 persen. Tren ini pun masih terus berlanjut pada 2024 dengan NIM yang mencapai 4,62 persen di akhir tahun. Sementara itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2021-2023. Meski pada 2024 CAR mengalami sedikit penurunan, permodalan perbankan dapat dikatakan masih relatif kuat. Adapun risiko kredit juga masih terjaga pada level aman, dimana Non-Performing Loan (NPL) secara konsisten mencatatkan penurunan hingga 2023. Tren ini masih terus berlanjut hingga akhir 2024 dengan tingkat NPL yang sudah mendekati level 2,0 persen. Mengacu pada kinerja positif sepanjang 2024, sektor perbankan diprediksi masih melanjutkan tren positifnya pada 2025. Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta semakin terdigitalisasinya layanan keuangan tentunya akan menjadi faktor penentu terhadap performa perbankan.

Grafik 20. Indikator Kinerja Perbankan Bank Umum, 2021 – 2024 (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Nilai tukar mancanegara dalam beberapa tahun terakhir cenderung dipengaruhi tekanan pasar keuangan dan arus modal global. Inflasi global yang tinggi telah mendorong kenaikan suku bunga negara maju dan menyebabkan kecenderungan pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS. Namun di akhir 2024, terdapat tendensi pelonggaran moneter yang memberikan sentimen positif hingga kemudian perkembangan politik AS memunculkan potensi tekanan baru.

Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden dengan arah kebijakan stimulus ekonomi yang akan diterapkannya, memungkinkan kembali meningkatnya inflasi di AS. Kondisi tersebut berisiko memengaruhi arah kebijakan moneter AS yang kembali relatif ketat. Ekspektasi pelonggaran kebijakan Federal Funds Rate (FFR) pun relatif memudar, dimana ekspektasi pasar dunia memperkirakan penurunan FFR lebih moderat. Situasi ini mendorong terjadinya isu *higher for longer* yang kembali menguat. Di Indonesia sendiri, fenomena tersebut telah mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah, khususnya di awal 2025.

Arah kebijakan proteksionisme di AS juga dapat menyebabkan penurunan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global. Kondisi ini akan berpengaruh negatif terhadap kinerja ekspor serta NPI. Faktor-faktor tersebut cenderung memiliki potensi depresiasi terhadap nilai tukar Rupiah. Meski demikian, masih terdapat faktor peluang bagi penguatan Rupiah. Strategi sumber pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kemunculan sumber ekspor yang baru. Selain itu, kebijakan pengelolaan DHE serta implementasi UU P2SK dapat memberikan dorongan tersendiri bagi sumber pasokan dolar AS di dalam negeri.

Secara agregat faktor potensi munculnya *higher for longer*, tekanan *demand* global dan kinerja ekspor Indonesia akibat *trade war*, serta tekanan arus modal investasi menjadi tantangan bagi nilai tukar. Namun tekanan tersebut masih dihadapkan beberapa faktor

peluang apresiasi seperti terjaganya inflasi domestik, strategi perbaikan struktur riil dan ekspor, serta implementasi UU P2SK untuk perbaikan daya saing pasar keuangan domestik. Dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, rata-rata nilai tukar tahun 2025 dapat dijaga pada tingkat Rp16.600 per dolar AS, terdepresiasi dibandingkan rata-rata tahun 2024.

Dinamika perkembangan pasar keuangan global juga menjadi pendorong utama pergerakan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Selama tahun 2024, *yield* SBN 10 tahun mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral global khususnya The Fed. Pada paruh pertama tahun 2024, imbal hasil SBN tenor 10 tahun cenderung meningkat akibat ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed yang masih ketat. *Yield* SBN 10 tahun mulai mengalami penurunan memasuki triwulan III seiring dengan sinyal dari The Fed yang mengindikasikan potensi pelonggaran kebijakan moneter yang memberikan sentimen positif bagi pasar obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia.

***Yield* SBN 10 Tahun cenderung mengalami peningkatan pada triwulan keempat 2024.** Meski AS mulai mengambil langkah pelonggaran moneter, dalam waktu bersamaan volatilitas di pasar keuangan global mulai meningkat yang mendorong kenaikan *yield* di pasar obligasi. Perkembangan politik di AS menjadi perhatian utama yang memicu kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan negara tersebut. Investor cenderung mengambil langkah *wait-and-see* dalam mengantisipasi potensi perubahan kebijakan ekonomi khususnya di sektor perdagangan serta hubungan geopolitik yang dapat mempengaruhi arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ketidakpastian global tahun 2025 yang diperkirakan masih cukup tinggi akan memengaruhi pergerakan *yield* SBN tenor 10 Tahun. Dengan arah kebijakan ekonomi AS yang diperkirakan akan lebih protektif, kondisi tersebut berisiko meningkatkan kekhawatiran perubahan arah kepada pengetatan kebijakan moneter sehingga diperkirakan akan mendorong peningkatan *yield* SBN 10 tahun. Langkah kebijakan penyesuaian tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed dapat menjaga *spread* imbal hasil yang diperkirakan akan menjadi katalis positif dalam pergerakan *yield* ke depan.

Di sisi lain, stabilitas fundamental ekonomi domestik akan menjadi faktor utama dalam menentukan arah pergerakan *yield* SBN ke depan. Faktor-faktor seperti inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang terjaga, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menjadi katalis positif bagi minat investor terhadap SBN tenor 10 Tahun. Berdasarkan dinamika tersebut, tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 2025 diperkirakan berada pada kisaran 7,0 persen, atau meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024.

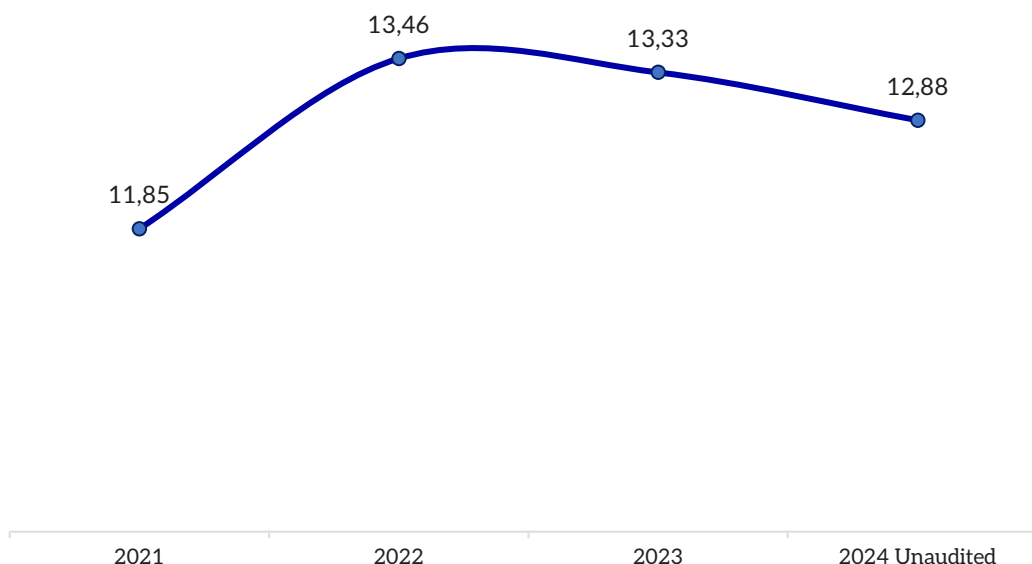
2.3. Capaian Kinerja Fiskal

2.3.1. Kinerja Makro Fiskal

Merespons perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik yang dinamis, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan. Kinerja makro fiskal yang tecermin dalam pendapatan negara, defisit anggaran, keseimbangan primer, dan rasio utang akan memberikan gambaran tentang seberapa efektif kebijakan fiskal dalam merespons tantangan dan

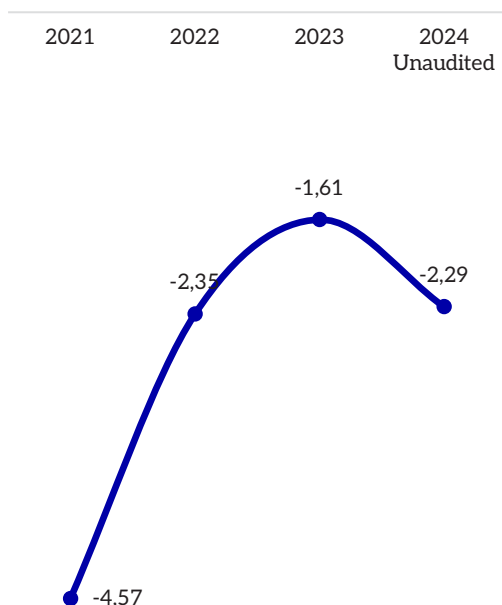
peluang yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal telah menunjukkan pemulihan yang signifikan, diiringi dengan konsolidasi fiskal yang berhasil mengendalikan defisit dan meningkatkan kapasitas fiskal negara. Keberhasilan ini mencerminkan penerapan kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.

Grafik 21. Rasio Pendapatan Negara, 2021-2024 (%)

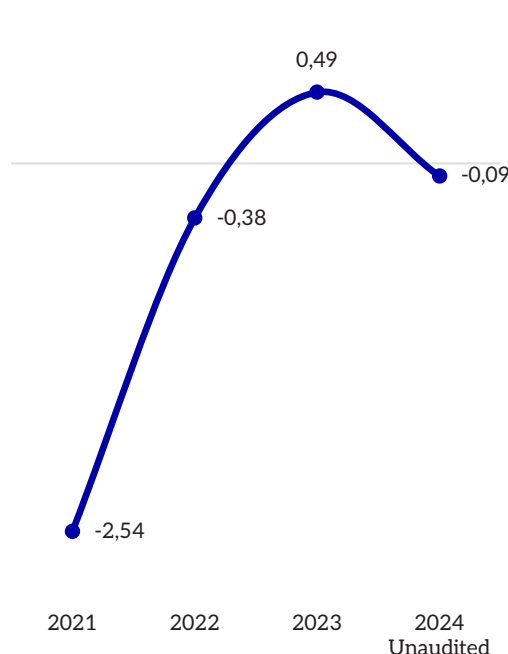


Sumber: Kementerian Keuangan

Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan pemulihan struktural yang kuat dan mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal jangka menengah. Pada 2020, tantangan global akibat pandemi Covid-19 sempat menekan rasio ini ke level 10,68 persen PDB, namun Pemerintah merespons dengan langkah cepat melalui berbagai strategi pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan yang terstruktur. Upaya ini mulai menunjukkan hasil pada 2021, ketika rasio pendapatan negara meningkat menjadi 11,85 persen, dan berlanjut dengan lonjakan signifikan ke 13,46 persen pada 2022, yang menjadi titik tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kinerja ini tetap terjaga pada 2023 dengan capaian 13,33 persen, dan pada tahun 2024 mencapai 12,88 persen PDB, tren pemulihan ini mencerminkan penguatan kapasitas fiskal serta keberhasilan konsolidasi kebijakan pendapatan negara secara berkelanjutan. Peningkatan pendapatan negara tidak hanya berasal dari perpajakan, tetapi juga dari optimalisasi PNBPN, terutama di sektor energi dan SDA. Pemerintah meningkatkan kontribusi PNBPN dengan memperbaiki tata kelola tambang dan migas, menegosiasikan ulang kontrak, serta mendorong efisiensi dan transparansi dalam pelaporan. Digitalisasi sistem dan integrasi data antarinstansi juga membantu memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan. Selain itu, kinerja pendapatan negara juga didukung oleh reformasi perpajakan yang menekankan reform administrasi, kelembagaan, dan digitalisasi layanan pajak melalui *core tax system* dalam sistem pengelolaan penerimaan. Lebih lanjut, penguatan reformasi sisi peraturan dilakukan melalui penerbitan UU HPP sehingga hal ini menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik, memperkuat akuntabilitas, dan efisiensi fiskal secara keseluruhan.

Grafik 22. Perkembangan Defisit Anggaran, 2021 – 2024 (% PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan

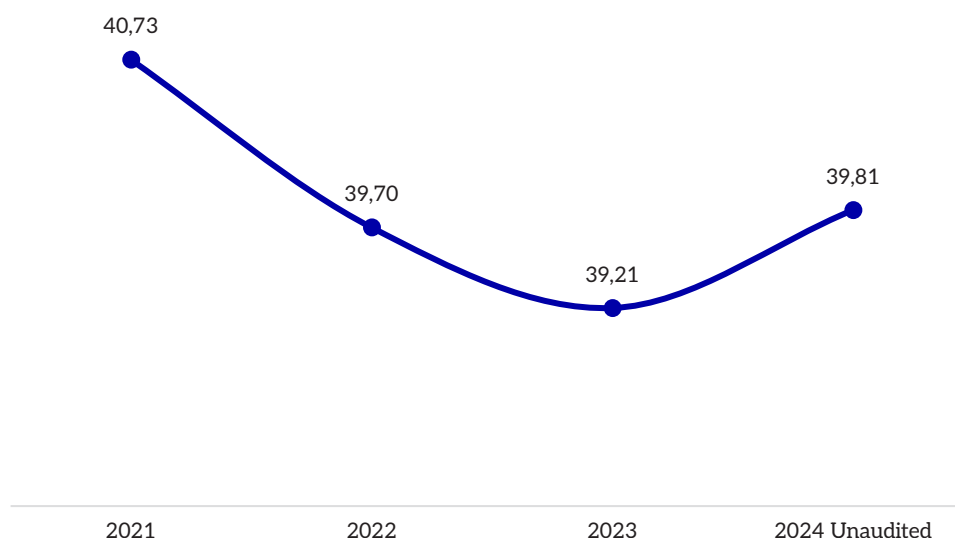
Grafik 23. Perkembangan Keseimbangan Primer, 2021 – 2024 (% PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja defisit anggaran dan keseimbangan primer pada tahun 2021-2024 mengalami penguatan dan terkendali dalam batas aman. Kinerja defisit anggaran menunjukkan tren penguatan mulai tahun 2021 setelah anjlok cukup dalam pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2021 defisit anggaran tercatat menguat pada level 4,57 persen PDB dan terus menguat sekaligus mencapai konsolidasi fiskal lebih cepat dengan tingkat defisit terkendali pada level 2,35 pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, keseimbangan primer tahun 2022 menguat pesat mendekati level positif dengan capaian -0,38 persen PDB dibanding kinerja tahun 2021 sebesar -2,5 persen PDB seiring dengan membaiknya kinerja fiskal didorong kondisi perekonomian yang mulai pulih. Pada tahun 2023, defisit mencapai level 1,61 persen PDB, terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Kinerja defisit juga dibarengi dengan capaian keseimbangan primer yang bernilai positif 0,49 persen PDB didukung oleh kinerja penerimaan yang positif. Pada tahun 2024, di tengah tantangan perekonomian akibat kondisi ketidakpastian, defisit dan keseimbangan primer mampu dijaga dalam batas aman dengan capaian masing-masing sebesar 2,29 persen dan -0,09 persen PDB.

Tingkat rasio utang terhadap PDB menurun dan terjaga pada level aman untuk mendukung target pembangunan. Selama periode 2021-2024, rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dan tetap terjaga pada level aman, jauh di bawah batas maksimal rasio utang. Rasio utang pada tahun 2021 berada pada level 40,73 persen PDB dipengaruhi oleh meningkatnya belanja yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan nasional. Seiring dengan peningkatan kinerja pendapatan negara dan belanja yang terkendali produktif, rasio utang terhadap PDB pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing pada level 39,70 dan 39,21 persen terhadap PDB. Pada tahun 2024, rasio utang pada level 39,81 persen PDB.

Grafik 24. Perkembangan Rasio Utang, 2021 – 2024 (% PDB)



Sumber: Bank Indonesia

2.3.2. Capaian Sasaran Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mendorong terciptanya lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia tercatat sebanyak 215 juta orang, dengan 152 juta orang di antaranya termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 meningkat menjadi 144,6 juta orang, dibandingkan dengan 139,9 juta orang pada Agustus 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru serta menurunkan jumlah pengangguran. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 menjadi 70,63 persen, dibandingkan dengan 69,8 persen pada Agustus 2023. TPAK mengindikasikan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Sementara itu, jumlah pengangguran pada 2024 tercatat sebesar 7,9 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen. Berdasarkan rilis data Februari 2025, TPT tercatat sebesar 4,76 persen, lebih rendah dari Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen dengan penciptaan lapangan kerja sebesar 3,59 juta jiwa. Hingga akhir 2025, Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan TPT ke level 4,5 – 5,0 persen.

Kualitas kondisi tenaga kerja nasional juga turut membaik. Proporsi tenaga kerja formal meningkat secara bertahap yang utamanya dipengaruhi oleh pemulihan sektor industri pengolahan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja formal. Pada Agustus 2024, proporsi tenaga kerja formal tercatat sebesar 42,1 persen meningkat dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 40,9 persen. Sementara itu, tenaga kerja formal di Februari 2025 tercatat sebesar 40,60 persen, menurun dibandingkan Februari 2024 sebesar 40,83 persen. Rata-rata upah bulanan juga mengalami kenaikan didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan produktivitas. Rata-rata upah di Agustus 2024 sebesar Rp3,27 juta meningkat

sebesar 2,8 persen dibandingkan Agustus 2023. Per Februari 2025, rata-rata upah buruh per bulan tumbuh sebesar 1,78 persen dari Februari 2024 menjadi sebesar Rp3,09 juta.

Kondisi ketenagakerjaan nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data Agustus 2024, penduduk Indonesia yang bekerja lebih dari 77 persen berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski demikian, TPT di Pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah dengan TPT tertinggi, yakni masing-masing 5,2 persen dan 4,8 persen. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan TPT paling rendah, yakni 2,5 persen. Perkembangan TPAK antarwilayah memperlihatkan bahwa wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua tercatat memiliki TPAK tertinggi, masing-masing sebesar 77,3 persen dan 72,6 persen. Lapangan usaha pertanian dan perkebunan mendominasi penyerapan tenaga kerja di semua wilayah, kecuali Jawa yang didominasi pekerja di sektor perdagangan. Mobilisasi tenaga kerja di seluruh wilayah nasional merupakan dampak dari transformasi struktural dan revitalisasi industri yang berbasis kewilayahan.

Tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun. Per September 2024, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,06 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir (2014-2024) bahkan terendah sejak tingkat kemiskinan diumumkan oleh BPS di tahun 1960. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2024 di perkotaan berada pada level 6,66 persen atau sebanyak 11,05 juta orang penduduk miskin. Sementara itu, di perdesaan tingkat kemiskinan berada pada level 11,34 persen atau sebanyak 13,01 juta orang penduduk miskin. Pulau Maluku dan Papua menjadi pulau dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia dengan total 18,62 persen diikuti Bali dan Nusa Tenggara dengan 12,15 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun berada pada tren yang semakin membaik. Per 2024, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,83 persen dan ditargetkan menuju 0 persen di tahun 2025.

Meski demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk masih harus terus dipantau dan diperbaiki. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) per September 2024 berada pada level 0,381, lebih rendah dari Rasio Gini per Maret 2024 yang sebesar 0,379. Peningkatan Rasio Gini tersebut didorong oleh naiknya Rasio Gini baik di perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing baik menjadi sebesar 0,402 dan 0,308 dengan Rasio Gini perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada tahun 2025, Secara spasial, hampir seluruh provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini di bawah level prapandemi pada September 2024. Di 2025, Rasio Gini ditargetkan pada level 0,379 - 0,382.

Kualitas modal manusia juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,02 di 2024, meningkat sebesar 0,63 poin (0,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM di 2024 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di 2023 serta rata-rata pertumbuhan tahunan selama 2020-2023. Capaian ini juga telah melebihi target sasaran pembangunan IPM 2024 yang ditargetkan sebesar 73,99 - 74,02. Peningkatan IPM 2024 juga terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara spasial, IPM tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta (84,15) sedangkan yang terendah dimiliki Papua Pegunungan (54,43). Di tahun 2025, Pemerintah mulai mengadopsi Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator pelengkap yang memberikan gambaran lebih komprehensif atas kapasitas dan daya saing SDM Indonesia, sebagai penyempurnaan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

telah digunakan pada periode sebelumnya. IMM ditargetkan sebesar 0,56 di tahun 2025 sebagai titik tolak awal upaya akselerasi pembangunan modal manusia.

Capaian indikator pembangunan lainnya, yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga tercatat positif. Secara nasional, NTP di tahun 2024 tumbuh positif sebesar 6,37 persen dibandingkan 2023 yang didorong oleh peningkatan pada subsektor tanaman pangan. NTN juga tercatat masih mengalami surplus di 2024, namun menurun 3,45 persen dibandingkan NTN 2023. Fenomena El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2024 turut berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi baik pada sektor pertanian maupun perikanan. Di sisi lain, sebagian provinsi masih memiliki level NTP dan NTN yang berada di bawah capaian nasional. Upaya penurunan disparitas antardaerah perlu untuk terus didorong antara lain melalui upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga.

Pembangunan infrastruktur menjadi modal penting bagi peningkatan konektivitas dan produktivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aktivitas perekonomian, memudahkan akses transportasi antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus membangun infrastruktur yang diarahkan pada sektor strategis sesuai dengan prioritas nasional sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Boks 1. Upaya Peningkatan Akses Layanan Publik Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Pemerintah mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kemiskinan di Indonesia.

Kementerian Keuangan sejak tahun 2023 bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Indonesia (LPEM FEB-UI) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Indonesia melakukan studi terkait *Multidimensional Deprivation Index-Indonesia* (MDI-I) yang memotret kekurangan akses dari berbagai aspek/multidimensi. Saat ini, pengukuran kemiskinan di Indonesia berfokus pada aspek moneter atau konsumsi rumah tangga yang hanya memberikan gambaran kemampuan konsumsi masyarakat. Pengukuran ini belum mencakup dimensi lain yang melihat kemiskinan sebagai suatu fenomena yang lebih kompleks. Di sisi lain, berbagai negara telah menggunakan pengukuran multidimensi yang juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak untuk melengkapi profil kemiskinan moneter. Melalui kajian MDI-I, ke depannya diharapkan pengukuran kemiskinan dapat dilengkapi pula dengan pengukuran multidimensi sehingga dapat membantu Pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam peningkatan kualitas modal manusia serta mengalokasikan anggaran secara lebih efisien kepada masyarakat.

Pengukuran MDI-I memberikan gambaran membaiknya kondisi kekurangan akses masyarakat secara umum, meskipun tantangan masih ada pada beberapa indikator terkait anak.

Kajian MDI-I menggunakan metode Alkire-Foster di level nasional dan subnasional. Metode Alkire-Foster menghitung skor MDI-I melalui dua komponen utama: persentase penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi (headcount ratio, H) dan intensitas kekurangan akses yang dialami oleh penduduk miskin multidimensi (intensity, A). Skor MDI-I merupakan hasil perkalian antara H dan A ($MDI = H \times A$), yang mencerminkan proporsi dan

tingkat keparahan kekurangan akses yang dialami oleh populasi. Intensitas ini dihitung sebagai rata-rata proporsi indikator yang tidak terpenuhi oleh individu-individu yang tergolong miskin multidimensi.

Pemanfaatan MDI-I juga dapat dilakukan di tingkat daerah untuk memperkuat perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan metodologi MDI-I untuk daerah masing-masing dengan penyesuaian agar lebih efektif dan selaras dengan prioritas lokal. Pemetaan potensi dan kekurangan akses masing-masing daerah sangat krusial dalam upaya mendukung menurunkan tingkat kekurangan akses dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan perhitungan kuantitatif tersebut, hasil kajian menunjukkan bahwa skor MDI-I, persentase orang miskin multidimensi, dan intensitas kekurangan akses menurun signifikan di 2023 dari 2020. Skor MDI-I di 2020 adalah sebesar 0,0515 dan menurun menjadi 0,0448 di 2023. Sementara itu, jumlah orang miskin multidimensi menurun menjadi 10,96 persen di 2023 (2020: 12,44 persen). Sebagian besar indikator MDI-I pada kelompok penduduk miskin multidimensi juga mengalami penurunan tingkat kekurangan akses di 2023. Terdapat 5 dari 13 indikator, yaitu indikator lama sekolah, vaksinasi anak, asset, pekerjaan, dan pendidikan prasekolah yang justru mengalami peningkatan di 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang berhubungan dengan anak seperti dalam aspek pendidikan dan kesehatan perlu untuk mendapatkan perhatian lebih.

Deprivasi Tiap Indikator Pada Penduduk Miskin Multidimensi* (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023
Kehadiran sekolah	24,35	23,92	23,16	20,52
Lama sekolah	85,05	83,95	84,14	84,42
Asuransi Kesehatan	42,16	42,74	44,98	40,11
Vaksinasi anak	36,74	35,94	35,42	36,32
Listrik	25,20	23,73	17,75	16,92
Air	19,78	17,39	16,57	14,47
Sanitasi	44,57	40,46	40,38	36,50
Perumahan	47,10	47,51	46,35	44,52
Aset	61,28	59,87	53,67	54,01
Pekerjaan	62,29	64,45	67,09	70,56
Pernikahan anak	6,14	5,10	4,61	4,13
Pekerja anak	7,79	8,02	6,77	6,35
Pendidikan prasekolah	19,83	19,22	18,46	19,06

Sumber: data Susenas 2020–2023, diolah.

Keterangan:

*Definisi miskin multidimensi adalah terdeprivasi di dalam 1/3 atau lebih indikator tertimbang.

*Syarat deprivasi per indikator menggunakan ketentuan target SDG Indonesia dan target capaian nasional (terutama dalam hal *universal healthcare* dan akses pendidikan 12 tahun).

Untuk itu, komitmen untuk memperkuat strategi program pengentasan kemiskinan yang efektif sejalan dengan pendekatan MDI-I akan terus dilaksanakan, terutama yang menyangkut dengan kondisi kemiskinan anak melalui akses ke pendidikan layak dan berkesinambungan, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas gizi.

BAB III

STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL JANGKA MENENGAH

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tujuan utama didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk senantiasa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, amanat ini mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Landasan konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini selaras dan konsisten dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan Makmur.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan. Keberlanjutan pembangunan perlu ditopang optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, didukung penguasaan teknologi untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sekaligus peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam harus mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi dan berbasis daya saing tinggi yang mampu menarik investasi secara produktif, sehingga menghasilkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas. Sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui program pendidikan terutama berbasis *Science Technology Engineering Arts and Mathematics* (STEAM) untuk mengejar ketertinggalan industri dan memacu kemajuan lebih tinggi. Program kesehatan universal (semesta) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan juga perluasan serta penguatan jaring pengaman sosial, memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh rakyat, terutama kelompok rentan dan tidak mampu. Seluruh masyarakat harus memiliki kesempatan untuk maju dan berkembang melalui berbagai program Pemerintah secara paripurna, baik melalui program seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, anak usia dini, dan ibu hamil, hingga program Sekolah Rakyat untuk anak tidak mampu.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi serta penguatan ekonomi akar rumput akan terus diperkuat termasuk melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di desa dan kelurahan. Petani, nelayan, dan buruh akan menjadi perhatian utama dari sisi kesejahteraan dan kepastian tingkat kebutuhan hidup yang layak, selain

karena mereka adalah tulang punggung ekonomi kita, juga untuk menghindarkan dari dampak negatif globalisasi dalam bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat besar, termasuk kemunduran kesejahteraan dan destabilisasi sosial politik di berbagai negara terutama negara maju. Membangun perekonomian yang berkeadilan dan inklusif, dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua, adalah sesuai dan menjadi mandat dari asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di saat Pemerintah sedang berupaya untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, eskalasi perang tarif memicu ketidakstabilan dan mengancam prospek ekonomi global. Lanskap ekonomi dan tata kelola dunia berubah drastis dan dramatis. Kesepakatan pasca Perang Dunia II untuk bersama-sama membangun dunia melalui globalisasi, saat ini justru berbalik mengarah pada deglobalisasi. Proteksionisme dan fragmentasi semakin menguat, bahkan *friendshoring* dan *nearshoring* semakin kabur. Semua negara fokus pada kepentingan masing-masing. Situasi ini menciptakan biaya tinggi bagi perekonomian dunia, rantai pasok terganggu, harga komoditas *volatile*, ekspor-impor melambat, nilai tukar melemah sedangkan *safe haven asset* cenderung menguat. Instrumen investasi pun mengalami tekanan semakin dalam dengan nilai risiko yang semakin tinggi.

Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tantangan struktural yang perlu diatasi secara konsisten antara lain: (i) Bonus demografi Indonesia yang semakin terbatas dan kecenderungan usia penduduk menua; (ii) Pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat mendisrupsi seluruh kegiatan ekonomi dan lapangan kerja; (iii) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus terus ditingkatkan; Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang harus dilandasi tata kelola yang baik dan bersih, serta efisien dan kompetitif; (iv) Sektor Keuangan yang masih terbatas dan dangkal menghambat kemajuan industri dan perkembangan jasa pelayanan; serta (v) ancaman perubahan iklim yang harus terus diantisipasi dan dimitigasi.

Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi dalam situasi saat ini sangat penting untuk diperkuat dan dijaga. Gejala dunia dan persaingan global yang meruncing di bidang militer, keamanan, geopolitik, ekonomi, dan keuangan sangat menantang dan makin kompleks, berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan kita capai. Untuk itu, Indonesia harus Mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pertahanan semesta.

Upaya mewujudkan cita-cita luhur amanat konstitusi tersebut kemudian diimplementasikan menjadi visi abadi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam perjalanannya, Pemerintah kemudian menargetkan visi tersebut dapat dicapai tepat pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. Di tahun tersebut, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju yang mandiri dan sejahtera.

Upaya pencapaian visi tersebut dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045. Undang-Undang tersebut (UU RPJPN 2025-2045) berfungsi sebagai peta jalan strategis yang mengarahkan seluruh upaya pembangunan nasional. RPJPN dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya memuat visi, misi, dan prioritas pembangunan, tetapi juga sasaran dan strategi

pencapaiannya. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2045 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pendapatan per kapita hingga setara dengan negara maju, yaitu sekitar USD23.000 – USD30.300. Selain itu, sektor maritim diharapkan memberikan kontribusi sebesar 15 persen, sementara Sektor Pengolahan mencapai 28 persen dari PDB.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,5–0,8 persen, mengurangi ketimpangan dengan *Gini Ratio* sebesar 0,29–0,32, serta meningkatkan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi 28,5 persen.
3. Memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional melalui diplomasi aktif, kepemimpinan global, pengaruh budaya, serta peran dalam organisasi internasional. Indonesia ditargetkan masuk 15 besar *Global Power Index* pada 2045.
4. Meningkatkan daya saing SDM dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, sikap kerja, dan kesehatan. Target *Human Capital Index* (HCI) yang ingin dicapai adalah 0,37.
5. Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emissions* (NZE), dengan target penurunan intensitas emisi sebesar 93,5 persen serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,0.

Indonesia diharapkan bertransformasi menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing global. Visi tersebut dapat tercapai melalui sasaran-sasaran dalam RPJPN tersebut. Visi ini mencerminkan tekad bangsa untuk mencapai kemajuan menyeluruh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang terkandung dalam RPJPN tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMN ini menjadi pijakan awal perencanaan pembangunan nasional lima tahunan pertama. RPJMN 2025-2029 berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan keterpaduan antara agenda pembangunan jangka menengah dengan kerangka visi jangka panjang, serta menjadi landasan penyusunan RKP. Penetapan RPJMN ini dimaksudkan untuk membangun fondasi awal transformasi menuju Indonesia Emas 2045, melalui penguatan tata kelola, pembangunan SDM, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1. Tantangan Ekonomi Jangka Menengah

3.1.1. Tantangan Ekonomi Global

Ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama akibat ketegangan perdagangan dan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi menghambat perdagangan internasional dan investasi global. Risiko eskalasi perang dagang, seperti kenaikan tarif AS terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, pengenaan tarif atas produk baja dan aluminium yang masuk pasar AS, serta tarif resiprokal pada mitra dagang AS, juga dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan potensi inflasi dan menekan kinerja perdagangan internasional. Dampaknya eskalasi perang dagang juga dirasakan Indonesia, khususnya

pada ekspor komoditas yang berpotensi menekan penerimaan negara dan menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Strategi *de-risking* dan *friendshoring* oleh Amerika Serikat dan mitra dagangnya turut mengubah pola perdagangan global, yang pada gilirannya juga memicu pergeseran aliran investasi dan perdagangan global. Percepatan inovasi digital dan adopsi teknologi baru juga mengubah lanskap industri, yang menuntut negara berkembang untuk beradaptasi guna mempertahankan daya saing. Tanpa penguatan industri berbasis teknologi dan peningkatan efisiensi produksi, Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global.

Tingkat suku bunga global yang masih relatif tinggi serta kembalinya sentimen *high for longer* di AS dapat memicu aliran modal keluar dan depresiasi nilai tukar di negara berkembang. Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta asing dan menekan kondisi fiskal. Di sisi lain, kebutuhan menjaga imbal hasil yang kompetitif untuk menarik arus modal masuk dapat mengancam keberlanjutan fiskal akibat tingginya *cost of fund* pemerintah.

Konflik berkepanjangan di Ukraina dan Timur Tengah menambah ketidakpastian dengan meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan perdagangan. Gangguan pada rantai pasok energi dan pangan global berpotensi memicu lonjakan inflasi, yang berdampak pada fluktuasi harga ekspor-impor dan tekanan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sentimen negatif dari ketidakstabilan geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian dalam arus investasi global.

Pada saat yang sama, dunia saat ini sedang mengalami pergeseran geopolitik yang melemahkan sistem multilateral, sebagaimana tecermin dari kebijakan tarif impor agresif dari AS dan tindakan balasan dari Tiongkok. Dinamika ini mendorong bangkitnya proteksionisme serta intervensi negara yang lebih aktif dalam perekonomian. Institusi multilateral semakin kehilangan pengaruh, sementara kerja sama ekonomi global terus mengalami kemunduran. Pola kebijakan negara yang semakin *inward looking*, didorong oleh kepentingan geostrategis dan kebijakan proteksionis, memberikan tekanan besar terhadap *rules based trade system* yang selama ini menjadi landasan stabilitas ekonomi global.

Perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi ancaman serius bagi ekonomi global, dan terutama negara-negara yang secara geografis dekat dengan Tiongkok termasuk Indonesia. Sebagai salah satu kontributor signifikan manufaktur dan perdagangan dunia, moderasi pertumbuhan Tiongkok dapat menurunkan permintaan global dan berdampak signifikan pada ekspor negara mitranya. Bagi Indonesia, perlambatan ekonomi Tiongkok berisiko mengurangi permintaan ekspor khususnya komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Penurunan ekspor ini pada gilirannya akan menurunkan kinerja neraca perdagangan, menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dan dapat berdampak negatif pada penerimaan negara.

Sementara itu, perubahan iklim yang semakin ekstrem juga meningkatkan risiko ketahanan pangan dan energi global. Bencana alam akibat faktor iklim yang lebih sering terjadi dapat mengganggu produksi pertanian dan memicu volatilitas harga pangan internasional. Di sisi lain, transisi menuju energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon mengubah struktur permintaan energi dan komoditas mineral, sehingga menuntut negara-

negara untuk mampu menyesuaikan diri dengan tren ini, apabila tidak ingin kehilangan daya saing di sektor ekspor energi dan bahan baku industri hijau.

3.1.2. Tantangan Ekonomi Domestik

Gejolak perekonomian global yang bergerak sangat dinamis berdampak pada kinerja perekonomian domestik yang terefleksi pada perlambatan kinerja ekspor-impor, terganggunya investasi, tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Indonesia saat ini juga masih menghadapi tantangan struktural yang membutuhkan respons secara tepat, terukur dan konsisten yaitu: (i) Bonus demografi yang semakin terbatas; (ii) Pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital (*artificial intelligence/AI*) dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; (iii) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang masih perlu ditingkatkan; serta (iv) Perubahan iklim yang semakin ekstrem sehingga perlu diantisipasi dan dimitigasi.

Hal ini tentunya harus diantisipasi dan dimitigasi baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dengan strategi yang tepat. Dalam jangka pendek difokuskan untuk meredam gejolak melalui upaya stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga agar APBN tetap sehat dan kredibel. Sementara, strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi reformasi struktural untuk memperkuat daya saing dan daya tahan ekonomi menuju Indonesia yang berdaulat, tangguh, mandiri, dan sejahtera. Eskalasi perang dagang yang tengah terjadi juga menjadi momentum untuk berbenah, untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi. Upaya tersebut antara lain dengan membangun kerja sama dan kolaborasi antarnegara yang lebih solid di bidang perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan, sehingga terbangun pola kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan dalam koridor kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa tetap menjadi yang utama.

Kerja sama dengan LKI selama ini telah memberikan dukungan yang signifikan bagi Indonesia. Diantaranya dengan World Bank Group (WBG) yang memberikan dukungan finansial untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia serta peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan mitra strategis lainnya seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). ADB mendukung pembangunan di Indonesia melalui pinjaman dan hibah aktif untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. IsDB bekerja sama dengan Indonesia berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang krusial seperti pertanian, keamanan pangan, dan pembangunan pedesaan, yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial di daerah-daerah terpencil. AIIB memberikan dukungan finansial pada proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, dan respons krisis yang membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

Pemerintah menyadari bahwa dalam menangani isu-isu global yang semakin kompleks, dibutuhkan penguatan kerja sama untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Hal ini juga yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota BRICS pada awal 2025. Indonesia saat ini sedang dalam proses akses menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and*

Development/OECD). OECD merupakan forum internasional yang terdiri dari negara-negara maju dengan komitmen untuk mendorong kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Boks 2. Peningkatan Peran Global Indonesia melalui OECD dan BRICS

Indonesia tengah menapaki dua jalur strategis dalam memperkuat posisinya di panggung global. Proses akses ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan keanggotaan penuh dalam BRICS per Januari 2025. Keduanya mencerminkan pendekatan komplementer Indonesia dalam memperluas kerja sama pembangunan internasional, meningkatkan kualitas kebijakan domestik, serta memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam tatanan global yang sedang berubah.

Indonesia telah menjadi mitra strategis OECD dengan menjadi anggota *key partner* sejak 2007 selama lebih dari dua dekade. Pada tahun 2019, Indonesia resmi menyatakan niat untuk bergabung dengan OECD, dengan Pemerintah menunjukkan keseriusan melalui berbagai reformasi seperti *Omnibus Law* dan reformasi fiskal. Keterlibatan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, baik dari sisi investasi maupun adopsi *best practice* global. Indonesia meyakini bahwa akses ini akan membawa Indonesia masuk ke dalam ekosistem global, mendorong peningkatan nilai investasi, menguatkan UMKM sebagai pemain global, serta meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, keanggotaan OECD dapat mendukung program prioritas Pemerintah, seperti ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, *good governance*, dan upaya Indonesia keluar dari *middle-income trap*. Pada 2024, OECD resmi mengadopsi Peta Jalan untuk Proses Akses OECD Indonesia, yang menandai dimulainya proses intensif penyesuaian kebijakan nasional terhadap standar OECD di bidang tata kelola pemerintahan, transparansi, reformasi ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan sosial. Keanggotaan di OECD tidak hanya membuka akses terhadap *best practices* negara-negara maju, tetapi juga memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor dan mitra dagang global.

Di saat yang sama, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan dan memperluas dimensi kerja sama Selatan-Selatan. Keanggotaan ini membuka peluang ekonomi signifikan, termasuk akses ke pasar BRICS yang berjumlah lebih dari 3.6 miliar jiwa, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan tekstil. Melalui New Development Bank (NDB)—lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS—, Indonesia dapat memperoleh pendanaan infrastruktur strategis dengan biaya lebih terjangkau, mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat transformasi pembangunan nasional. Pernyataan resmi keanggotaan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025 saat menerima Presiden NDB, Dilma Rousseff.

Indonesia diharapkan dapat terlibat aktif dalam agenda BRICS, mulai dari penguatan ketahanan ekonomi, kolaborasi teknologi, hingga solusi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Keanggotaan ini sekaligus membuka peluang diplomasi yang lebih luas, termasuk diversifikasi mitra dagang, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, serta memperjuangkan reformasi tata kelola ekonomi global—seperti distribusi hak suara yang lebih adil di lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia.

Keterlibatan aktif dalam OECD dan BRICS menunjukkan pendekatan Indonesia yang adaptif dan seimbang. Mendorong reformasi domestik melalui kerja sama dengan negara maju, sekaligus memperkuat solidaritas dengan negara berkembang. Dengan strategi ini, Indonesia menegaskan ambisinya untuk menjadi aktor utama dalam membentuk masa depan tata kelola global yang inklusif dan berkeadilan, sembari mempercepat agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Momentum reformasi struktural juga akan dilakukan melalui konsolidasi untuk penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi. Reformasi struktural dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan transformasi ekonomi Indonesia yang produktif dan inklusif. Penguatan transformasi pada jangka menengah pertama sebagaimana tertuang dalam UU RPJPN 2025-2045, akan difokuskan kepada (i) transformasi sosial; (ii) transformasi ekonomi; (iii) transformasi tata kelola; (iv) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; dan (v) ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Implementasi reformasi struktural pada jangka menengah diharapkan akan didukung penguatan transformasi. Penguatan transformasi tersebut diharapkan searah dengan agenda pembangunan nasional yang pelaksanaannya diharapkan dapat optimal, yang dalam bagian ini utamanya akan dititik beratkan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Agenda pembangunan nasional pada jangka menengah akan difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan akselerasi peningkatan kesejahteraan yang akan didukung strategi ekonomi dan fiskal jangka menengah sebagai program-program prioritas.

3.2. Tantangan Fiskal Jangka Menengah

Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama dalam menstimulus perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan fiskal masih menghadapi tantangan, antara lain perlunya optimalisasi pendapatan untuk meningkatkan ruang fiskal, perlunya mendorong agar belanja semakin efisien dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta terus mendorong inovasi pembiayaan yang produktif dan *sustainable*. Dalam kondisi global yang masih penuh tantangan, Pemerintah menempuh langkah-langkah efisiensi dan rekonstruksi belanja agar lebih efisien dan sekaligus produktif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan, agar setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara optimal dan memberi dampak nyata bagi rakyat dan perekonomian.

Pemerintah terus memastikan bahwa belanja negara diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial. Program prioritas tersebut antara lain dilakukan untuk penguatan ketahanan pangan; ketahanan energi; penguatan Makan Bergizi Gratis; pendidikan yang bermutu; kesehatan yang berkualitas; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; penguatan pertahanan semesta; serta peningkatan investasi dan perdagangan.

Di sisi pendapatan, ditengah tekanan global yang memengaruhi harga komoditas, perdagangan, dan investasi berdampak pada kinerja penerimaan negara. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh dengan memperkuat basis penerimaan perpajakan melalui reformasi perpajakan yang berkelanjutan, digitalisasi, serta peningkatan kepatuhan

dan pengawasan. Optimalisasi PNBPN melalui peningkatan tata kelola, transparansi, dan optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam.

Pemerintah juga terus bersinergi dengan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Koordinasi yang erat dilakukan untuk menjaga nilai tukar tetap stabil, mengelola risiko suku bunga, serta menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Upaya menjaga cadangan devisa, memperkuat sektor eksternal, dan mendorong investasi menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

3.3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah

Lanskap perdagangan dan investasi global kini semakin bergeser ke produk bernilai tambah tinggi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Saat ini, perdagangan global didorong oleh meningkatnya permintaan produk *high-tech* seperti semikonduktor dan teknologi digital, seiring tumbuhnya kebutuhan akan AI dan energi terbarukan. Sementara itu, produk *low-tech* seperti tekstil mengalami tekanan oleh naiknya biaya produksi dan dorongan menuju ekonomi sirkular. Sedangkan produk *medium-tech* tumbuh stabil berkat adopsi otomatisasi dan *internet of things* di negara berkembang. Meningkatnya fragmentasi rantai pasok yang dipicu oleh kebijakan proteksionisme dan *reshoring*, terutama pada sektor *high-tech*, telah membuka peluang investasi strategis di sektor teknologi dan energi terbarukan. Selain itu, dinamika investasi global selama satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan aliran investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI) pada industri *high-tech* dan industri *medium-tech* mendukung transisi energi melalui otomatisasi. Sementara, industri *low-tech* mengalami moderasi pertumbuhan FDI karena tuntutan sertifikasi hijau dan adaptasi ke ekonomi sirkular. Dengan demikian, pergeseran ini mencerminkan komitmen global terhadap inovasi, keberlanjutan, dan pencapaian target NZE.

Di tengah dinamika global ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen pada tahun 2024. Kinerja perekonomian Indonesia didorong oleh sektor jasa yang berkontribusi sebesar 53,8 persen terhadap PDB dan tumbuh di atas 6,4 persen. Sementara itu, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 19,0 persen dan tumbuh sebesar 4,4 persen pada tahun 2024, didorong oleh kontribusi industri *low-tech* seperti industri makanan dan minuman. Di sisi lain, sektor pertanian berkontribusi 12,6 persen terhadap PDB, kinerjanya didorong oleh subsektor perkebunan dan perikanan. Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya transformasi ekonomi melalui integrasi sektor jasa dengan manufaktur berteknologi tinggi, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan.

Sektor manufaktur Indonesia saat ini masih didominasi oleh industri *low-tech* dan padat karya dengan tingkat keterampilan yang relatif rendah. Industri ini menjadi penopang utama sektor manufaktur dengan kontribusi sebesar 54 persen terhadap PDB sektor manufaktur dan penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2024. Di sisi lain, industri *high-tech* seperti elektronik menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam dua tahun terakhir. Industri *medium-tech* seperti logam dasar dan barang galian bukan logam juga mencatatkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Perkembangan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong transformasi sektor manufaktur menuju sektor bernilai tambah tinggi yang terhubung dengan rantai pasok global dan berorientasi pada ekonomi hijau, guna menciptakan lapangan kerja berkualitas serta memperkuat daya saing di pasar internasional.

Kinerja sektor jasa masih bertumpu pada aktivitas perdagangan konvensional yang memiliki nilai tambah rendah. Sektor perdagangan berkontribusi sebesar 24,3 persen terhadap PDB sektor jasa, mencerminkan peran yang sangat penting dalam mendukung distribusi barang dan jasa. Sebagai tulang punggung rantai pasok domestik, sektor perdagangan tidak hanya mendorong perputaran ekonomi, tetapi juga memperkuat konektivitas antara produsen, konsumen, dan berbagai sektor industri lainnya. Dari sisi ketenagakerjaan, dominasi perdagangan dalam menyerap tenaga kerja mencerminkan kontribusinya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, namun juga mengisyaratkan minimnya diversifikasi ke sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti keuangan, teknologi, atau informasi. Transformasi menuju jasa berbasis inovasi dan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat struktur ekonomi, mengurangi ketergantungan pada model konvensional, dan menciptakan ekosistem berdaya saing global. Upaya ini tidak hanya akan mendorong produktivitas, tetapi juga membuka lapangan kerja berkualitas serta mengakselerasi terciptanya ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sektor Pertanian memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi, terutama sebagai pilar ketahanan pangan. Dengan performa positif pada awal tahun, Sektor Pertanian diperkirakan menguat cukup signifikan di tahun 2025, meskipun hanya tumbuh tipis sebesar 0,7 persen di tahun 2024. Untuk mewujudkan percepatan kinerja Sektor Pertanian, pemerintah akan terus mendorong transformasi sektor pertanian program modernisasi alat dan teknologi pertanian, optimalisasi dan perluasan lahan tanam, penerapan pertanian cerdas berbasis digital, serta inovasi teknologi seperti penggunaan bahan hayati untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga akan memperkuat sinergi kepada semua pihak terkait termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan *off-taker* yang akan menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, serta kesejahteraan para petani dan pelaku usaha pertanian.

Indonesia perlu memperkuat sektor bernilai tambah tinggi berorientasi ekspor dan investasi untuk menuju ke jalur aspirasi 2045. Mengingat permintaan global cenderung pada produk berteknologi menengah dan tinggi, transformasi industri menjadi kunci untuk menangkap peluang ini. Dalam jangka pendek, strategi ekspansi pasar harus fokus pada produk dengan daya saing relatif kuat seperti elektronik. Sementara dalam jangka menengah dibutuhkan strategi transformasi industri-industri yang daya saingnya masih relatif lemah namun memiliki potensi untuk berkembang. Kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka penting untuk mendorong industri yang sesuai dengan permintaan pasar global, mengingat *Global Value Chain* (GVC) menjadi pintu masuk utama. Dukungan ekosistem investasi seperti infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, inovasi, riset dan pengembangan, kawasan industri, akses keuangan, energi berkelanjutan, efisiensi logistik, insentif tepat guna, serta persaingan usaha sehat sangat diperlukan. Selain itu, dinamika geopolitik akan mempengaruhi ekspor, sehingga peran institusi dalam peningkatan kualitas data, koordinasi antarlembaga, dan sinergi dengan dunia usaha menjadi sangat krusial untuk menunjang transformasi industri bernilai tambah tinggi.

Pemerintah terus mengakselerasi transformasi ekonomi melalui perumusan sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengembangan industri *high-tech* dan ekonomi hijau, seperti produksi baterai, kendaraan listrik, serta energi terbarukan (*biofuel*, solar panel) serta industri kimia, farmasi dan digital.

Di sisi lain, ketahanan pangan dan sektor tradisional seperti tekstil serta makanan-minuman tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas domestik melalui integrasi inovasi teknologi, penguatan rantai pasok global, dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, upaya alih teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada industri *low-tech* dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global.

Pemerintah juga terus mendorong kebijakan hilirisasi SDA sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui hilirisasi 28 komoditas strategis, antara lain nikel, bauksit, sawit, dan komoditas pertanian, diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini juga mendorong pengembangan energi terbarukan melalui konversi batubara menjadi bioetanol dan produksi solar panel. Kebijakan hilirisasi diharapkan memperkuat neraca transaksi berjalan dan menciptakan lapangan kerja serta mendukung kinerja sektor manufaktur melalui efek pengganda terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Di tengah ketidakpastian global, disrupsi rantai pasok, dan isu perubahan iklim, upaya hilirisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing global serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku, guna mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi kewilayahan, akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan investasi melalui berbagai upaya yang difokuskan untuk meningkatkan daya saing daerah. Dalam meningkatkan daya saing daerah, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kompleksitas ekonomi daerah agar mampu meningkatkan produktivitas dalam memenuhi rantai pasok dan menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Penguatan reformasi struktural di daerah dan peningkatan belanja produktif terus menjadi perhatian agar kebijakan hilirisasi yang menjadi strategi transformasi ekonomi dapat berjalan dengan optimal.

Dari sisi geopolitik, Indonesia mempertahankan posisi nonblok di tengah meningkatnya ketegangan global, dibarengi dengan upaya untuk menjalin kemitraan strategis. Diplomasi proaktif dan negosiasi dilakukan dengan Amerika Serikat serta berbagai negara mitra dagang dan investasi utama lainnya. Spesifik untuk AS, pasca penerapan tarif pada 2 April 2025, Indonesia mengajukan proposal komprehensif yang mencakup sektor Kesehatan, pertanian, energi terbarukan, serta minyak dan gas bumi, termasuk pengembangan rantai nilai melalui kerja sama industri strategis dan mineral kritis. Situasi ini memberikan poin positif bagi Indonesia, secara langsung memaksa dilakukan percepatan deregulasi yang telah digagas Presiden Prabowo sejak awal Pemerintahan untuk mendorong investasi dan perdagangan. Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk unggulan ke kawasan potensial lainnya, termasuk ASEAN+3, BRICS, dan Eropa sebagai Langkah antisipatif dampak tarif AS. Pembukaan pasar baru dilakukan melalui serangkaian proses negosiasi dengan mendorong produk-produk Indonesia yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing di level global. Kolaborasi yang konsisten dengan seluruh K/L akan dilakukan demi mewujudkan target tersebut.

3.4. Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Jangka Menengah

Pengentasan kemiskinan terus menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara umum upaya akselerasi pengentasan

kemiskinan ditempuh melalui: (i) pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban kebutuhan pokok; (ii) meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan; (iii) meningkatkan akses pembiayaan; (iv) meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas, serta (v) mendorong agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. Upaya pengentasan kemiskinan utamanya ditempuh melalui optimalisasi anggaran perlintas sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli dan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 2024, realisasi anggaran perlintas sebesar Rp455,9 triliun (13,58 persen dari belanja negara) tumbuh 4,5 persen (yoy) terutama untuk program bansos reguler dan subsidi serta perluasan sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pada 2025, alokasi anggaran untuk program perlintas meningkat 1,3 persen (yoy) menjadi Rp503,23 triliun terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi. Anggaran perlintas dalam periode 2023-2025 terjaga di atas 2 persen PDB. Alokasi anggaran perlintas yang cukup besar dan terus meningkat menunjukkan komitmen Pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program perlintas cukup efektif berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Berbagai program perlintas yang dilaksanakan, baik untuk mengurangi beban maupun untuk meningkatkan pendapatan, mendukung penurunan tingkat kemiskinan dari 9,03 persen (Maret 2024) menjadi 8,57 persen (September 2024) atau turun 0,46 persen. Penurunan yang terjadi dalam kurun waktu enam bulan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian satu tahun sebelumnya (Maret 2023 - Maret 2024) yang hanya turun 0,33 persen. Sama halnya dengan kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem turun cukup signifikan menjadi 1,12 persen pada Maret 2023 dan menjadi 0,83 persen pada Maret 2024.

Berbeda dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang konsisten menurun pada 2023-2024, tingkat ketimpangan cenderung stagnan.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini tercatat sebesar 0,388. Selanjutnya, Rasio Gini menunjukkan perbaikan pada Maret 2024 sehingga mencapai 0,379. Penurunan sebesar 0,009 ini merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan adanya perbaikan distribusi pendapatan yang lebih nyata. Namun demikian, perbaikan indikator ketimpangan tersebut tidak berlanjut pada September 2024, tecermin pada Rasio Gini yang kembali meningkat menjadi 0,381.

Pelaksanaan program perlintas dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan.

Beberapa tantangan tersebut antara lain yaitu penyaluran program yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan besaran bantuan yang cenderung tetap sehingga kecukupan manfaat yang dirasakan semakin menurun. Selain itu, program pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas sehingga masyarakat miskin belum dapat mandiri dan masih bergantung pada bantuan sosial yang diberikan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu penguatan strategi untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Dalam jangka menengah, Pemerintah menetapkan sasaran indikator kemiskinan yang optimis.

Tingkat kemiskinan pada 2025 ditargetkan turun ke kisaran 7,0-8,0 persen. Penurunan ini diharapkan terus berlanjut ke 4,5-5,0 persen pada 2029. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan dapat dihapus mulai 2025. Sasaran tingkat ketimpangan

juga ditetapkan terus menurun walaupun tidak sedalam penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2025, Rasio Gini ditargetkan pada rentang 0,378-0,382. Selanjutnya rasio ini diharapkan turun hingga rentang 0,372-0,375 pada 2029.

Pemerintah merancang strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan untuk mencapai target jangka menengah. Strategi yang ditempuh antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perumahan), pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan program pemberdayaan melalui dukungan bantuan modal usaha dan peningkatan akses ke lapangan pekerjaan. Penyediaan hunian yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi yang layak menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan utamanya melalui integrasi basis data pensasaran dan memastikan kecukupan manfaat dan sinergi antarprogram perlintsos yang relevan. Selain itu, program MBG bagi siswa, balita, dan ibu hamil/menyusui diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran makanan, meningkatkan gizi, pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. Dari sisi anggaran, dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi tersebut Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas anggaran perlintsos.

Strategi akselerasi pengentasan kemiskinan juga ditempuh melalui penyaluran bansos yang disinergikan dengan program pemberdayaan. Sinergi ini akan meningkatkan kemandirian dan mendorong masyarakat miskin untuk graduasi dari kemiskinan. Bansos yang dikhususkan untuk rumah tangga miskin dapat diberikan untuk menopang pengeluaran guna memastikan kebutuhan dasar tercukupi. Oleh karena itu, penyaluran bantuan ini perlu dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu agar berdampak optimal mendukung penurunan kemiskinan.

Penyaluran bantuan sosial disertai dengan program pemberdayaan berupa dukungan kewirausahaan dan pelatihan kerja guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Dukungan kewirausahaan mencakup bantuan permodalan serta pendampingan dalam merintis dan mengembangkan usaha. Selain itu, rumah tangga miskin yang telah berhasil keluar dari garis kemiskinan (graduasi) didorong untuk mengakses program pembiayaan, seperti kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna memperkuat keberlanjutan usaha mereka. Sementara itu, bagi masyarakat miskin usia produktif yang tidak terlibat dalam program kewirausahaan, disediakan program pelatihan kerja yang dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mendukung program prioritas nasional.

Di sisi penciptaan lapangan kerja, Pemerintah berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja melalui berbagai program unggulan, seperti MBG, hilirisasi industri, dan pengembangan lumbung pangan. Program-program ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, Pemerintah juga mendorong pengembangan *care economy*, seperti pengasuhan balita dan lansia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas, terutama bagi perempuan, sekaligus memperkuat peran mereka dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Alokasi anggaran perlinsos akan terus dioptimalkan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kebutuhan anggaran perlinsos diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan penguatan peran perlinsos sebagai *shock absorber* di tengah risiko ketidakpastian global. Selain itu, penuaan populasi juga akan meningkatkan anggaran perlinsos terutama untuk perlindungan kelompok lanjut usia. Dalam jangka menengah, anggaran perlinsos akan diarahkan pada penyaluran bantuan sosial yang lebih mencukupi dan tepat sasaran, perluasan program pemberian bantuan modal usaha, peningkatan akses program pembiayaan, pelatihan kerja untuk mendukung program nasional, dan penguatan perlinsos adaptif. Untuk itu, pada 2026-2029, anggaran perlinsos diproyeksikan akan terus meningkat dan terjaga di kisaran dua persen PDB. Peningkatan anggaran tersebut utamanya diprioritaskan pada alokasi untuk mengurangi beban pengeluaran dan mendorong pemberdayaan.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah juga mendorong pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Akses terhadap hunian yang memenuhi standar minimum kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masih menjadi tantangan bagi kelompok ini. Untuk itu, Pemerintah memperkuat kebijakan pembiayaan perumahan melalui program FLPP sebagai instrumen utama dalam memperluas akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program perumahan nasional dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi kewilayahan, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pemerataan layanan publik di daerah dan mendorong peningkatan kualitas belanja daerah untuk menurunkan kemiskinan. Beberapa upaya peningkatan pemerataan layanan publik di daerah antara lain melalui penguatan kebijakan TKD berbasis kinerja seperti penguatan kebijakan *earmarking* DAU dalam mendukung capaian kinerja layanan daerah, penguatan *earmarking* PDRD, pemberian insentif kepada daerah berkinerja baik, dan peningkatan akses daerah terhadap skema alternatif pembiayaan daerah. Sementara itu, sebagai upaya peningkatan kualitas belanja untuk menurunkan kemiskinan, belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan beban pengeluaran, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan sesuai dengan kondisi deprivasinya.

3.5. Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi kebijakan agar mampu merespons dinamika perekonomian serta menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal. Saat ini perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi, terutama perang dagang Sementara itu, Indonesia saat ini juga masih menghadapi tantangan struktural yang harus direspons secara tepat, terukur, dan konsisten yaitu bonus demografi yang semakin terbatas; pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat; kualitas SDM dan tata kelola SDA yang masih perlu ditingkatkan; serta perubahan iklim yang semakin ekstrem. Situasi ini mengarahkan desain kebijakan fiskal dalam jangka pendek dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka

menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua komponen bangsa.

Strategi ekonomi dan fiskal jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) efektivitas MBG; (iv) pendidikan bermutu; (v) kesehatan berkualitas; (vi) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (vii) penguatan pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

3.5.1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang merupakan salah satu prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional diperkuat dengan meningkatkan produktivitas, menstabilkan harga pangan, serta mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa (pada tahun 2024), Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Krisis pangan global yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta dinamika geopolitik dunia semakin mempertegas urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem ketahanan pangannya. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan terhadap impor pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, daging sapi, dan susu, berisiko tinggi terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi ekonomi fiskal 2025–2029 akan difokuskan pada penguatan produksi domestik, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan terutama petani dan peternak.

Saat ini, Indonesia masih menghadapi kurang optimalnya produksi pangan. Pada tahun 2024, defisit produksi beras tercatat sebesar 367.595 ton dan kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai dengan 3 juta ton menyebabkan ketergantungan impor mencapai 4,3 juta ton dan diperkirakan dapat meningkat hingga 6,1 juta ton pada tahun 2029. Sementara itu, defisit produksi daging sapi mencapai 288.261 ton pada tahun 2024, dengan hampir 95 persen kebutuhan tambahan dipenuhi melalui impor. Kondisi yang serupa terjadi pada komoditas susu sapi, di mana defisit mencapai 3,72 juta ton, yang hampir seluruhnya dipenuhi dari pasokan luar negeri, dan diperkirakan dapat meningkat hingga 7,57 juta ton pada tahun 2029.

Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia juga masih sangat bergantung pada beras, sementara konsumsi sumber protein seperti daging sapi, ayam, telur, dan susu masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Konsumsi daging sapi yang memenuhi diet sehat sekitar 85 gram per hari per kapita, namun rata-rata konsumsi daging sapi masyarakat sebesar 8,3 gram per hari per kapita. Konsumsi susu sapi yang sesuai diet sehat sekitar 1 cangkir per hari per kapita atau 240 gram per hari per kapita, namun masyarakat baru mengonsumsi 45,6 gram per hari per kapita. Kurangnya konsumsi nutrisi ini terjadi pada masyarakat menengah ke bawah. Data Susenas 2024 mengindikasikan bahwa terdapat 59,54 persen keluarga di tingkat 10 persen pendapatan terbawah kekurangan konsumsi protein. Atas dasar itu, diperlukan langkah lebih konkret

untuk mendorong diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi, guna mengurangi tekanan terhadap komoditas tertentu dan meningkatkan ketercukupan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Swasembada Beras

Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi ekonomi fiskal ketahanan pangan 2025-2029 disusun dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang fokus untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga dan mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Salah satu pilar utama dalam strategi ini adalah program swasembada beras yang akan dilakukan melalui ekspansi lahan pertanian serta peningkatan produktivitas. Perkiraan penambahan lahan pertanian yang diperlukan sebesar 0,31 juta hektar pada tahun 2026 dan meningkat secara bertahap hingga 2 juta hektar di tahun 2029. Selain peningkatan lahan, peningkatan produktivitas diperlukan dengan produktivitas 5,3 ton per hektar pada tahun 2024 menjadi 5,5 ton per hektar pada tahun 2029. Peningkatan produktivitas ini memerlukan perubahan metode pertanian tradisional menjadi pertanian modern yang *sustainable*.

Oleh karena itu, langkah ini perlu didukung dengan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, bendungan, jalan produksi, serta modernisasi alat dan mesin pertanian. Selain itu, penggunaan benih unggul, pemupukan berbasis sains, serta penerapan teknologi digital dalam pertanian perlu untuk terus ditingkatkan, guna mendorong efisiensi dan peningkatan hasil panen. Pemerintah perlu mendorong investasi untuk mendukung program swasembada beras ini, kontribusi APBN dan sektor swasta melalui skema kemitraan strategis diperlukan untuk meningkatkan potensi keberhasilan program swasembada beras ini.

Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu

Revitalisasi sektor peternakan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan produksi daging sapi dan susu. Pengembangan peternakan sapi pedaging modern yang berbasis pada sistem penggemukan dan pembiakan skala besar diestimasi memerlukan impor sapi pedaging sekitar 2,9 juta ekor dalam periode 2025-2027, dengan alokasi sebanyak 1 juta ekor per tahun. Sejalan dengan itu, program peningkatan produksi susu perlu dilakukan melalui impor sekitar 6.638 ekor sapi perah indukan sampai dengan tahun 2029, dengan impor 1.294 ekor pada tahun 2026 sebagai lanjutan dari impor pada tahun 2025 sebanyak 2.694 ekor dan secara bertahap menurun menjadi 702 ekor pada tahun 2029. Kontribusi APBN dan sektor swasta melalui skema kemitraan strategis dapat meningkatkan potensi keberhasilan program swasembada daging sapi dan susu ini. Untuk mendukung pengembangan industri peternakan ini, Pemerintah dapat memberikan berbagai insentif fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan Produksi Jagung

Pemerintah juga menempatkan komoditas jagung sebagai pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Jagung memegang peranan strategis, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pakan ternak. Selama periode 2022–2023, kebutuhan jagung nasional mengalami defisit sementara produksi jagung nasional mencapai surplus pada tahun 2024. Kebutuhan jagung pada lima tahun ke depan diproyeksikan meningkat didorong oleh peningkatan permintaan pakan ternak dan industri untuk program MBG.

Sebagian besar kebutuhan jagung yaitu 58 persen, digunakan untuk pakan ternak, 26 persen untuk industri, dan sisanya sebesar 16 persen digunakan sebagai bahan pangan. Dalam periode 2025–2029, Pemerintah menargetkan produksi jagung tumbuh rata-rata 4,78 persen per tahun, dengan produksi diproyeksikan mencapai 25,89 juta ton di tahun 2029.

Strategi untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas lahan tanam di kawasan hutan, perkebunan, dan lahan tadah hujan. Perluasan lahan tanam ini ditargetkan mencapai 2,9 juta hektar pada tahun 2029. Sedangkan intensifikasi dilakukan melalui modernisasi pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul, akses pupuk yang lebih mudah, serta pengembangan infrastruktur seperti gudang jagung, irigasi, dan mekanisasi pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Strategi intensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jagung dari 5,93 ton per hektar pada tahun 2024 hingga 6,21 ton per hektar pada tahun 2029. Pemerintah melalui APBN akan memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur saluran irigasi berupa embung dan sumur-sumur pompa.

Penguatan Peran Perusahaan Umum BULOG

Sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional, penguatan peran Perum BULOG menjadi elemen kunci dalam menjaga stok beras nasional, menjaga stabilitas harga pangan serta ikut berkontribusi peningkatan kesejahteraan petani. Stok beras nasional ditargetkan mencapai 3 juta ton, atau sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional. BULOG bertanggung jawab dalam menyerap produksi petani melalui skema harga pembelian pemerintah (HPP) untuk memastikan ketersediaan beras dalam menghadapi lonjakan permintaan atau krisis pangan. Dalam melakukan pengadaan gabah atau beras dari petani, BULOG melakukan pembelian sesuai HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah. Saat ini, untuk HPP Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp6.500 per kg, HPP GKG di penggilingan sebesar Rp8.000 per kg dan HPP beras di gudang BULOG pada harga Rp12.000 per kg. Kebijakan ini juga digunakan untuk memastikan kesejahteraan petani dengan menjaga Nilai Tukar Petani (NTP) melalui penetapan HPP agar petani tetap mendapatkan harga yang layak terutama ketika harga gabah atau beras sedang turun. Dengan strategi ini, BULOG dapat berperan dalam menjaga pasokan beras yang memadai untuk program intervensi pasar, distribusi ke wilayah rawan pangan, serta mendukung program bantuan pangan bagi MBR.

BULOG juga memainkan peran penting dalam menstabilkan harga pangan untuk menjaga inflasi pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Inflasi pangan dimaksud berkisar 3-5 persen. Dengan demikian, peran BULOG tidak hanya menjaga stabilitas pangan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Strategi ekonomi fiskal terkait ketahanan pangan pada 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang tepat, insentif bagi sektor pertanian dan peternakan, serta penguatan infrastruktur pangan, Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan ketahanan pangan global dan membangun sistem pangan yang lebih inklusif, tangguh, dan

berkelanjutan. Kedepannya, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mampu menciptakan stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sekaligus meningkatkan daya saing sektor agribisnis di kancah internasional.

3.5.2. Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, strategi untuk meningkatkan ketahanan energi ditempuh dengan meningkatkan produksi *lifting* migas, menjaga stabilitas harga, mengakselerasi transisi ke energi baru terbarukan, serta akselerasi pengembangan ekonomi hijau. Ketahanan energi berperan kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor energi merupakan sumber penerimaan negara, pendukung kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi dari hulu sampai dengan hilir. Ketahanan energi dilihat dari empat kategori yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas. Ketahanan energi terjadi ketika negara memiliki akses kepada sumber energi secara berkelanjutan (ketersediaan) dengan didukung iklim investasi yang kondusif (aksesibilitas). Selain itu, kemampuan untuk menyediakan sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau (akseptabilitas) dengan harga terjangkau (keterjangkauan) menjadi syarat ketahanan energi.

Asesmen yang dilakukan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) berdasarkan empat kategori ketahanan energi tersebut, menunjukkan bahwa indeks ketahanan energi Indonesia pada tahun 2023, masih perlu diperkuat. Indeks tersebut dihitung berdasarkan beberapa parameter kebijakan antara lain: kebijakan harga khusus batubara untuk PT PLN (Persero), subsidi BBM, LPG 3kg dan listrik yang menjadikan harga energi terjangkau oleh masyarakat, serta porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi yang belum optimal.

Dalam mewujudkan ketahanan energi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. ***Lifting* migas Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir.** *Lifting* minyak bumi turun dari 707 ribu barel per hari (rbph) di 2020 menjadi 579,7 rbph di 2024. Sementara *lifting* gas turun dari 983 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) di 2020 menjadi 978,8 rbsmph di 2024. Menurunnya *lifting* migas menyebabkan Pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas.
2. **Sumber energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dengan porsi EBT baru mencapai 14,68 persen pada tahun 2024.** Sumber energi fosil meliputi Batubara (40,48 persen), Minyak Bumi (29,15 persen), dan Gas Bumi (15,69 persen).
3. **Pengembangan dan investasi EBT tidak secepat yang diharapkan dikarenakan berbagai faktor** antara lain daya tarik investasi dan infrastruktur EBT seperti jaringan transmisi yang masih terbatas.
4. **Subsidi dan kompensasi energi belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh golongan mampu,** sehingga berdampak pada besarnya anggaran subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung Pemerintah.

Kebijakan dalam Mencapai Ketahanan Energi

1. *Lifting* Migas

Untuk mencapai ketahanan energi, swasembada migas perlu diupayakan, antara lain melalui peningkatan *lifting* minyak bumi. Untuk meningkatkan *lifting* tersebut, Pemerintah akan melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi dan mendorong investasi sektor migas. Terdapat beberapa strategi peningkatan produksi yang dapat diterapkan Pemerintah. Pertama, Pemerintah dapat memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau *idle well*. Data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 16.990 sumur *idle* dari sekitar 40.000 sumur migas, yang mana sekitar 4.495 sumur *idle* dapat dioperasikan kembali (reaktivasi). Kedua, optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Teknologi EOR pada dasarnya digunakan untuk menguras minyak yang masih banyak tersisa di sumur (*reservoir*) yang belum dapat diangkat dengan metode produksi primer atau *primary recovery*. Ketiga, Pemerintah mengeksplorasi cadangan minyak baru. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi terbukti sekitar 2,41 miliar barel dan 35,3 *Trillion Cubic Feet* (TCF) gas. Wilayah Indonesia Timur memiliki potensi migas besar dengan lima fokus area eksplorasi migas, yaitu Buton, Timor, Seram, Aru, dan Warim.

Pemerintah berupaya meningkatkan *lifting* dengan mendorong investasi sektor hulu migas (produksi dan pengembangan). Upaya tersebut dilakukan dengan percepatan *Plan of Development* (PoD), fleksibilitas kontrak migas, penyederhanaan perizinan, dan dukungan fiskal. Dari sisi dukungan fiskal, Pemerintah memberikan pembebasan pajak tidak langsung baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas non perpajakan seperti perbaikan kontrak migas, misalnya dengan model baru *Gross Split* dengan bagi hasil untuk kontraktor mencapai 45-50 persen.

2. Energi Hijau

Dalam dua dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia terus mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia turut aktif dalam aksi global melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung transisi energi untuk mencapai tujuan jangka panjang menuju NZE. Strategi transisi energi yang lebih baik diwujudkan melalui perbaikan ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel.

a. Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

Pemerintah menetapkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus didasarkan pada prinsip manfaat, keberlanjutan, efisiensi yang adil, optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi, kemandirian, serta pelestarian lingkungan. Penetapan tersebut dilakukan Pemerintah melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Pengembangan pembangkit listrik dengan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional secara memadai, dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pembangkit listrik juga sejalan dengan upaya nasional dalam transisi energi menuju pencapaian NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan tetap mengutamakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

PLN mendukung prinsip-prinsip dalam RUKN dengan menyusun RUPTL yang menekankan pentingnya meningkatkan bauran EBT, jaringan transmisi dan distribusi yang andal, serta akses ketenagalistrikan untuk daerah terpencil. Untuk mengakselerasi transisi energi menuju energi hijau di sektor ketenagalistrikan serta perkembangan permintaan listrik yang signifikan pada tiga tahun terakhir, PLN tengah menyusun RUPTL baru 2025-2034.

RUPTL tersebut merencanakan pembangunan jaringan transmisi yang akan memastikan sumber-sumber energi terbarukan menjadi mudah diakses. Pembangunan transmisi ini akan dilengkapi dengan implementasi jaringan *smart grid* yang adaptif untuk monitoring dan kontrol *supply and demand* pada sistem tenaga listrik. Adanya *smart grid* akan membantu penetrasi energi terbarukan yang bersifat intermiten, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu. Dengan jaringan transmisi dan distribusi yang andal, maka Pemerintah dapat menargetkan penetrasi pembangkit energi terbarukan yang masif. Untuk itu, PLN menargetkan tambahan pembangkit sebesar 70 GW, dengan 72 persen di antaranya merupakan pembangkit listrik EBT. Dengan demikian, bauran EBT di sektor ketenagalistrikan akan mencapai 20 persen pada tahun 2029 dan 35 persen di tahun 2034.

RUPTL 2025-2034 membutuhkan investasi sekitar Rp2.800 triliun untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, gardu induk, listrik desa, serta biaya pemeliharaan. Sebagian besar investasi untuk sektor pembangkit bersumber dari swasta. Sementara untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, gardu induk, dan listrik desa akan dilaksanakan oleh PLN, mengingat sifatnya yang kurang komersial. Dukungan APBN tetap krusial bagi PLN dalam melaksanakan penugasannya di sektor ketenagalistrikan.

Boks 3. Transisi Energi dan Nilai Ekonomi Karbon

Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi energi sebagai bagian dari upaya mencapai target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu langkah strategis adalah melalui penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan pembaruan RUPTL 2021–2030 yang berorientasi pada energi hijau. RUPTL ini menargetkan lebih dari 50 persen tambahan kapasitas pembangkit berasal dari EBT yang mencerminkan arah kebijakan yang semakin berpihak pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batubara. Transformasi ini tidak hanya penting untuk mengurangi emisi GRK, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan teknologi bersih, penciptaan lapangan kerja hijau, dan penguatan ketahanan energi nasional.

Pembangunan rendah karbon juga menjadi kerangka utama dalam RPJMN 2025–2029, yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada delapan sektor utama, mulai dari penurunan emisi sektor energi dan sumber daya mineral, pengembangan transportasi hijau, hingga dekarbonisasi industri dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan, lahan, dan ekosistem karbon biru. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan tata kelola emisi, guna mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Untuk mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan percepatan transisi energi, Indonesia terus mendorong peningkatan akses terhadap pembiayaan perubahan iklim. Peningkatan akses tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen fiskal dan mekanisme keuangan yang inovatif. Pemerintah memainkan peran strategis dalam menyediakan kerangka pembiayaan yang adil dan terjangkau (*just and affordable transition*), termasuk melalui insentif fiskal, penerbitan *green bonds*, dan dukungan terhadap skema transisi energi seperti *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang memungkinkan pensiun dini pembangkit batubara. Upaya ini dipadukan dengan kebijakan yang tertuang dalam RUPTL hijau dan RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penurunan emisi GRK, peningkatan investasi hijau, serta penguatan tata kelola karbon di berbagai sektor seperti energi, transportasi, industri, dan kehutanan.

Indonesia juga terus mengembangkan kerangka kerja Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen pengendalian perubahan iklim berbasis pasar. Mekanisme ini berlandaskan hukum Perpres No. 98/2021 tentang NEK, yang memuat berbagai mekanisme seperti perdagangan karbon (*carbon trading*), pembayaran berbasis hasil (*result-based payment*), dan instrumen non-pasar lainnya. NEK dirancang untuk memberikan insentif finansial kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang berhasil menurunkan emisi GRK secara signifikan. Pada tahun 2023, Indonesia secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia, menandai dimulainya perdagangan kredit karbon di pasar domestik dan perluasan kerja sama menuju pasar internasional. Transisi energi dan pengembangan NEK merupakan dua pilar penting dalam transformasi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Pengembangan Program Biodiesel Mendukung Energi Hijau

Pemanfaatan biodiesel sebagai salah satu biofuel berbasis minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) terus didorong oleh Pemerintah. Hal itu dilakukan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor CPO terbesar di dunia. Porsi biodiesel dalam bahan bakar biosolar terus ditingkatkan secara bertahap dari 15 persen (B15) di 2015 menjadi 20 persen (B20) di 2016, kemudian B30 di 2020, B35 di 2023, dan terakhir B40 di 2025. Sepanjang 2023-2024, program B35 menunjukkan kenaikan penyaluran biodiesel sebesar 7,8 persen, yaitu dari 12,26 juta KL di tahun 2023 menjadi 13,15 juta KL di 2024. Penyaluran biodiesel 2024 mencapai 116,4 persen dari targetnya sebesar 11,3 juta KL. Program biodiesel diharapkan dapat berdampak positif pada penghematan devisa, pengurangan emisi GRK, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, meningkatnya pemanfaatan biodiesel membutuhkan dukungan finansial untuk menutup selisih harga yang muncul ketika harga biodiesel lebih tinggi dari solar. Dukungan tersebut berupa insentif yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS)—sejak Oktober 2024 berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dana insentif tersebut berasal dari hasil pungutan ekspor komoditas sawit. Pada tahun 2024 realisasi insentif biodiesel sebesar Rp29,38 triliun, meningkat signifikan sebesar 60,37 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh selisih harga biodiesel dan solar yang semakin melebar sepanjang 2024. Program pengembangan biodiesel melibatkan beberapa program lainnya seperti Program Sawit Rakyat, dukungan riset sektor sawit, dan pendidikan bagi petani.

Pemerintah mengimplementasikan program Mandatori B40 pada tahun 2025. Program tersebut didukung alokasi volume penyaluran 15,62 juta KL ke seluruh Indonesia dengan perkiraan insentif biodiesel sebesar Rp36,40 triliun. Insentif biodiesel pada tahun 2025 mulai diarahkan hanya untuk biosolar bersubsidi untuk mendukung program subsidi tepat sasaran.

Selain pengembangan biodiesel, Pemerintah juga berupaya melakukan pemanfaatan bahan bakar nabati lainnya seperti diesel hidrobiokarbon, bioetanol, dan bioavtur. Pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai energi hijau perlu ditingkatkan secara bertahap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, mempertimbangkan kaidah keteknikan, menjaga iklim usaha bahan bakar nabati dan lingkungan hidup.

3. Subsidi dan Kompensasi Energi Lebih Tepat Sasaran

Subsidi dan kompensasi energi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

APBN berperan sebagai *shock absorber*. Ketika harga komoditas energi melambung tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2022, APBN digunakan sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi dari risiko inflasi yang bersumber dari kenaikan harga komoditas global. Instrumen APBN yang dominan menjalankan peran tersebut adalah subsidi dan kompensasi energi. Implikasinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 mencapai Rp551,2 triliun (2,8 persen PDB) dari yang sebelumnya hanya Rp188,3 triliun (1,1 persen PDB) di tahun 2021.

Peran subsidi dan kompensasi energi sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dalam kondisi perekonomian yang normal, subsidi dan kompensasi energi didorong lebih tepat sasaran khususnya masyarakat miskin dan rentan. Namun di sisi lain, penyaluran subsidi dan kompensasi energi masih belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga peran APBN dalam menjalankan fungsi distribusi masih perlu didorong lebih optimal. Oleh karena itu, kebijakan subsidi dan kompensasi energi yang lebih tepat sasaran perlu didorong untuk APBN yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan kebijakan energi hijau untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mendorong pemanfaatan EBT, sehingga dapat mengurangi emisi GRK. Namun demikian upaya mendorong subsidi tepat sasaran tersebut senantiasa memerhatikan kondisi daya beli masyarakat dan momentum yang tepat.

Dalam jangka menengah, Pemerintah mendorong transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis target penerima manfaat. Harga komoditas energi dibentuk melalui mekanisme pasar sesuai harga keekonomian tanpa intervensi Pemerintah. Pemerintah berperan melindungi daya beli dan akses energi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan, baik berupa *cash transfer* ataupun *in-kind benefit*.

Dalam jangka pendek subsidi energi hanya diberikan kepada target sasaran penerima sesuai tujuan pemberian subsidi termasuk menjaga daya saing UMKM. Kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian konsumsi LPG Tabung 3kg dan BBM bersubsidi, *tariff adjustment* untuk pelanggan listrik nonsubsidi golongan rumah tangga kaya dan Pemerintah.

Transformasi subsidi dan kompensasi energi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sesuai dengan fungsi subsidi dan kompensasi energi sebagai *shock absorber* bagi perekonomian. Esensi utama dari transformasi subsidi dan kompensasi energi bukanlah efisiensi anggaran, melainkan mendorong peran APBN yang lebih berkeadilan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, utamanya masyarakat miskin dan rentan.

3.5.3. Makan Bergizi Gratis

Program MBG merupakan program unggulan Pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini sekaligus berperan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal dan penguatan SDM Indonesia. Dengan pendekatan menyeluruh, MBG diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal.

Program MBG berpotensi berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan gizi yang optimal bagi siswa dan santri diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi, kehadiran, dan prestasi akademik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, pemberian makanan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui merupakan langkah preventif dalam menekan angka *stunting* yang juga menjadi prioritas Pemerintah. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat dan produktif.

Program MBG juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Pelaksanaan program ini melibatkan UMKM dan petani/peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan memanfaatkan produk lokal, program ini juga mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa program serupa dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menargetkan empat kelompok penerima manfaat: siswa dan santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tahun pertama, program ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 17,9 juta penerima manfaat, yang terdiri atas 15,5 juta siswa di semua jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan SMA) serta 2,4 juta balita, ibu hamil/menyusui melalui 5000 SPPG. Setiap SPPG dirancang melayani sekitar 3.000-4.000 penerima manfaat dengan cakupan geografis sejauh 5 km atau sekitar 30 menit perjalanan. Terdapat dua mekanisme utama dalam pengelolaan SPPG, yaitu melalui skema swakelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan kontraktual dengan pihak ketiga. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun pertama, dengan komposisi terbesar dialokasikan pada belanja barang yang mencapai Rp51 triliun.

MBG mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025, mencakup 327.000 penerima manfaat di tahap awal dan terus diperluas secara bertahap. Sebanyak 109 SPPG telah

beroperasi di 26 provinsi dan akan terus bertambah hingga mencapai target 5.000 SPPG di seluruh provinsi pada akhir 2025. Pada tahap awal implementasi program MBG, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kesiapan kelembagaan terutama mengenai pemenuhan kebutuhan SDM di BGN maupun SPPG, mekanisme pembayaran kepada mitra, serta standar gizi dan kualitas makanan. Pemerintah secara aktif melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan guna mengatasi tantangan tersebut dan memastikan efektivitas program MBG.

Pemerintah akan mengakselerasi target cakupan program MBG, yang semula ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2029 menjadi target pada akhir 2025. Untuk itu, diperlukan sekitar 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ekspansi program MBG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknis di lapangan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah terus berupaya memperkuat kualitas pelaksanaan program MBG. Hal ini ditempuh melalui peningkatan standar gizi dan kualitas makanan serta pengawasan insentif terhadap higienitas dan sanitasi pengolahan makanan untuk menjaga standar mutu kualitas makanan. Selain itu, Pemerintah juga mendorong K/L untuk berkolaborasi dalam membantu pelaksanaan program MBG dengan BGN sebagai koordinatornya. Selanjutnya, ekonomi daerah semakin diberdayakan dengan mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal yang dibeli dari petani/peternak/UMKM lokal. Kapasitas UMKM yang terlibat perlu ditingkatkan antara lain dengan mempermudah akses UMKM ke permodalan.

Dalam jangka menengah, program MBG dapat berkontribusi positif pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Lebih jauh, program ini dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja baru.

3.5.4. Program Pendidikan

Pendidikan memegang peran krusial dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan SDM, pendidikan berkontribusi secara strategis terhadap pembangunan karakter dan peningkatan daya saing. Pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mengasah *critical thinking* yang diperlukan untuk menghadapi tantangan menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, peningkatan *link and match* dan mendorong penguatan PAUD, serta mendukung berbagai penguatan program unggulan antara lain sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk meningkatkan daya saing SDM sekaligus menjadikan pendidikan sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan.

Komitmen Pemerintah terhadap sektor pendidikan tecermin dalam alokasi *mandatory spending* sebesar 20 persen APBN. Anggaran pendidikan 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di sektor pendidikan, seperti MBG, Sekolah Unggul Garuda, dan Renovasi Sekolah. Dengan alokasi tersebut, anggaran pendidikan 2025 berkisar 2,98 persen PDB atau mengalami peningkatan dari 2024 (2,49 persen PDB) dan 2023 (2,46 persen PDB). Kenaikan ini diharapkan dapat

memperluas akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan capaian dan daya saing, serta menyelesaikan berbagai tantangan ke depan.

Partisipasi pendidikan di Indonesia cenderung meningkat di berbagai jenjang pendidikan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2024 menunjukkan sebanyak 53,32 juta anak telah menerima layanan pendidikan di seluruh jenjang, meningkat 0,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi (PT) juga mengalami peningkatan pada 2024. APK PT 2024 mencapai 32 persen atau meningkat dari capaian 2023 sebesar 31,45 persen. Selain itu, rata-rata lama sekolah di Indonesia juga mengalami peningkatan dari 8,77 (2023) menjadi 8,85 (2024). Kenaikan ini menjadi indikasi positif terhadap upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Meskipun APK PT mengalami kenaikan, masih dibutuhkan upaya menyeluruh untuk mengakselerasi capaian APK PT. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai 40 persen. Penyediaan akses ke perguruan tinggi yang masih terbatas perlu diperbaiki dengan menambah dan pemeratakan ketersediaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, terutama di daerah terpencil. Selain itu, intervensi Pemerintah dalam penyediaan biaya kuliah yang terjangkau juga harus dilakukan karena faktor ekonomi turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengakses perguruan tinggi. Pemerintah bersama sektor swasta perlu lebih bersinergi dalam penguatan program dan pendanaan pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan.

APK yang masih rendah tidak hanya terjadi pada jenjang perguruan tinggi, tetapi juga pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Data BPS menunjukkan bahwa APK PAUD 2024 hanya mencapai 36,03 persen, atau sekitar sepertiga dari APK SD 2024. Capaian ini bahkan menurun apabila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 36,36 persen, mengindikasikan akses dan partisipasi anak usia dini dalam pendidikan masih menghadapi tantangan serius. Padahal, PAUD memiliki peran yang strategis dalam membentuk fondasi perkembangan anak di usia emasnya, baik dalam hal kognitif, motorik, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dari Pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk meningkatkan akses dan kesadaran akan pentingnya PAUD agar lebih banyak anak Indonesia merasakan manfaat dari pendidikan usia dini yang berkualitas.

Kualitas pembelajaran di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun skor PISA 2022 menunjukkan kenaikan peringkat sebanyak lima posisi dibandingkan sebelumnya, pencapaian ini masih menyisakan tantangan lainnya. Skor di setiap aspek penilaian, yakni literasi membaca, sains, dan matematika justru mengalami penurunan. Selain itu, capaian ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menandakan adanya kesenjangan mutu pendidikan.

Permasalahan kualitas pembelajaran di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Untuk itu, solusi yang menyeluruh diperlukan, mencakup peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai, peningkatan akses serta keterjangkauan biaya pendidikan, hingga pemerataan infrastruktur digital seperti akses

internet yang andal. Selain itu, kurikulum pendidikan harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja di masa mendatang. Hal tersebut diharapkan membuat lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Tanpa upaya yang sistematis dan berkelanjutan, kesenjangan pendidikan akan semakin melebar dan menghambat kemajuan bangsa.

Pemerintah akan membangun “Sekolah Unggul Garuda”, yakni sekolah unggulan terintegrasi setingkat SMA serta “Sekolah Rakyat” yang ditujukan khusus bagi anak dari keluarga miskin ekstrem. Kedua program pendidikan ini dirancang untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekolah Unggul Garuda diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi bagi generasi muda berbakat, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Dengan kurikulum inovatif, sistem pembelajaran berkualitas, serta tenaga pengajar yang kompeten, program ini diproyeksikan melahirkan lulusan unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp2 triliun pada 2025 untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan akan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan di sektor pendidikan. Sementara itu, Sekolah Rakyat yang menggunakan sistem pendidikan berasrama diharapkan mampu mengintervensi berbagai permasalahan multidimensional yang dihadapi MBR, mulai dari mutu dan akses pendidikan, lingkungan belajar, hingga isu sosial ekonomi.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah juga berkomitmen mendorong implementasi “Wajib Belajar 13 Tahun” yang dimulai dari PAUD. Akses ke PAUD akan diperluas dan dipermudah dengan mengutamakan pemerataan antarwilayah dan keterjangkauan biaya. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong optimalisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan pemanfaatan Dana Desa. Pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas penitipan anak (*child care*), terutama di pusat bisnis dan kawasan industri. Dengan adanya *child care* dan PAUD yang terintegrasi, anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang lebih optimal, sementara orang tua dapat bekerja tanpa mengorbankan perkembangan anak. Investasi pendidikan usia dini bukan hanya menjadi langkah strategis dalam menciptakan SDM unggul, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan memastikan generasi penerus yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Strategi peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada akses dan metode pembelajaran, tetapi juga mencakup perbaikan sarpras pendukung. Pemerintah akan melaksanakan program “Renovasi Sekolah” secara masif yang menargetkan rehabilitasi 330 ribu sekolah sampai 2029. Sebagai langkah awal, sebanyak 20 ribu sekolah direncanakan dapat dilakukan rehabilitasi atau renovasi pada 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun. Perbaikan infrastruktur pendidikan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan kualitas sarpras sekolah antarwilayah. Dengan lingkungan belajar yang lebih layak, diharapkan kualitas pendidikan meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Pemerintah akan terus memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan dan berkomitmen untuk memenuhi *mandatory spending* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Secara nominal, alokasi anggaran Pendidikan pada lima tahun mendatang akan meningkat seiring dengan pertumbuhan APBN. Peningkatan ini akan dialokasikan untuk mengakomodasi PHTC yang bertujuan

mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional, seperti MBG, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan Renovasi Sekolah. Pemerintah juga akan berfokus pada penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan kesejahteraan yang lebih baik, serta digitalisasi sistem pendidikan guna mendukung pembelajaran yang lebih adaptif dan modern.

3.5.5. Program Kesehatan

Sektor kesehatan akan terus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Strategi untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas ditempuh dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan melindungi keuangan masyarakat sehingga beban biaya kesehatan masyarakat berkurang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan mulai dari dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemeriksaan kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta layanan kesehatan bagi lansia.

Arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) tahun 2025 – 2029. Saat ini, RIBK dalam proses penyusunan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mewujudkan visi “Masyarakat yang Sehat dan Produktif menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mendukung terlaksananya rencana induk kesehatan, Pemerintah berupaya menjaga anggaran kesehatan di atas 5 persen dari belanja negara. Selama 2023 dan 2024, Pemerintah telah merealisasikan anggaran kesehatan masing-masing mencapai 5,94 persen dan 5,79 persen terhadap belanja negara pada APBN tahun tersebut. Sementara itu, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp218,5 triliun pada 2025 atau 6,03 persen dari belanja negara. Dalam periode 2023-2025, rata-rata anggaran kesehatan berada pada kisaran 0,89 persen terhadap PDB, dan tumbuh secara nominal rata-rata sebesar 5,32 persen.

Seperti halnya pada sektor pendidikan, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sepanjang periode 2023 – 2024, porsi anggaran kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) masing-masing sebesar 65,7 persen dan 64,8 persen. Dukungan tersebut terutama dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI JKN), penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal, pemenuhan alat/obat kontrasepsi, serta pengendalian penyakit menular seperti Tuberkulosis. Dukungan pelayanan kesehatan untuk masyarakat juga bersumber dari TKD yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun porsi belanja kesehatan dari TKD sebesar 34,3 persen dan 35,2 persen pada periode yang sama, terutama dimanfaatkan untuk pembangunan sarpras kesehatan di daerah, pendanaan operasional puskesmas dan bantuan operasional program Keluarga Berencana (KB).

Berbagai program pembangunan kesehatan telah berkontribusi signifikan pada peningkatan kualitas kesehatan yang tecermin dari perbaikan capaian beberapa indikator kesehatan. Jumlah rumah sakit umum meningkat, dari 1.855 unit pada 2014 menjadi 2.636 unit pada 2023, sementara jumlah puskesmas bertambah dari 9.731 unit menjadi 10.416 unit pada periode yang sama. Peningkatan kualitas layanan kesehatan berdampak pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH), dari 70,59 tahun pada 2014 menjadi 72,13 tahun pada 2023.

Berbagai tantangan di sektor kesehatan ke depan masih memerlukan perhatian, terutama terkait dengan *stunting*, fasilitas kesehatan, dan penyakit tidak menular. Salah satu isu krusial adalah penurunan prevalensi *stunting* yang cenderung stagnan. Penurunan *stunting* pada 2023 hanya sebesar 0,10 persen (yoy), sehingga membutuhkan upaya ekstra untuk mencapai target prevalensi *stunting* pada 2029 sebesar 14,4 persen. Di samping itu, peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes melitus dan obesitas menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Prevalensi diabetes melitus meningkat dari 10,9 persen (2018) menjadi 11,7 persen (2023), sementara prevalensi obesitas meningkat dari 21,8 persen (2018) menjadi 23,4 persen (2023). Tren ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah karena populasi Indonesia yang cenderung semakin menua. Peningkatan risiko penyakit serta *aging population* di Indonesia dapat menghadirkan beban tambahan bagi pembiayaan kesehatan, terutama melalui JKN. Dari sisi fasilitas kesehatan, rasio puskesmas per kecamatan selama periode 2019-2023 pun cenderung stagnan. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan dapat berdampak pada akses layanan kesehatan yang tidak merata, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengatasinya.

Seiring dengan berbagai tantangan pada masa depan, Pemerintah menyusun strategi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program kesehatan. Pemerataan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis, terutama di daerah 3T, menjadi langkah krusial untuk memastikan akses layanan yang lebih adil dan merata. Peningkatan penyakit tidak menular akibat pola hidup sedenter serta ancaman penyakit menular akibat perubahan iklim harus diantisipasi dengan memperkuat upaya preventif dan promotif. Langkah strategis yang diperlukan mencakup perluasan pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi dan gaya hidup sehat, pembangunan sarana sanitasi dan air bersih, serta optimalisasi program imunisasi. Selain itu, stagnasi dalam penurunan prevalensi *stunting* memerlukan kebijakan yang lebih efektif dalam perbaikan gizi dan pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil dan balita. Salah satu langkah konkret adalah melalui program MBG bagi anak balita serta ibu hamil dan menyusui. Di sisi lain, Pemerintah berkomitmen memperkuat upaya kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi alat kesehatan dan bahan baku obat. Selain itu, keandalan laboratorium pengujian alat kesehatan akan terus ditingkatkan guna memastikan standar keamanan dan efektivitas produk dalam negeri.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan sektor kesehatan dan mencapai berbagai target sasaran pembangunan melalui dukungan anggaran kesehatan. Dalam lima tahun ke depan, anggaran kesehatan akan dijaga pada kisaran 5–6 persen dari total belanja negara. Anggaran ini juga dialokasikan untuk mendukung berbagai program unggulan di sektor kesehatan guna meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat. Adapun program unggulan tersebut adalah bagian dari PHTC, yaitu Cek Kesehatan Gratis, Pemberantasan TB, dan Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas.

Pemerintah juga akan terus memperkuat program JKN terutama melalui bantuan iuran bagi PBI JKN guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah memberikan bantuan iuran kepada 96,7 juta jiwa dari kelompok masyarakat miskin dan rentan atau 40 persen penduduk berpenghasilan terendah. Pada 2025, pemberian PBI JKN menjadi porsi terbesar dalam anggaran kesehatan, yaitu mencapai 22 persen. Namun, dalam lima tahun ke depan, bantuan premi iuran diharapkan dapat menurun secara bertahap seiring dengan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan dukungan khusus bagi tenaga kesehatan

sebagai pendukung utama layanan kesehatan, yaitu berupa gaji, tunjangan, pelatihan, beasiswa kedokteran, dan tunjangan terkait dengan penugasan khusus. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan yang profesional dan merata, proporsi anggaran untuk penguatan kapasitas tenaga kesehatan diproyeksikan terus meningkat dalam lima tahun mendatang.

3.5.6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Peran desa dalam pembangunan terus diperkuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Tingkat kemajuan suatu desa dapat diukur salah satunya melalui indikator Indeks Desa yang mengelompokkan status desa dalam 5 kelompok yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Pada tahun 2024, status desa semakin membaik. Jumlah desa mandiri dan desa maju meningkat. Pada tahun 2024, jumlah desa mandiri sebanyak 17.023 desa, bertambah sebanyak 13.745 desa atau 419,3 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal terus menurun. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan di desa juga terus menunjukkan perbaikan dari 13,1 persen di tahun 2021 menjadi 11,8 persen di tahun 2024.

Pembangunan desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat kemiskinan di perdesaan tergolong cukup tinggi, yakni mencapai 11,8 persen dibandingkan perkotaan yang mencapai 7,09 persen (BPS, 2024). Lebih dari separuh penduduk miskin (55,4 persen) tinggal di desa. Selain itu, masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan layanan dasar antara desa dan kota. Pemerintah desa juga perlu memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas penggunaan anggaran desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan desa dari desa dan dari bawah merupakan prioritas nasional dalam jangka menengah (2025-2029). Pembangunan desa akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar publik, termasuk perumahan dan pemukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas. Selain itu, pembangunan desa juga diprioritaskan untuk transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, penguatan lembaga ekonomi desa, dan pengelolaan perubahan iklim. Tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan pembangunan desa yang adaptif akan terus diperkuat.

Dalam rangka memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah merumuskan sejumlah strategi komprehensif untuk periode 2025-2029. Strategi tersebut antara lain mencakup peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi melalui pengembangan sektor produksi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi prioritas, seiring dengan perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi UMKM dan Koperasi. Upaya ini turut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dan Koperasi dalam rantai nilai komoditas unggulan nasional dan mendorong peningkatan mutu produk.

Penguatan kewirausahaan juga menjadi salah satu pilar utama strategi pembangunan UMKM dan Koperasi. Hal ini dilakukan melalui penyediaan ekosistem kewirausahaan

yang kondusif, termasuk inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha serta memastikan integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pelaku usaha.

Sebagai bentuk intervensi afirmatif untuk mendorong UMKM naik kelas, Pemerintah akan mendorong transformasi UMKM ke kelompok menengah. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan standar program pemberdayaan yang terukur dan terintegrasi, pemanfaatan data dari Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan pelaku usaha. Sistem informasi berbasis digital juga akan dikembangkan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi yang akuntabel.

Selaras dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai strategi nasional dalam rangka pemberdayaan desa sehingga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan terbentuk untuk penguatan usaha masyarakat. Pendekatan ini mencakup pembentukan koperasi baru, penguatan koperasi aktif, serta revitalisasi koperasi tidak aktif, disertai model bisnis berbasis kawasan dan dukungan digitalisasi. Kedepan penguatan Koperasi Desa Merah Putih akan terus diperkuat untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan desa mandiri, memperkuat ketahanan pangan serta mewujudkan kesejahteraan. Koperasi Desa Merah Putih juga akan didorong menjadi simpul produksi, pengolahan, dan distribusi produk lokal yang berdaya saing, dengan penguatan kelembagaan, pelatihan manajerial, integrasi ke dalam rantai pasok nasional, dan dukungan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah. Pada tahun 2025, Pemerintah berkomitmen untuk membentuk 80.000 koperasi disetiap desa/kelurahan dengan melakukan pengembangan koperasi yang ada, pembentukan koperasi baru serta revitalisasi koperasi yang selama ini tidak aktif. Dukungan fiskal dalam penguatan koperasi tersebut, melalui APBN, APBD, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap berkomitmen mendukung agar unit usaha yang dijalankan dapat berjalan optimal dengan ditopang tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel.

3.5.7. Pertahanan Semesta

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 butir 1, pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan dimaksud dipersiapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan semesta (Sishanta) merupakan implementasi dari UUD 1945 pasal 30 yang menegaskan bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya institusi militer tetapi juga sebuah sistem yang mengintegrasikan kekuatan nasional secara menyeluruh.

Salah satu ukuran untuk mengetahui peta kekuatan militer Indonesia adalah *Asia Power Index*. Berdasarkan *Asia Power Index* tahun 2024, kekuatan militer Indonesia

berada di peringkat 13 dari 27 negara dengan skor 15,7. Dalam posisi tersebut, indikator anggaran pertahanan Indonesia berada pada peringkat 11 dengan skor 1,5. Indikator personel militer Indonesia berada pada peringkat 10 dengan skor 23,6. Indikator peralatan militer Indonesia berada pada peringkat 13 dengan skor 8. Sedangkan Indikator kapasitas khusus yang mengukur fitur spesial dan kekuatan strategis dalam peperangan menempati peringkat 13 dengan skor 14,7.

Pertahanan Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, dinamika geopolitik dan potensi eskalasi ketegangan di kawasan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan, termasuk Indonesia. Kedua, Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dari dalam negeri dan luar negeri. Ketiga, teknologi maju, trafik data anomali, dan ancaman siber. Keempat, ancaman pada wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur strategis perairan. Kelima, anggaran pertahanan Indonesia yang masih di bawah 1 persen dari PDB dinilai belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. Keenam, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih terbatas dari segi jumlah dan kualitas.

Anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2013-2022 rata-rata sebesar 0,8 persen PDB yang menempati peringkat 29 dari 175 negara (data World Bank). Nilai ini masih jauh lebih rendah dari rata-rata anggaran pertahanan negara-negara *Upper Middle Income* yang mencapai 1,6 persen PDB. Pada tahun 2025-2029, anggaran pertahanan ditargetkan terus meningkat yang harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pertahanan.

Strategi kebijakan jangka menengah untuk penguatan sistem pertahanan yang tangguh dan responsif dalam menghadapi berbagai ancaman, adalah sebagai berikut:

1. Modernisasi Alpalhankam untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara dan meningkatkan daya gentar Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan.
2. Meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor peralatan militer dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri.
3. Memperkuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
4. Penguatan area ALKI, *Air Defence Identification Zone* (ADIZ), dan skenario area *Choke and Flash Point*.
5. Memperkuat keamanan siber dalam menjaga ketahanan negara di era digital.
6. Penguatan diplomasi internasional prajurit TNI.
7. Penguatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penguasaan teknologi.

3.5.8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global

Investasi memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat dalam kurun 5 tahun terakhir (2020-2024) investasi telah memberikan andil 30,0 persen terhadap perekonomian nasional. Capaian investasi Indonesia yang cukup baik juga terlihat dari catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan realisasi investasi 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun melampaui target yang ditetapkan. Kepercayaan investor global terhadap Indonesia juga tecermin dari andil PMA yang mencapai 52,5 persen melebihi andil PMDN. Pentingnya investasi bagi perekonomian Indonesia tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi,

tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Investasi 2024 menciptakan lapangan kerja baru, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang. Oleh karena itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional jangka menengah ke level 8 persen pada 2029, kinerja investasi perlu terus diakselerasi untuk mencapai angka pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Indonesia menerapkan strategi komprehensif untuk menarik investasi produktif dalam rantai nilai global. Pemerintah telah memulai dengan menerapkan beberapa strategi untuk mempercepat investasi, melalui reformasi struktural dengan deregulasi dan kemudahan perizinan melalui *omnibus law*, konsolidasi perizinan, dan digitalisasi layanan seperti *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Insentif fiskal seperti *tax allowance* dan *tax holiday* diberikan untuk industri padat karya dan energi terbarukan, sementara pembiayaan inovatif memanfaatkan dana sosial syariah dan obligasi hijau. Sektor keuangan diperkuat melalui pendalaman pasar modal dan perbankan. Investasi juga difokuskan pada sektor berorientasi ekspor, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan industri berbasis SDA. Pemerintah juga terus memperkuat diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama dalam akses pasar global.

Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai lembaga pengelola aset negara dan manajer investasi Pemerintah, memperkuat upaya percepatan di sisi investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Danantara diharapkan memainkan peran sebagai *super holding* bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menggantikan peran Kementerian BUMN yang nantinya akan lebih banyak mengambil porsi sebagai regulator. Tujuannya adalah membangun sinergi dan efisiensi antarentitas BUMN guna menciptakan pengelolaan aset dan investasi yang lebih terintegrasi, profesional, dan produktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Boks 4. Danantara untuk Penguatan Tata Kelola BUMN serta Akselerasi Investasi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai *super holding* BUMN menjadi bagian dari strategi penguatan pengelolaan aset dan investasi negara. Secara struktur organisasi, di bawah Chief Executive Officer (CEO) Danantara terdapat dua fungsi yang menggambarkan dua tugas utama Danantara, yaitu ***Chief Operating Officer (COO)*** dan ***Chief Investment Officer (CIO)***. Struktur ini dirancang untuk mendorong kolaborasi operasional serta optimalisasi investasi secara terarah dan terukur. COO membangun sinergi dan efisiensi antarentitas BUMN dalam rangka menciptakan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, profesional, dan produktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang ditetapkan Pemerintah.

CIO memegang peran penting dalam mengelola dan mengarahkan investasi strategis dengan fungsi Danantara sebagai *super holding* BUMN. CIO memastikan bahwa setiap alokasi modal mendukung pertumbuhan bernilai tambah tinggi dalam jangka panjang, termasuk memperkuat posisi Indonesia di dalam rantai pasok global. Fungsi investasi ini diarahkan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan modal di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki Pemerintah. Danantara juga berperan mengoptimalkan aset strategis dalam menarik partisipasi (*leverage*) investasi swasta, baik domestik maupun asing, melalui berbagai bentuk kemitraan. Lembaga ini juga menjalankan fungsi untuk mendukung kebutuhan pendanaan Pemerintah dalam jangka panjang, termasuk sebagai *anchor investor* untuk proyek strategis nasional (PSN).

Peran Danantara menjadi sangat krusial dalam konteks meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk proyek prioritas, terutama untuk mencapai pertumbuhan tinggi dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Fokus investasi diarahkan untuk sektor yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian dan memperkuat posisi Indonesia di dalam *global value chain*. Sektor yang menjadi target dari investasi Danantara antara lain hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, hulu yang memiliki nilai strategis di tingkat global, serta ketahanan pangan. Berkembangnya sektor-sektor tersebut, dengan Danantara sebagai motor utama pendukung investasi, akan mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat keseimbangan eksternal perekonomian.

Beberapa fitur utama Danantara mencakup mandat melihat ekosistem BUMN dari perspektif *helicopter view*. Dengan mandat tersebut, Danantara secara transparan memastikan adanya konsolidasi investasi untuk menghindari tumpang tindih alokasi sumber daya serta penguatan pengelolaan aset melalui pendekatan profesional dan terstandarisasi. Melalui pendekatan secara *helicopter view*, keberadaan Danantara juga diarahkan untuk dapat memperbaiki performa keuangan BUMN secara keseluruhan.

Dari sisi pembiayaan atau permodalan, seiring dengan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, pengelolaan dividen BUMN yang sebelumnya masuk APBN sebagai PNPB kini dialihkan pengelolaannya ke Danantara yang berperan sebagai lembaga pengelola aset dan investasi agar lebih produktif yang diselaraskan dengan agenda pembangunan. Lebih lanjut, Danantara berperan sebagai SWF yang mengoptimalkan kekayaan negara dengan tata kelola transparan dan akuntabel untuk mendukung kemandirian ekonomi, dan menjamin masa depan Indonesia.

Secara menyeluruh, kehadiran Danantara merepresentasikan inisiatif reformasi struktural yang signifikan dalam memperkuat daya saing serta memastikan keberlanjutan kinerja BUMN. Dengan pendekatan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada pencapaian hasil, Danantara diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

Selain penguatan kinerja sektor usaha melalui dukungan investasi Danantara dan berbagai insentif fiskal, Pemerintah juga mengarah pada investasi yang lebih produktif dalam perspektif yang lebih struktural. Investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi yang lebih efisien, serta penyempurnaan regulasi juga menjadi fokus Pemerintah. Investasi yang bersifat struktural ini bertujuan mempercepat perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, di samping strategi penguatan nilai tambah investasi melalui Danantara. Menurunnya ICOR mencerminkan semakin efisiennya investasi dalam menghasilkan *output* ekonomi.

Pembangunan infrastruktur dan kawasan yang terintegrasi akan tetap menjadi pilar utama dalam strategi mendorong investasi. Konektivitas, transisi energi, dan transformasi digital akan menjadi prioritas melalui PSN. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi kesenjangan antardaerah sekaligus memperkuat integrasi pasar domestik dan mendukung industri berorientasi ekspor. Kolaborasi antara swasta, BUMN, dan Pemerintah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga terus melanjutkan

komitmen mencapai *net-zero emission* pada 2060. Investor asing akan dilibatkan termasuk melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP), sehingga semakin memperkuat transisi Indonesia menuju infrastruktur energi bersih. Secara keseluruhan, di tengah berbagai ekspansi investasi, tantangan seperti risiko geopolitik, keterbatasan APBN, dan daya dukung lingkungan harus diantisipasi dengan baik. Deforestasi juga terus dibatasi untuk menjaga keberlanjutan ekologis.

Upaya strategis untuk memperkuat konektivitas ekonomi nasional dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan perdagangan domestik dan antarwilayah, melainkan juga daya saing perdagangan global. Dengan memperlancar arus barang dan jasa antarwilayah, efisiensi distribusi dapat meningkat, menciptakan sinergi antardaerah, dan memperluas basis produksi nasional. Hal ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kapasitas ekspor, khususnya produk bernilai tambah, yang selanjutnya membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam rantai nilai global (*Global Value Chains/GVC*). Partisipasi yang lebih dalam pada GVC akan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dalam sistem perdagangan internasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal.

Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mendorong perdagangan global. Langkah-langkah tersebut meliputi pemberian akses pasar global melalui kerja sama internasional, yang membuka peluang lebih luas bagi produk dalam negeri untuk bersaing di kancah internasional. Di samping itu, Pemerintah juga berfokus pada peningkatan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan, serta peningkatan likuiditas, yang secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi melalui interaksi global. Meskipun demikian, kebijakan perlindungan produk domestik juga diterapkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyeimbangkan antara penguatan industri dalam negeri dan partisipasi aktif dalam perdagangan internasional.

3.6. Kerangka Strategi Ekonomi dan Fiskal Jangka Menengah

3.6.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur Makro Fiskal

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui **penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas.** Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang $2,5 \pm 1$ persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta *stakeholders* terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah.

Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank *bullion* (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan

daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik.

Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (*yield*) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, *yield* SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan *yield* pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan *yield* SBN ke depan.

Faktor lain yang turut berdampak pada nilai *yield* SBN adalah pengaruh *yield* obligasi *benchmark* global, dalam hal ini *US treasury (UST) bond*. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan *yield* dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan *yield* UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada *yield* SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan *lifting* migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan *Full Scale Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan teknologi *waterflood*. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui *Chemical EOR* (CEOR), serta injeksi CO₂ (CO₂-EOR) dan *waterflood* (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan *Full Scale EOR* telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan *lifting* dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan

lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude-oil Price/ICP*). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.

Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8	5,3-6,1	5,6-7,0	5,8-8,0
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2	6,3-7,3	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	600-605	568-696	567-792	578-901
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1017	904-1.118	1.023-1.345	1.110-1.539

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah di atas, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran jangka menengah. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal Jangka Menengah sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut.

Tabel 2. Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	APBN 2025	KEM-PPKF 2026		2027		2028		2029	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	12,36	11,71	12,22	11,70	13,21	12,12	14,94	12,86	16,76
1. Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,45	10,29	11,39	10,75	13,13	11,52	15,01
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76	1,40	1,81	1,36	1,81	1,33	1,76
3. Hibah	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003
B. BELANJA NEGARA	14,89	14,19	14,75	14,05	15,68	14,44	17,35	15,10	19,11
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,86	11,29	12,88	11,70	14,59	12,38	16,37
2. Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89	2,76	2,80	2,74	2,76	2,72	2,74
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(0,26)	(0,18)	(0,22)	(0,09)	(0,18)	(0,09)	(0,15)	(0,05)	(0,13)
D. DEFISIT ANGGARAN	(2,53)	(2,48)	(2,53)	(2,35)	(2,47)	(2,32)	(2,41)	(2,24)	(2,35)
E. PEMBIAYAAN	2,53	2,48	2,53	2,35	2,47	2,32	2,41	2,24	2,35
<i>Debt Ratio</i>	39,43	39,69	39,85	39,43	39,62	39,05	39,29	38,55	38,64

Sumber: Kementerian Keuangan

3.6.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan menjadi fondasi penting dalam membangun arah transformasi nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pada tahap awal ini, agenda pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran nasional, guna mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pembangunan nasional ditargetkan terus membaik dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,00 – 4,71 persen di 2029. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat kemiskinan juga ditargetkan akan turun ke level 4,5 – 5,0 persen di 2029. Penurunan tingkat kemiskinan juga dibarengi dengan upaya memperbaiki Rasio Gini ke tren yang lebih merata, yaitu mencapai 0,372– 0,375 di 2029. Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat melalui integrasi data dengan adanya data tunggal kemiskinan untuk peningkatan ketepatan sasaran, serta digitalisasi bantuan dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pembangunan kualitas SDM diarahkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi jangka panjang. Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dilakukan secara bertahap melalui perluasan program peningkatan kualitas SDM serta peningkatan standar hidup layak penduduk. Fokus kebijakan ditujukan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. IMM ditargetkan sebesar 0,59 di 2029 lebih meningkatkan daya saing SDM Indonesia dalam menjawab tantangan industri dan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indikator	2025	2026	2029
	APBN	KEM-PPKF	Target
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0	0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	6,5 – 7,5	4,5 – 5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 – 5,00	4,44 – 4,96	4,00 – 4,71
Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,380	0,372 – 0,375
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,57	0,59

Sumber: RPJMN 2025-2029

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

ARAH DAN STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL TAHUN 2026

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua,

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

4.1. Strategi Ekonomi Makro Tahun 2026

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

4.1.1. Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 - 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan *pro-growth* diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah. Dengan didukung oleh pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang *prudent* dan tetap sehat, diperkirakan akan terus mendorong perspektif positif dari investor sehingga dapat menjaga pergerakan *yield* SBN. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan pergerakan *yield* tetap terkendali. Kebijakan moneter yang akomodatif namun tetap berhati-hati dapat membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Di sisi lain, optimalisasi strategi penerbitan SBN serta penguatan pasar keuangan dapat meningkatkan likuiditas dan pergerakan pasar obligasi domestik.

4.1.2. Inflasi

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

Tercapainya inflasi pada target sasaran perlu didukung oleh terkendalinya inflasi di masa Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu pada masa permintaan yang meningkat di tengah tantangan suplai dan distribusi. Inflasi inti terus didorong tumbuh agar mencerminkan tetap kuatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah tantangan cuaca dan perubahan iklim. Berbagai strategi yang dilakukan mencakup sisi hulu hingga

hilir, antara lain operasi pasar, pasar murah, fasilitasi distribusi, intervensi pasokan dan harga, dan perbaikan infrastruktur.

Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dukungan data yang semakin kredibel memadai terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi agar tetap positif.

4.1.3. Indonesian Crude-oil Price

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi harga minyak mentah dunia. Ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya ini telah menciptakan ketidakpastian global, yang menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan minyak mentah, yang kemudian mempengaruhi harga. Perubahan pola perdagangan juga dapat terjadi sebagai akibat dari perang dagang ini.

Tantangan juga berasal dari sisi suplai dan *demand* yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperti Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong peningkatan suplai minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis *non-fossil fuel* juga cukup mereduksi permintaan minyak global.

Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD60 - USD80 per barel. Dalam skenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.

4.1.4. Lifting Migas

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian *lifting* migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan *lifting* migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan *shutdown* fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian *lifting* migas tahun 2025.

Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *lifting* migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur *idle* yang belum beroperasi, serta percepatan proyek EOR di beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan *lifting* tersebut,

capaian *lifting* migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 600-605 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.

4.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion* dan *trade creation*). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

4.2. Fokus Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, dukungan fiskal dan investasi perlu ditingkatkan. Salah satu dukungan Pemerintah yaitu melalui anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan tiap tahun. Fokus penggunaan anggaran ketahanan pangan tersebut mencakup subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, subsidi bunga KUR, penguatan infrastruktur pertanian, serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pendekatan kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta juga perlu terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian dan peternakan, guna memastikan optimalisasi penggunaan anggaran negara serta meningkatkan efisiensi dalam implementasi kebijakan.

Pemerintah juga akan mendorong peningkatan produktivitas produksi pangan. Untuk beras, perluasan lahan 0,31 juta hektar dan peningkatan produktivitas padi menjadi 5,4 ton/ha menjadi target utama 2026. Peningkatan ini akan diiringi pembangunan infrastruktur irigasi, mekanisasi pertanian, serta adopsi teknologi modern dan benih unggul. Sementara itu, BULOG akan memainkan peran strategis dalam menjaga stok beras nasional sebesar 3 juta ton, menjaga stabilitas harga melalui skema HPP, dan menyalurkan program SPHP untuk menjaga inflasi pangan dalam kisaran 3–5 persen. Untuk daging sapi dan susu, Pemerintah akan mengembangkan peternakan skala besar, dengan kebutuhan impor awal

sekitar 1 juta sapi pedaging dan 1.294 sapi perah di tahun 2026. Investasi dari APBN dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini. Produksi jagung juga perlu ditingkatkan untuk mendukung industri pakan dan program gizi nasional. Target produksi 2026 sebesar 23 juta ton akan dicapai melalui perluasan lahan hingga 2,68 juta hektar dan peningkatan produktivitas menjadi 6,18 ton/ha. Dukungan berupa embung, sumur pompa, benih unggul, dan mekanisasi pertanian akan diperkuat.

Dalam konteks ketahanan energi, pada tahun 2026 Pemerintah akan melanjutkan kebijakan program mandatori biodiesel B40 dan tetap mempersiapkan akselerasi pengembangan menuju B50. Program B40 adalah program pemerintah untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) yaitu biodiesel yang berbahan baku minyak kelapa sawit sebesar 40 persen. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah juga mempersiapkan serangkaian pengujian untuk pengembangan B50. Pengujian dilakukan baik pada sektor otomotif maupun non otomotif, seperti alat dan mesin pertanian, alat-alat berat, kereta api, pembangkit listrik, dan angkutan laut. Di Indonesia, pengembangan biodiesel dimulai sejak tahun 2006 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sejak saat itu, produksi biodiesel kelapa sawit di Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu negara produsen biodiesel kelapa sawit terbesar di dunia.

Peningkatan produksi biodiesel menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga permintaan CPO domestik dan mendukung ketahanan energi. Pemanfaatan biodiesel yang dicampur dengan bahan bakar fosil solar perlu mempertimbangkan antara lain: (i) ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang; (ii) kesiapan kompatibilitas teknis mesin pengguna dan penyesuaian infrastruktur penyimpanan dan distribusi; (iii) harga biodiesel yang cenderung lebih mahal dibandingkan BBM fosil; serta (iv) keberlanjutan keuangan BPDP dalam memberikan insentif biodiesel. Sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia saat ini memprioritaskan pengembangan biodiesel dalam kebijakan hilirisasi kelapa sawit sebagai upaya mengurangi impor BBM, mengurangi emisi GRK, dan memperkuat permintaan domestik. Dengan penguatan permintaan domestik diharapkan dapat memperkuat stabilitas harga sawit dan CPO di dalam negeri serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Langkah-langkah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan seperti biodiesel harus terus dilakukan bersama-sama antara produsen biodiesel, produsen biosolar, pemerintah, serta masyarakat.

Program MBG terus digulirkan secara bertahap sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat. Pemerintah akan terus melanjutkan implementasi program MBG sebagai salah satu program unggulan pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit SPPG, dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Alokasi anggaran program MBG 2026 diproyeksikan sekitar 1,0 persen PDB untuk penyediaan makanan bergizi, pembangunan dapur dan sarana prasarana serta pelaksanaan program dukungan manajemen. Dengan alokasi anggaran yang signifikan dan cakupan penerima manfaat yang luas, program MBG membutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi berbagai pihak dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator menjadi kunci untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk

terus memperkuat dampak MBG terhadap gizi masyarakat melalui peningkatan standar gizi, higienitas pengolahan makanan, serta edukasi pola makan gizi seimbang. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan penggunaan sumber pangan lokal guna memperbesar stimulus pada ekonomi mikro-kecil agar semakin berdaya. Implementasi beberapa strategi tersebut perlu terus disempurnakan melalui upaya penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu, baik dari sisi anggaran, pensasaran, pencapaian *outcome*, maupun isu sensitif lainnya.

Komitmen Pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan tecermin dari terjaganya porsi belanja pendidikan dan dilanjutkannya program-program unggulan. Pemerintah akan mendorong perluasan Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Sekolah Rakyat, dan akselerasi program renovasi sekolah pada 2026. Selain sebagai pusat pengembangan bakat, kompetensi, dan prestasi para siswa, Sekolah Unggul Garuda juga akan difokuskan untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat yang diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Beban pengeluaran rumah tangga diharapkan akan berkurang karena Sekolah Rakyat menggunakan konsep *boarding school*. Anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu mengasah bakat, minat, dan keahliannya sehingga setelah lulus mampu berdikari dan memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. Pembangunan Sekolah Rakyat yang dimulai pada 2025 direncanakan terus diperkuat pada 2026. Pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat selesai dibangun pada 2025 dan siap digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026. Program renovasi sekolah rusak dan kurang layak juga dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah ada. Dengan demikian, sinergi antara program Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat dan renovasi sekolah rusak akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua, mulai dari dalam kandungan hingga lansia. Upaya tersebut dicapai melalui berbagai program pembangunan kesehatan termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta peningkatan kuantitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan. Program CKG menjadi upaya preventif atau deteksi dini penyakit dan diharapkan mampu menekan beban biaya kesehatan. Program ini juga mendorong peningkatan literasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Program CKG mulai dilaksanakan pada 2025 dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Pada 2026 diharapkan program CKG dapat terus dilaksanakan dengan perbaikan layanan di Fasilitas Layanan Tingkat Pertama (FKTP) dan peningkatan cakupan penerima manfaat, dengan target cakupan sebesar 46 persen dari total penduduk. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan. FKTP yang bermutu dan tersebar secara merata akan mengurangi beban pelayanan di rumah sakit sehingga akan berkontribusi pada efisiensi pembiayaan kesehatan, baik terhadap anggaran JKN maupun pengeluaran langsung masyarakat (*out-of-pocket spending*). Selain itu, akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil akan mengurangi disparitas dan meningkatkan keadilan layanan kesehatan.

Pada tahun 2026, pembangunan desa akan fokus pada percepatan permberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal. Pembangunan desa

tersebut bertujuan untuk percepatan pemerataan ekonomi sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan percepatan peningkatan status desa. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar publik desa dilaksanakan melalui penyediaan akses air bersih dan pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi warga miskin melalui program padat karya tunai desa. Selain itu, infrastruktur digital dan teknologi juga akan terus diperkuat. Pemerintah juga melanjutkan program penanganan *stunting* antara lain melalui revitalisasi pos kesehatan desa dan kampanye hidup sehat.

Peran koperasi diperkuat sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, akan dilakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih. Hal tersebut dilakukan melalui pembangunan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi bagi koperasi yang tidak aktif. Koperasi Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkeadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, koperasi juga akan menjadi solusi terhadap minimnya akses pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan wilayah, dan kemiskinan ekstrem desa. Pada tahun 2026, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan dukungan fiskal dalam pengembangan usaha Koperasi Merah Putih melalui berbagai program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi gejala global. UMKM yang mencakup lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka mendukung UMKM, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan melalui program KUR, Ultra Mikro (UMi), dan penyaluran melalui Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian UMKM serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang disertai insentif perpajakan dan program pendampingan terpadu.

Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara, pada tahun 2026 Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan postur pertahanan melalui pendekatan *optimum essential force*, serta pemenuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Industri pertahanan dalam negeri akan terus diintensifkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dengan dukungan teknologi dan produksi dalam negeri. Kemampuan teritorial pertahanan negara juga akan terus diperkuat. Selain itu, Pemerintah akan meningkatkan kesiapan komponen cadangan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah telah menyiapkan dan akan terus memberikan dukungan penyediaan insentif fiskal untuk mendorong peningkatan dan percepatan investasi, diantaranya dengan pemberian berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Percepatan investasi juga diharapkan mendukung upaya pemerataan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan peran serta Indonesia dalam rantai pasok global. Percepatan investasi menjadi salah satu upaya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing.

Dengan percepatan investasi tersebut diharapkan akan meningkatkan aktivitas dan kemandirian ekonomi nasional.

Untuk mempercepat masuknya investasi berkualitas tinggi di berbagai sektor strategis dan pengelolaan aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pemerintah membentuk BPI Danantara. Badan ini akan berfungsi sebagai lembaga pengelola investasi pemerintah yang menggabungkan dan mengelola aset-aset negara, termasuk BUMN. Dengan mengelola aset BUMN, BPI Danantara bertujuan mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BPI Danantara berfungsi sebagai platform investasi nasional yang fokus pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, kesehatan, dan teknologi. Pengintegrasian aset penting dari berbagai BUMN untuk dikelola oleh BPI Danantara menciptakan sinergi operasional yang lebih kuat dan meningkatkan kapasitas pendanaan proyek dan investasi sehingga proses investasi menjadi lebih mudah dan menarik bagi investor global. Dengan pendekatan profesional dan tata kelola yang baik, BPI Danantara menjadi mitra terpercaya bagi investor domestik maupun internasional, khususnya yang tertarik pada sektor-sektor prioritas. Melalui kemitraan internasional, BPI Danantara menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menarik investasi global untuk pembangunan nasional. BPI Danantara juga berperan sebagai wadah investasi bersama (*co-investment vehicle*) yang mendorong kerja sama strategis antara Pemerintah dan investor internasional. Model investasi ini memberikan kepastian hukum, transparansi, serta pembagian risiko dan keuntungan secara adil sehingga percepatan realisasi berbagai proyek strategis dapat lebih mudah tercapai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengelola investasi secara profesional di luar mekanisme APBN, Pemerintah dapat mengurangi risiko fiskal sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi jangka panjang.

4.3. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan yang optimal, maka Pemerintah terus menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi fiskal yang holistik yang selama ini dilakukan akan terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan yang diselenggarakan kapasitas perekonomian, penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif, serta terus mendorong agar pembiayaan lebih inovatif dan *prudent*. Belanja negara diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya ungkit ekonomi, diantaranya dengan memperkuat sinergi pusat-daerah, serta memastikan subsidi dan perlintas berjalan efektif dan lebih tepat sasaran. Sementara itu, pembiayaan difokuskan antara lain pada pengembangan skema KPBU yang berkelanjutan, penguatan peran *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan SWF.

4.3.1. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta PNPB. Lebih lanjut, untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara lebih tinggi, serta menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan efektif, Pemerintah akan melakukan kebijakan mobilisasi pendapatan melalui:

1. Penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan;
2. Penguatan peran *coretax* dan *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan;
3. Penyelarasan sistem perpajakan yang *compatible* dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global;
4. Reformasi pengelolaan SDA dan BMN; dan
5. Peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi hilirisasi industri.

Boks 5. Hilirisasi Berbasis SDA untuk Akselerasi Ekonomi

Hilirisasi berbasis SDA menjadi landasan utama dalam strategi transformasi ekonomi Indonesia.

Strategi tersebut diperlukan untuk keluar dari *middle income trap* dan mewujudkan struktur ekonomi yang lebih kompleks, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan memanfaatkan potensi SDA yang melimpah, hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan eksternal, serta mendorong akselerasi pertumbuhan industri manufaktur sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Hilirisasi yang berwawasan lingkungan menjadi strategi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di tengah tren global menuju dekarbonisasi.

Kebijakan hilirisasi yang berwawasan lingkungan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Selain itu, kebijakan hilirisasi juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan industri domestik dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan berorientasi pada dekarbonisasi, hilirisasi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kompleksitas produk ekspor Indonesia serta memperluas basis industri berteknologi menengah dan tinggi (*medium-high tech*).

Arah kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan dan komprehensif didasarkan pada empat pilar utama untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan memperkuat fondasi industri nasional.

Secara strategis, hilirisasi memiliki empat manfaat utama: (i) menghasilkan nilai tambah dalam negeri melalui transformasi komoditas primer menjadi produk antara dan produk jadi; (ii) memperkuat struktur industri nasional dengan membangun keterkaitan antarsektor (*forward and backward linkages*) dan integrasi dalam rantai nilai global; (iii) menyediakan lapangan kerja dengan kualitas dan produktivitas yang lebih baik, khususnya di wilayah penghasil SDA dan kawasan industri; serta (iv) memperbaiki neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor produk olahan dan substitusi impor. Selanjutnya, untuk mengakselerasi hilirisasi secara berkelanjutan, kebijakan diarahkan pada empat pilar utama. Pertama, pengelolaan SDA secara berkelanjutan, dengan menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlangsungan pasokan bahan baku jangka panjang. Kedua, penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi, mencakup ketersediaan energi, air, pelabuhan, jalan, dan kawasan industri yang ramah lingkungan dan efisien. Ketiga, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan kepastian regulasi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan, serta perluasan akses ke pasar global. Keempat, penguatan riset dan inovasi teknologi, serta pengembangan SDM industri yang unggul, termasuk melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan.

Pemerintah telah menetapkan hilirisasi atas sejumlah komoditas strategis sebagai langkah prioritas untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan kompleksitas produk dalam rantai nilai industri nasional. Saat ini, Pemerintah telah mengidentifikasi dan mendorong hilirisasi terhadap sedikitnya 28 komoditas strategis, yang mencakup: (i) mineral dan batubara, terdiri dari komoditas nikel, tembaga, bauksit, timah, pasir silika, dan batubara; (ii) migas; dan (iii) pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terdiri dari komoditas kelapa sawit, karet, kopi, cokelat, rumput laut, dan ikan. Berbagai komoditas tersebut diarahkan untuk dikembangkan secara bertahap menjadi produk-produk dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Tahapan hilirisasi meliputi: (1) ekstraksi/pemanfaatan SDA, (2) pengolahan awal seperti *smelting* dan *refining*, (3) produksi barang antara (*intermediate goods*), (4) pengembangan komponen industri (*industrial parts*), dan (5) manufaktur produk akhir (*final goods*). Strategi ini diharapkan menciptakan nilai tambah yang tinggi dan berkelanjutan dalam rantai nilai industri nasional.

Pengembangan produk antara, komponen industri, dan produk akhir berteknologi tinggi menjadi fokus utama hilirisasi untuk mendorong ekspor bernilai tinggi, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja nasional. Beberapa produk antara dan komponen industri yang menjadi fokus pengembangan antara lain: baterai dan komponen kendaraan listrik, kabel dan tube, bahan baku konstruksi, suku cadang otomotif, pesawat dan elektronik, infrastruktur digital seperti data center, serta produk berbasis energi baru terbarukan seperti bioetanol dan biodiesel. Di sektor kimia dan kesehatan, pengembangan industri kosmetik dan farmasi juga didorong untuk mengurangi ketergantungan impor. Pada tahap produk akhir, hilirisasi difokuskan pada pengembangan solar panel, kendaraan listrik, semikonduktor, kemasan makanan, peralatan elektronik dan medis, serta produk olahan ikan dan rumput laut. Produk-produk ini memiliki nilai ekspor tinggi, prospek pasar global yang luas, serta potensi penciptaan lapangan kerja yang signifikan.

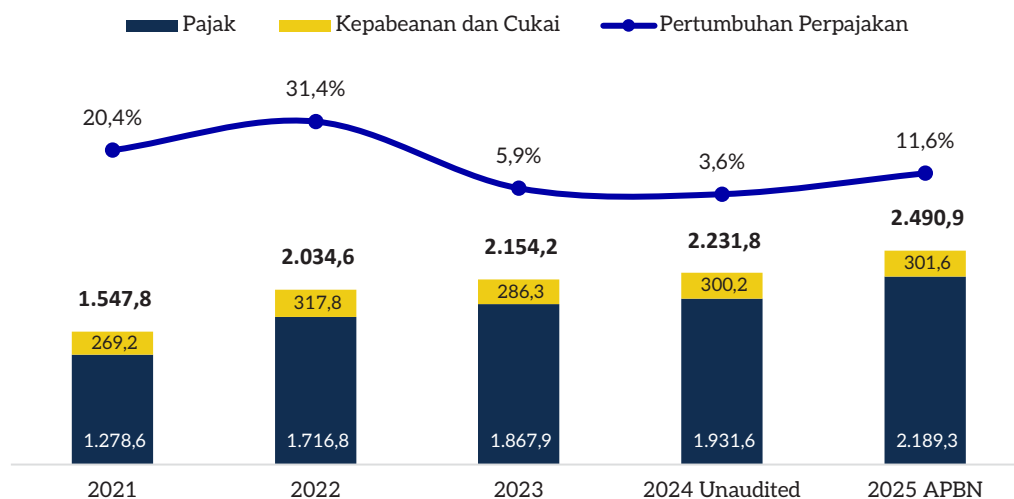
Potensi hilirisasi komoditas strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadikan strategi ini sebagai instrumen kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis keunggulan komparatif. Peta komoditas strategis Indonesia menunjukkan bahwa potensi hilirisasi tersebar luas di berbagai wilayah, dimana komoditas mineral logam berada di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan; migas di Sumatera dan Jawa; sawit di Sumatera dan Kalimantan; perikanan dan rumput laut di kawasan pesisir timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, strategi hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keunggulan komparatif. Ke depan, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga riset, serta keberpihakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pembiayaan investasi industri berkelanjutan. Melalui hilirisasi yang inklusif dan progresif, Indonesia diharapkan mampu membangun fondasi ekonomi baru yang lebih resilien, produktif, dan kompetitif dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Penerimaan Perpajakan

Perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2023-2024 secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Kinerja penerimaan perpajakan masih tumbuh melanjutkan tren positif pertumbuhan penerimaan sejak tahun 2021 yang meningkat seiring perbaikan kondisi ekonomi pascapandemi. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2023-2024 secara nominal tumbuh rata-rata 4,8 persen. Pada tahun 2023, kinerja perpajakan tumbuh 5,9 persen (yoy) dan di 2024 masih tumbuh 3,6 persen (yoy). Kinerja

perpajakan yang positif tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2023 kinerja perpajakan tumbuh didorong oleh upaya untuk menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sementara, pertumbuhan kinerja penerimaan di tahun 2024 terus berlanjut didukung oleh kinerja positif sektor utama penerimaan dan kebijakan optimalisasi perpajakan, baik dari pajak maupun kepabeanan dan cukai, meskipun di tengah termoderasinya harga komoditas.

Grafik 25. Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja penerimaan pajak yang positif pada periode 2023-2024 dipengaruhi antara lain oleh dinamika perekonomian global dan domestik, perkembangan harga komoditas utama, dan kebijakan Pemerintah. Kinerja penerimaan pajak pada tahun 2023 tumbuh 8,8 persen (yoy). Penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan selama tiga tahun berurutan. Hal ini didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta berbagai kebijakan optimalisasi pajak. Tiga komponen utama penerimaan pajak mampu tumbuh signifikan, yaitu penerimaan PPh Nonmigas (7,8 persen, yoy), PPN dan PPnBM (11,1 persen, yoy), dan PBB (26,6 persen, yoy). Selanjutnya, pada tahun 2024 penerimaan pajak mengalami fluktuasi pertumbuhan di sepanjang tahunnya yang sangat dipengaruhi oleh faktor volatilitas harga komoditas dan gejolak global. Kinerja pajak mampu tumbuh 3,5 persen (yoy) di tahun 2024. Kinerja tersebut didukung utamanya oleh pertumbuhan komponen penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai 8,5 persen (yoy). Pada kuartal terakhir 2024, kinerja penerimaan pajak didorong oleh pertumbuhan PPN Dalam Negeri yang sangat baik terutama dari sektor perdagangan dan industri pengolahan seiring dengan konsumsi domestik yang terjaga dan penurunan restitusi. Sementara, kinerja PPh Badan didorong oleh dinamisasi pembayaran angsuran masa dari sektor pertambangan dan industri pengolahan, serta sektor keuangan dan asuransi yang meningkat pembayaran masanya.

Kinerja penerimaan perpajakan yang bersumber dari penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami fluktuasi di tahun 2023-2024. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kepabeanan dan cukai, dinamika

perekonomian global dan domestik, serta perkembangan harga komoditas utama. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2023 mengalami kontraksi 9,9 persen (yoy) di tengah termoderasinya harga komoditas terutama CPO dan produk turunan CPO, serta terjadinya *downtrading* atau perubahan konsumsi rokok dari rokok dengan golongan tarif cukai yang lebih mahal ke rokok yang dikenakan golongan tarif cukai lebih murah seperti rokok Golongan I ke rokok golongan di bawahnya atau jenis rokok sigaret kretek mesin (SKM)/sigaret putih mesin (SPM) ke rokok sigaret kretek tangan (SKT). Selain itu, kinerja penerimaan di tahun 2023 juga dipengaruhi oleh penurunan produksi rokok dan turunnya aktivitas impor. Selanjutnya, pada tahun 2024 penerimaan kepabeanan dan cukai kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,9 persen (yoy). Pertumbuhan positif yang tinggi pada tahun 2024 tersebut didukung oleh kinerja positif seluruh jenis penerimaan, bahkan bea keluar mampu tumbuh *double digits*. Hal tersebut dipengaruhi oleh dampak dari kebijakan intensifikasi cukai hasil tembakau, penguatan nilai impor dan nilai kurs dolar yang mendorong kinerja bea masuk, serta kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi di akhir tahun 2024 yang mendorong kinerja bea keluar tumbuh sangat signifikan.

Capaian kinerja penerimaan perpajakan yang baik pada tahun 2025 diharapkan tetap tumbuh dan positif di tahun 2026. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan kemungkinan moderasi harga komoditas dan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan capaian kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2024 yang cukup baik, serta realisasi capaian di triwulan I 2025, Pemerintah berupaya mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2025 untuk melanjutkan kinerja positif penerimaan perpajakan di tengah tekanan terhadap harga komoditas dan dinamika kondisi global. Lebih lanjut, kinerja penerimaan perpajakan 2025 masih didorong oleh pertumbuhan kinerja perekonomian domestik dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di tahun 2025, serta keberlanjutan implementasi reformasi perpajakan. Adapun realisasi penerimaan perpajakan hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp400,1 triliun (16,1 persen terhadap APBN 2025). Penerimaan perpajakan tahun 2026 diproyeksikan juga akan meningkat meskipun terjadi perubahan tatanan dunia dan implikasi tekanannya terhadap perekonomian domestik. Kinerja perpajakan tahun 2026 diharapkan dapat mendukung dan menjaga APBN tetap sehat, efisien dan efektif melalui upaya mobilisasi pendapatan negara yang lebih kuat.

Di tengah dinamisasi kondisi global yang tengah terjadi, optimalisasi penerimaan perpajakan menghadapi berbagai risiko dan tantangan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun domestik. Faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya perubahan geopolitik dan menguatnya proteksionisme dari berbagai negara yang berpotensi memicu terjadinya perang dagang, pertumbuhan global yang melambat, harga komoditas yang melemah, pengetatan moneter di berbagai yurisdiksi, dan gejolak pada pasar keuangan. Hal tersebut akan meningkatkan risiko volatilitas harga komoditas, serta tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga yang menjadi faktor utama yang memengaruhi penerimaan perpajakan. Sementara itu, dari domestik, tantangannya diantaranya berasal dari pergeseran struktur perekonomian konvensional ke ekonomi digital yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem perpajakan, serta dominasi sektor informal dengan semakin meningkatnya peran sektor jasa. Oleh karena itu, efektivitas keberlanjutan reformasi perpajakan juga menjadi faktor penting yang harus terus dijaga dan diperkuat. Selain itu, implementasi reformasi administrasi perpajakan antara lain *coretax* dan CEISA, serta peraturan perpajakan perlu dipastikan berjalan dengan lancar dan efektif.

Kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan efektif dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah berbagai tantangan yang ada. Sistem perpajakan Indonesia perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan struktur ekonomi serta menerapkan *best practice* perpajakan internasional guna memastikan keberlanjutan mobilisasi pendapatan domestik. Tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya tensi geopolitik, justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Hal tersebut akan berfungsi sebagai fondasi fiskal yang kuat. Dengan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian, reformasi perpajakan dapat diarahkan antara lain untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target perpajakan yang optimal, diperlukan penguatan di berbagai aspek, termasuk administrasi, SDM, dan infrastruktur, sehingga sistem perpajakan dapat lebih mendukung peningkatan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Boks 6. Implikasi Pajak Minimum Global di Indonesia: Insentif Pajak Baru dan Penolakan Trump

Pajak minimum global merupakan bagian integral dari *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*. Konsensus global ini merupakan proyek kerangka inklusif OECD/G20 yang bertujuan untuk mengatasi isu penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Pajak minimum global yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional dengan omzet global sedikitnya €750 Juta, membayar pajak dengan tarif efektif minimum 15 persen. Apabila suatu perusahaan multinasional membayar pajak dengan tarif efektif di bawah 15 persen, maka akan dikenakan pajak tambahan (*top-up tax*) sebesar selisih antara tarif efektif minimum 15 persen dan tarif efektif perusahaan multinasional tersebut di suatu negara.

Pajak minimum global diterapkan melalui tiga mekanisme utama. Mekanisme tersebut yaitu (i) *Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT)*; (ii) *Income Inclusion Rules (IIR)*; dan (iii) *Undertaxed Payment Rules (UTPR)*. Mekanisme DMTT diterapkan oleh negara sumber penghasilan kepada perusahaan multinasional dengan mengenakan pajak tambahan secara domestik. Apabila negara sumber tersebut tidak menerapkan DMTT, maka negara domisili tempat entitas induk perusahaan dapat menerapkan IIR. Sementara, jika negara domisili induk tidak mengenakan IIR, maka negara domisili anggota grup perusahaan multinasional lainnya dapat mengenakan UTPR berdasarkan formula alokasi tertentu.

Penerapan pajak minimum global di Indonesia dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024. Melalui penerbitan PMK tersebut, Indonesia secara resmi mengadopsi pajak minimum global sejak 1 Januari 2025 untuk DMTT dan IIR, serta mulai 1 Januari 2026 untuk UTPR. Penerapan pajak minimum global di Indonesia mewajibkan Wajib Pajak yang menjadi bagian dari perusahaan multinasional dengan omzet global sedikitnya €750 Juta (Wajib Pajak Tercakup) untuk menyampaikan suatu dokumen pelaporan pajak. Dokumen tersebut meliputi notifikasi atau pemberitahuan tertulis terkait identitas subjek pajak dan pihak yang ditunjuk menyampaikan *GloBE Information Return (GIR)* kepada DJP dengan formula standar, dan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak minimum global yang berupa SPT Tahunan PPh GloBE/SPT Tahunan PPh DMTT/SPT Tahunan PPh UTPR.

Implementasi pajak minimum global berdampak pada efektivitas dan daya tarik berbagai insentif pajak yang saat ini berlaku di Indonesia, khususnya yang diberikan kepada Wajib Pajak Tercakup.

Insentif pajak berupa *tax holiday* berisiko paling besar karena berpotensi memicu kewajiban pajak tambahan. Hal tersebut dikarenakan insentif *tax holiday* dapat menurunkan tarif pajak efektif di bawah 15 persen, bahkan hingga 0 persen. Insentif pajak seperti *tax allowance*, *investment allowance*, dan *supertax deduction* mengalami dampak moderat. Sementara itu, insentif pajak lainnya seperti penyusutan dipercepat atas aset berwujud dan pengecualian dividen selain portofolio jangka pendek, tetap netral terhadap pengenaan ketentuan pajak minimum global. Hal tersebut dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan potensi kewajiban pajak tambahan. Meskipun demikian, jenis insentif ini memiliki *magnitude* yang lebih rendah dari insentif berupa *tax holiday* dalam menarik investasi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu merancang skema insentif pajak baru agar tetap kompetitif dalam menarik investasi.

Pemerintahan Donald Trump menyatakan penolakan terhadap solusi BEPS 2.0 dalam kerangka *America First Trade Policy*.

Melalui memorandum Presiden Trump kepada US *Treasury*, Pemerintah AS menyatakan menarik dukungannya terhadap solusi Dua Pilar dan menerapkan aksi retaliasi kepada negara-negara yang mengenakan *digital services tax* (DST) dan pajak minimum global yang bersifat ekstrateritorial yang merugikan perusahaan AS. Selanjutnya, *United States Trade Representatives* (USTR) diinstruksikan untuk memberikan rekomendasi terkait dalam jangka waktu 60 hari. Keberatan utama AS kemungkinan terletak pada pemberlakuan UTPR karena dianggap sebagai bentuk pajak ekstrateritorial dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 7 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Hingga April 2025, belum terdapat respons konkret dari negara-negara lain terhadap penolakan AS.

Sekitar 65 negara di dunia telah menerapkan pajak minimum global. Beberapa di antaranya menerapkan UTPR, seperti Australia, Korea, negara-negara Uni Eropa, Kanada, dan Jepang. Di kawasan ASEAN, hanya Indonesia dan Thailand yang mengadopsi UTPR (Thailand sejak 1 Januari 2025 dan Indonesia mulai 1 Januari 2026). Sementara itu, di Uni Eropa, meskipun sebagian besar negara telah mengadopsi UTPR sejak 1 Januari 2025, belum terlihat reaksi konkret negara-negara tersebut terhadap potensi keberatan dari AS. Lebih lanjut, Pemerintah Jerman berencana menunda penerapan pajak minimum global. Sementara itu, terkait dengan keberatan AS atas pengenaan DST, India mengumumkan akan membatalkan pengenaan pajak digital/*equalization levy*.

Kebijakan umum perpajakan 2026 diarahkan untuk mendukung *statecraft* Indonesia dalam menghadapi goncangan global yang tengah terjadi. Kebijakan umum perpajakan tahun 2026 diharapkan dapat memitigasi dampak risiko dan tantangan yang ada, seperti: (i) perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat; (ii) peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan *joint program*, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan; (iii) penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; serta (iv) pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi.

Berbagai kebijakan tersebut juga harus diwujudkan melalui kebijakan teknis pajak serta kepabeanan dan cukai sebagai implementasi dari kebijakan umum perpajakan 2026. Kebijakan teknis pajak tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko, yang didukung optimalisasi penggunaan *coretax* dalam pengelolaan data dan pengambilan kebijakan perpajakan, serta penggunaan *Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine* (CRM-IRE) dalam penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
2. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui optimalisasi kegiatan *joint program* Kementerian Keuangan serta penyusunan *Compliance Improvement Plan* yang efektif melalui optimalisasi kegiatan *joint audit*, *joint analysis*, *joint investigation*, *joint collection*, dan *joint intelligence* dalam rangka sinergitas Kementerian Keuangan, serta penyusunan *Compliance Improvement Plan* berbasis strategi pengamanan penerimaan sesuai rekomendasi *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT);
3. Optimalisasi insentif perpajakan yang mendukung iklim investasi, peningkatan daya beli masyarakat, dan pembangunan ekonomi hijau dengan melakukan pemberian insentif perpajakan yang lebih tepat sasaran;
4. Penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dalam mendukung perbaikan administrasi perpajakan berupa optimalisasi penyusunan regulasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta optimalisasi kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui regulasi yang memberikan *deterrent effects*.

Selain itu, kebijakan teknis di bidang kepabeanan dan cukai tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk mendukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan ekspor serta mendukung hilirisasi industri nasional;
 - b. Optimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
 - c. Peningkatan ekspor produk UMKM melalui optimalisasi klinik ekspor dan kolaborasi dengan berbagai entitas; dan
 - d. Peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.
2. Kebijakan untuk mendukung perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif, melalui:
 - a. Penguatan kapasitas pengawasan dan revitalisasi pengawasan laut;
 - b. Penguatan pengawasan perbatasan, pesisir, serta pelabuhan dan bandara utama;
 - c. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
 - d. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya;
 - e. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
 - f. Pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara; dan
 - g. Peningkatan efektivitas penegakan hukum dan audit kepabeanan dan cukai.

3. Kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal, melalui:
 - a. Intensifikasi penerimaan yang berupa:
 - 1) Kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berlandaskan 4 pilar (Pengendalian Konsumsi, Penerimaan Negara, Keberlangsungan Tenaga Kerja, dan Pengawasan Rokok Ilegal) dengan Dana Bagi Hasil (DBH) CHT sebagai bantalan kebijakan serta restrukturisasi tarif CHT berdasarkan kebijakan yang berkesinambungan;
 - 2) Kebijakan tarif bea masuk komoditas tertentu;
 - b. Ekstensifikasi BKC melalui upaya penambahan objek cukai baru;
 - c. Perluasan basis penerimaan bea keluar;
 - d. Penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif; dan
 - e. Penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan (*joint program*); dan
4. Kebijakan untuk mendukung manajemen organisasi, SDM, dan IT, melalui:
 - a. Penguatan organisasi yang dinamis dan adaptif;
 - b. Penyempurnaan manajemen proses bisnis Kepabeanan dan Cukai;
 - c. Pemenuhan dan penguatan SDM yang berintegritas, berkompeten, dan berbudaya sesuai kebutuhan dan nilai organisasi;
 - d. Penyempurnaan *Core System* dan *Smart Customs*; dan
 - e. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi, dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antarlembaga.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebagai salah satu komponen penerimaan negara masih sangat dipengaruhi penerimaan berbasis komoditas. Dengan dinamika kondisi ekonomi global yang sedang terjadi, capaian kinerja PNBP dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi volatilitas harga komoditas serta tren penurunan produksi, *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging*, *idle asset*, kualitas layanan yang kurang merata dan inklusif, serta data dan layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi.

Kinerja PNBP tahun 2023-2024 menunjukkan capaian positif yang melebihi target APBN, namun rata-rata pertumbuhan PNBP pada periode tersebut sedikit berkontraksi sebesar 0,9 persen terutama akibat moderasi harga komoditas. Capaian PNBP di tahun 2023 tumbuh sebesar 2,8 persen (yoy) terutama didukung oleh pertumbuhan signifikan dari PNBP Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan PNBP BLU. Sedangkan pada tahun 2024, kinerja PNBP berkontraksi 4,6 persen terutama disebabkan oleh tekanan pada PNBP yang bersumber dari SDA dan PNBP lainnya.

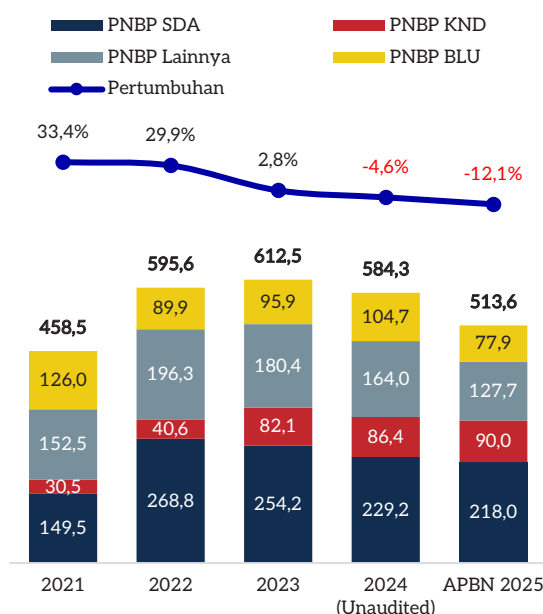
Sementara itu, pada tahun 2025 PNBP ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun (turun 12,1 persen dari realisasi tahun 2024), atau setara 2,1 persen terhadap PDB. Hal tersebut sejalan dengan antisipasi atas berlanjutnya moderasi harga komoditas. Adapun realisasi PNBP hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp115,9 triliun (22,6 persen terhadap APBN 2025).

Kebijakan PNBP 2026 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu kebijakan PNBP 2026 diarahkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBPN untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBPN, serta optimalisasi PNBPN termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan
3. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

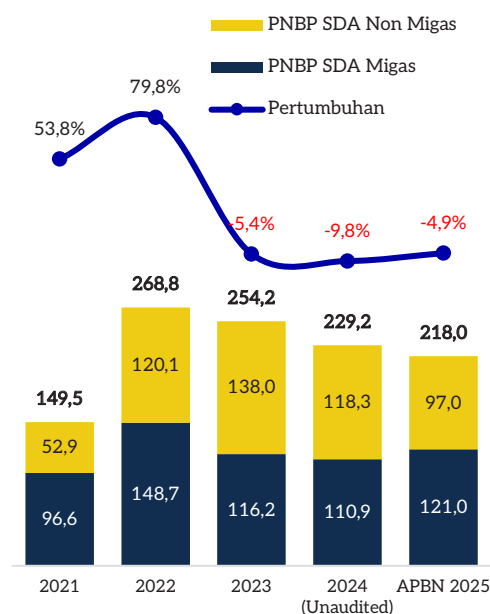
Sumber penerimaan PNBPN terdiri dari beberapa objek yaitu SDA (migas dan nonmigas), kekayaan negara dipisahkan, dan layanan (layanan KL dan BLU). Dalam rangka mengoptimalkan upaya mobilisasi pendapatan negara, kebijakan umum PNBPN 2026 di atas dijelaskan lebih lanjut pada masing-masing jenis PNBPN.

Grafik 26. Perkembangan PNBPN, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 27. Perkembangan PNBPN SDA, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

PNBPN SDA

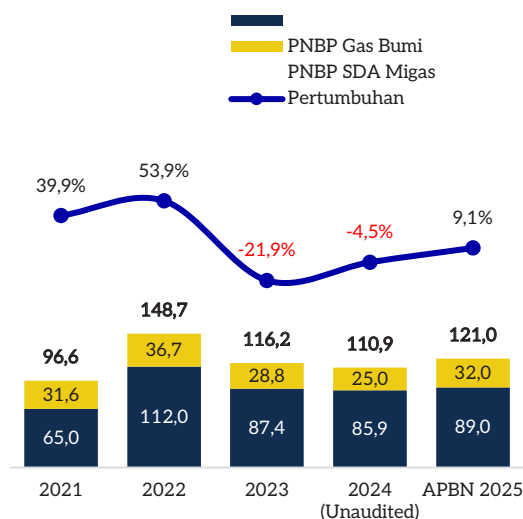
Upaya optimalisasi PNBPN SDA masih dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas dan produksi. Fluktuasi harga komoditas yang cukup dinamis, pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang masih belum cukup optimal, serta sistem perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi merupakan hal-hal yang masih akan memengaruhi kinerja PNBPN SDA. Dalam periode tahun 2021-2024 porsi terbesar dari PNBPN SDA secara rata-rata masih didominasi dari kontribusi PNBPN SDA Migas yang mencapai 53,5 persen terhadap total PNBPN SDA. Namun demikian, berdasarkan realisasi di tahun 2024 porsi terbesar dikontribusikan oleh SDA Nonmigas yang mencapai 51,6 persen terhadap total PNBPN SDA, seiring dengan tingginya harga-harga komoditas minerba dan penyesuaian tarif PNBPN batubara di tengah pelemahan harga dan produksi migas.

PNBP SDA Migas

Kinerja PNBP SDA Migas tahun 2023-2024 mengalami kontraksi. Pada periode tersebut, PNBP SDA Migas terkontraksi rata-rata sebesar 13,2 persen sejalan dengan menurunnya ICP dan *lifting* migas. Realisasi PNBP SDA Migas tahun 2023 mencapai Rp116,2 triliun atau terkontraksi 21,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja ICP yang hanya mencapai USD78,4 per barel dan kinerja *lifting* minyak bumi sebesar 604,7 rbph. Sepanjang tahun 2024, kinerja ICP dan *lifting* migas secara umum mengalami kontraksi. Realisasi ICP tahun 2024 mencapai USD78,1 per barel, *lifting* minyak bumi mencapai 579,7 rbph, dan *lifting* gas bumi mencapai 978,8 rbsmph. Capaian kinerja ICP dan *lifting* migas yang kurang optimal tersebut memengaruhi capaian realisasi PNBP SDA Migas tahun 2024 yang hanya terealisasi Rp110,9 triliun atau terkontraksi 4,5 persen (yoy). Sementara itu, PNBP SDA migas tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp121,0 triliun, terdiri dari penerimaan minyak bumi sebesar Rp89,0 triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp32,0 triliun. Penetapan target tersebut terutama mempertimbangkan fluktuasi ICP dan target *lifting* migas di sepanjang tahun 2025. Realisasi PNBP SDA Migas hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp24,9 triliun (atau 20,6 persen APBN 2025).

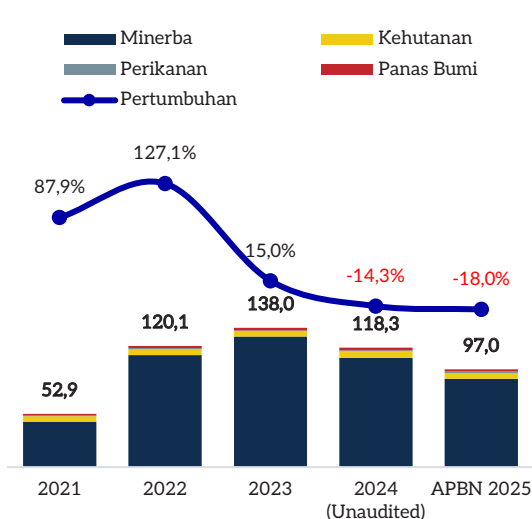
PNBP SDA Migas masih menghadapi tantangan cukup berat di tengah volatilitas harga minyak internasional dan upaya optimalisasi produksi migas nasional. Tantangan utama dalam upaya optimalisasi kinerja PNBP SDA Migas adalah tren ICP yang fluktuatif dan kinerja *lifting* migas yang belum optimal. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang dapat memengaruhi optimalisasi PNBP SDA Migas, antara lain (i) upaya Pemerintah dalam mendorong transisi EBT; (ii) upaya mendorong investasi sektor migas; (iii) upaya penyempurnaan regulasi yang terkait; (iv) upaya mendorong optimalisasi *lifting* migas; (v) upaya dalam mendorong penyelesaian proyek migas strategis; (vi) upaya meningkatkan optimalisasi tata kelola dan kegiatan monitoring evaluasi secara berkelanjutan; serta (vii) melaksanakan penguatan digitalisasi data.

Grafik 28. Perkembangan PNBP SDA Migas, 2021 -2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 29. Perkembangan PNBP SDA Nonmigas, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah akan melaksanakan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan PNBP SDA Migas tahun 2026. Arah kebijakan tersebut adalah (i) mendorong penyempurnaan regulasi, baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian, serta perbaikan tata kelola industri hulu migas; (ii) mendorong peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui menggarap sumur-sumur *idle* (*idle well*) yang tersedia, optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada dilakukan dengan penerapan teknologi termasuk EOR, serta percepatan *PoD* pada sumur-sumur yang telah selesai dieksplorasi; (iii) mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas; (iv) meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi; (v) mendorong efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT); serta (vi) mendorong digitalisasi proses bisnis.

PNBP SDA Nonmigas

Kinerja PNBP SDA Nonmigas 2023-2024 mengalami kontraksi. Realisasi PNBP SDA Nonmigas tahun 2024 turun 14,3 persen dibanding tahun 2023 menjadi Rp118,3 triliun akibat menurunnya harga batu bara. Sementara pada tahun 2025, PNBP SDA Nonmigas ditargetkan sebesar Rp97,0 triliun, lebih rendah sebesar Rp21,3 triliun atau turun sekitar 18,0 persen dari realisasi 2024 dengan pertimbangan terjadinya moderasi harga komoditas minerba. Realisasi PNBP SDA Nonmigas hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp25,7 triliun atau 26,6 persen terhadap APBN 2025.

Pengelolaan PNBP SDA Nonmigas pada tahun 2026 masih menghadapi berbagai tantangan. Selain adanya fluktuasi harga komoditas, terdapat beberapa tantangan lain di antaranya (i) volatilitas harga dan penurunan produksi; (ii) kepatuhan dan transparansi pelaku usaha; (iii) pengawasan dan monitoring digital; (iv) regulasi yang belum optimal; (v) isu lingkungan dan sosial; (vi) desentralisasi dan bagi hasil; dan (vii) transisi energi dan kebijakan hijau.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan PNBP SDA Nonmigas. Untuk mengoptimalkan PNBP SDA Nonmigas yang meliputi Minerba, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Panas Bumi, kebijakan tahun 2026 diarahkan sebagai berikut:

Kebijakan PNBP SDA Minerba

1. Peningkatan sinergi, perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan pengawasan dan kepatuhan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA);
2. Audit kewajiban Wajib Bayar, Pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi, dan *Automatic Blocking System* (ABS) pada sistem aplikasi e-PNBP Minerba;
3. Peningkatan kerja sama Kementerian ESDM/Kemendag/Kemenhub/Kemenkeu (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, koordinasi dan supervisi dengan KPK dan Pelaksanaan *joint business process*, *joint analysis* dan *joint audit* kewajiban sektor minerba;
4. Memberlakukan kewajiban penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM untuk persyaratan kelengkapan dokumen pengapalan dan mengharuskan pembayaran kewajiban PNBP melalui e-PNBP Minerba;

5. Pemberian sanksi atas ketidakpatuhan atas pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) Batu bara dan ketidakpatuhan atas pemenuhan target komitmen pembangunan smelter.

Kebijakan PNBPN SDA Kehutanan

1. Perbaikan tata kelola kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya (penyelesaian sawit ilegal di kawasan hutan);
2. Peningkatan produktivitas kawasan hutan serta diversifikasi kegiatan usaha untuk memaksimalkan nilai ekonomi hutan;
3. Memperkuat ekosistem usaha serta meningkatkan nilai tambah produk hutan melalui percontohan pengembangan bioekonomi berbasis agroforestri;
4. Revitalisasi industri dan hilirisasi kayu dan hasil hutan bukan kayu;
5. Optimalisasi PNBPN sektor kehutanan melalui peningkatan pengawasan dengan pengendalian internal serta *post audit* Wajib Bayar (WB) secara intensif;
6. Digitalisasi layanan, transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas tata kelola PNBPN;
7. Optimalisasi penyelesaian piutang PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan dengan memprioritaskan koordinasi dengan K/L dalam rangka mempersempit ruang gerak WB yang mempunyai piutang;
8. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBPN sektor kehutanan.

Kebijakan PNBPN SDA Kelautan dan Perikanan

1. Penyesuaian jenis dan besaran tarif atas jenis PNBPN sektor kelautan dan perikanan;
2. Optimalisasi pemanfaatan SDA pengelolaan kelautan dan perikanan melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Integrasi dan penguatan basis data sektor kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas dan optimalisasi pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN);
5. Penguatan fungsi evaluasi dan penilaian terhadap target PNBPN;
6. Penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan terhadap PNBPN agar sinergi, akurat, dan akuntabel; serta
7. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi dengan diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

Kebijakan PNBPN Panas Bumi

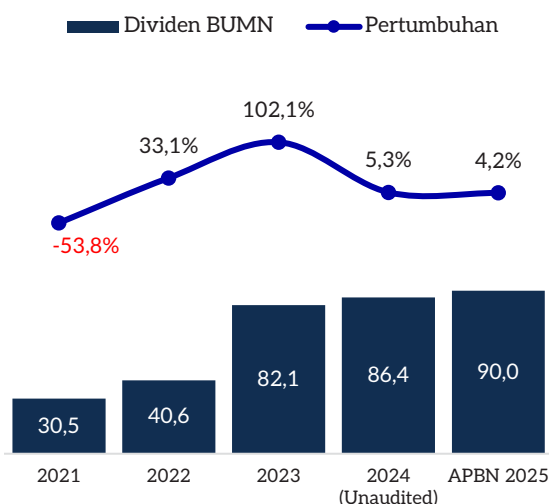
1. Penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis peraturan Menteri ESDM, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama pemerintah daerah;
2. Penguatan tata kelola perusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi, percepatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), optimalisasi penugasan dan koordinasi BUMN, penguatan pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi pemberian fasilitas fiskal sektor panas bumi, serta mendorong skema perusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha;

3. Peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan pemanfaatan *brine* (limbah panas bumi);
4. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBPN melalui e-PNBPN, dan integrasi sistem pengelolaan.

PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan

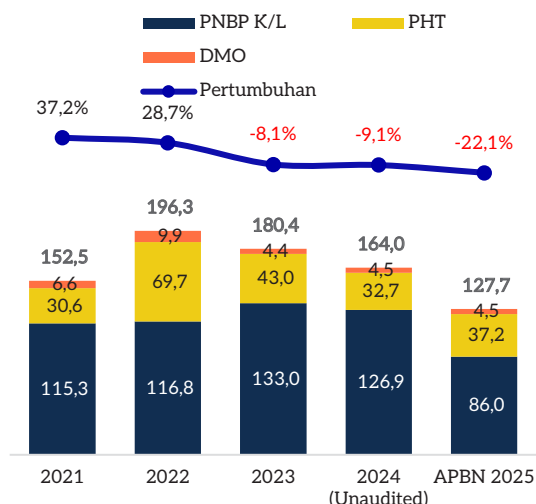
Selama ini, PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang utamanya berasal dari dividen BUMN bagian Pemerintah. Seiring dengan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, pengelolaan dividen BUMN yang sebelumnya masuk APBN sebagai PNBPN kini dialihkan pengelolaannya ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang berperan sebagai lembaga pengelola aset dan pengelola investasi agar lebih produktif yang diselaraskan dengan agenda pembangunan. Danantara berperan sebagai SWF yang mengoptimalkan kekayaan negara dengan tata kelola transparan, mendukung kemandirian ekonomi, dan menjamin masa depan Indonesia. Sumber lain yang dapat dikategorikan sebagai PNBPN KND selain dividen BUMN antara lain surplus Bank Indonesia bagian Pemerintah, surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagian Pemerintah, bagian laba Pemerintah pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PNBPN yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada LPEI.

Grafik 30. Perkembangan PNBPN KND, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 31. Perkembangan PNBPN Lainnya, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Capaian kinerja PNBPN KND pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang semakin membaik. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 102,1 persen yang berasal dari Dividen BUMN dengan nilai PNBPN sebesar Rp82,1 triliun. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan bagian pemerintah

atas laba BUMN sebesar Rp86,4 triliun. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh 5,3 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan dalam dua tahun terakhir ini utamanya disebabkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan pada klaster jasa keuangan, kenaikan volume penjualan komoditas mineral, naiknya harga komoditas emas, serta adanya peningkatan penjualan pada klaster jasa telekomunikasi. Selain itu, dengan kondisi perekonomian Indonesia yang stabil dan kondusif, peningkatan volume lalu lintas barang dan penumpang, aktivitas bisnis yang pulih dari dampak pandemi Covid-19, serta upaya restrukturisasi dan langkah transformasi pengelolaan perusahaan yang intens dijalankan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa BUMN berhasil mencatatkan kinerja yang baik. Kontributor utama dividen selama periode tersebut di antaranya BUMN Perbankan, BUMN Energi, dan BUMN Telekomunikasi.

Pada tahun 2025, PNBPN KND ditargetkan akan mencapai Rp90,0 triliun atau naik 4,2 persen dari realisasi PNBPN KND tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dan kinerja BUMN. Realisasi PNBPN KND hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp10,9 triliun atau 12,1 persen dari target APBN 2025.

Sehubungan diundangkannya UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka kebijakan pengelolaan BUMN mengalami penyesuaian berdasarkan UU tersebut. Penyesuaian pada UU dimaksud di antaranya mengatur mengenai tugas dan peran BPN Danantara untuk mengelola BUMN secara operasional dan mengoptimalkan dana setoran dividen BUMN untuk mendukung investasi yang produktif sejalan dengan agenda pembangunan. Dalam konteks ini tentunya akan mempengaruhi realisasi PNBPN KND Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya pembentukan BPN Danantara, Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan BPN Danantara dan Kementerian BUMN untuk memperkuat sinergisitas bagi penerimaan negara di tahun 2026.

PNBPN Lainnya

Capaian kinerja PNBPN Lainnya tumbuh fluktuatif, dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan masyarakat, serta volatilitas harga komoditas batu bara dan minyak bumi. Dalam dua tahun terakhir (2023 – 2024) realisasi PNBPN Lainnya berkontribusi rata-rata sebesar 28,8 persen terhadap total PNBPN dengan pertumbuhan negatif 9,3 persen pada periode tersebut. Pertumbuhan negatif tersebut utamanya dipengaruhi oleh penurunan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) negatif 24,0 persen akibat harga batu bara yang termoderasi, serta PNBPN K/L negatif 4,9 persen yang utamanya dipengaruhi penurunan pada penerimaan tidak berulang di Bendahara Umum Negara (BUN). Di sisi lain, Penerimaan dari DMO minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 0,8 persen.

Pada tahun 2025 PNBPN Lainnya ditargetkan sebesar Rp127,7 triliun. Hal tersebut sejalan dengan antisipasi atas penerimaan yang tidak berulang seperti Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) ataupun Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (*Treasury Single Account/TSA*) dan/atau atas Penempatan Uang Negara. Adapun secara rinci target tahun 2025 untuk PNBPN K/L sebesar Rp86,1 triliun, PHT sebesar Rp37,2 triliun, dan DMO sebesar Rp4,5 triliun. Realisasi PNBPN Lainnya hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp37,2 triliun atau 29,1 persen dari target APBN 2025.

Pengelolaan PNBPN Lainnya masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBPN Lainnya di antaranya adalah volatilitas harga komoditas,

pemerataan kualitas layanan, kompleksitas integrasi teknologi, stagnasi PNBPN konvensional, dan perbaikan tata kelola yang perlu dioptimalkan. Selain itu, upaya peningkatan kinerja utilisasi pengelolaan BMN melalui inovasi kebijakan juga diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama pengelolaan aset, yaitu belum optimalnya kerangka optimalisasi aset, serta aspek regulasi yang masih perlu dievaluasi.

Kebijakan pada PNBPN K/L tahun 2026 diarahkan pada digitalisasi layanan publik, optimalisasi aset, dan penguatan tata kelola untuk peningkatan efisiensi dan transparansi layanan. Untuk itu, arah kebijakan umum PNBPN K/L yaitu (i) pengembangan sistem perizinan terpadu, aplikasi layanan, serta integrasi database lintas sektor untuk mempercepat administrasi dan mengurangi inefisiensi; (ii) pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi, sertifikat elektronik, dan layanan geospasial akan menciptakan sumber PNBPN baru, seperti *travel insurance* bagi warga asing; (iii) evaluasi dan penyesuaian jenis tarif dan perluasan cakupan layanan dengan penerapan tarif progresif; (iv) penagihan intensif dan memperkuat pengelolaan piutang dengan melibatkan KPKNL/PUPN dan Kementerian Keuangan; (v) Penguatan sinergi antar-K/L melalui integrasi data wajib bayar dan pengawasan layanan berbasis kerja sama dengan sektor perbankan, serta peningkatan transparansi melalui sistem pelaporan berjenjang dan audit internal. Selain itu, khususnya kebijakan PNBPN yang terkait dengan aset dan BMN, beberapa arah kebijakannya antara lain: (i) integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN; (ii) optimalisasi BMN melalui pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan (iii) pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat. Adapun secara lebih khusus terutama pada enam K/L kontributor terbesar, arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Kementerian Komunikasi dan Digital**, antara lain (i) penagihan dan sosialisasi secara intensif kepada para wajib bayar untuk meningkatkan kepatuhan para wajib bayar terhadap kewajiban kepada negara melalui forum bimbingan teknis; (ii) pengembangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi PNBPN yang ada di lingkungan Kementerian Komdigi sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik; (iii) penegakan hukum terhadap pengguna layanan PNBPN Komdigi; (iv) penyempurnaan pengelolaan, integrasi dan sinkronisasi database sistem informasi yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital; (v) percepatan dan kemudahan pelayanan permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) melalui Program Prima Aksi - *Fast Track* layanan ISR dan pelaksanaan ODS (*One Day Service*) pada pelayanan perijinan ISR dan penerbitan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi; (vi) peningkatan pelayanan pada bidang perijinan serta peningkatan kualitas SDM pada bidang pelayanan perijinan melalui pelayanan OSS (*One Single Submission*) dan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik bidang Komdigi; (vii) pemberian kemudahan dan insentif atas layanan PNBPN Komdigi dan dukungan PSN melalui pemberian tarif sampai dengan Rp0,- (nol rupiah) serta pengenaan tarif 50 persen untuk beberapa jenis PNBPN yang memenuhi kriteria; (viii) penagihan SPP dan piutang wajib bayar serta penyempurnaan aplikasi database wajib bayar, serta penanganan piutang pnbpn dengan melibatkan KPKNL/PUPN; (ix) pemberlakuan interkoneksi sistem pembayaran dengan aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI); (x) pengenaan sanksi berupa denda dan pencabutan izin; (xi) evaluasi dan revisi kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini; (xii) pendampingan kepada wajib

bayar terkait tata cara perhitungan dan pembayaran serta penyampaian dokumen PNBPN Kominfo, khususnya kepada wajib bayar baru yang belum memahami tata cara perhitungan dan pembayaran maupun kepada wajib bayar eksisting yang belum sesuai ketentuan dalam menerapkannya; (xiii) kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pemanfaatan data wajib pajak dan wajib bayar.

2. **Kepolisian RI**, antara lain (i) pembangunan dan pengembangan inovasi berupa digitalisasi sistem pelayanan Regident Mengemudi yang dilengkapi sistem IT diseluruh wilayah kepolisian serta mengoptimalkan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dan ERI (*Electronic Registration and Identification*) guna mempercepat dan memudahkan pelayanan PNBPN Fungsi Lalu Lintas; (ii) optimalisasi penerapan standar pelayanan sesuai UU Nomor 2009 tentang Pelayanan Publik; (iii) sinergi dengan instansi terkait/pemangku kepentingan yaitu: DPR RI, BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Pembina Samsat dan Perbankan; dan (iv) penerapan pendukung pelayanan aplikasi layanan digital antara lain OSS (*Online Single Submission*) dalam layanan pengajuan event keramaian komersial (musik dan olah raga) melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pemuda dan Olah Raga, PSSI (event olahraga), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi, Tim Transisi (Bank terkait, Telkom, Peruri) agar dapat dimasukkan dan terintegrasi dalam layanan aplikasi OSS.
3. **Kementerian Perhubungan**, antara lain melalui peningkatan tata kelola pengelolaan PNBPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan optimalisasi Potensi PNBPN. Peningkatan tata kelola tersebut dilakukan melalui: (i) sinergi internal dan eksternal; (ii) penggunaan IT untuk simplifikasi layanan dan modernisasi proses bisnis; (iii) keterlibatan Mitra Instansi Pengelola PNBPN (MIP-PNBPN) seperti pelibatan MIP PNBPN pada jasa layanan tertentu di sektor transportasi; (iv) penyelesaian Piutang PNBPN; serta (v) monitoring, pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi proses bisnis secara terintegrasi. Sementara itu, optimalisasi Potensi PNBPN dilakukan melalui: (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan PNBPN; (ii) optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana; (iii) peningkatan dan/atau evaluasi kerja sama dalam pengelolaan aset; dan (iv) evaluasi tarif dan jenis PNBPN.
4. **Kementerian Hukum**, antara lain (i) intensifikasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui penguatan *corporate identity*; (ii) peningkatan kolaborasi dan kerja sama strategis melalui agen pelayanan AHU di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mal Pelayanan Publik (MPP) dan kerja sama strategis kekayaan intelektual; (iii) optimalisasi integrasi data layanan antar K/L; (iv) peningkatan kualitas layanan melalui pembentukan *Account Representative*; (v) transformasi digital melalui perluasan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik; (vi) peningkatan pemahaman kekayaan intelektual; dan (vii) optimalisasi jenis dan tarif PNBPN Kementerian Hukum.
5. **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, antara lain (i) penyesuaian jenis dan tarif PNBPN yang berlaku untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; (ii) kewajiban asuransi perjalanan bagi orang asing yang masuk ke Indonesia; (iii) evaluasi penambahan dan/atau pengurangan negara yang termasuk dalam subjek Visa on Arrival maupun Bebas Visa Kunjungan (BVK); (iv) meningkatkan infrastruktur di

perlintasan dan mengintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang telah terkoneksi dengan *database* lintas institusi antara lain Interpol, Disdukcapil, dll; (v) peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan dan pembayaran PNPB Keimigrasian; dan (vi) meningkatkan sinergi dengan penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan hukum terhadap orang asing.

6. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**, antara lain (i) peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, serta diversifikasi layanan informasi melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT); (ii) peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (implementasi sertipikat elektronik); (iii) optimalisasi penerimaan melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian; dan (iv) penyusunan kebijakan dalam usulan tarif yang tidak hanya untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan keberpihakan kepada masyarakat, namun tetap mempertimbangkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

PNBP Badan Layanan Umum

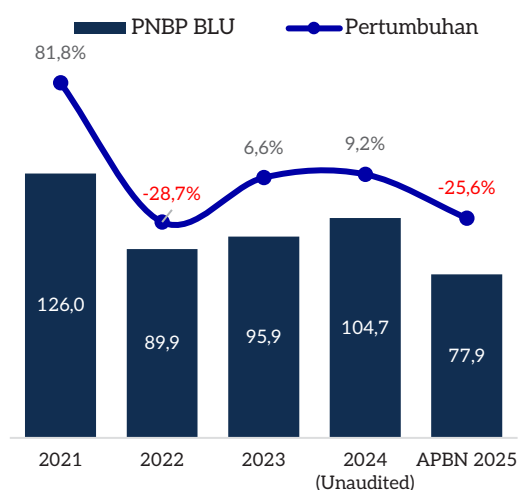
BLU terus melakukan perbaikan kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan yang fleksibel, penerapan sistem tata kelola yang baik (*good governance*), penggunaan teknologi informasi, manajemen kinerja yang terukur, peningkatan SDM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Kinerja PNPB dari BLU periode tahun 2023-2024 terus meningkat. Pada tahun 2024, kontribusi PNPB dari BLU mencapai 16,9 persen dari total PNPB atau meningkat 15,7 persen (yoy). Peningkatan PNPB dari BLU didukung oleh peningkatan jumlah BLU dari 312 unit menjadi 338 unit pada tahun 2024, yang utamanya berasal dari rumpun bidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan nilai aset, pada tahun 2024 aset BLU mencapai Rp1.064,1 triliun atau bertambah sebesar Rp20,1 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.044 triliun. Indikator kinerja BLU juga dapat dilihat dari tingkat rasio kemandirian. Setelah mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 78,41 persen, rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 75,93 persen (2023) dan 73,38 persen (2024).

Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan BLU dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan dari Rp95,9 triliun tahun 2023 menjadi Rp104,7 triliun pada tahun 2024. Kontribusi terbesar PNPB BLU tahun 2024 berasal dari BLU BBPDPKS yang mencapai Rp47,8 triliun. Namun demikian, nilai kontribusi ini mengalami penurunan sebesar Rp1,7 triliun dari tahun 2023 akibat moderasi tarif pungutan CPO. Selain itu, kenaikan penerimaan BLU didukung oleh peningkatan PNPB dari BLU Pendidikan dan Kesehatan yang meningkat masing-masing sebesar Rp1,7 triliun dan Rp2,91 triliun menjadi Rp17,45 triliun dan Rp26,04 triliun pada tahun 2024. Pada tahun 2025 PNPB dari BLU ditargetkan sebesar Rp77,9 triliun dengan mempertimbangkan perkembangan harga komoditas CPO. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, pendapatan BLU mencapai Rp17,1 triliun.

Penguatan kebijakan BLU tahun 2026 diarahkan untuk transformasi BLU yang inklusif, digital, dan berkelanjutan dalam mendukung efisiensi BLU dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka penguatan sinergi dan transformasi dilakukan dengan program-program antara lain: (i) implementasi bagi pakai sumber daya (*shared service*) dan *link and match* antar BLU; (ii) peningkatan kualitas sumber daya pemenuhan layanan; dan (iii)

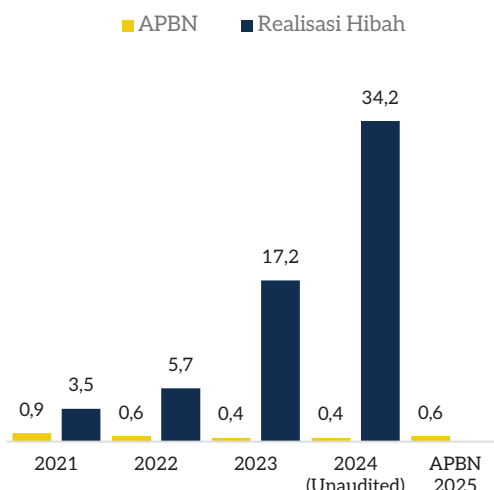
pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. Sementara itu, upaya peningkatan digitalisasi layanan dan optimalisasi efisiensi keuangan BLU dilakukan melalui (i) implementasi Sistem Informasi Terintegrasi (SAKTI BLU dan BIOS Next Gen); (ii) pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi operasional dan peningkatan layanan; (iii) peningkatan kapasitas SDM (peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pendidik); dan (iv) optimalisasi proses bisnis. Selain itu, penguatan kebijakan BLU juga diarahkan untuk optimalisasi *idle cash* dan diversifikasi melalui (i) konsolidasi saldo kas; (ii) optimalisasi aset dan unit usaha BLU; dan (iii) membangun kemitraan dengan pihak ketiga. Pada kebijakan peningkatan inovasi skema pembiayaan dan kemudahan akses layanan, upaya yang dilakukan adalah (i) implementasi *creative financing* dalam rangka penyediaan aset untuk peningkatan kapasitas layanan BLU; (ii) akselerasi program pengembangan kawasan; dan (iii) perluasan akses pembiayaan UMKM.

Grafik 32. Perkembangan PNPB BLU, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 33. Penerimaan Hibah, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Hibah

Hibah merupakan salah satu instrumen pendapatan dalam APBN. Penerimaan Hibah menurut jenisnya terdiri dari Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung. Hibah yang Direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan pada Kementerian PPN/Bappenas. Hibah Langsung adalah hibah tidak melalui mekanisme perencanaan yang diterima dari pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah.

Realisasi penerimaan Hibah selama periode 2023-2024 lebih besar dari target APBN. Realisasi penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp34,2 triliun. Kenaikan realisasi Penerimaan Hibah terutama dipengaruhi meningkatnya penerimaan pendapatan hibah dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2024. Di tahun 2025, penerimaan Hibah ditargetkan sebesar Rp0,6 triliun. Realisasi Hibah hingga triwulan I 2025 telah mencapai Rp111,7 miliar.

Pokok kebijakan penerimaan Hibah yang lebih baik diarahkan selaras dengan Kerangka Kebijakan Hibah Tahun 2025 – 2029, yaitu (i) penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); (iii) penerimaan Hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan Hibah dalam bentuk barang diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau *retrofit*; dan (v) penerimaan Hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

4.3.2. Kebijakan Belanja Negara

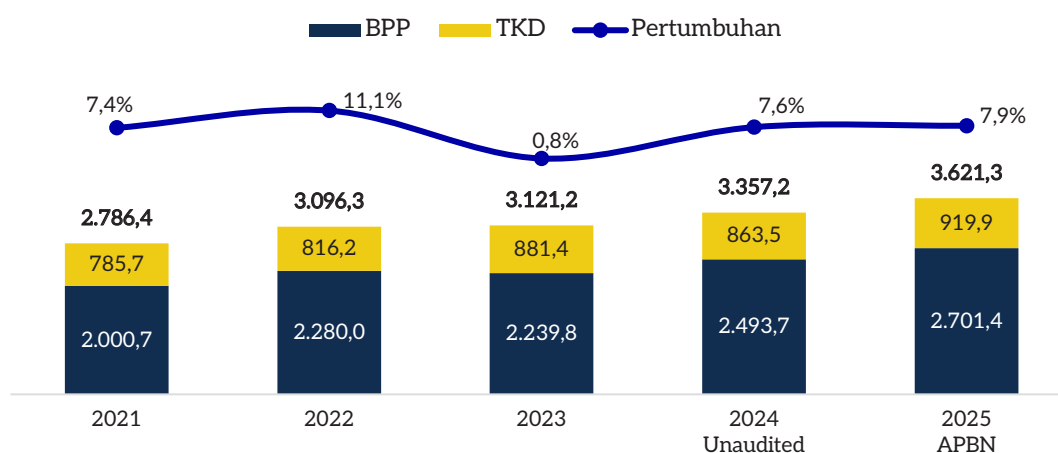
Perkembangan belanja negara pada periode 2023-2025 secara nominal menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,5 persen. Arah belanja tahun 2023 mengutamakan akselerasi pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Sementara pada 2024, kebijakan belanja diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan energi, dan pengembangan sektor-sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Realisasi Belanja Negara tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh belanja untuk pemberian layanan dasar baik kesehatan maupun pendidikan, penyaluran berbagai program bansos dan subsidi, dukungan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri. Komposisi belanja negara pada 2025 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 74,6 persen dan TKD sebesar 25,4 persen. Belanja Negara tahun 2025 telah mengakomodasi 8 visi, 17 program prioritas, dan 8 PHTC pemerintahan baru.

Pada awal 2025, Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi belanja ini bertujuan untuk mendorong efisiensi belanja operasional dan merekonstruksi agar belanja lebih produktif untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM dan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa melalui pemanfaatan teknologi. Total efisiensi yang direncanakan mencapai Rp306,7 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan TKD sebesar Rp50,6 triliun. Identifikasi rencana efisiensi mencakup belanja operasional dan non-operasional, antara lain meliputi belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi yang dilakukan ini sama sekali tidak mengurangi alokasi belanja pegawai dan bansos.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun (17,1 persen dari pagu APBN), di tengah upaya optimalisasi dan efisiensi anggaran. Angka ini didorong oleh realisasi BPP sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen dari pagu APBN) dan TKD yang mencapai Rp207,1 triliun (22,5 persen dari pagu APBN). Capaian ini tumbuh positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan pengelolaan anggaran yang terkendali dan terjaga dengan baik. Realisasi Belanja Negara dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis dan agenda pembangunan nasional, termasuk program MBG dan CKG yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, Belanja Negara juga digunakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,

melalui pemberian bansos, diskon listrik, subsidi dan kompensasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pembayaran THR bagi ASN/TNI/Polri, dan pensiunan.

Grafik 34. Perkembangan Belanja Negara, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja Negara 2026 secara umum difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat delapan fokus kebijakan yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. Ketahanan pangan diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing.
2. Ketahanan energi dilakukan dengan mendorong peningkatan lifting migas, menjaga stabilisasi harga, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk kemandirian energi dan ekonomi.
3. Program MBG untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil/menyusui akan diperluas dengan tetap memastikan kualitas pelaksanaan, termasuk kecukupan gizi dan higienitas makanan.
4. Penguatan sektor pendidikan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dalam rangka peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah.
5. Penguatan sektor kesehatan dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk melanjutkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
6. Pembangunan desa akan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal. Hal ini utamanya untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemberdayaan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan dan ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan.
7. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan melalui modernisasi alutsista dan pertahanan siber.

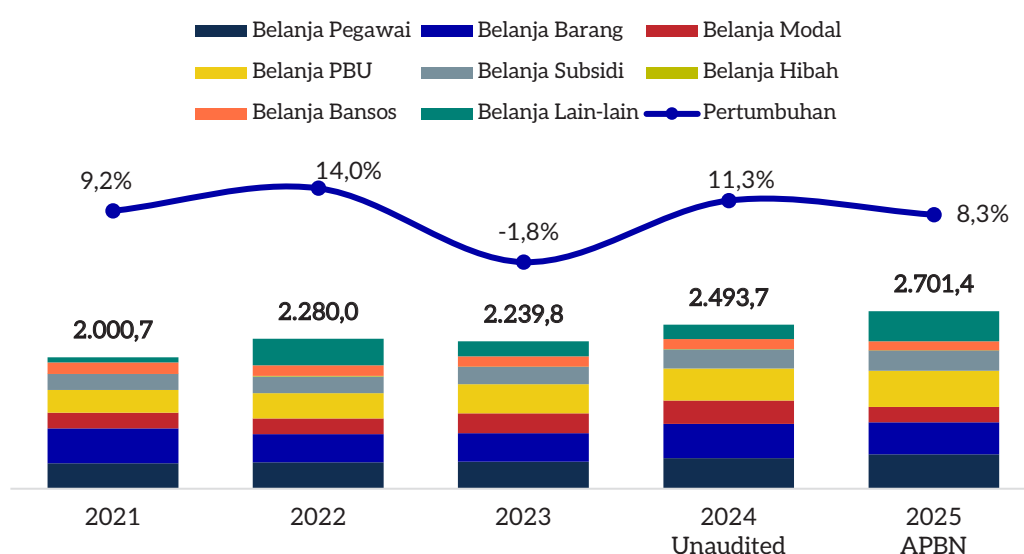
8. Percepatan investasi dan perdagangan global dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan prosedur perizinan, dan dorongan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendukung delapan fokus kebijakan, Belanja Negara tahun 2026 diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; (ii) memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa. Ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; (iii) mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; (iv) melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta (v) memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP pada periode 2023-2025 terus menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan upaya untuk menjalankan agenda pembangunan sekaligus sebagai *shock absorber* terhadap dinamika perekonomian. Rata-rata realisasi BPP selama tiga tahun terakhir tercatat sekitar 10,88 persen dari PDB, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6 persen per tahun. Pada 2024, fokus utama BPP adalah pemulihan ekonomi pascapandemi serta mitigasi dampak El Nino. Sementara pada 2025, pemerintah semakin menekankan pentingnya efisiensi belanja, dengan pengurangan anggaran untuk belanja non-prioritas dan alokasi yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan peningkatan produktivitas ekonomi melalui terobosan teknologi. Kebijakan BPP selama tiga tahun ini mencerminkan upaya untuk memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Grafik 35. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

BPP akan terus diarahkan pada belanja yang berkualitas pada tahun 2026. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Komponen BPP terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain.

Belanja Pegawai akan dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan. Untuk itu, kebijakan Belanja Pegawai diarahkan pada:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui penguatan manajemen ASN/TNI/Polri, digitalisasi birokrasi, serta penerapan pola kerja fleksibel untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan produktivitas pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas belanja pegawai melalui pemberian THR, Gaji/Pensiun ke-13, dan menjaga kesejahteraan ASN/TNI/Polri dengan tetap menjaga efisiensi anggaran.
3. Reformasi program pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) ASN/TNI/Polri untuk memastikan kesejahteraan pensiunan dan keberlanjutan program.

Belanja Barang akan diprioritaskan untuk pengadaan barang yang mendukung delapan fokus kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan belanja barang dilakukan secara transparan dan efisien untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak terhadap perekonomian. Untuk itu, kebijakan Belanja Barang diarahkan pada:

1. Penajaman belanja operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja bantuan pemerintah untuk selanjutnya dialokasikan pada belanja yang lebih produktif termasuk program prioritas.
2. Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat luar kantor.
3. Penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran.
4. Prioritisasi penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung pemberdayaan industri dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Belanja Modal sebagai investasi publik difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka peningkatan kemandirian dan daya saing, seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan semesta. Untuk itu, kebijakan Belanja Modal diarahkan pada:

1. Prioritisasi pada program prioritas untuk mendukung kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing.
2. Mendorong Belanja Modal untuk penguatan pemanfaatan teknologi seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertahanan.
3. Mengutamakan Belanja Modal dengan komponen dalam negeri tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Belanja Pembayaran Bunga Utang akan dikelola dengan hati-hati untuk mengurangi beban bunga utang dengan fokus pada utang jangka panjang dan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program prioritas. Untuk itu, kebijakan Belanja Pembayaran Bunga Utang tahun 2025 diarahkan pada:

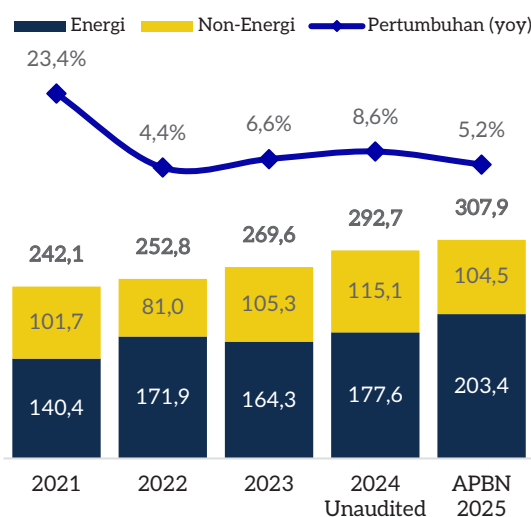
1. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang.
2. Penguatan pengelolaan bunga utang untuk menjaga risiko bunga utang pada level yang terkendali.
3. Optimalisasi potensi pendanaan utang dalam negeri guna mendorong kemandirian pembiayaan utamanya melalui pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik.
4. Reprofilng utang untuk mengendalikan risiko utang antara lain melalui *debt swap*, konversi pinjaman dan/atau *buyback*.

Belanja Bantuan Sosial (bansos) diarahkan pada akselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, kebijakan Belanja Bansos diarahkan pada:

1. Pensasaran menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Peningkatan kualitas implementasi khususnya pada program utama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah dan PBI JKN, guna memastikan kecukupan nilai manfaat untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
3. Sinergi bansos dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian yang lebih berkelanjutan.

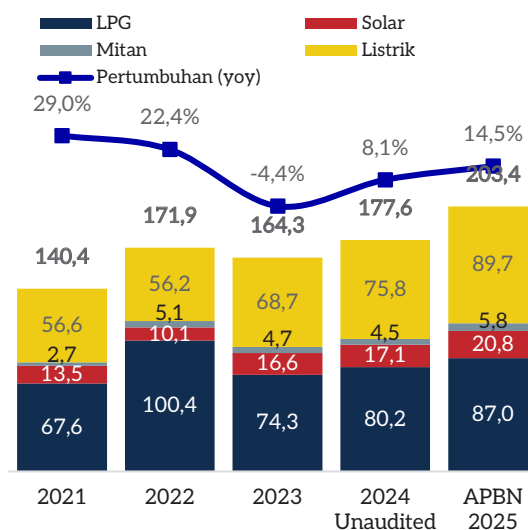
Belanja Subsidi

Grafik 36. Perkembangan Anggaran Subsidi, 2021—2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 37. Perkembangan Anggaran Subsidi Energi, 2021—2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah terus mendorong efektivitas kebijakan subsidi. Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran subsidi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap menjaga kesehatan keuangan BUMN. Kebijakan tersebut antara lain (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan Rumah Tangga R1 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir

Miskin (DTPPFM); (ii) penyesuaian tarif listrik untuk golongan non subsidi yakni masyarakat mampu dan Pemerintah; (iii) penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar; (iv) pendataan konsumen BBM dan LPG bersubsidi; (v) digitalisasi pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi; (vi) pengembangan sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi secara bertahap; dan (vii) pemberian subsidi bunga KUR sampai dengan 3 persen untuk KUR Super Mikro dan 6 persen untuk KUR jenis lainnya.

Berbagai tantangan dihadapi dalam upaya transformasi kebijakan subsidi. Beberapa tantangan tersebut adalah (i) munculnya beban kompensasi karena belum dilaksanakannya kebijakan penyesuaian harga/tarif; (ii) validitas dan akurasi data masyarakat yang berhak menerima subsidi masih harus ditingkatkan dan diperbaharui secara periodik; (iii) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi; (iv) LPG Tabung 3kg masih didistribusikan secara terbuka; (v) transformasi mekanisme penyaluran BBM dan LPG Tabung 3kg secara tepat sasaran yang perlu dioptimalkan; dan (vi) kebutuhan anggaran yang akan meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan transisi energi.

Subsidi energi dari tahun 2023–2025 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar Rp181,8 triliun atau tumbuh rata-rata sebesar 11,3 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, alokasi subsidi energi di tahun 2025 meningkat sebesar 23,8 persen dari Rp164,3 triliun menjadi Rp203,4 triliun. Subsidi energi terdiri atas subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu solar dan minyak tanah, LPG Tabung 3kg, serta subsidi listrik.

Dalam periode 2023–2025, realisasi subsidi JBT dan LPG Tabung 3kg mendominasi subsidi energi dengan besaran Rp95,6 triliun di tahun 2023 menjadi Rp113,7 triliun di tahun 2025. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan ICP dan nilai tukar Rupiah serta perkembangan volume konsumsi. Sedangkan untuk subsidi listrik sebesar Rp68,7 triliun pada 2023 menjadi Rp89,7 triliun di tahun 2025. Jika dilihat pada tahun 2025, pertumbuhan besaran subsidi listrik tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 14,3 persen. Hal ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya volume konsumsi, rasio elektrifikasi nasional, dan target capaian EBT.

Pada periode 2023 - 2025, Pemerintah terus melanjutkan reformasi subsidi energi, salah satunya melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima subsidi. Dalam rangka mewujudkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, Pemerintah melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM Solar. Namun demikian, kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan subsidi BBM melalui registrasi konsumen pengguna yang dilakukan oleh badan usaha yang menerima penugasan.

Pemerintah juga melakukan transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3kg dari subsidi selisih harga menjadi subsidi berbasis penerima manfaat, serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan basis data yang akan digunakan sebagai acuan seperti menyiapkan pengembangan fitur pendataan konsumen berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pencocokan data dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta penyiapan infrastruktur penyaluran LPG Tabung 3kg. Selaras dengan hal itu, mulai bulan Januari 2024, pembelian LPG Tabung 3kg di pangkalan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi. Oleh karena

itu, pengguna LPG Tabung 3kg dapat terdata untuk mendukung kesiapan Indonesia menuju penyaluran LPG Tabung 3kg yang berkeadilan.

Meskipun subsidi listrik lebih berkeadilan karena bersifat progresif, Pemerintah masih perlu melakukan transformasi kebijakan agar subsidi listrik hanya diterima masyarakat kurang mampu pada golongan pelanggan R1 450 VA saja. Transformasi ini membutuhkan data penerima manfaat yang telah siap dan akurat. Selain itu, transformasi ini juga perlu diikuti dengan penerapan *tariff adjustment* pada golongan nonsubsidi.

Realisasi subsidi energi sampai dengan triwulan I 2025 sebesar Rp32,2 triliun atau 15,8 persen terhadap APBN 2025. Realisasi tersebut meliputi subsidi BBM sebesar Rp1,5 triliun atau 5,5 persen terhadap APBN 2025, subsidi LPG Tabung 3kg sebesar Rp14,1 triliun atau 16,2 persen terhadap APBN 2025 dan subsidi listrik mencapai Rp16,6 triliun atau 18,5 persen terhadap APBN 2025. Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN, oleh karena itu pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data, dan keberlanjutan usaha BUMN.

Berdasarkan evaluasi kebijakan dari tahun 2023 hingga 2025 maka kebijakan subsidi energi pada tahun 2026 yakni:

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3kg
 - a. **Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah.** Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Dalam menetapkan besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.
 - b. **Melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran.** Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi disertai dengan registrasi konsumen penggunaannya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya.
 - c. **Melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat.** Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3kg berbasis teknologi. Sehingga pengguna LPG Tabung 3kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address*. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Kebijakan Subsidi Listrik
 - a. **Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan.** Kebijakan ini disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non subsidi. Saat ini pemberian subsidi untuk Rumah Tangga golongan R1 450 VA belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih diberikan untuk seluruh pelanggan. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi hanya diberikan kepada Rumah Tangga yang berhak.
 - b. **Mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.** Pemerintah telah berkomitmen

untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

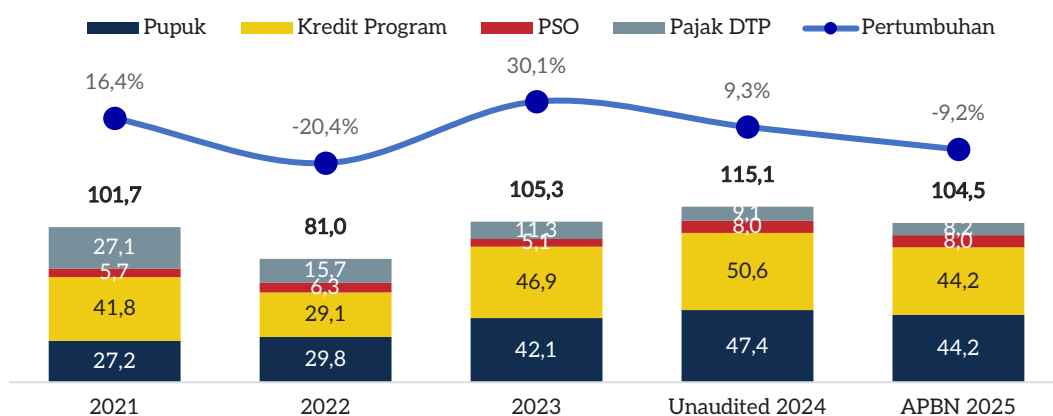
Subsidi Nonenergi

Dalam periode 2023-2025, realisasi Subsidi Nonenergi mengalami peningkatan dari Rp105,3 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp115,1 triliun pada tahun 2024, dan dialokasikan Rp104,5 triliun pada tahun 2025. Peningkatan realisasi subsidi Nonenergi di tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh peningkatan subsidi bunga kredit program, subsidi pupuk, dan subsidi *Public Service Obligation* (PSO). Peningkatan realisasi tersebut antara lain disebabkan oleh adanya pembayaran kurang bayar subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya. Subsidi Nonenergi terdiri atas Subsidi Pupuk, Subsidi PSO (PT Pelni, PT KAI, LKBN Antara), Subsidi Bunga Kredit Program (a.l. Subsidi Bunga KUR, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan), dan Subsidi Pajak.

Realisasi Subsidi Nonenergi didominasi oleh Subsidi Bunga Kredit Program dan Subsidi Pupuk. Pada periode 2023 dan 2024, rata-rata proporsi Subsidi Bunga Kredit Program terhadap total subsidi nonenergi adalah sebesar 44,3 persen per tahun dan Subsidi Pupuk rata-rata sebesar 40,6 persen per tahun. Realisasi Subsidi Pupuk pada periode 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,7 persen dari tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2025 alokasi Subsidi Bunga Kredit Program yaitu sebesar Rp44,2 triliun dan Subsidi Pupuk sebesar Rp44,2 triliun.

Realisasi Subsidi Bunga KUR masih mendominasi proporsi total realisasi Subsidi Bunga Kredit Program. Rata-rata kontribusi realisasi Subsidi Bunga KUR terhadap keseluruhan Subsidi Bunga Kredit Program selama periode 2023-2024 sebesar 87,5 persen per tahun. Dalam periode yang sama, realisasi Subsidi Bunga KUR juga meningkat dengan pertumbuhan 8,4 persen, yaitu dari Rp40,9 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp44,4 triliun pada tahun 2024. Tren peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan plafon KUR dan juga peningkatan debitur yang mengakses KUR. Untuk tahun 2025, Pemerintah mengalokasikan Subsidi Bunga KUR sebesar Rp38,3 triliun.

Grafik 38. Perkembangan Anggaran Subsidi Nonenergi, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja Subsidi Nonenergi pada triwulan I 2025 adalah sebesar Rp0,2 triliun, atau 0,2 persen dari alokasi anggaran 2025. Realisasi tersebut masih didominasi oleh Subsidi PSO sebesar Rp0,1 triliun atau 70,6 persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Sementara, realisasi lain dari subsidi nonenergi adalah Subsidi Bunga Kredit Program telah mencapai Rp54,1 miliar dan subsidi bunga CPP sebesar Rp53,1 miliar.

Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan penyaluran Subsidi Nonenergi. Secara umum penyempurnaan kebijakan Subsidi Pupuk ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi yang mampu mendorong produktivitas pertanian. Penyempurnaan kebijakan tersebut antara lain: (i) peningkatan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi dan validasi data petani penerima; (ii) melakukan pemadanan data penerima pupuk bersubsidi dengan data lain seperti dukcapil, sensus pertanian, regsosok, dan sejenisnya; (iii) subsidi pupuk diberikan kepada komoditas prioritas; (iv) jenis pupuk bersubsidi yang diberikan hanya urea, NPK, dan organik; dan (v) penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung dari BUMN Pupuk hingga ke titik serah kepada penerima pupuk bersubsidi.

Pemerintah juga melakukan penyempurnaan kebijakan Subsidi Nonenergi lainnya. Penyempurnaan kebijakan Subsidi Bunga KUR antara lain (i) menetapkan target debitur baru dan debitur naik kelas; (ii) menetapkan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; (iii) suku bunga KUR sebesar 3-6 persen bagi petani maupun UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing usaha. Beberapa penyempurnaan kebijakan Subsidi Nonenergi lainnya: (i) pemberian pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan bunga 6 persen kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan cara menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG); (ii) pemberian SBUM perumahan bagi MBR yang terintegrasi dengan program FLPP; (iii) perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut, serta dukungan terhadap pengadaan infrastruktur kereta ringan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Subsidi Nonenergi secara umum berkaitan dengan efektivitas penyaluran. Data penerima Subsidi Nonenergi masih belum sepenuhnya valid, serta pelaksanaan penyalurannya masih perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, verifikasi dan validasi data petani penerima subsidi pupuk belum optimal, karena masih terdapat data petani penerima yang belum tidak menebus pupuk bersubsidi. Selain itu, subsidi bunga pinjaman penyelenggaraan CPP dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Alsintan (KUA) juga belum optimal penyalurannya sehingga realisasinya di bawah target. Dalam rangka mendukung Asta Cita terutama mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, dan ekonomi kreatif, maka disusunlah kebijakan Subsidi Nonenergi untuk sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

1. Kebijakan Subsidi Pupuk

Kebijakan Subsidi Pupuk yang akan dilaksanakan yaitu: (i) membangun dan mengembangkan sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi secara bertahap, sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang mengatur mengenai satu data Indonesia; (ii) melakukan verifikasi dan validasi data penerima Subsidi Pupuk minimal 1-2 kali setahun, agar penerima pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran; (iii) memadankan data penerima subsidi pupuk dengan data lain seperti data sensus pertanian, dukcapil, regsosok, dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan; (iv) jenis pupuk bersubsidi yang dapat diberikan yaitu urea, NPK, dan organik, serta apabila

diperlukan dapat diberikan juga jenis SP36 dan ZA; (v) subsidi pupuk diberikan kepada komoditas prioritas; (vi) penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung dari BUMN Pupuk hingga ke titik serah kepada penerima pupuk bersubsidi yaitu gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), pengecer, dan/atau koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk; dan (vii) petani penerima subsidi pupuk dapat melakukan penebusan pupuk dengan menggunakan KTP/kartu tani digital/biometrik dan membayar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Subsidi Bunga KUA

Kebijakan Subsidi Bunga KUA yang akan dilaksanakan yaitu: (i) melanjutkan pemberian suku bunga 3 persen kepada petani atau kelompok tani atau UMKM sektor pertanian; (ii) pemberian plafon dengan besaran sampai Rp2 miliar serta calon debitur bukan debitur KUR; dan (iii) pinjaman hanya diberikan satu kali per debitur untuk pengadaan alsintan dan selanjutnya wajib diusahakan sebagai program Taksi Alsintan.

3. Kebijakan SSRG

Kebijakan SSRG yang akan dilaksanakan yaitu: (i) melanjutkan pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga 6 persen per tahun kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan menjaminkan komoditas yang disimpan di gudang SRG; (ii) melakukan sinkronisasi sistem informasi Sistem Informasi Resi Gudang (SIRG) dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); (iii) melakukan pelatihan pengelola gudang, dan perluasan lokasi sebagai upaya penetrasi gudang ke pasar; (iv) sinergi dan penguatan peran Asosiasi Pengelola Gudang SRG; (v) penguatan pemantauan penyaluran SSRG; dan (vi) sinergi K/L dalam pengembangan dan perluasan pemanfaatan SRG.

4. Kebijakan Subsidi Bunga KUR

Kebijakan Subsidi Bunga KUR yang akan dilaksanakan yaitu: (i) melanjutkan pemberian suku bunga KUR kepada petani/nelayan/UMKM sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro dan sebesar 6 persen untuk KUR jenis lain; (ii) penetapan target debitur baru dan debitur naik kelas untuk memperluas UMKM penerima KUR; (iii) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebanyak 60-65 persen; dan (iv) pengenaan suku bunga KUR naik berjenjang kepada debitur KUR Mikro dan Kecil yang melakukan pengajuan KUR berulang.

5. Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP

Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP akan dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pemberian pinjaman dengan penjaminan/tanpa penjaminan kepada Perum BULOG dan/atau ID Food melalui perbankan dan non perbankan untuk pembelian komoditas jenis pangan tertentu. Selanjutnya, CPP dapat digunakan untuk menanggulangi gejolak harga pangan, kekurangan pangan, bencana alam, keadaan darurat, dan bencana sosial.

6. Kebijakan Subsidi Bunga Air Bersih

Kebijakan Subsidi Bunga Air Bersih akan dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pemberian jaminan dan subsidi bunga maksimal 5 persen untuk memberikan kredit investasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kebijakan ini ditujukan untuk

mendukung percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dengan target akses aman 100 persen air minum.

Selain itu, beberapa kebijakan Subsidi Nonenergi lainnya.

1. Kebijakan Subsidi *Public Service Obligation* (PSO)

Kebijakan Subsidi PSO merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT Pelni dan PT KAI) serta untuk mendukung penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara).

- a. Kebijakan Subsidi PSO transportasi kepada PT Pelni dan PT KAI umumnya dilakukan untuk perbaikan kualitas dan inovasi dari sisi pelayanan kelas ekonomi dan juga dukungan penyelenggaraan dan operasional kereta ringan (*Light Rail Transit/LRT*). Berikut kebijakan PSO transportasi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) rencana pemberlakuan tarif khusus kepada para penumpang berkebutuhan khusus (disabilitas) untuk penyelenggaraan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dan LRT Jabodebek; (ii) penyelenggaraan layanan mudik gratis bagi peserta angkutan motor melalui moda kereta api; dan (iii) menyelenggarakan PSO PT Pelni untuk penumpang kelas ekonomi.
- b. Kebijakan Subsidi PSO LKBN Antara yang akan dilaksanakan yaitu: (i) sebagai penyedia informasi publik yang murah, mudah diakses, dan terjangkau; (ii) mendukung ketersediaan informasi yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam kerangka NKRI; (iii) menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik; (iv) melakukan pemerataan informasi melalui televisi, radio, media cetak, dan digital termasuk di wilayah 3T.

2. Kebijakan Subsidi Pajak DTP

Kebijakan Subsidi Pajak DTP yang akan dilaksanakan, yaitu melanjutkan pemberian subsidi pajak PPh DTP reguler pada sektor panas bumi dan SBN valas. Tujuan pemberian DTP untuk sektor panas bumi diantaranya untuk mendorong pengembangan EBT dan mendukung transisi energi nasional menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sementara, DTP SBN Valas diberikan dengan tujuan antara lain untuk menarik investasi asing, dan menjaga stabilitas nilai tukar.

3. Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program

Kebijakan subsidi bunga kredit program lainnya antara lain melalui subsidi perumahan dalam rangka mengurangi *backlog* perumahan MBR dan subsidi bunga pinjaman daerah.

- a. Kebijakan SBUM Perumahan yang akan dilaksanakan yaitu: melanjutkan pemberian SBUM sebagai komplementer Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dari FLPP untuk meningkatkan keterjangkauan akses MBR pada KPR FLPP dan besaran yang diberikan Rp4 juta/unit rumah untuk nonPapua dan Rp10 juta/unit rumah untuk wilayah Papua. Untuk Subsidi Bunga Kredit Perumahan masih dialokasikan dalam rangka membayar subsidi selisih bunga KPR yang telah diterbitkan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang akan dilaksanakan yaitu: melanjutkan pengalokasian untuk membayar subsidi bunga yang diterbitkan tahun-tahun sebelumnya, serta pinjaman yang diajukan terdahulu digunakan untuk

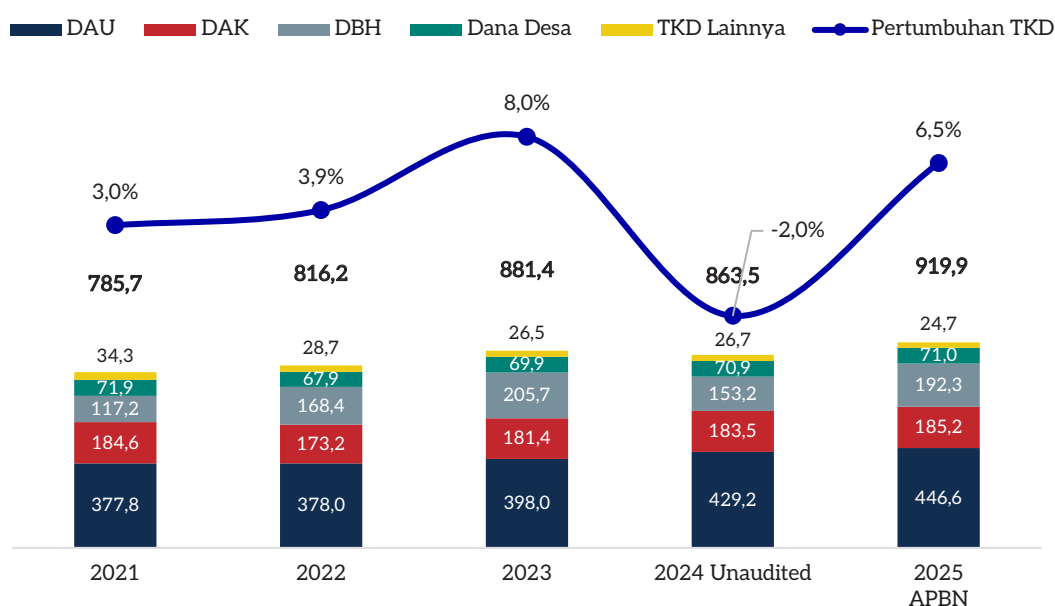
pembangunan infrastruktur antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Transfer ke Daerah

TKD merupakan alokasi belanja APBN ke daerah sebagai pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sejak tahun 2023, TKD berbasis kinerja diimplementasikan sesuai UU HKPD, untuk mempercepat peningkatan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan.

Perkembangan TKD tahun 2023-2025 bergerak fluktuatif. Penyaluran TKD tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun atau 108,2 persen dari pagu APBN 2023, meningkat 8,0 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini seiring dengan penyelesaian kurang bayar DBH, kebijakan relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan perbaikan kinerja daerah dalam memenuhi syarat penyaluran. Pada tahun 2024, seiring dengan moderasi harga komoditas yang mempengaruhi besaran DBH, penyaluran TKD menjadi Rp863,5 triliun atau 100,7 persen dari pagu APBN 2024. TKD tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp919,9 triliun. Hingga Maret 2025, realisasi TKD mencapai Rp207,09 triliun (22,51 persen dari pagu).

Grafik 39. Perkembangan Transfer ke Daerah, 2021-2025 (Rp triliun)



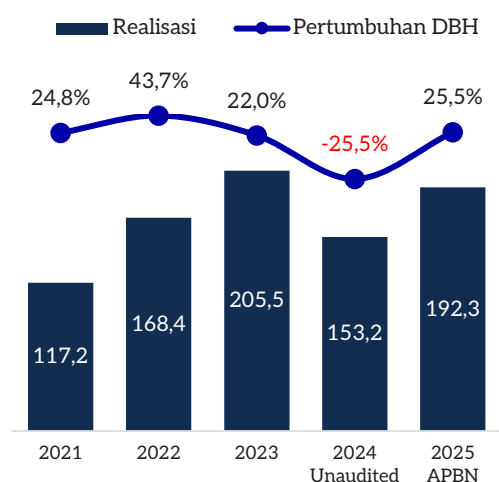
Sumber: Kementerian Keuangan

Dana Bagi Hasil

Pada periode tahun 2023 - 2025, DBH cenderung berfluktuasi mengikuti tren penerimaan negara yang dibagihasilkan. Pada tahun 2023, realisasi DBH sangat tinggi sebagai akibat dari penyaluran Kurang Bayar DBH dan perubahan alokasi DBH yang bersumber dari kenaikan harga komoditas batubara. Realisasi DBH tahun 2024 sebesar Rp153,17 triliun, sedangkan DBH tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp192,28 triliun. Hingga Maret 2025, realisasi DBH adalah sebesar Rp26,09 triliun (13,57 persen dari pagu).

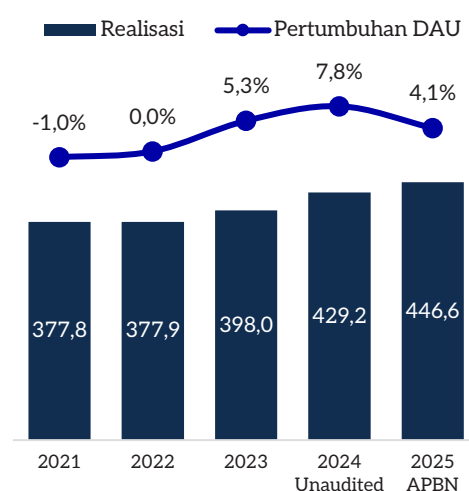
Pengelolaan DBH masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan DBH *Earmarked* yang masih perlu dioptimalkan; (ii) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur DBH yang masih perlu ditingkatkan; dan (iii) adanya deviasi proyeksi DBH yang menimbulkan Kurang Bayar/Lebih Bayar.

Grafik 40. Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 41. Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dana Alokasi Umum

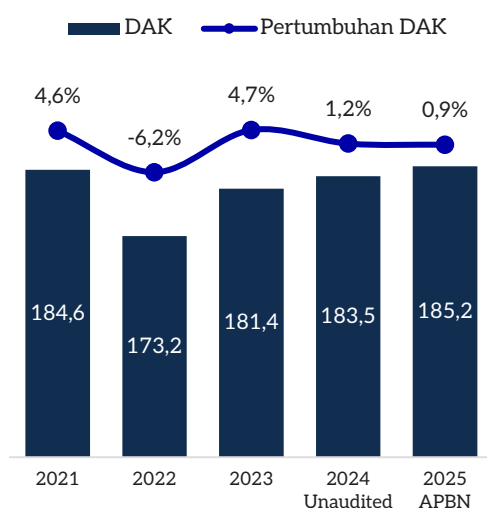
Pada periode 2023 - 2025, DAAU meningkat dari Rp398,0 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp446,6 triliun pada tahun 2025. Hingga Maret 2025, realisasi DAAU adalah sebesar Rp121,19 triliun (27,13 persen dari pagu). Pengelolaan DAAU masih dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya: (i) pemahaman pemerintah daerah mengenai implementasi skema baru DAAU masih perlu ditingkatkan; (ii) perlunya standardisasi dan kelengkapan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sebagai basis perhitungan alokasi DAAU; (iii) pemanfaatan *specific grant* untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar yang perlu dioptimalkan; dan (iv) tata kelola penyaluran DAAU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang masih perlu ditingkatkan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada periode 2023-2025, DAK mengalami peningkatan dari Rp181,4 triliun di tahun 2023 menjadi Rp185,2 triliun tahun 2025. DAK Nonfisik merupakan jenis DAK dengan alokasi tertinggi mencapai Rp146,7 triliun di tahun 2025, meningkat 12,4 persen (yoy). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik. Sementara itu, DAK Fisik dan Hibah kepada Daerah berfluktuasi seiring dengan dinamika prioritas nasional. Hingga Maret 2025, realisasi DAK adalah Rp39,54 triliun (21,34 persen dari pagu).

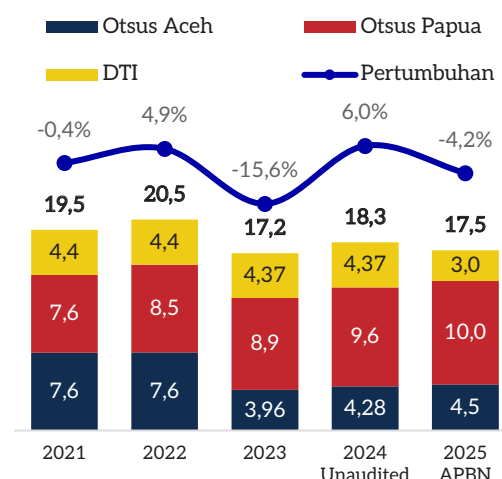
Pengelolaan setiap jenis DAK masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pengelolaan DAK fisik yang masih perlu dioptimalkan yaitu: (i) kinerja penyerapan anggaran; (ii) kualitas output; (iii) proses pengadaan barang dan jasa; dan (iv) koordinasi antar K/L pengampu dan daerah. DAK Nonfisik dihadapkan pada beberapa tantangan yang masih perlu dioptimalkan/ditingkatkan dalam kaitannya dengan: (i) penyerapan anggaran; (ii) sinergi antar K/L; (iii) perencanaan dan pengusulan alokasi dalam memenuhi *readiness criteria*; dan (iv) risiko perubahan kebijakan di tahun berjalan. Hibah kepada Daerah dihadapkan pada tantangan terutama pada penguatan perencanaan kegiatan dan komitmen penganggaran oleh pemerintah daerah serta peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

Grafik 42. Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 43. Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada pemerintah daerah di wilayah Papua dan Aceh. Pemerintah daerah di wilayah Papua mendapatkan alokasi Dana Otsus sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional selama 20 tahun, mulai dari tahun 2022 hingga 2041. Selain itu, pemerintah daerah di wilayah Papua juga mendapatkan DTI yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi. Sementara itu, Dana Otsus untuk Aceh diberikan selama 20 tahun sejak tahun 2008 hingga 2027. Alokasi tersebut sebesar 2 persen dari pagu DAU nasional untuk 2008 s.d. 2022, dan 1 persen untuk 2023 s.d. 2027.

Pada periode 2023-2025, Dana Otsus relatif stabil. Dana Otsus didominasi oleh Otsus Papua yang meningkat dari Rp8,9 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp10,0 triliun di tahun 2025. Alokasi Otsus Aceh juga mengalami kenaikan dari Rp3,96 triliun di tahun 2023 menjadi Rp4,5 triliun di tahun 2025. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2025 disesuaikan menjadi Rp3,0 triliun.

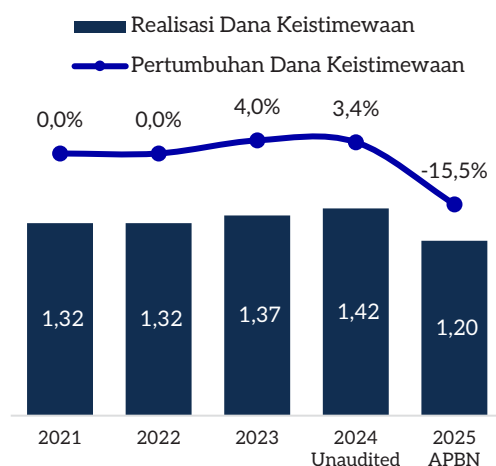
Pengelolaan Dana Otsus dan DTI menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain: (i) kapasitas SDM dalam mengelola Dana Otsus dan DTI; (ii) kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; (iii) kualitas data dan informasi laporan pelaksanaan Dana Otsus dan DTI; serta (iv) dukungan sistem informasi.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dalam lima tahun terakhir, Dana Keistimewaan DIY telah dilakukan perbaikan kebijakan. Beberapa penyempurnaan kebijakan Dana Keistimewaan DIY antara lain (i) meningkatnya kualitas perencanaan dana; (ii) membaiknya tata kelola evaluasi yang dilakukan oleh K/L dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pemerintah daerah; (iii) meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Keistimewaan DIY; dan (iv) meningkatnya efisiensi penggunaan dengan membatasi kegiatan yang bersifat rutin tidak dapat dibiayai melalui Dana Keistimewaan DIY. Hingga Maret 2025, realisasi Dana Keistimewaan DIY adalah sebesar Rp0,15 triliun (12,5 persen dari pagu).

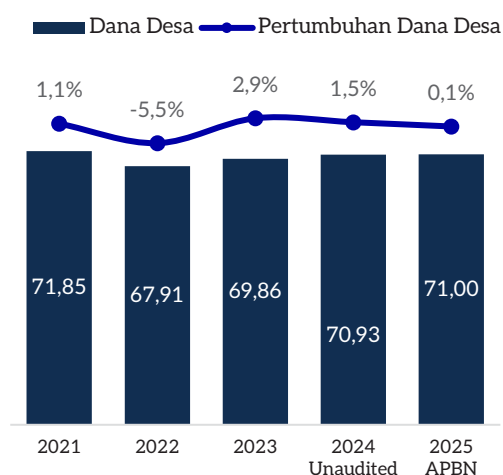
Kinerja Dana Keistimewaan DIY perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, penggunaan Dana Keistimewaan DIY perlu dioptimalkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, penguatan sinergi antara belanja pusat dan daerah serta sumber pendanaan lainnya, serta peningkatan efektivitas dan akuntabilitas Dana Keistimewaan DIY melalui optimalisasi penggunaan sistem informasi.

Grafik 44. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 45. Perkembangan Dana Desa, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dana Desa

Dana Desa periode 2023 - 2025 tumbuh rata-rata 1,5 persen setiap tahun. Pada tahun 2025, alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk 75.259 desa. Implementasi Dana Desa selama periode 2023 hingga 2025 ditujukan untuk percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat

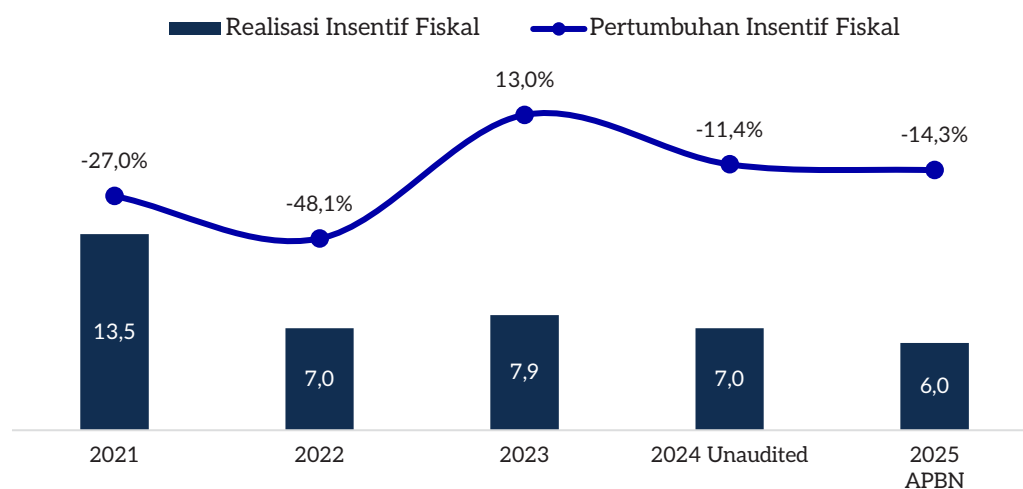
desa, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di Indonesia melalui berbagai program prioritas yang telah ditetapkan. Hingga Maret 2025, realisasi Dana Desa adalah sebesar Rp19,83 triliun (27,93 persen dari pagu).

Dalam penyusunan kebijakan dan implementasi Dana Desa, terdapat beberapa tantangan yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Tantangan tersebut antara lain: (i) tata kelola dan akuntabilitas yang perlu ditingkatkan; (ii) kapasitas SDM Desa yang terbatas; (iii) perbaikan kualitas data desa dan integrasi sistem data keuangan berbasis elektronik; (iv) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang masih perlu ditingkatkan; dan (v) koordinasi kebijakan antarlembaga yang perlu ditingkatkan.

Dana Insentif Fiskal

Perkembangan Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah periode 2023-2025 relatif stagnan. Realisasi Dana Insentif Fiskal tahun 2023 mencapai Rp7,91 triliun atau 98,83 persen dari pagu APBN, yang merupakan realisasi tertinggi periode 2023-2025. Hal ini disebabkan adanya peningkatan koordinasi dan pendampingan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pada tahun 2025 alokasi Dana Insentif Fiskal adalah sebesar Rp6 triliun yang terbagi untuk Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4 triliun dan Dana Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan sebesar Rp2 triliun. Hingga Maret 2025, realisasi Dana Insentif Fiskal adalah sebesar Rp0,29 triliun (4,89 persen dari pagu).

Grafik 46. Perkembangan Dana Insentif Fiskal, 2021-2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Implementasi kebijakan Dana Insentif Fiskal dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut di antaranya: (i) masih terdapat indikator yang bersifat pemenuhan administrasi dan penyiapan regulasi dalam perhitungan kinerja pemerintah daerah; (ii) penyampaian data indikator yang digunakan dalam perhitungan kinerja pemerintah daerah tahun berjalan masih belum tepat waktu; (iii) pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan dana insentif fiskal serta implikasinya terhadap pengelolaan APBD masih perlu ditingkatkan; serta (iv) pemenuhan dan penyampaian syarat salur yang belum tepat waktu.

Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*.
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD per jenis transfer tahun 2026, sebagai berikut.

Arah kebijakan DBH Tahun 2026, yaitu:

1. Memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagihasilkan.
2. Mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan DAU Tahun 2026 yaitu:

1. Memperbaiki formula penghitungan alokasi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelayanan publik termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya.
2. Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah.
3. Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional.
4. Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi.
5. Perbaiki tata kelola DAU terutama dalam aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Arah kebijakan DAK Tahun 2026 secara umum, yaitu:

1. Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik,
2. Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta *matching program*, dan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan.

Arah kebijakan Dana Otsus dan DTI Tahun 2026:

1. Mendukung Program Prioritas Nasional melalui kerja sama K/L, TNI/Polri dan pemerintah daerah yang terintegrasi;

2. Menyelaraskan kebijakan Dana Otsus dan DTI dengan target capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif;
3. Menyinerjikan perencanaan dan penggunaan Dana Otsus dan DTI dengan jenis pendanaan lain;
4. Meningkatkan kualitas penyaluran yang didasarkan pada kinerja pemanfaatan Dana Otsus dan DTI; dan
5. Memperkuat kualitas tata kelola melalui peningkatan kualitas SDM, didukung dengan kemampuan pertukaran data dan informasi antar sistem informasi (interoperabilitas) dan penguatan badan pengarah.

Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2026:

1. Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan DIY dengan belanja K/L dalam rangka mendukung prioritas nasional;
2. Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk mendanai kewenangan keistimewaan yang difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, pengurangan kesenjangan antarwilayah di DIY, serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja penunjang kegiatan.
3. Meningkatkan sinergi penggunaan Dana Keistimewaan DIY dengan sumber penerimaan APBD lainnya; dan
4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.

Arah kebijakan Dana Desa Tahun 2026, yaitu:

1. Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui:
 - a. Mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - b. Memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lambung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa lainnya (BUMDes dan UMKM);
 - c. Membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana;
 - d. Membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa;
 - e. Mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen, dan/atau
 - f. Melaksanakan program prioritas desa lainnya.
2. Menambah kriteria alokasi afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.
3. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa.

Arah kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun 2026, yaitu:

1. Mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah;

2. Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah;
3. Menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional;
4. Mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal.

Boks 7. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan: Langkah Menuju Ekonomi Inklusif

Literasi dan inklusi keuangan telah menjadi bagian dari kebijakan strategis Pemerintah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), RPJMN Tahun 2025–2029, dan RPJPN Tahun 2025–2045. Hal ini menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dari upaya pengembangan sektor keuangan yang berujung pada upaya pembangunan ekonomi inklusif.

UU P2SK mengamanatkan Pemerintah, BI, dan OJK harus berkoordinasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Koordinasi dan sinergi tersebut di antaranya dilakukan melalui penyusunan strategi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan strategi literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, peningkatan inklusi keuangan dilakukan melalui percepatan akses keuangan termasuk bagi kelompok masyarakat marginal, sementara peningkatan literasi keuangan dilakukan dengan dukungan penguatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah. Asta Cita juga memuat sejumlah kebijakan strategis berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan.

Berdasarkan *Global Findex Data 2021*, indeks inklusi keuangan Indonesia menempati peringkat kedua terendah di antara negara anggota G20 dengan indeks 51,8 persen. Di kawasan ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari Singapura (98 persen), Malaysia (88 persen), dan Thailand (96 persen) meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata negara ASEAN (50,6 persen). Secara global, indeks Indonesia lebih rendah dari *upper middle-income countries* (84,3 persen) dan rata-rata dunia (76,2 persen) (World Bank, 2022).

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan serta inklusi keuangan Indonesia meningkat. Indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 65,43 persen dan inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. Meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat beberapa tantangan utama yaitu kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan, disparitas antardaerah, kesenjangan antarsektor (inklusi sektor nonperbankan masih <15 persen), serta kesenjangan pemanfaatan produk keuangan.

Akses keuangan Indonesia baik dari sisi penawaran maupun permintaan masih mengalami ketimpangan. Dari sisi penawaran, ketimpangan terjadi pada kepemilikan rekening. Dari sisi permintaan, ketimpangan terjadi pada kepemilikan rekening. Kenaikan jumlah rekening tabungan tidak menunjukkan kualitas inklusi keuangan. Menurut LPS (2024), terdapat 573 juta rekening tabungan—setara lebih dari 5 rekening per orang usia di atas 15 tahun—naik 280 juta sejak 2019, didorong oleh rekening pelajar, penerima PKH, dan dampak Covid-19. Meskipun demikian, peningkatan jumlah rekening bank tidak disertai dengan peningkatan akses ke sektor keuangan lainnya. Berdasarkan data OJK, investor pasar modal

tercatat sebanyak 13 juta dan investor kripto sebanyak 19 juta. Adapun kepesertaan JHT BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 18,3 juta peserta, dana pensiun sukarela sebanyak 22,9 juta, dan asuransi jiwa sebanyak 21,69 juta.

Akses terhadap pembiayaan produktif dari sisi permintaan juga masih terbatas. Sekitar 40 persen usaha ultra mikro belum memiliki akses pembiayaan, sedangkan yang telah mendapatkan pembiayaan masih didominasi dari sumber pembiayaan informal (keluarga dan rentenir). Hal ini yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan agunan dan riwayat kredit (BRI Institute, 2022).

Asta Cita menekankan peningkatan harmonisasi kebijakan sektor moneter (BI dan OJK), sektor fiskal, dan sektor riil sebagai stabilisator sekaligus stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi acuan dalam memperkuat ekosistem sektor keuangan, termasuk dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan baik di pusat dan daerah sejalan dengan RPJMN 2025 - 2029, serta perlindungan konsumen sektor keuangan termasuk di forum internasional maupun domestik.

Upaya peningkatan literasi keuangan di Indonesia dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Di forum internasional, komitmen peningkatan literasi dan inklusi keuangan dilakukan melalui G20 *Global Partnership for Financial Inclusion ASEAN Working Committee for Financial Inclusion*. Di level domestik, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dilaksanakan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai oleh Presiden dan beranggotakan Menteri serta ketua lembaga, termasuk Menteri Keuangan. Di tingkat daerah, upaya peningkatan inklusi keuangan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). UU P2SK juga mengamanatkan dibentuknya komite nasional yang bertugas untuk mengoordinasikan peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui Peraturan Pemerintah. Komite nasional tersebut akan mentransformasi DNKI dengan memperkuat kelembagaan, dan memperjelas mekanisme koordinasi antara pusat dengan daerah.

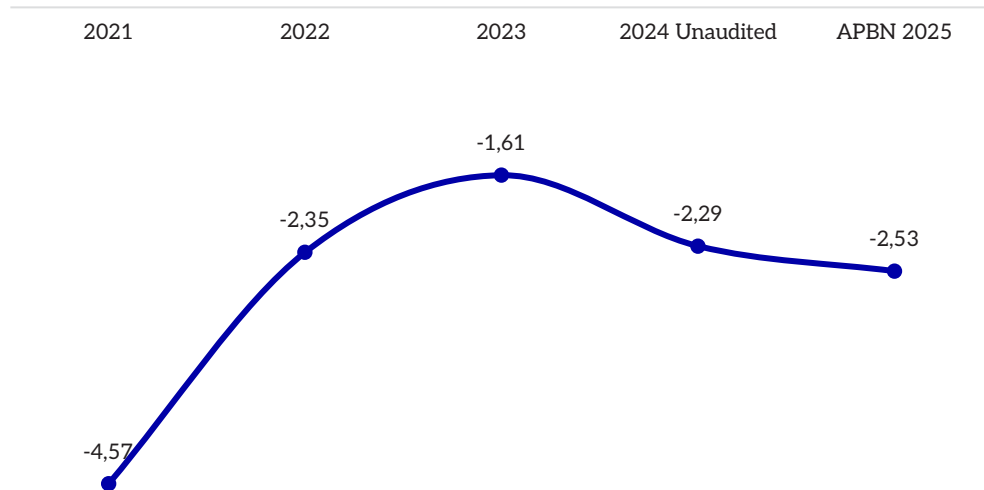
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya terkait membuka akses ke layanan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, BI, OJK, dan sektor swasta, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045. Strategi ini tidak hanya akan memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

4.3.3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Dalam menghadapi tekanan global yang sangat dinamis dan mengatasi masalah struktural, kebijakan fiskal 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48% – 2,53% PDB untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui *counter cyclical* yang efektif, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fiskal. Arah kebijakan pembiayaan fiskal 2026, dijaga secara prudent, inovatif dan sustainable untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang ditempuh, dengan: (i) mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan manageable; (ii) mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan memberdayakan dan mensinergikan peran BLU, dan SMV serta BPI Danantara; (iii) memanfaatkan SAL untuk antisipasi

ketidakpastian; (iv) peningkatan akses pembiayaan investasi bagi MBR dan UMKM; serta (v) mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.

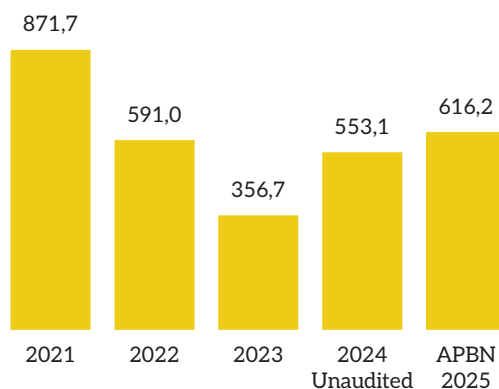
Grafik 47. Perkembangan Defisit, 2021 – 2025 (% PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan

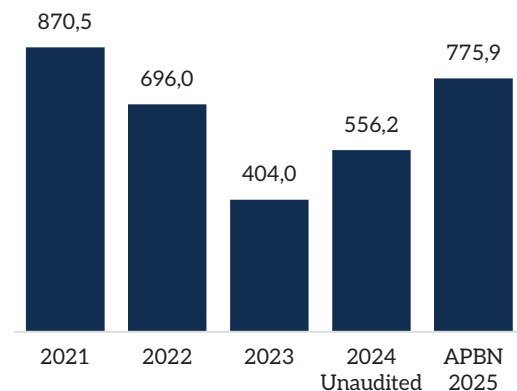
Pembiayaan anggaran sebagai salah satu aspek utama dari APBN memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Peranan penting tersebut salah satunya digunakan untuk menutup *financing gap* pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Pembiayaan Anggaran terdiri dari Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, dan Pembiayaan Anggaran Lainnya.

Grafik 48. Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2021 – 2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 49. Perkembangan Pembiayaan Utang, 2021 – 2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pembiayaan Utang

Sebagai bagian dari pengelolaan APBN yang kredibel, akuntabel, dan andal, kebijakan pengelolaan utang berpegang teguh pada prinsip akseleratif, efisien, dan seimbang. Pengelolaan utang yang akseleratif menjalankan peran sebagai katalisator percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan utang diupayakan melalui pengadaan utang baru dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, serta melalui inovasi dan diversifikasi instrumen utang. Pengelolaan utang yang seimbang diwujudkan melalui pembentukan struktur portofolio utang yang optimal dengan kalibrasi seimbang antara biaya dan risiko.

Kebijakan pengelolaan utang tahun 2026 diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan innovative, prudent, dan sustainable dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pengelolaan utang dilakukan dengan:

1. Mengendalikan risiko pengelolaan portofolio utang pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang;
2. Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap;
3. Mengembangkan instrumen utang dalam upaya mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan;
4. Memperluas basis investor melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam kerangka kerja strategi hubungan investor yang komprehensif dan terstruktur;
5. Mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN;
6. Memanfaatkan skema pengelolaan portofolio utang dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang;
7. Mendukung pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan;
8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan portofolio utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala, dan strategi komunikasi adaptif; dan
9. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

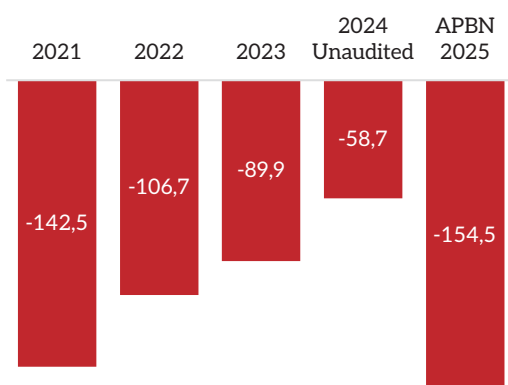
Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi menghadapi berbagai tantangan yang beragam. Tantangan tersebut antara lain (i) dampak positif sosial dan ekonomi masih perlu dioptimalkan; (ii) *good corporate governance* perlu terus dijaga; (iii) peran BLU masih perlu ditingkatkan; (iv) kualitas SDM perlu ditingkatkan (v); akses kesehatan dan penyediaan perumahan yang belum optimal; serta (iv) peningkatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar K/L,

pemerintah daerah, BPI Danantara/BUMN, BLU, dan badan/lembaga lainnya yang perlu dikuatkan.

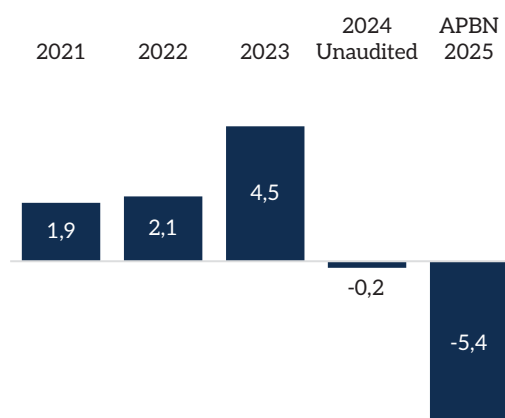
Pembiayaan Investasi tahun 2026 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyediaan perumahan bagi MBR. Pembiayaan Investasi untuk mendukung program prioritas antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, penguatan SDM, serta peningkatan akses pembiayaan UMKM dan MBR. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan dana abadi untuk pendidikan, pesantren, kebudayaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembiayaan investasi tahun 2026 juga ditujukan untuk penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR melalui skema FLPP.

Grafik 50. Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2021 – 2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 51. Perkembangan Pemberian Pinjaman, 2021 - 2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Pembiayaan Investasi tahun 2026 ditujukan untuk (i) meningkatkan efektivitas Pembiayaan Investasi untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal; (ii) memberdayakan peran BLU dan SMV sebagai agent of development dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU; (iii) mendorong penguatan sinergi antara BPI Danantara, BUMN, BLU, SMV dan badan/lembaga lainnya; dan (iv) mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman termasuk Penerusan Pinjaman pada tahun 2026 akan difokuskan dalam rangka mendukung visi misi Indonesia terutama terkait penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam dan lingkungan, mendukung transportasi massal serta penyediaan fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Pemberian Pinjaman diberikan untuk mendukung peralihan energi Indonesia dari sebelumnya energi fosil menuju energi baru dan terbarukan. Pemberian Pinjaman akan disalurkan untuk pendanaan proyek konstruksi dan eksplorasi panas bumi serta pembangunan PLTA. Sedangkan Penerusan Pinjaman Luar Negeri yaitu proyek konstruksi *Mass Rapid Transit (MRT)* Jakarta sebagai alternatif moda transportasi perkotaan yang ramah lingkungan serta penyediaan rumah sakit berstandar internasional.

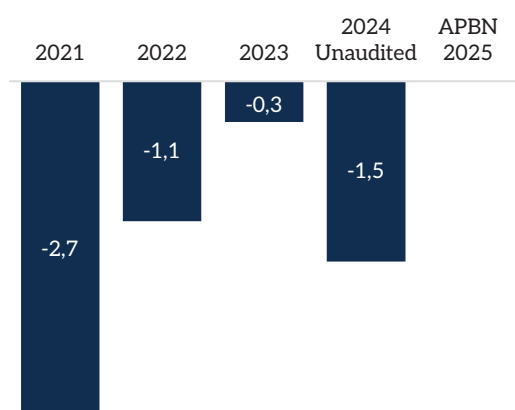
Kewajiban Penjaminan

Dalam kurun waktu 2017 – 2024, Pemerintah telah melakukan kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional, dukungan penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional diantaranya untuk (i) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (proyek 10.000 MW Tahap I); (ii) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batu bara dan gas (proyek 10.000 MW Tahap II); (iii) percepatan penyediaan air minum; (iv) penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (v) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN; (vi) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera; (vii) Penjaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung; (viii) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW (infrastruktur ketenagalistrikan); dan (ix) Penugasan penyediaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

Pada tahun 2026, penjaminan Pemerintah dilakukan secara terukur dan *prudent*. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya mitigasi risiko atas potensi timbulnya klaim dari untuk program penjaminan. Fokus pengelolaan risiko atas klaim penjaminan Pemerintah diantaranya: (i) percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara; (ii) proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iii) percepatan penyediaan air minum; (iv) Penerusan Pinjaman dari lembaga keuangan internasional kepada BPI Danantara/BUMN; (v) penyelenggaraan LRT Jabodebek; dan (vi) berbagai program penjaminan lainnya yang ditetapkan Pemerintah antara lain penjaminan untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

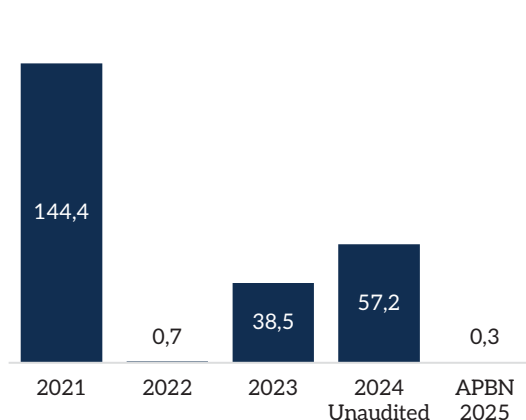
Pembiayaan Lainnya

Grafik 52. Perkembangan Kewajiban Penjaminan, 2021 – 2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 53. Perkembangan Pembiayaan Lainnya, 2021 – 2025 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

SAL tahun 2026 akan terus dikelola secara efisien dan optimal sebagai *fiscal buffer* di tengah kondisi perekonomian domestik dan global yang masih menantang. Kebijakan yang akan ditempuh antara lain melalui penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek dengan tingkat risiko yang *manageable*. Namun, jika diperlukan, penggunaan SAL dapat digunakan untuk menutup defisit APBN. Selain itu, optimalisasi SAL dilakukan melalui pemanfaatan SAL Level Efisien dengan tingkat risiko yang terkelola.

4.4. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Agenda pembangunan tahun 2026 merupakan langkah lanjutan dalam pencapaian RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada sasaran pembangunan dilakukan terhadap bidang-bidang yang memiliki nilai strategis agar pencapaian sasaran pembangunan nasional menjadi lebih efektif dan efisien sejalan dengan penguatan perekonomian nasional.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda pembangunan nasional. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan untuk terus menurun mencapai 4,44 – 4,96 persen dengan terus bertambahnya penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai angka 6,5 – 7,5 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun akan terus didorong untuk mencapai 0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga berada pada rentang 0,377 – 0,380. Melalui kebijakan penguatan program perlintas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi ke depan perlu terus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Selain itu, dinamika global yang penuh ketidakpastian juga menuntut SDM yang memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Di tahun 2026, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,57.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V**HARMONISASI KEBIJAKAN
FISKAL PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 2026**

Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan dasar hukum dalam penguatan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah ditujukan untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Kebijakan fiskal daerah dituangkan pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD. Melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah yang terefleksi pada peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan serta meningkatnya kemandirian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi. Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha (mobilisasi pendapatan), peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif dan prudent.

5.1. Peluang dan Tantangan Wilayah

Perekonomian daerah memiliki perkembangan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, tingkat kemiskinan yang menurun, serta ketimpangan pendapatan yang lebih merata. Sementara itu, perkembangan yang positif tersebut perlu dijaga kualitasnya sehingga pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi terutama di wilayah penghasil SDA seperti Maluku, Papua, dan Sulawesi masih menjadi tantangan. Pengangguran juga masih menjadi fenomena yang tak terelakkan disebabkan industri yang semakin *capital intensive* serta memerlukan *skill* yang sesuai dengan level pendidikan tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang

lebih inklusif dan merata, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di semua daerah masih menjadi fokus pembangunan guna meminimalkan ketimpangan.

5.2. Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan Tahun 2026

Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan. Arah kebijakan ekonomi untuk mendorong akselerasi investasi terutama melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan ICOR. Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus tersebut akan dilakukan melalui bauran kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PDRD yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan kualitas belanja yang semakin produktif, dan pembiayaan kreatif daerah yang *prudent* serta sinergi pendanaan.

5.2.1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu cara dalam mendukung ketahanan ekonomi suatu bangsa. Hal ini terjadi karena dengan menciptakan ketahanan pangan maka akan meningkatkan pemulihan dan stabilitas ekonomi Indonesia ketika dampak dari perekonomian global yang tidak menentu, melemah, dan protektif. Lebih lanjut, hal ini diwujudkan dengan terciptanya pemerataan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kelas menengah.

Peningkatan Produktivitas Produk Pertanian dan Perikanan

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah, strategi fiskal daerah tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, dibutuhkan strategi kebijakan yang tepat dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah yang berbeda. Pemetaan daerah dapat dilakukan melalui analisis kuadran dengan memperhatikan besaran belanja ketahanan pangan/belanja perikanan dan produktivitas dari produk pertanian tertentu/hasil perikanan.

Strategi kebijakan setiap kuadran untuk produk pertanian sebagai berikut:

1. Kuadran I (Belanja pangan tinggi, produktivitas pertanian tinggi)

Strategi: (i) Meningkatkan produktivitas pangan melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi; (ii) meningkatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas; (iii) hilirisasi.

2. Kuadran II (Belanja pangan rendah, produktivitas pertanian tinggi)

Strategi: Penguatan fiskal antara lain melalui skema sinergi pendanaan yang mendukung kerja sama antardaerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan khususnya dengan daerah yang memiliki produktivitas rendah.

3. Kuadran III (Belanja pangan rendah, produktivitas pertanian rendah)

Strategi: (i) Penguatan fiskal; (ii) skema sinergi pendanaan antara TKD, Belanja K/L dan APBD.

4. Kuadran IV (Belanja pangan tinggi, produktivitas pertanian rendah)

Strategi: Evaluasi belanja agar lebih berdampak dalam peningkatan produktivitas.

Strategi kebijakan setiap kuadran untuk produk perikanan sebagai berikut:

1. Kuadran I (Belanja perikanan tinggi, produktivitas perikanan tinggi)

Strategi: Hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan harga jual serta memastikan peningkatan kesejahteraan nelayan, terutama untuk daerah dengan NTN-nya di bawah rata-rata nasional.

2. Kuadran II (Belanja perikanan rendah, produktivitas perikanan tinggi)

Strategi: Investasi terhadap infrastruktur pendukung perikanan, seperti alat tangkap, tempat penyimpanan ikan, dan sarana pasca panen, yang dapat dilakukan melalui skema sinergi pendanaan.

3. Kuadran III (Belanja perikanan rendah, produktivitas perikanan rendah)

Strategi: (i) Sinergi pendanaan serta kerja sama antardaerah untuk peningkatan infrastruktur; (ii) pelatihan nelayan lokal dan penyediaan alat tangkap modern untuk meningkatkan produktivitas.

4. Kuadran IV (Belanja perikanan tinggi, produktivitas perikanan rendah)

Strategi: (i) Evaluasi atas efisiensi belanja dalam peningkatan produktivitas perikanan; (ii) modernisasi alat tangkap dan budidaya perikanan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan pangan di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja daerah yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengembangan irigasi, revitalisasi embung, dan pengadaan alat/mesin pertanian dan perikanan.
2. Penetapan tarif PBB-P2 lebih rendah untuk lahan pangan dan ternak dibandingkan tarif lahan lainnya sesuai amanah UU HKPD, pemberian insentif perpajakan untuk peningkatan lahan pangan, dan pemenuhan *earmarking* PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan untuk pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dan wilayah distribusinya.
3. Optimalisasi peran BUMDes dan/atau koperasi desa/kelurahan dalam rantai pasok pangan untuk membantu petani mendapatkan pasar yang lebih baik, mengelola distribusi pangan, menambah nilai hasil panen, dan menjaga stabilitas harga pangan.
4. Untuk mendukung ketahanan pangan akuatik, diperlukan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kemudahan perizinan untuk memudahkan akses kerja sama dengan pihak swasta atau non-pemerintahan dengan tetap memperhatikan tata kelola pungutan retribusi, termasuk untuk tempat pelelangan ikan.
5. Pendampingan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan terkait teknik pertanian dan penangkapan serta pemanfaatan teknologi.

Peningkatan Gizi Untuk Penanganan *Stunting*

Ketahanan pangan yang baik akan memastikan ketersediaan, keberagaman, dan akses terhadap makanan bergizi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan ketersediaan serta keberagaman pangan yang cukup, keluarga memiliki peluang untuk

mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan yang kuat akan berkontribusi signifikan dalam upaya menurunkan angka *stunting*.

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2024 yang menggambarkan capaian ketahanan pangan dan gizi, daerah-daerah di wilayah Maluku-Papua memiliki skor indeks yang relatif rendah. Provinsi Papua termasuk dalam kategori rentan yaitu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan tetapi masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, dengan angka prevalensi *stunting* cukup tinggi sebesar 18,2 (Data Tahun 2023, Kemenkes). Dengan ditunjuknya Papua sebagai salah satu KSPP, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan memperbaiki kualitas gizi di wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka prevalensi *stunting*.

Untuk mendukung pengurangan angka prevalensi *stunting*, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas belanja dalam penanganan *stunting*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain: (i) memahami dengan baik jenis intervensi dan objek belanja di program/kegiatan terkait *stunting* yang relevan; (ii) memfokuskan belanja *stunting* pada penguatan intervensi, utamanya yang mendorong peningkatan gizi ibu hamil dan anak; dan (iii) mengurangi belanja yang sifatnya dukungan.

5.2.2. Program Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan salah satunya adalah kualitas pendidikan yang belum merata. Hal ini terlihat dari capaian indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan tahun 2024 yang belum merata dan masih perlu ditingkatkan di beberapa daerah.

Untuk merumuskan strategi fiskal kewilayahan dalam mendorong pemerataan layanan pendidikan, analisis kuadran dilakukan berdasarkan karakteristik Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) dan SPM Pendidikan. Dengan analisis kuadran, dapat diidentifikasi kondisi kualitas layanan pendidikan di daerah dan kemampuan daerah untuk membiayai urusan pendidikan.

Strategi kebijakan untuk setiap kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I (RKFD Tinggi, SPM Tinggi)

Pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, pembelajaran koding dan AI melalui instrumen DAU *Earmarked* bidang Pendidikan.

2. Kuadran II (RKFD Tinggi, SPM Rendah)

Peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran dan tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola. Selain itu, perlu dilakukan (i) penguatan DAU *earmarked* dan Dana Otsus untuk mendukung Papua Cerdas; (ii) evaluasi *mandatory spending* dan belanja PDRD; dan (iii) peningkatan akses terhadap skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk peningkatan kualitas infrastruktur Pendidikan.

3. Kuadran III (RKFD Rendah, SPM Rendah)

Pengalokasian TKD sektor pendidikan antara lain DAK dan DAU yang lebih tinggi dibandingkan provinsi di kuadran I dan II untuk percepatan pemenuhan SPM Pendidikan.

4. Kuadran IV (RKFD Rendah, SPM Tinggi)

Pengalokasian TKD sektor pendidikan diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik dan dorongan untuk mengakses skema sinergi pendanaan serta *creative financing*.

Pemerintah daerah mendukung percepatan pencapaian SPM pendidikan dan mewujudkan akses yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan (i) penguatan kualitas belanja *Mandatory Spending* dan TKD secara lebih tepat, melalui pemutakhiran *budget tagging*, *budget tracking*, serta pemetaan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan; (ii) pemanfaatan skema sinergi pendanaan dan dukungan kebijakan *creative financing* seperti pinjaman daerah dan KPBU, untuk penyediaan dan revitalisasi infrastruktur layanan pendidikan khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Khusus Pemerintah Provinsi, perlu melakukan (iii) penguatan *link and match* melalui penguatan sinergi TKD dan APBD untuk mendukung pendidikan vokasi sesuai potensi daerah; (iv) peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran dan tenaga kependidikan; serta (v) penguatan tata kelola agar lulusannya dapat terserap secara optimal dengan industri di wilayah tersebut.

5.2.3. Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah

Program Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan memiliki beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain masih tingginya masalah kesehatan dasar (malnutrisi, kesehatan Ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular) dan munculnya masalah kesehatan baru (*mental health* pada remaja). Hal ini antara lain disebabkan oleh timpangnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta faktor kondisi lingkungan.

Strategi fiskal kewilayahan diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan kesehatan nasional. Strategi tersebut disusun berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel RKFD dan Indeks Kesehatan untuk mengidentifikasi kondisi kualitas layanan kesehatan dan kemampuan daerah untuk membiayai urusan kesehatan.

Strategi kebijakan untuk setiap kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I (RKFD Tinggi, IK Tinggi)

Strategi: Fokus pada belanja kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan seperti pengembangan budaya hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan dan tata kelola.

2. Kuadran II (RKFD Tinggi, IK Rendah)

Strategi: (i) fokus pada belanja kesehatan untuk meningkatkan Indeks Kesehatan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi, dan penguatan layanan dan kapasitas ketahanan kesehatan; (ii) memperkuat kebijakan *DAU earmarked* dan kebijakan

earmarking pajak rokok untuk kesehatan; dan (iii) melakukan skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

3. Kuadran III (RKFD Rendah, IK Rendah)

Strategi: Penggunaan TKD sektor kesehatan yang lebih optimal dibandingkan provinsi di kuadran I dan II untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan dan mendorong daerah untuk mengakses skema sinergi pendanaan dan *creative financing* yang selaras dengan kapasitas fiskalnya.

4. Kuadran IV (RKFD Rendah, IK Tinggi)

Strategi: Pengalokasian TKD sektor kesehatan diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang lebih baik, pemerataan layanan kesehatan, dan peningkatan gizi masyarakat, serta mendorong akses terhadap skema sinergi pendanaan dan *creative financing* yang selaras dengan kapasitas fiskalnya.

Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dalam mendukung percepatan perbaikan layanan kesehatan dan mewujudkan akses kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut antara lain: (i) memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk mendukung penyediaan layanan dasar kesehatan prioritas; (ii) melaksanakan kebijakan *earmarking* pajak rokok untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, perbaikan tata kelola retribusi atas pelayanan kesehatan dengan penentuan tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat; (iii) mendorong penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; (iv) memperbaiki kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian target dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) tahun 2025-2029.

Pengelolaan Sampah

Keberhasilan program kesehatan juga tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Isu persampahan merupakan tantangan kesehatan yang juga penting untuk ditindaklanjuti. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan dari 60,99 persen sampah yang tidak terkelola (34,54 juta ton), sebesar 21,8 persen sampah tersebut ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *open dumping*, sementara 39,1 persen terbuang ke lingkungan. Untuk itu, daerah yang diprioritaskan untuk penanggulangan permasalahan persampahan adalah daerah dengan timbunan sampah terbanyak. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan timbunan sampah terbanyak terdapat di wilayah Jawa.

Terdapat tiga strategi utama untuk mengatasi permasalahan persampahan. Pertama, membangun sistem pengumpulan sampah berbasis zonasi (perkotaan, pedesaan) dengan armada transportasi sampah yang memadai (misalnya: truk kompresor, gerobak listrik). Kedua, memperluas jaringan bank sampah di tingkat desa/kelurahan dan mengintegrasikannya dengan industri daur ulang untuk menciptakan rantai nilai ekonomi sirkular. Ketiga, adalah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPST3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) skala komunal untuk mengolah sampah organik (kompos/biogas) dan anorganik (daur ulang).

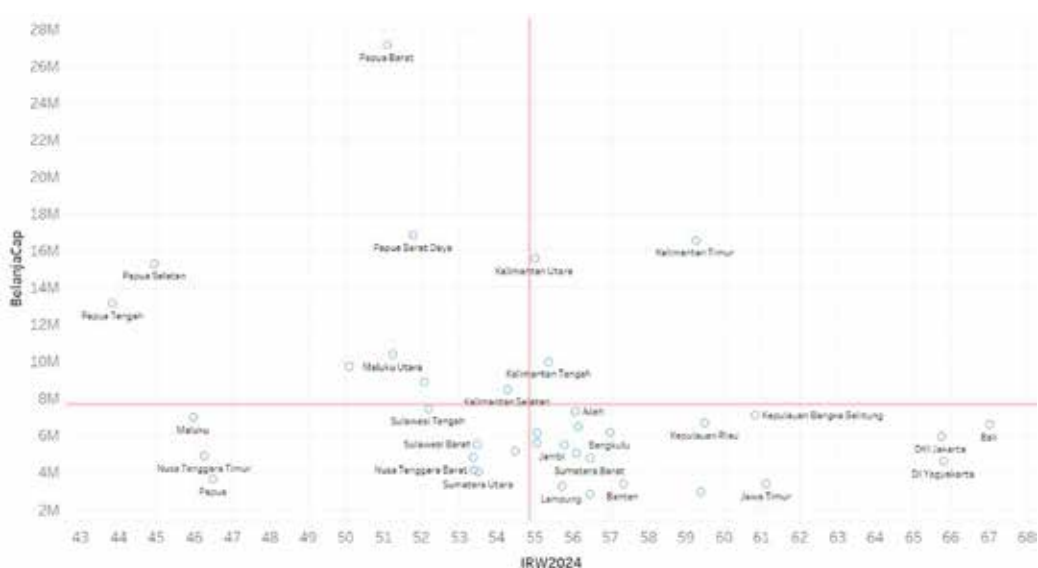
Strategi kebijakan fiskal daerah dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian pengelolaan sampah. Strategi kebijakan tersebut antara lain: (i) mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan dalam pengelolaan persampahan seperti pembangunan TPST; (ii) memanfaatkan dana *earmarking* penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk penanganan persampahan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, penyediaan sarana pemilahan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah; (iii) menyiapkan Insentif Pajak Daerah untuk rumah tangga maupun nonresidensial yang terlibat pengelolaan persampahan melalui pembebasan retribusi pelayanan kebersihan dan pemberian insentif PBB-P2 kepada kalangan maupun sektor tertentu yang telah melakukan pengolahan sampah (dengan instalasi) ataupun pemilahan sampah; serta (iv) memperbaiki tata kelola retribusi pelayanan kebersihan dengan menerapkan *polluter pay principle* (P3).

5.2.4. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menyusun strategi kewilayahan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan desa, koperasi dan UMKM di daerah adalah indikator tingkat kemiskinan yang ditargetkan terus menurun.

Seiring dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di perdesaan juga menunjukkan penurunan. Hal ini sejalan dengan peningkatan status desa. Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal berkurang, sedangkan desa mandiri terus meningkat di seluruh wilayah. Kebijakan pembangunan dari desa yang memperkuat peran desa melalui pemberian kewenangan dan sumber pendanaan yang lebih luas kepada desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

Grafik 54. Pemetaan Kondisi Kesejahteraan di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Kementerian Keuangan

Program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM merupakan salah satu upaya pencapaian target penurunan kemiskinan. Pembangunan di desa akan difokuskan pada peningkatan status desa, peningkatan pendapatan dan produktivitas petani, nelayan, dan peternak, dan penguatan ketahanan pangan di desa. Sementara itu, pengembangan koperasi dan UMKM desa bertujuan untuk meningkatkan akses modal produktif dan meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional. Selain itu, kondisi pelayanan publik di desa terutama infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan yang baik juga akan berperan dalam penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan produktivitas. Investasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan. Dalam rangka merumuskan strategi fiskal kewilayahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dilakukan pemetaan kondisi kesejahteraan daerah melalui analisis kuadran dengan memperhatikan besaran belanja modal dan Indeks *Regional Wellbeing* sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 54.

Strategi penurunan kemiskinan di daerah dilakukan melalui 3 (tiga) pilar utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan koperasi desa dan UMKM. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, rumah layak, dan internet. Ketiga, penurunan kemiskinan melalui optimalisasi data pensasaran. Pendekatan penurunan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan seperti program bantuan sosial tapi juga program pemberdayaan seperti program pelatihan, padat karya, dan transfer aset.

Pemerintah daerah berperan penting dengan mengarahkan belanja daerah ke sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, UMKM, dan infrastruktur layanan dasar, serta memperkuat data penerima bantuan sosial dan mempercepat realisasi dana TKD. Pemerintah daerah juga didorong untuk membuka sinergi pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan *earmarking* pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum guna mengurangi beban masyarakat miskin.

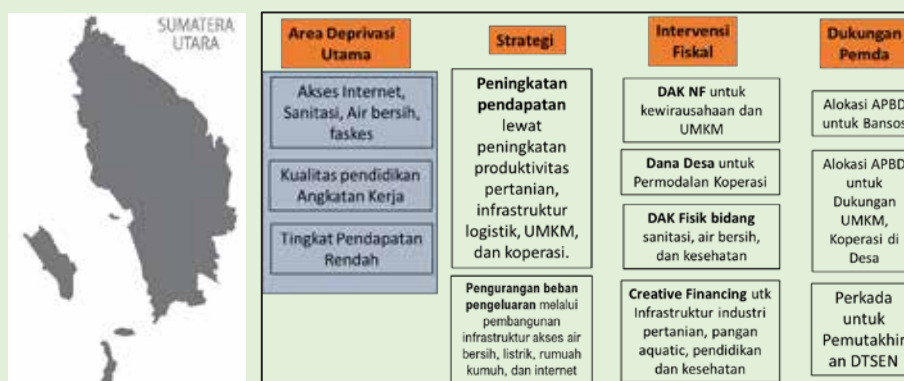
Boks 8. Penerapan Strategi Kewilayahan untuk Meningkatkan Desa Mandiri

Penerapan strategi kewilayahan dalam penurunan kemiskinan dengan memperhatikan lokasi prioritas penurunan kemiskinan dan Indeks *Regional Wellbeing* di daerah tersebut. Sebagai contoh, Sumatera utara merupakan lokasi prioritas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam RPJMN 2025-2029 dengan nilai Indeks *Regional Wellbeing* di bawah rata-rata Nasional. Tingkat kemiskinan Sumatera Utara sebesar 7,99 persen dengan Jumlah penduduk miskin sebesar 1,228 juta jiwa. Pelayanan publik yang belum optimal yaitu akses air bersih, sanitasi, fasilitas kesehatan, akses internet, kualitas pendidikan angkatan kerja, dan tingkat pendapatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya di desa. Pembangunan infrastruktur layanan dasar untuk air bersih, listrik, rehabilitasi rumah kumuh, serta perbaikan akses internet juga mendukung upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Seluruh intervensi tersebut perlu diletakkan dalam kerangka besar pengembangan desa mandiri.

Selanjutnya, Pemerintah akan menyusun kebijakan DAK untuk mendukung UMKM dan layanan dasar, Dana Desa untuk permodalan koperasi desa, menyusun model sinergi pendanaan untuk proyek-proyek strategis yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan PAD daerah. Dari sisi pemerintah daerah, alokasi APBD dapat digunakan untuk bantuan sosial, pelatihan skill dan kewirausahaan, serta pengembangan UMKM. Dengan mendorong desa menjadi mandiri secara ekonomi dan institusional, maka upaya penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan jangka panjang masyarakat desa.

Ilustrasi Strategi Kewilayahan dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan di Sumatera Utara



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.5. Akselerasi Investasi

Akselerasi investasi diarahkan untuk meningkatkan volume penanaman modal dan membangun kekuatan ekonomi daerah melalui dua pendekatan strategis yaitu **hilirisasi** dan **penguatan konektivitas**. Hilirisasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya lokal dan penguatan daya saing daerah, sehingga daerah tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, konektivitas fisik dan digital menjadi infrastruktur kunci untuk memastikan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi antardaerah.

Untuk menyusun strategi akselerasi investasi di daerah, diperlukan pemetaan daerah berdasarkan nilai ICOR dan indikator *Economic Complexity Index* (ECI). ICOR sebagai proksi level investasi (PMTB) dan ECI sebagai proksi level pembangunan ekonomi di daerah. Pemerintah perlu mengupayakan nilai ICOR rendah yang mengindikasikan tingkat efisiensi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang lebih rendah. Sementara itu, nilai ECI yang tinggi artinya suatu daerah semakin mampu untuk menghasilkan produk langka dan bernilai tambah tinggi sehingga tingkat keuntungan yang didapat dapat lebih besar karena daya saingnya tinggi.

Strategi kebijakan untuk setiap kuadran sebagai berikut:

1. Kuadran I (Inefisien dan Kompleksitas Tinggi)
Strategi: penguatan infrastruktur ekonomi (teknologi) dan digitalisasi industri untuk memperbaiki efisiensi investasi.
2. Kuadran II (Efisien dan Kompleksitas Tinggi)

Strategi: Dengan keberhasilan strategi hilirisasi dan daerah perlu terus mempertahankan kinerja dan memperluas inovasi.

3. Kuadran III (Efisien dan Kompleksitas Rendah)

Strategi: Peningkatan kompleksitas ekonomi melalui investasi hilirisasi industri dan pemanfaatan teknologi.

4. Kuadran IV (Inefisien dan Kompleksitas Rendah)

Strategi: Segera melakukan hilirisasi komoditas utama untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Dukungan fiskal, reformasi regulasi investasi, dan pengembangan infrastruktur dan SDM lokal diperlukan untuk mempercepat proses hilirisasi.

Pemerintah dalam rangka mendorong akselerasi investasi daerah, akan meningkatkan kualitas TKD berbasis kinerja untuk mendorong peningkatan belanja produktif sekaligus mendorong penguatan reformasi struktural daerah. Selain itu, bagi daerah dengan rata-rata pertumbuhan dan belanja produktif yang rendah, akan diberikan target peningkatan belanja modal. Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan mendorong skema sinergi pendanaan dan *creative financing* untuk meningkatkan konektivitas. Beberapa terobosan kebijakan dimaksud, diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus menurunkan ICOR.

Strategi fiskal dapat dilakukan pemerintah daerah untuk akselerasi investasi di daerah.

Strategi tersebut antara lain (i) mengalokasikan belanja modal dan belanja infrastruktur untuk program/kegiatan yang produktif; (ii) memfasilitasi industri dalam meningkatkan nilai tambah produk andalannya melalui proses hilirisasi; dan (iii) memberikan insentif perpajakan daerah untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan penyesuaian kebijakan PDRD untuk mendukung program prioritas nasional dan penerapan tarif PDRD yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Untuk memberikan gambaran umum tentang strategi kebijakan fiskal kewilayahan berdasarkan analisis kuadran atas fokus kebijakan fiskal 2026 yang sesuai dengan karakteristik daerah, dijelaskan dalam matriks pada Lampiran 1.

5.3. Bauran Kebijakan Fiskal Kewilayahan

5.3.1. Pendapatan Daerah

Optimalisasi penerimaan PDRN dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pertama, optimalisasi pemungutan PDRD khususnya melalui PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk mendorong peningkatan belanja produktif. Kedua, penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah. Ketiga, sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah. Keempat, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima, penetapan target pertumbuhan PDRD harus berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras dengan kondisi makroekonomi daerah. Keenam, pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan di masing-masing pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan investasi, diperlukan juga kebijakan PDRD yang mampu meningkatkan daya saing. Kebijakan tersebut melalui kebijakan insentif perpajakan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan prioritas

kebijakan fiskal baik nasional maupun daerah dan penetapan tarif layanan yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

5.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain (i) memperkuat implementasi *mandatory spending* (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja kesehatan; (ii) menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur; (iii) memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan (iv) merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (a.l. ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana).

5.3.3. Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

Pembiayaan Daerah

Keterbatasan fiskal dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang cukup besar, menuntut adanya inovasi pembiayaan yang kreatif, tidak sekadar menjalankan pola *business-as-usual*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan. Pengembangan kebijakan pembiayaan daerah seperti pinjaman daerah akan terus dioptimalkan, misalnya melalui kebijakan pinjaman konsesional yang ditujukan untuk memberikan afirmasi kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan indikator sosial ekonomi tertentu untuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah.

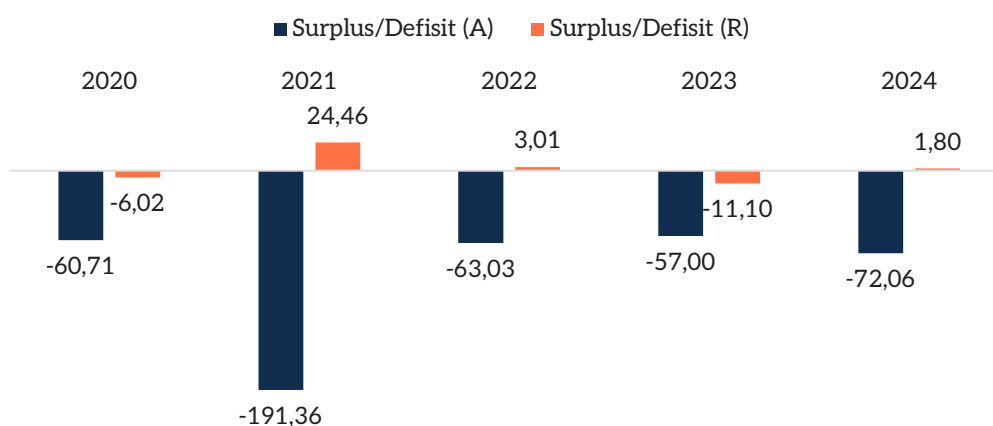
Selain itu, pengembangan pembiayaan inovatif juga akan dilakukan melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya melalui skema KPBU. Sektor transportasi mendominasi proyek KPBU dengan rata-rata 30-35 proyek per tahun sejak 2020, namun proyek KPBU untuk sektor lain seperti fasilitas umum masih relatif sedikit, berkisar antara 4-10 proyek per tahun. Oleh karena itu, mendorong partisipasi swasta dalam proyek KPBU skala kecil di sektor lain menjadi penting untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.

Pelaksanaan KPBU skala kecil menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses yang panjang dan rumit, serta biaya penyiapan yang tinggi. Hal ini membuat proyek dengan nilai investasi kecil kurang menarik bagi investor. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penyederhanaan prosedur dan insentif yang menarik bagi investor lokal maupun nasional. Sinergi pendanaan dari sumber-sumber yang ada baik dari APBD maupun non APBD termasuk dengan SMV seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga menjadi kunci dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis. Kolaborasi ini dapat diarahkan untuk proyek infrastruktur di bidang persampahan dan air minum, yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Melalui

inovasi pembiayaan, peningkatan peran swasta, dan sinergi pendanaan, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan efektif. Hal ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan.

Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

Grafik 55. Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2020-2024* (Rp triliun)

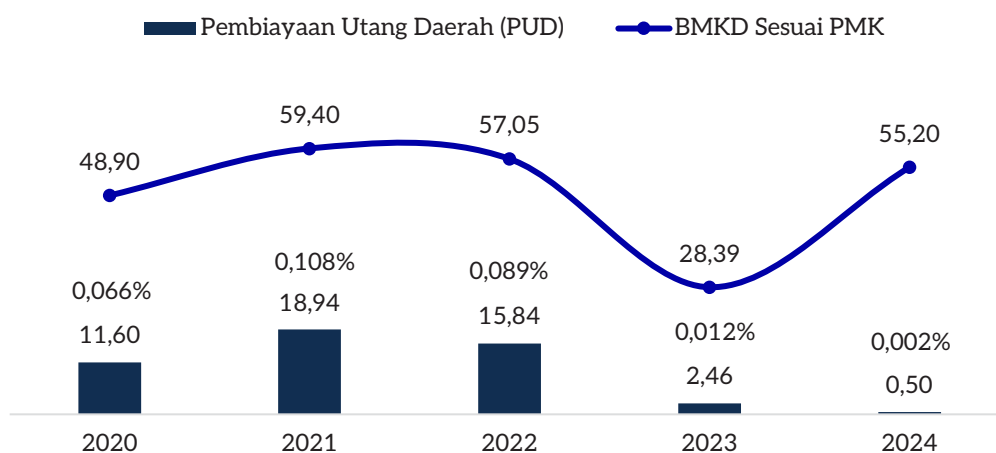


* Unaudited

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 172 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2024 bahwa defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

Grafik 56. Realisasi Pembiayaan Utang Daerah (PUD) dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, 2020-2024* (Rp triliun)



* Unaudited

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam periode 2020-2024, defisit APBD masih sangat terkendali dalam batas aman. Selama kurun waktu tersebut, secara agregat APBD selalu dianggarkan defisit. Namun demikian, dengan berbagai dinamika pelaksanaan anggaran di daerah, realisasi APBD hampir selalu surplus. Realisasi APBD pada tahun 2020 dan 2023 tetap mengalami defisit, namun dengan jumlah defisit yang rendah dibandingkan pada saat perencanaan penganggaran APBD di awal tahun. Dampak Pandemi Covid-19 dan juga tidak terpenuhinya target pendapatan menyebabkan beberapa daerah tetap mengalami defisit. Realisasi Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah pada kurun waktu tersebut juga masih relatif rendah dan aman, yakni masih dibawah batas maksimal kumulatif defisit APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam PMK yang dikeluarkan setiap tahunnya dengan realisasi rata-rata 0,056 persen dari PDB.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2026

6.1. Perkembangan Kebijakan Belanja Negara TA 2024

Belanja Negara TA 2024 digunakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta mendorong pemerataan pembangunan. Realisasi Belanja Negara tahun 2024 mencapai Rp3.357,2 triliun atau meningkat 7,6 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara tahun 2023 sebesar Rp3.121,2 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi antara lain oleh: (i) penyaluran berbagai program bansos, pemberian layanan kesehatan dan pendidikan, pengadaan sarpras hankam, pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, kenaikan gaji ASN/TNI/Polri; (ii) subsidi/kompensasi dan pembayaran manfaat pensiun; (iii) percepatan penyelesaian kurang bayar DBH dan tambahan DAU untuk dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 guru; (iv) pengadaan tanah LMAN; (v) penyaluran insentif biodiesel; (vi) program penurunan *stunting*; (vii) pengentasan kemiskinan ekstrem; (viii) penguatan SDM unggul; dan (ix) mendukung pelayanan publik dan sektor prioritas yang dilaksanakan daerah, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perlindungan sosial. Perkembangan Belanja Negara TA 2024 yang tumbuh kuat sebesar 7,6 persen mencerminkan telah optimalnya APBN sebagai *shock absorber and agent of development* untuk melindungi daya beli, stabilisasi ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan.

6.1.1. Realisasi Belanja K/L Per Jenis Belanja

Realisasi belanja K/L TA 2024 mencapai sebesar Rp1.321,5 triliun atau meningkat 14,7 persen dibandingkan dengan realisasi belanja K/L TA 2023 yang mencapai Rp1.152,2 triliun. Realisasi Belanja Pegawai K/L TA 2024 mencapai Rp291,8 triliun atau naik 11,7 persen dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp261,3 triliun. Peningkatan realisasi ini terutama dipengaruhi oleh: (i) kenaikan gaji pokok ASN/TNI/Polri sebesar 8 persen; (ii) pembayaran THR dan Gaji ke-13 untuk ASN/TNI/Polri dan dengan komponen tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Realisasi Belanja Barang K/L TA 2024 mencapai Rp521,0 triliun atau meningkat 20,8 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp431,3 triliun. Peningkatan realisasi Belanja Barang tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, penyaluran insentif biodiesel (BPDPKS), dan pembayaran bantuan pangan (beras, daging ayam, dan telur) dalam rangka mitigasi dampak El Nino. Selanjutnya, realisasi Belanja Modal TA 2024 mencapai Rp353,8 triliun atau meningkat 16,7 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp303,0 triliun.

Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur dari Kementerian PUPR serta penyelesaian beberapa tahapan pembangunan IKN. Selain itu, juga digunakan untuk dukungan sarpras alutsista Kementerian Pertahanan/TNI, pengadaan alat dan material khusus (Almatsus) Polri, pengadaan peralatan intelijen taktis pada BIN, pengadaan tanah/lahan untuk PSN yang dilakukan oleh LMAN terutama dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur pada sektor jalan tol, bendungan, kereta api, irigasi, dan air baku yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kemudian, realisasi Bantuan Sosial mencapai Rp154,9 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk pelaksanaan berbagai program bansos seperti Program Kartu Sembako, dan PKH melalui Kementerian Sosial, PIP dan KIP Kuliah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama, penyaluran PBI/JKN melalui Kementerian Kesehatan, serta penanggulangan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

6.1.2. Realisasi Anggaran Beberapa Agenda Pembangunan yang Bersifat Prioritas

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional untuk memastikan ketersediaan, akses, dan distribusi pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Pada 2024, Pemerintah mengalokasikan Rp114,3 triliun untuk meningkatkan produksi domestik, memperkuat kelembagaan petani, membangun infrastruktur pangan, serta mengembangkan cadangan pangan nasional. Realisasi sementara anggaran ketahanan pangan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp159.629,2 miliar atau 139,7 persen dari pagunya dalam APBN. Manfaat realisasi anggaran ketahanan pangan terutama adalah penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih, serta infrastruktur irigasi dan bendungan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi anggaran ketahanan pangan tahun 2024 tumbuh mencapai 38,7 persen dari tahun 2023. Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh penyaluran bantuan pangan beras, daging ayam, dan telur bagi keluarga penerima manfaat atas pelaksanaan tahun 2024 dan pembayaran kurang bayar tahun 2023.

Beberapa *output* strategis di bidang ketahanan pangan telah tercapai. *Output* tersebut antara lain: (i) area dan penyaluran bantuan benih padi (target 2.000,2 ha, terealisasi 1.999,1 ha); (ii) area penyaluran benih jagung (target 896,2 ha, terealisasi 894,0 ha); (iii) alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (target 91,1 dan realisasi sama 91,1 unit); (iv) sarpras pascapanen hortikultura (target dan realisasi sama 820 unit); (v) sarpras pascapanen tanaman perkebunan (target dan realisasi sama, sebanyak 120 unit); (vi) sarana pascapanen tanaman pangan (target dan realisasi sama 1.407 unit); (vii) jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (target dan realisasi sama 1.663 unit); (viii) layanan optimalisasi reproduksi (target 1.287.801 layanan, realisasi 1.547.257 layanan); (ix) benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat (target 32.604.747 ekor, realisasi 36.143.174 ekor); (x) calon induk unggul ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat (target 45.868 ekor, realisasi 190.937 ekor); (xi) calon induk unggul udang yang disalurkan ke masyarakat (target 14.908 ekor, realisasi 53.338 ekor); (xii) bantuan alat penangkap ikan (target 17.000 unit, realisasi 20.807 unit); (xiii) pelatihan masyarakat (target 37.305 orang, realisasi 41.601 orang); (xiv) penguatan sarana logistik pangan (target dan realisasi sama 12 unit); dan (xv)

pengembangan desa beragam bergizi seimbang dan aman (target dan realisasi sama 70 kelompok).

Pendidikan

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dengan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan sejak 2009. Anggaran pendidikan 2024 difokuskan pada peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah, optimalisasi layanan PAUD, peningkatan sarana prasarana di daerah 3T, peningkatan kompetensi guru melalui program Guru Penggerak, serta penguatan pendidikan vokasi dengan konsep *link and match* antara SMK dan industri.

Realisasi sementara anggaran pendidikan TA 2024 sebesar Rp550.441,6 miliar atau lebih tinggi 7,2 persen dibanding realisasi TA 2023 yang sebesar Rp513.387,2 miliar. Anggaran Pendidikan ini dimanfaatkan antara lain untuk (i) PIP melalui Kemenristek Dikti dan Kementerian Agama (target 20.783.684 orang terealisasi 21.085.565 orang); (ii) KIP Kuliah (target 985.577 orang, terealisasi 1.022.084 orang); (iii) Tunjangan Profesi Guru Non PNS (target 242.640 orang, terealisasi 252.536 orang); (iv) beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (target 9.276 mahasiswa, realisasi 7.676 mahasiswa); (v) penyaluran dana riset melalui Kemenkeu (target 110 laporan riset, terealisasi 154 laporan riset); (vi) pengembangan SMK berbasis *teaching factory* (target dan realisasi sama sebanyak 315 lembaga); (vii) pembangunan sarpras di daerah (target 10.653 unit, realisasi 10.653 unit); dan (viii) revitalisasi sekolah di daerah (target 14.096 sekolah, realisasi 12.623 sekolah).

Kesehatan

Kebijakan anggaran kesehatan TA 2024 difokuskan pada percepatan penurunan *stunting*, peningkatan akses layanan kesehatan, distribusi tenaga medis, penguatan teknologi kesehatan, serta optimalisasi program JKN. Pada TA 2024 realisasi sementara anggaran kesehatan mencapai Rp194.385,8 miliar atau mencapai 103,7 persen dari pagu APBN sebesar Rp187.534,4 miliar. Realisasi dimaksud meningkat 4,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi anggaran kesehatan TA 2023 sebesar Rp185.478,8 miliar. Peningkatan realisasi anggaran kesehatan ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan realisasi penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan dengan beberapa capaian output antara lain: (i) PBI JKN (target 96,8 juta orang, realisasi 96,7 juta orang); (ii) penugasan nakes (target 5.400 orang, realisasi 5.385 orang); (iii) pemberian makanan tambahan untuk balita kurus (target dan realisasi sama sebesar 100.000 orang); (iv) pemeriksaan sampel obat, makanan, dan kosmetik (target dan realisasi sama 8,1 juta sampel); dan (v) pemenuhan alat kontrasepsi (target dan realisasi sama 21.361 lembaga).

Perlindungan Sosial

Perlinsos bertujuan mengatasi berbagai risiko dan kerentanan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Kebijakan ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan dari 10,14 persen (2021) menjadi 8,57 persen (September 2024). Pada tahun 2024, realisasi sementara anggaran perlinsos sebesar Rp455.926,6 miliar, meningkat 4,5 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp436.174,0 miliar. Peningkatan anggaran realisasi perlinsos utamanya dipengaruhi oleh peningkatan realisasi subsidi energi dan nonenergi. Beberapa capaian output strategis antara lain: (i) PKH (target dan realisasi sama sebanyak 10 juta KPM); (ii) kartu sembako (target 18,8 juta KPM, realisasi

18,7 juta KPM); (iii) PIP (target 20, 8 juta siswa, realisasi 21,1 juta siswa); (iv) KIP (target dan realisasi sama 1,1 juta mahasiswa); (v) bansos PBI JKN (target 96,8 juta peserta, realisasi 96,7 juta peserta); (vi) subsidi energi (target 19,58 juta kl BBM dan 8,03 juta metrik ton LPG 3kg, realisasi 18,1 juta kl BBM dan 8,2 juta metrik ton LPG 3kg); (vii) subsidi nonenergi di luar subsidi pajak (target 7,3 juta ton Pupuk Bersubsidi, 4,9 juta debitur KUR, realisasi 7,3 juta ton Pupuk Bersubsidi, 4,9 juta debitur KUR); (viii) BLT desa (target 2,96 juta KPM, realisasi 2,53 juta KPM); dan (ix) tanggap darurat bencana (target 30 paket, realisasi 46.118 paket).

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025, lebih cepat dari target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pada tahun 2030. Sebagai langkah strategis, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Berkat pendekatan konvergensi program dan ketepatan sasaran intervensi, upaya ini mulai menunjukkan hasil positif. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta implementasi berbagai program perlindungan sosial.

Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur 2024 tetap menjadi prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan meliputi percepatan infrastruktur ekonomi (transportasi, energi, pangan), penyediaan layanan dasar, pembangunan IKN, pemerataan akses TIK, dan peningkatan keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU. Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran infrastruktur dalam APBN TA 2024 dialokasikan sebesar Rp423.384,0 miliar. Alokasi anggaran infrastruktur tersebut terdiri atas: (i) BPP sebesar Rp234.609,7 miliar, yang meliputi belanja K/L sebesar Rp214.331,4 miliar dan Non K/L sebesar Rp20.278,3 miliar; (ii) TKD sebesar Rp94.846,6 miliar; dan (iii) Pembiayaan Anggaran sebesar Rp93.927,7 miliar. Realisasi sementara anggaran infrastruktur dalam APBN TA 2024 sebesar Rp389.779,4 miliar yang terdiri dari : (i) BPP sebesar Rp237.524,9 miliar, yang meliputi realisasi belanja K/L sebesar Rp237.042,6 miliar dan belanja Non K/L sebesar Rp482,3 miliar; (ii) TKD sebesar Rp94.268,8 miliar; dan (iii) Pembiayaan Anggaran sebesar Rp57.985,7 miliar. Beberapa capaian *output* serta realisasi anggaran infrastruktur tahun 2024 antara lain: (i) pembangunan jalan (target 44.984 km, terealisasi 95,6 persen); (ii) pembangunan jembatan (target 500.718 m, terealisasi 96,7 persen); (iii) pembangunan bendungan (target 24 unit, terealisasi 84,4 persen); (iv) pembangunan jaringan irigasi (target 42.000 ha, terealisasi 97,9 persen); (v) pembangunan rumah susun (target 5.479 unit, terealisasi 84,0 persen); (vi) pembangunan rel kereta api (target 61,9 km'sp, terealisasi 78,4 persen); (vii) pengembangan pipa transmisi gas bumi Ruas Cisem (target dan realisasi sama 1 ruas); (viii) bantuan pasang baru jaringan listrik (target 80.000 unit, realisasi 150.000 unit); (ix) pembangunan irigasi perpompaan (target 800 unit, terealisasi 9.391 unit); (x) pembangunan *data center* nasional (target 2 lokasi, realisasi 1 lokasi); dan (xi) penyediaan kapasitas satelit (target 19 Gbps, realisasi 29 Gbps).

6.1.3. Perkembangan Kebijakan Strategis Lainnya yang Menjadi Perhatian Khusus

Revitalisasi Industri

Pemerintah mendorong industri mandiri dan berdaya saing melalui standardisasi dan hilirisasi. Hingga 2024, telah ditetapkan 5.400 SNI, dengan 135 SNI wajib dan 7.064 sertifikat SPPT SNI diterbitkan. Hilirisasi industri difokuskan pada agro, tambang, serta migas dan batubara. Hilirisasi sawit menghasilkan 193 produk hilir dan meningkatkan rasio ekspor produk sawit menjadi 7 persen (CPO): 93 persen (produk hilir). Industri tambang didukung oleh 83 smelter, dengan beberapa telah memproduksi *stainless steel* dan prekursor baterai. Hilirisasi migas mencakup pengembangan *blue ammonia* (800.000 ton) dan *coal-to-ammonia* (600.000 ton). *Blue ammonia* adalah produk yang akan dipergunakan untuk *fuel co-firing* dengan batubara sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih baik. *Blue ammonia* diperlukan di masa depan terutama bagian energi seperti pada *marine fuel*, *power generation*, dan *H2 carrier*.

Ekonomi Hijau dan Transisi Energi

Berdasarkan laporan inventarisasi GRK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, industri menyumbang emisi sekitar 422 juta ton CO₂-ekuivalen dari sektor energi, limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU). *United Nations Development Program* (UNDP) juga memproyeksikan bahwa angka ini akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 801 juta ton CO₂-ekuivalen pada tahun 2030.

Ekonomi hijau menjadi kunci dalam memperkuat upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung penerapan industri hijau, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 62 Standar Industri Hijau dalam 35 Permenperin tentang Standar Industri hijau sampai dengan tahun 2024. Selain itu Kementerian Perindustrian juga telah menunjuk 24 Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang telah melakukan sertifikasi industri hijau untuk 167 perusahaan industri. Dalam program dekarbonisasi sektor industri, Pemerintah (cq. Kemenperin) optimis sektor industri dapat mencapai target NZE pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat dari target nasional tahun 2060. Upaya Kemenperin dalam pencapaian target pengurangan emisi GRK salah satunya dengan menetapkan 8 + 1 subsektor intensif energi sekaligus emiter GRK terbesar yaitu industri semen, besi baja, pulp dan kertas, tekstil, kaca dan keramik, pupuk dan petrokimia, kimia, makanan dan minuman serta alat transportasi.

Reformasi Birokrasi sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud *governance* yang berkualitas dengan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, dan berdampak nyata melayani masyarakat. Dalam periode 2017-2024, pelaksanaan reformasi birokrasi telah menunjukkan capaian yang positif. Indeks reformasi birokrasi secara umum cenderung meningkat, terutama pada tingkat K/L dan provinsi. Indeks reformasi birokrasi K/L mencapai angka tertinggi di tahun 2024 yaitu 77,12, meningkat 2,70 poin dari tahun 2017. Indeks reformasi birokrasi pada tingkat provinsi juga mengalami perbaikan dari 62,15 di tahun 2017 menjadi 69,91 di tahun 2024. Sedangkan, untuk kabupaten/kota, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk terus memperbaiki kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Capaian *Government Effectiveness Index* (GEI) Indonesia pada periode tersebut juga memperlihatkan konsistensi peningkatan yang signifikan. GEI mengalami kenaikan 34 peringkat dari 99 pada tahun 2017 menjadi 65 di tahun 2023. Indeks yang diterbitkan Bank Dunia tersebut mengukur kualitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Beberapa hal yang menjadi indikator dalam indeks ini antara lain persepsi atas kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas atas komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik.

Pelaksanaan pelayanan aparatur kepada masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Hal ini antara lain ditandai dengan telah diresmikannya 272 Mal Pelayanan Publik (MPP), ini artinya sekitar 53 persen dari Kab/Kota yang ada di Indonesia telah memiliki MPP dan 91 MPP Digital sampai dengan bulan Desember 2024. Penyediaan MPP yang semakin masif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi kepada masyarakat dan meminimalkan hambatan yang ada sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, sejalan dengan transformasi digital pemerintahan, Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Peraturan tersebut diantaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dalam *e-Government Development Index*, Indonesia juga mengalami kenaikan peringkat signifikan dari peringkat 107 di tahun 2018 menjadi peringkat 64 di tahun 2024 dengan skor 0.79911, lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata dunia 0,6382.

Pada tahun 2024, upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi diwujudkan melalui berbagai langkah yang merupakan kelanjutan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertama, memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan memulai penyusunan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045. Kedua, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur antara lain melalui penyusunan Rancangan Perpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Ketiga, meningkatkan pembangunan integritas instansi pemerintah yang dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Keempat, percepatan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi pemerintahan, khususnya terkait layanan ASN.

6.2. Perkembangan Kebijakan Belanja TA 2025

Kualitas Belanja Negara TA 2025 terus ditingkatkan melalui efisiensi operasional, fokus mendukung program prioritas dan berorientasi hasil, penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah serta mendukung berbagai kebijakan pemerintahan yang bersifat prioritas dan strategis. Hal itu dilakukan untuk tetap menjadikan APBN sebagai *shock absorber and agent of development* sekaligus mendukung keberlanjutan agenda reformasi fiskal guna mewujudkan peningkatan *spending better*. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 telah digulirkan

kebijakan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pada K/L dalam APBN TA 2025, APBD TA 2025, dan TKD dalam APBN TA 2025 untuk keperluan efisiensi anggaran. Nilai efisiensi atas anggaran Belanja Negara TA 2025 adalah Rp306.695,18 miliar yang terbagi atas efisiensi pada Belanja K/L sebesar Rp256.100,00 miliar dan TKD sebesar Rp50.595,18 miliar. Identifikasi efisiensi tidak termasuk untuk: belanja pegawai dan belanja bantuan sosial, serta diprioritaskan selain yang berasal dari: (i) pinjaman dan hibah; (ii) rupiah murni pendamping (kecuali tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2025); (iii) sumber PNB-BLU (kecuali yang disetor ke Kas Negara pada tahun 2025); dan (iv) sumber SBSN dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN. Secara umum identifikasi efisiensi difokuskan pada: (i) pengadaan ATK; (ii) percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan; (iii) kegiatan seremonial; (iv) kajian dan analisis (v) perjalanan dinas; (vi) rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya; (vii) jasa konsultan; (viii) infrastruktur; (ix) lisensi aplikasi; dan (x) belanja lainnya.

Pengguliran kebijakan efisiensi pada tahun 2025 ini bersamaan dengan dimulainya tahapan RPJMN 2025-2029 yang telah memuat visi dan misi Presiden hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang tecermin sebagai Asta Cita/Prioritas Nasional dan disusun berdasarkan RPJPN. RPJMN menjadi dasar hukum bagi: (i) K/L dalam menyusun Renstra; (ii) penyusunan RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang termuat di dalam RPJMN; dan (iii) Pemerintah dalam menyusun RKP. RPJMN memuat PSN dan wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan Pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

Kebijakan efisiensi di tahun 2025 bertujuan untuk lebih memfokuskan anggaran dan mendorong kegiatan *pro growth*. Kebijakan tersebut juga mendukung penguatan beberapa agenda pembangunan prioritas, antara lain ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan potensi sumber devisa dan kemampuan daya saing melalui terobosan pengoptimalan pemanfaatan teknologi. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah juga menerbitkan sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:

Tabel 4. Daftar Regulasi Untuk Percepatan Pembangunan Nasional

No	Regulasi	Tentang
1	Inpres Nomor 2 Tahun 2025	Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan
2	Inpres Nomor 3 Tahun 2025	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan
3	Inpres Nomor 4 Tahun 2025	Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
4	Inpres Nomor 5 Tahun 2025	Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan

No	Regulasi	Tentang
		Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan
5	Inpres Nomor 6 Tahun 2025	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
6	Inpres Nomor 7 Tahun 2025	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran
7	Inpres Nomor 8 Tahun 2025	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
8	Inpres Nomor 9 Tahun 2025	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih
9	Perpres Nomor 17 Tahun 2025	Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menitikberatkan pada percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di 14 provinsi prioritas guna mendukung swasembada pangan. Selanjutnya, Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pengalihan status Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian untuk memperkuat sistem penyuluhan pertanian, mempercepat birokrasi, memberikan kepastian karier, serta meningkatkan efektivitas pendampingan petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Inpres Nomor 4 Tahun 2025 berfokus pada integrasi data sosial dan ekonomi nasional untuk meningkatkan keterpaduan, akurasi, dan interoperabilitas data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 yang menekankan penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran CBP untuk stabilisasi harga, bantuan pangan, tanggap darurat bencana, hingga program MBG. Selanjutnya, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 ditujukan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan program unggulan seperti Sekolah Rakyat yang menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menargetkan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), baik dalam bentuk revitalisasi terhadap koperasi yang sudah ada maupun pembentukan koperasi yang baru sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan dan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan ekonomi. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan ekstrem, meningkatkan efektivitas kebijakan sosial ekonomi, serta mendorong pembangunan ekonomi desa secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui serangkaian Inpres. Terakhir, Pemerintah juga

menerbitkan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur strategi untuk meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri dan melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan antara lain untuk kepentingan konsumsi, aneka industri, peternakan dan perkebunan, pengeboran minyak, dan *water treatment*.

6.3. Pokok-pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026

6.3.1. Kebijakan Umum Belanja K/L

Kebijakan Belanja K/L merupakan bagian dari Kebijakan BPP yang pemanfaatannya secara lebih efisien dan produktif untuk mendukung Prioritas Nasional sehingga efektif untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Beberapa kebijakan Belanja K/L tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Belanja K/L agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel seiring dengan optimalisasi pemanfaatan TIK/digitalisasi birokrasi;
2. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP serta Tema Kebijakan Fiskal tahun 2026;
3. Menjaga kebutuhan minimum Belanja Operasional pemerintahan, Arahan Presiden, Prioritas Nasional dan belanja yang bersifat *mandatory*, dengan menjadikan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 sebagai basis perhitungan kebutuhan anggaran belanja K/L tahun 2026;
4. Memperhitungkan tambahan belanja pegawai dan operasional minimum untuk K/L yang mengalami transisi pasca-restrukturisasi K/L;
5. Menjadikan intervensi belanja sebagai stimulus/dukungan fasilitasi kebijakan untuk beberapa kegiatan yang bernilai tambah tinggi dan mampu menjaga ketahanan ekonomi karena memiliki karakteristik skala ekonomi yang luas, beragam, tersebar berkelanjutan, dan melibatkan sektor swasta;
6. Menjaga harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD serta komponen APBN yang lain;
7. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri, terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri; dan
8. Memanfaatkan sumber dana RM dan NonRM yang bersifat saling melengkapi dan merupakan bagian dari strategi pendanaan dalam APBN untuk mencapai target Prioritas Nasional, dengan ketentuan:
 - a. Dalam rangka perumusan kebijakan belanja, proporsi pemanfaatan sumber dana RM maupun NonRM untuk menghasilkan suatu keluaran dalam rangka pencapaian target prioritas nasional, dapat diidentifikasi, dikelompokkan, dan dihimpun berdasarkan informasi kerangka pendanaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen perencanaan anggaran, baik yang berdimensi jangka pendek maupun jangka menengah; dan
 - b. Pengalokasian PLN dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) difokuskan untuk penyelesaian pinjaman proyek yang berstatus *on going* dengan memperhitungkan rencana realistis penarikan oleh Kementerian Negara/Lembaga, termasuk memperhitungkan penarikan PLN dan PDN untuk proyek-proyek K/L yang bersifat strategis.

6.3.2. Kebijakan Khusus Belanja K/L

Memanfaatkan belanja K/L dalam rangka penguatan tema/bidang/sektor yang mendukung Prioritas Pembangunan, Arahan Presiden maupun tematik APBN melalui strategi ekonomi dan fiskal yang meliputi:

1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Swasembada Air
4. Percepatan Perluasan MBG
5. Perluasan Akses dan Kualitas Pendidikan
6. Peningkatan Kualitas dan Akses Kesehatan
7. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
8. Pertahanan Semesta
9. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global

serta pada bidang-bidang agenda pembangunan lainnya sesuai RKP Tahun 2026, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan

Diarahkan untuk mendukung kebijakan pengembangan lumbung pangan nasional dan peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perikanan, antara lain melalui:

- a. Cetak sawah;
- b. Pemenuhan kebutuhan garam nasional; dan
- c. Penguatan infrastruktur pertanian (irigasi).

2. Ketahanan Energi

Diarahkan untuk mendukung peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, dan penguatan implementasi transisi energi, antara lain melalui dukungan/fasilitasi kebijakan untuk:

- a. Mengembangkan jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan industri; dan
- b. Swasembada energi.

3. Swasembada Air

Diarahkan untuk memperluas akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat, di antaranya, melalui:

- a. Peningkatan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
- b. Perkuatan kelembagaan, regulasi, kebijakan, pendanaan dan pembiayaan pendukung SPAM.

4. Percepatan Perluasan MBG

Diarahkan untuk penguatan kualitas pelaksanaan program, kolaborasi lintas K/L dengan BGN sebagai koordinator, dan penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil, dengan rincian:

- a. Penguatan kualitas pelaksanaan program

- 1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan makanan yang sehat, dengan kalori dan komposisi gizi yang seimbang;
 - 2) Memastikan proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan terjaga;
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program MBG terhadap gizi dan kesehatan anak;
 - 4) Melakukan evaluasi secara ketat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program; dan
 - 5) Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
- b. Kolaborasi lintas K/L dengan BGN sebagai koordinator
- Memastikan bahwa kolaborasi lintas K/L mampu untuk mempercepat penurunan angka *stunting* secara bertahap, dengan mensinergikan program-program K/L terkait dengan program MBG.
- c. Penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil
- 1) Memberdayakan UMKM sebagai pemasok bahan makanan, seperti sayuran dari petani lokal atau produk olahan makanan tradisional;
 - 2) Memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi;
 - 3) Menjadikan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan tenaga kerja tambahan dalam program MBG;
 - 4) Memberikan akses kemudahan pembiayaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM.

5. Perluasan Akses dan Kualitas Pendidikan

Diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Kebijakan anggaran pendidikan antara lain:

- a. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat, dengan penekanan pada:
 - 1) Perluasan pemberian akses pendidikan berkualitas (sains dan teknologi) bagi siswa berbakat dan kurang mampu sehingga dapat mendukung upaya, memutus mata rantai kemiskinan;
 - 2) Penguatan kualitas lingkungan belajar yang kondusif (pendidikan gratis, asupan gizi yang terjamin, dan pemberian program keterampilan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja);
 - 3) Pemberian pelatihan dan/atau pembekalan untuk melatih siswa agar dapat masuk ke perguruan tinggi Internasional; dan
 - 4) Pemberian pelatihan intensif untuk guru berbasis standar pengajaran yang lebih berkualitas tinggi (terutama untuk Sekolah Unggul Garuda).
- b. Percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;

6. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan antara lain:

- a. Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan;
- b. Pemeriksaan kesehatan gratis:
 - 1) Pemeriksaan untuk dewasa dan lansia antara lain difokuskan pada skrining tuberkulosis, tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, pemeriksaan indera (pendengaran dan penglihatan), mendeteksi diabetes melitus, serta pemeriksaan gigi, dan jiwa;
 - 2) Pemeriksaan untuk bayi dan balita, antara lain difokuskan pada pemeriksaan kelainan bawaan, pengukuran pertumbuhan dan perkembangan, pemeriksaan gizi, mata, dan telinga;
 - 3) Pemeriksaan khusus untuk mendeteksi risiko stroke, jantung, dan kanker, serta untuk calon pengantin;
 - 4) Memberikan edukasi dan konsultasi atas hasil pemeriksaan, dan memberikan saran tindak lanjut yang diperlukan; dan
 - 5) Memberikan rekomendasi pelayanan kesehatan lanjutan di fasilitas kesehatan rujukan berdasarkan BPJS Kesehatan.
- c. Percepatan Penuntasan Tuberkulosis; dan
- d. Peningkatan efektivitas program JKN (PBI dan PBP BP kelas 3).

7. Pembangunan Desa, Pengembangan Koperasi, dan UMKM

Diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan daya saing dan kemandirian finansial. Intervensi kebijakan yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Pengembangan koperasi desa merah putih;
- b. Peningkatan kapasitas usaha dan akses UMKM; dan
- c. Peningkatan Kemandirian Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.

8. Pertahanan Semesta

- a. Pertahanan

Diarahkan untuk penguatan stabilitas pertahanan melalui:

- 1) Penguatan pertahanan negara melalui pemenuhan dan modernisasi alutsista;
- 2) Pengembangan industri pertahanan dalam negeri;
- 3) Penguatan komponen cadangan;
- 4) Penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara.

- b. Stabilitas Keamanan dan Penguatan Hukum

Diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan penguatan bidang hukum melalui:

- 1) Penguatan alat dan sistem keamanan negara;
- 2) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian;
- 3) Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;
- 4) Penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal;
- 5) Penguatan gerakan dan pendidikan anti narkoba, serta pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- 6) Peningkatan hubungan internasional yang kondusif
- 7) Penguatan kelembagaan dan budaya hukum;
- 8) Pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran hukum;

- 9) Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang;
- 10) Penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, dan PTUN; dan
- 11) Pengembangan kompetensi di bidang teknis peradilan.

9. Percepatan Investasi Dan Perdagangan Global

Diarahkan sebagai intervensi belanja yang bersifat stimulus, dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi kebijakan bagi sektor swasta (dunia usaha-dunia industri) untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan strategi awal berupa penciptaan Nilai Tambah Tinggi dan Ketahanan Ekonomi terlebih dahulu. Beberapa dukungan/fasilitasi kebijakan yang digulirkan antara lain:

- a. Penguatan resiliensi sektor pangan dan tradisional, pada berbagai kegiatan yang terkait dengan tanaman pangan, peternakan, dan perikanan dan industri yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi;
- b. Peningkatan nilai tambah tinggi dan daya saing di bidang energi baru dan terbarukan, elektronik, jalur distribusi dan rantai pasok, digital elektronik, dan industri kimia farmasi;
- c. Pengembangan hilirisasi industri pada komoditas strategis berbasis SDA untuk percepatan ekonomi, antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan industri yang terintegrasi
 - 2) Pengembangan riset dan pengembangan hilirisasi industri; dan
 - 3) Hilirisasi industri pada komoditas strategis berbasis SDA (tambang mineral, agro, dan minyak bumi)
- d. Peningkatan penerapan standardisasi industri; dan
- e. Peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Penguatan tema/sektor/bidang sebagaimana dimaksud di atas, harus didukung dengan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital, berorientasi pelayanan, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, birokrasi dari berbagai pihak (*stakeholders*) harus memiliki pemahaman komprehensif atas arah, strategi dan sinergi kebijakan fiskal dan Prioritas Nasional, serta didukung dengan regulasi yang mengatur secara jelas kriteria dan prosedur pemanfaatan belanja K/L dan dapat diterjemahkan secara sederhana, mudah dan jelas sampai pada tataran praktik.

6.3.3. Kebijakan Belanja K/L Menurut Jenis Belanja

1. Kebijakan Belanja Pegawai

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas;
- b. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas;
 - 1) Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan

- 2) Kebutuhan ASN tahun 2026 harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, dengan memperhatikan jumlah pegawai yang pensiun dan mempertimbangkan kebijakan *zero* atau *minus growth*.

2. Kebijakan Belanja Barang

- a. Melanjutkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik, salah satunya dengan menekankan pemanfaatan digitalisasi;
- b. Melanjutkan kebijakan efisiensi tahun 2025 sebagai angka dasar (*baseline*) untuk penajaman Belanja Barang Operasional, antara lain: perjalanan dinas, pengadaan ATK, kegiatan seremonial, seminar dan sejenisnya, lisensi aplikasi, pencetakan dan souvenir, *Focus Group Discussion*/Konsinyering/paket meeting serta honorarium seiring dengan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/digitalisasi birokrasi;
- c. Mengoptimalkan Belanja Pemeliharaan dalam rangka menjaga nilai aset BMN;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi Belanja Barang melalui penguatan kepatuhan terhadap implementasi Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, dan Standar Struktur Biaya;
- e. Melanjutkan sinkronisasi Belanja Barang yang diserahkan kepada Pemda Pemerintah Daerah/Masyarakat dengan skema Bantuan Lainnya, antara lain: Belanja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Belanja TKD, Bantuan Pemerintah Presiden, Bantuan Sosial, dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melanjutkan pendanaan kreatif untuk mendukung skema KPBU yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Kebijakan Belanja Modal

- a. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas belanja modal, salah satunya dengan penguatan sistem pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan dan akuntabel;
- b. Menjadikan kebijakan efisiensi Tahun 2025 sebagai angka dasar (*baseline*), dengan tetap melakukan penajaman pada beberapa program/kegiatan/ output terutama yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional;
- c. Mendukung pendanaan kegiatan/output yang bersifat strategis mendukung Prioritas Nasional serta berdampak kuat terhadap pertumbuhan secara sangat selektif berdasarkan skala prioritas;
- d. Mengembangkan pembiayaan inovatif untuk mendukung skema pendanaan konvensional secara lebih efektif dan efisien;
- e. Mendukung pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas; dan
- f. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, jaringan konektivitas, dan swasembada air.

4. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

- a. Melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial antara lain seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, dan rehabilitasi sosial;
- b. Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi antarprogram,

penyempurnaan kelembagaan, serta perbaikan mekanisme penyaluran melalui digitalisasi bantuan;

- c. Mendorong pelaksanaan bantuan sosial adaptif dan sepanjang hayat yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif; dan
- d. Mendorong percepatan graduasi, antara lain melalui sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan lainnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh kebijakan Belanja K/L ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh 98 K/L pada tahun anggaran 2026 setelah masing-masing K/L melalui tahapan proses pembahasan tinjau ulang angka dasar (*review baseline*) bersama dengan Kemenkeu (cq. Ditjen Anggaran) dan Bappenas, dan penyusunan RKA-K/L guna menjabarkan pokok-pokok kebijakan belanja dalam bentuk Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 yang juga diselaraskan dengan arah dan strategi perencanaan pembangunan yang terdapat pada RKP Tahun 2026. Rincian Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 6. Selanjutnya, Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 berdasarkan program dijabarkan dalam Lampiran 2.

Tabel 5. Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026

No	BA	Kementerian/Lembaga	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	695,1
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6.552,6
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.835,0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.878,4
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	8.965,0
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.136,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.244,2
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.933,1
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	167.400,0
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	47.132,9
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.757,1
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.936,9
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.118,0
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	24.406,0
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	104.354,7
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	75.214,1
17	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.716,9
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL	76.038,9

No	BA	Kementerian/Lembaga	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.606,8
20	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	203,1
21	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	106,9
22	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	150,5
23	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	133,1
24	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	208,2
25	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.951,7
26	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	2.963,9
27	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.692,1
28	055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	764,5
29	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7.786,1
30	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	266,7
31	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	7.745,7
32	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	109.672,1
33	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.166,0
34	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	115,7
35	065	KEMEN. INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM	435,2
36	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	1.015,8
37	068	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BKKBN	3.223,0
38	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	132,6
39	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.894,3
40	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.768,8
41	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	260,9
42	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	199,0
43	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	2.197,9
44	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)	177,8

No	BA	Kementerian/Lembaga	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
45	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	110,0
46	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	264,3
47	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	254,3
48	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	574,8
49	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	2.075,9
50	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.100,4
51	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA	248,7
52	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	878,0
53	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	871,2
54	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	82,6
55	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	200,1
56	104	KEMEN. PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BP2MI	285,8
57	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	94,5
58	107	BADAN SAR NASIONAL	1.011,8
59	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	68,3
60	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	152,6
61	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	131,1
62	112	BPKPB BATAM	2.447,9
63	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	1.659,8
64	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.987,4
65	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	783,9
66	117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	824,0
67	118	BPKPB SABANG	36,5
68	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.650,7
69	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	107,8
70	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	70,7
71	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	4.271,7

No	BA	Kementerian/Lembaga	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
72	125	BADAN PANGAN NASIONAL	79,4
73	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	5.050,0
74	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	1.503,1
75	128	BADAN GIZI NASIONAL	217.860,2
76	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	126,6
77	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	124,6
78	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	137,0
79	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	115,7
80	134	KEMEN. KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	223,9
81	135	KEMENTERIAN HUKUM	3.930,0
82	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	718,1
83	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	17.152,3
84	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	33.651,8
85	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	55.452,5
86	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	827,4
87	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	156,0
88	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	216,1
89	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4.933,3
90	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.075,8
91	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	70.855,5
92	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.824,8
93	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	926,1
94	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	428,5
95	149	KEMENTERIAN KOPERASI	311,7

No	BA	Kementerian/Lembaga	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
96	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	196,7
97	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.591,8
98	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1.902,0

6.4. Pagu Indikatif Transfer ke Daerah TA 2026

Pemerintah berupaya terus melanjutkan penyempurnaan dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan anggaran TKD, khususnya dalam mendukung program-program prioritas nasional. Strategi pengelolaan TKD tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja untuk sebagian jenis TKD, penguatan APIP dalam melakukan pengawasan, dan perbaikan kualitas penyaluran TKD.

Anggaran TKD sebagai instrumen fiskal bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pengalokasian dan penggunaan TKD harus memberikan kontribusi optimal dalam program prioritas nasional dan meraih capaian rencana pembangunan nasional khususnya dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Pagu Indikatif TKD pada TA 2026 dipengaruhi oleh penyelarasan terhadap kebijakan strategis Pemerintah, *outlook* pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar publik di daerah, serta kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal APBN). Arah kebijakan umum TKD TA 2026 adalah sebagai berikut; (i) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan; (ii) mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*; (iii) meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan; (iv) memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan PDRD untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah. Rincian Pagu Indikatif TKD TA 2026 berdasarkan jenis transfer dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 6. Pagu Indikatif Transfer ke Daerah TA 2026

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp triliun)	Fokus Kebijakan 2026
Dana Bagi Hasil	77,74 – 90,15	1. Memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagihasilkan.

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp triliun)	Fokus Kebijakan 2026
		2. Mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel. 3. Meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. 4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Dana Alokasi Umum	404,99 - 414,99	1. Memperbaiki formula penghitungan alokasi DAU untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan dalam pelayanan publik termasuk penerapan DAU yang ditentukan penggunaannya. 2. Mendorong peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan karakteristik daerah. 3. Penguatan sinergi penggunaan DAU dengan prioritas nasional 4. Menjaga pemenuhan layanan dasar kawasan afirmasi. 5. Perbaiki tata kelola DAU utamanya terkait aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Dana Alokasi Khusus	149,21 - 153,71	1. Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik; 2. Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp triliun)	Fokus Kebijakan 2026
		menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta <i>matching program</i>, dan 3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan
Dana Otsus	13,16 - 13,49	1. Mendukung Program Prioritas Nasional melalui kerja sama K/L, TNI/Polri dan pemerintah daerah yang terintegrasi; 2. Menyelaraskan kebijakan Dana Otsus dan DTI dengan target capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; 3. Menynergikan perencanaan dan penggunaan Dana Otsus dan DTI dengan jenis pendanaan lain; 4. Meningkatkan kualitas penyaluran yang didasarkan pada kinerja pemanfaatan Dana Otsus dan DTI; 5. Memperkuat kualitas tata kelola melalui peningkatan kualitas SDM, didukung dengan kemampuan pertukaran data dan informasi antar sistem informasi (interoperabilitas) dan penguatan badan pengarah.
Dana Keistimewaan D. I. Yogyakarta	0,70 - 0,80	1. Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan DIY dengan belanja K/L dalam rangka mendukung prioritas nasional; 2. Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk mendanai kewenangan keistimewaan yang difokuskan pada penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, pengurangan

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp triliun)	Fokus Kebijakan 2026
		kesenjangan antarwilayah di DIY, serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja penunjang kegiatan. 3. Meningkatkan sinergi penggunaan Dana Keistimewaan DIY dengan sumber penerimaan APBD lainnya; 4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.
Dana Desa	65,00 - 69,00	1. Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui: a. mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; b. memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lumbung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa lainnya (BUMDes dan UMKM); c. membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana; d. membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa; e. mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen, dan/atau f. melaksanakan program prioritas desa lainnya. 2. Menambah kriteria Alokasi Afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana. 3. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan/atau operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan insentif kepada desa yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp triliun)	Fokus Kebijakan 2026
		Koperasi Desa Merah Putih melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa.
Dana Insentif Fiskal	1,50 - 3,20	1. Mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah; 2. Mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah, di antaranya peningkatan ketahanan pangan dan/atau pengelolaan sampah; 3. Menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional; 4. Mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VII

RISIKO FISKAL TAHUN 2026

Pengelolaan fiskal ke depan masih sangat menantang utamanya dipengaruhi gejolak perekonomian global yang saat ini masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi. Beberapa faktor global yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal di antaranya dampak perang dagang yang memicu lanskap ekonomi global berubah dramatis, konflik geopolitik, meningkatnya proteksionisme, fragmentasi, terganggunya rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu pada sisi lain tantangan struktural yang harus direspon secara tepat, terukur dan konsisten yaitu (i) perubahan iklim yang perlu diantisipasi dan dimitigasi; (ii) bonus demografi yang semakin terbatas; (iii) pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; dan (iv) perlunya penguatan kualitas SDM dan optimalisasi pengelolaan SDA.

Hal ini perlu diantisipasi dan dimitigasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat serta keberlanjutan fiskal. Berdasarkan karakteristik sumber risikonya, taksonomi risiko fiskal dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain (i) risiko ekonomi makro; (ii) risiko kewajiban kontingensi; (iii) risiko pelaksanaan atas program dan kebijakan pemerintah; (iv) risiko neraca konsolidasi sektor publik; dan (v) risiko fiskal daerah.

7.1. Risiko Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian perlu diwaspadai. Kondisi ini tecermin dari pergerakan berbagai indikator utama, seperti pertumbuhan PDB global, volume perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Dinamika perekonomian global perlu diantisipasi dan diimbangi dengan kebijakan Pemerintah yang tepat.

Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026. Risiko tersebut antara lain (i) pelemahan nilai tukar (ii) tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi; (iii) eskalasi tensi geopolitik; (iv) ruang kebijakan fiskal yang terbatas; dan (v) penambahan pembiayaan dari sumber utang dari proyeksi awal serta volatilitas pasar keuangan.

7.1.1. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Penerimaan Perpajakan

Perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian turut memengaruhi kinerja perekonomian domestik dan dapat berdampak terhadap APBN baik pada sisi penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Pengaruh penerimaan negara ada yang secara langsung pada tahun berjalan atau pada tahun berikutnya. Jenis penerimaan negara yang berpengaruh langsung pada tahun berjalan adalah PNBPN sementara jenis

penerimaan negara yang berpengaruh pada tahun berikutnya adalah Pajak Penghasilan badan dan Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan negara berupa Bea Keluar merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasar internasional. Jika harga komoditas yang merupakan objek bea keluar tinggi maka penerimaan bea keluar akan tinggi sementara jika harga komoditas rendah maka penerimaan negara dari bea keluar juga ikut berkontraksi.

Ketidakpastian pada perekonomian global menimbulkan risiko pada perekonomian domestik. Berdasarkan perkembangan terakhir, beberapa risiko yang diidentifikasi antara lain adalah fluktuasi harga komoditas, depresiasi nilai tukar, tekanan inflasi, serta potensi perlambatan ekonomi lebih lanjut yang dapat menurunkan basis pajak dan mempengaruhi realisasi penerimaan negara. Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah perlu memperkuat diversifikasi basis penerimaan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi baru dan memperluas basis pajak. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan ekonomi digital untuk memperluas sumber-sumber penerimaan baru.

7.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Utang

Pasar keuangan ke depan masih dipenuhi ketidakpastian dan dapat memengaruhi pada pemenuhan target pembiayaan melalui utang dan pengelolaan portofolio utang. Volatilitas pasar yang tecermin pada pergerakan tingkat bunga dan nilai tukar selain berdampak langsung terhadap pembayaran kewajiban utang, juga memengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi di instrumen SBN. Ketidakpastian kondisi eksternal dan kondisi internal yang dinamis membutuhkan pengelolaan risiko utang yang *prudent* untuk memastikan kesinambungan fiskal bisa tetap dijaga. Risiko portofolio utang Pemerintah yang senantiasa dimonitor pergerakannya secara umum meliputi risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, serta risiko pembiayaan kembali (*refinancing*). Risiko lain yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan APBN adalah risiko kekurangan pembiayaan (*shortage*).

Risiko tingkat bunga yang bersumber dari utang Pemerintah dengan tingkat bunga mengambang atau *Variable Rate* (VR) tetap aman seiring kebijakan mengutamakan utang berbunga tetap. Pasca pandemi, ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih diwarnai dengan berbagai gejolak dan konflik geopolitik. Respons kebijakan negara maju khususnya AS juga terus dicermati karena berdampak pada tantangan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan negara *emerging* termasuk Indonesia. Perkembangan ekonomi dan tingkat inflasi di AS yang bertahan tinggi pada akhirnya memicu kondisi tingkat bunga *high for longer* yang berlanjut. Hal tersebut perlu dimitigasi karena dapat berdampak pada risiko naiknya beban pembayaran bunga utang Pemerintah, khususnya utang dengan tingkat bunga mengambang. Peningkatan utang dengan bunga mengambang juga disebabkan oleh peningkatan penerbitan SBN Ritel *non-tradable* dalam mendorong perluasan basis investor, serta peningkatan penarikan pinjaman seiring besarnya komitmen pembiayaan kegiatan melalui pinjaman. Dengan fokus pembiayaan yang memiliki tingkat bunga tetap dalam beberapa tahun terakhir, risiko utang Pemerintah yang bersumber dari volatilitas tingkat bunga diharapkan dapat terus dijaga dalam batas aman selama periode jangka menengah panjang.

Risiko nilai tukar stabil di level yang terukur seiring upaya Pemerintah untuk memprioritaskan pembiayaan dalam mata uang Rupiah. Dalam beberapa tahun terakhir

dan jangka menengah ke depan, Pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dengan mata uang Rupiah dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal itu dilakukan untuk mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik sekaligus menjaga eksposur terhadap risiko nilai tukar. Upaya pengendalian utang valas dalam beberapa tahun terakhir juga didukung oleh potensi permintaan investor domestik khususnya dari perbankan dan ritel. Peningkatan minat investor tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring dengan membaiknya prospek perekonomian dalam negeri, stabilnya peringkat kredit, serta terjaganya defisit APBN. Upaya mitigasi risiko nilai tukar terus dijalankan dalam kerangka *liability management* yang aktif, salah satunya melalui mekanisme konversi PLN, sehingga mengurangi eksposur instrumen utang dari volatilitas nilai tukar.

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) berada dalam batas yang aman dan dapat dikelola dengan baik. Risiko *refinancing* diukur dari rata-rata jatuh tempo utang (*Average Time to Maturity/ATM*) dan porsi utang dalam jangka pendek. ATM utang Pemerintah posisi akhir Maret 2025 adalah 7,8 tahun, relatif stabil dibandingkan posisi akhir tahun 2023 dan 2024. ATM utang tetap berada dalam koridor target indikator risiko portofolio utang jangka menengah. Pemerintah secara aktif melakukan upaya *liability management* seperti *debt switch* untuk mengendalikan risiko *refinancing*. Pemerintah juga menjaga sinergi dengan Bank Indonesia, termasuk dalam hal *debt switch* dilakukan terhadap SBN yang diterbitkan dalam pembiayaan pandemi Covid-19.

Selain ketiga risiko portofolio di atas, berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan dapat berdampak pada tekanan likuiditas pasar. Meskipun sumber utama pembiayaan APBN berasal dari instrumen SBN mata uang Rupiah, pasar keuangan domestik tidak terbebas dari dampak volatilitas pasar keuangan global. Namun demikian, perbaikan ekonomi domestik yang diperkirakan terus berlangsung ke depan akan berdampak positif bagi stabilitas pasar keuangan. Dalam pemenuhan pembiayaan, Pemerintah juga senantiasa menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal dengan menjaga disiplin fiskal sesuai undang-undang. Pembiayaan APBN sepanjang tahun 2022-2024 tetap dapat dipenuhi di tengah kondisi likuiditas yang cukup ketat selama periode kenaikan tingkat bunga global. Hal itu ditopang dengan strategi pengelolaan utang yang fleksibel dan oportunistik, dengan tetap menjaga kehati-hatian. Nominal pembiayaan utang neto selama kurun waktu tersebut bahkan berhasil ditekan lebih rendah dari yang direncanakan dalam APBN. Sebagai upaya untuk memenuhi target pembiayaan utang ke depan, Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjalin komunikasi aktif dengan pelaku pasar, memanfaatkan alternatif sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendorong penguatan basis investor dalam negeri terutama investor ritel.

7.2. Risiko Program Prioritas

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program prioritas dalam jangka menengah yang bertujuan untuk penguatan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Risiko pelaksanaan atas program dan kebijakan mencakup diantaranya potensi terhadap adanya potensi berkurangnya penerimaan negara atau tambahan beban bagi APBN. Dalam konteks ini, terdapat beberapa program yang perlu dicermati pelaksanaannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Namun demikian Pemerintah senantiasa berupaya agar program prioritas dapat berjalan optimal sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Sejalan dengan

hal tersebut APBN dijaga sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, efisien dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan inovasi pembiayaan yang *prudent* dan *sustainable*.

7.2.1. Risiko Kebijakan Ketahanan Energi

Fluktuasi harga energi global dapat memengaruhi komponen belanja negara mengingat kenaikan harga migas berdampak pada peningkatan beban subsidi BBM, LPG 3kg, dan listrik. Pemerintah terus mengupayakan optimalisasi perencanaan belanja, meningkatkan efisiensi penganggaran berbasis kinerja, memperkuat mekanisme mitigasi tantangan fiskal agar kebijakan yang diambil tetap berkelanjutan. Upaya ini dilakukan diantaranya melalui penguatan sinergi antar instansi, pemanfaatan teknologi dalam perencanaan dan pemantauan anggaran, serta peningkatan akurasi proyeksi belanja agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial.

Program pengembangan EBT sangat krusial dalam memastikan tercapainya ketahanan energi di Indonesia. EBT yang terus berkembang akan memastikan kesinambungan energi dan kelestarian lingkungan dalam jangka Panjang di tengah semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil. Perencanaan ketenagalistrikan yang semakin mengedepankan EBT dan peningkatan pemanfaatan biodiesel merupakan contoh nyata upaya Indonesia dalam mengembangkan EBT. Sektor ketenagalistrikan yang semakin hijau dan pemanfaatan biodiesel yang semakin optimal dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan impor, serta di saat bersamaan dapat mendukung aspek kelestarian lingkungan.

Pengembangan EBT merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi sebagaimana ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Sesuai komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* tahun 2016, target penurunan emisi tersebut adalah sebesar 31,89 persen secara *Business as Usual* dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sektor energi merupakan kontributor kedua terbesar setelah sektor kehutanan dalam target penurunan emisi NDC. Namun demikian, biaya yang dibutuhkan untuk penurunan emisi di sektor energi merupakan yang paling mahal. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam upaya pengurangan emisi di sektor ini.

Terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi dalam program pengembangan EBT. Pertama, terdapat risiko adanya peningkatan beban fiskal atas adanya biaya penggantian (kompensasi) atas kenaikan biaya listrik yang bersumber dari pembangkit berbasis energi terbarukan. Kedua, risiko peningkatan insentif biodiesel seiring meningkatnya porsi biodiesel. Ketiga, kenaikan eksposur kewajiban kontingensi atas pemberian dukungan fiskal berupa penjaminan untuk pengembangan EBT dan transisi energi. Sebagai langkah mitigasi, secara berkala dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sektor terkait roadmap transisi energi, penyiapan alokasi dana kontingensi, dan koordinasi dalam penganggaran belanja kompensasi maupun insentif biodiesel untuk mengakomodir potensi kenaikan BPP listrik atas pengembangan EBT dan kenaikan insentif biodiesel.

7.2.2. Risiko dan Upaya Mitigasi Program Pembiayaan Perumahan

Pembiayaan perumahan yang saat ini masih sangat tergantung dukungan APBN. Upaya untuk memitigasi risiko pembiayaan perumahan, antara lain dilakukan dengan mendorong

agar ekosistem perumahan semakin kondusif dengan menjaga keselarasan antara *supply* dan *demand*. Sementara itu pada sisi lain juga Pemerintah terus mendorong agar instrumen fiskal yang selama ini diberikan dapat disinergikan sehingga efektif untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Instrumen fiskal tersebut antara lain meliputi pembebasan PPN, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada sisi lain Pemerintah juga perlu mengembangkan alternatif skema pembiayaan perumahan MBR. Skema ini dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, Corporate Social Responsibility (CSR) perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR melalui skema KPBU. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendukung program pembiayaan perumahan bagi MBR.

7.2.3. Risiko dan Upaya Mitigasi Pelaksanaan Program Pengembangan Koperasi Merah Putih

Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memberdayakan desa, memutus rantai kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan program ini diperlukan adanya dukungan fiskal dalam berbagai bentuk yang dirancang dengan prinsip kehati-hatian guna menjaga keberlanjutan program dan sustainabilitas fiskal. Sustainabilitas fiskal dan keberlanjutan program perlu dijaga antara lain melalui penguatan kelembagaan dan SDM, pendampingan berkelanjutan, tata kelola yang baik, mekanisme pendanaan campuran (*blended finance*) yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan sumber lainnya. Untuk memitigasi risiko dan menjaga keberlanjutan program sekaligus fiskal maka penting disusun model bisnis KDMP yang kuat, SDM yang profesional dan kompeten, pilihan unit usaha yang prospektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, tata kelola yang akuntabilitas dan monitoring yang ketat, termasuk dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dan desa.

7.2.4. Risiko Belanja Negara

Peningkatan belanja pemerintah akibat kebijakan belanja mengikat (*mandatory spending*) memengaruhi ruang gerak fiskal. Semakin besar alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* untuk anggaran pendidikan akan semakin meningkat. Apabila terdapat tambahan belanja negara, maka Pemerintah berkewajiban menambah anggaran pendidikan sehingga tetap memenuhi *mandatory spending* sebesar 20 persen dari APBN. Pada sisi lain seiring dinamika perekonomian yang sangat dinamis berdampak pada beberapa indikator makro antara lain tekanan terhadap nilai tukar, dan suku bunga serta volatilitas ICP. Hal ini akan berdampak pada belanja negara antara lain terkait dengan pembayaran bunga utang dan subsidi dan kompensasi. Hal ini tentu perlu diantisipasi dan dimitigasi. Upaya untuk mitigasi risiko belanja dapat dilakukan dengan (i) efisiensi dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif; (ii) memanfaatkan *fiscal buffer* untuk mengantisipasi ketidakpastian; dan (iii) menjaga pengelolaan fiskal tetap fleksibel agar tetap responsif dan antisipatif di tengah eskalasi ketidakpastian global.

7.2.5. Risiko Pembiayaan Utang

Tren nominal kebutuhan pembiayaan APBN dalam jangka menengah diproyeksikan masih akan tinggi seiring dukungan APBN bagi kesejahteraan rakyat dan agenda pembangunan. Kebutuhan pemenuhan pembiayaan melalui utang masih akan cukup besar baik untuk memenuhi defisit APBN, pembiayaan jatuh tempo, dan pembiayaan non-utang. Kondisi likuiditas pasar SBN ke depan diperkirakan juga masih akan terbatas. Likuiditas yang berasal dari investor perbankan dan rumah tangga diperkirakan mulai mengalami normalisasi menuju keseimbangan yang baru seiring perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, peran investor asing akan menghadapi tantangan sebagai dampak dari kondisi global dan perbaikan ekonomi di negara maju.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko untuk memenuhi target pembiayaan APBN. Komitmen Pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan terus ditingkatkan dengan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Alternatif pembiayaan yang dapat dipertimbangkan meliputi kombinasi berbagai instrumen utang, pengembangan sumber, skema, dan pembiayaan non-utang, dengan tetap mempertimbangkan tingkat biaya dan risiko. Strategi operasional pembiayaan utang berpedoman pada kehati-hatian dengan meningkatkan fleksibilitas komposisi, nominal, dan *timing* penerbitan utang dengan menyesuaikan kondisi fiskal, kebutuhan kas, kondisi pasar, target risiko, dan portofolio utang.

Pemerintah juga menyiapkan strategi dalam memitigasi dampak krisis terhadap pasar SBN yakni melalui mekanisme stabilisasi pasar SBN. Mekanisme tersebut adalah *Bond Stabilization Framework (BSF)* dan *Crisis Management Protocol (CMP)*. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya mitigasi yang dilakukan Pemerintah melalui pengelolaan yang baik seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, pengendalian rasio utang terhadap PDB pada level yang aman, serta mempertimbangkan parameter risiko keuangan negara lainnya.

7.3. Risiko Kontingensi

7.3.1. Risiko Kontingensi Penjaminan

Risiko Penjaminan Infrastruktur

Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur, Pemerintah melibatkan swasta dengan menyediakan dukungan/insentif berupa penjaminan. Pemerintah memberikan penjaminan atas program atau skema pembangunan infrastruktur, antara lain PSN, pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU, dan pembangunan infrastruktur melalui penugasan pemerintah. Pemberian penjaminan tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan kepada APBN apabila dana yang dialokasikan tidak cukup untuk menutup klaim yang timbul. Beban klaim tersebut dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan fiskal negara apabila tidak dimitigasi dengan tepat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pengelolaan risiko tersebut sesuai dengan prinsip prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (*fiscal sustainability*).

Untuk memitigasi transmisi beban klaim dari risiko yang mungkin terjadi, Pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan Penjaminan khusus untuk pembiayaan

infrastruktur. Dana ini bertujuan untuk memberikan tambahan perlindungan yang diperlukan untuk menangani klaim yang timbul. Selain alokasi dana cadangan, Pemerintah melakukan beberapa mitigasi risiko seperti kolaborasi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk melakukan penjaminan bersama, penerapan mekanisme *single window policy*, sebagai *ring fencing* terhadap APBN, pemantauan dan evaluasi secara rutin, serta peninjauan rencana mitigasi risiko untuk memastikan potensi iko gagal bayar dapat dikelola dengan baik.

Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka realisasi percepatan program PEN, Pemerintah menyediakan dukungan bagi pelaku usaha (UMKM, Korporasi, dan BUMN) di antaranya melalui skema penjaminan kredit modal kerja. Program Penjaminan PEN untuk pelaku usaha UMKM dan Korporasi berakhir pada akhir tahun 2025, sehingga tidak terdapat eksposur risiko bagi Program PEN UMKM dan Korporasi pada tahun 2026. Sedangkan untuk Penjaminan Program PEN BUMN, terdapat risiko fiskal apabila BUMN yang mendapatkan jaminan PEN BUMN gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial (*default*) kepada penerima jaminan di tahun berjalan. Adapun program penjaminan PEN BUMN akan berakhir masa penjaminannya pada 31 Desember 2025 adalah PT Pertamina, dan pada 31 Desember 2026 adalah PT LEN, PT INKA, dan Perum DAMRI. Sedangkan penjaminan untuk PT Waskita Karya akan berakhir pada tahun 2029.

Pemerintah berupaya memitigasi risiko atas pelaksanaan program PEN. Adapun upaya tersebut antara lain (i) melakukan monitoring dan evaluasi rutin khususnya untuk debitur yang memiliki potensi klaim (*watchlist*) dan memiliki *outstanding* pinjaman yang masih cukup besar; (ii) menyediakan dana cadangan kewajiban penjaminan; (iii) memperkuat peran PT PII sebagai *ring fencing* yang menyerap risiko jika melebihi *threshold loss limit* penjaminan korporasi; dan (iv) menjaga kapasitas penjamin agar dapat melaksanakan penugasan dengan baik.

Risiko Penjaminan Kredit Cadangan Pangan Pemerintah

Peranan penyelenggaraan CPP menjadi signifikan untuk memastikan ketahanan pangan dan mengurangi kerentanan di tengah ketidakpastian global di sektor pangan. Ketidakpastian ini dipicu oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada produksi dan distribusi pangan. Dalam rangka kebutuhan penguatan penyelenggaraan CPP tersebut, diperlukan adanya dukungan Pemerintah kepada Penyelenggara CPP. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan yaitu Penjaminan Pemerintah untuk mendapatkan kredit dengan bunga rendah dalam rangka pengadaan dan pengelolaan stok pangan. Dengan diberikannya Penjaminan Pemerintah, maka Penyelenggara CPP memiliki biaya modal yang lebih rendah sehingga lebih efisien dalam mengelola CPP. Sebagai bagian dari kebijakan dukungan kepada sektor pangan, pada tahun 2026 diperkirakan terdapat potensi peningkatan frekuensi permohonan Penjaminan Pemerintah atas pengadaan pembelian beberapa komoditas pangan sebagaimana diatur dalam Perpres No 125 Tahun 2022 oleh Penyelenggara CPP.

Pemberian Penjaminan Pemerintah dapat menimbulkan risiko keuangan negara di kemudian hari dengan kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan Penyelenggara CPP dalam membayar pinjaman kepada kreditur. Untuk itu, diperlukan

upaya mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam PMK No 34 Tahun 2023, diantaranya persetujuan dari K/L yang berwenang (Badan Pangan Nasional) sebagai syarat penarikan pinjaman, penggunaan *escrow account* dalam menampung dana yang diterima oleh Penyelenggara CPP, serta kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman yang sudah harus tersedia minimal satu bulan sebelum jatuh tempo. Selain upaya mitigasi risiko tersebut, Kementerian Keuangan juga terus melakukan monitoring penyaluran pinjaman dan risiko Penjaminan Pemerintah secara berkala bersama dengan Badan Usaha Penjaminan, Penyelenggara CPP, dan Kreditur.

7.3.2. Kontingensi Non-Penjaminan

Risiko Jaminan Sosial

Risiko utama dari jaminan sosial adalah kecukupan dana untuk membiayai manfaat program di masa mendatang. Program jaminan sosial nasional mencakup program jaminan sosial kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparatur sipil negara dan TNI/Polri.

1. Program Jaminan Kesehatan

Utilisasi pelayanan Jaminan Kesehatan mengalami tren peningkatan signifikan setelah pandemi Covid-19 diiringi dengan tingkat kolektibilitas iuran yang masih perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dan berpotensi akan mempengaruhi kemampuan pembayaran klaim layanan kesehatan kepada fasilitas Kesehatan. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui: (i) monitoring dan evaluasi arus kas secara reguler; (ii) melakukan evaluasi terhadap manfaat, tarif layanan kesehatan dan iuran; (iii) perbaikan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menghindari inefisiensi dan potensi *fraud* di fasilitas kesehatan; dan (iv) mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam meningkatkan ketahanan dana program JKN melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningkatan kepesertaan aktif masyarakat di wilayahnya.

2. Program Jaminan Ketenagakerjaan

Secara umum, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran manfaat tahun 2026. Adapun, dari lima program yang dikelola, yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), program JKJ mengalami tren peningkatan rasio klaim yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga terjadi penurunan kesehatan keuangan yang menjadi risiko dalam jangka menengah-panjang. Pemerintah terus melakukan evaluasi secara rutin atas indikator kesehatan keuangan seluruh program, asumsi aktuarial untuk proyeksi ketahanan dana, dan *reviu* besaran iuran/manfaat.

3. Program Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri

Pada tahun 2026, Kondisi keuangan program jaminan sosial ASN dan TNI/Polri diproyeksikan masih mencukupi kebutuhan pembayaran manfaat kepada peserta. Program jaminan sosial tersebut terdiri atas Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) pada program asuransi sosial yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Namun, dalam jangka menengah perlu diperhatikan potensi risiko yang bersumber dari program Tabungan Hari Tua (THT) yang diproyeksikan akan terjadi trend peningkatan rasio klaim. Untuk program Jaminan Pensiun, Pemerintah masih terus mengupayakan percepatan reformasi pensiun baik untuk ASN maupun untuk TNI/POLRI.

Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum terhadap Pemerintah merupakan proses hukum yang dapat berbentuk gugatan perdata atau sengketa administrasi tata usaha negara. Gugatan ini diadili di pengadilan umum atau di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), di dalam negeri termasuk juga gugatan yang terjadi pengadilan negara lain yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat (K/L). Dalam konteks hukum di Indonesia, sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah tidak hanya terkait dengan keputusan atau tindakan administratif yang diambil oleh pejabat negara, tetapi juga dapat mencakup berbagai aspek hukum lainnya. Misalnya, sengketa kontraktual yang timbul dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah dan pihak ketiga, sengketa kepemilikan aset negara, serta tuntutan ganti rugi akibat kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai dampak dari kebijakan publik yang telah diputuskan oleh Pemerintah.

Adanya tuntutan hukum terhadap Pemerintah berpotensi menimbulkan berbagai risiko, salah satunya adalah munculnya kewajiban negara untuk membayar ganti rugi atau menyerahkan aset negara. Aset tersebut bisa berupa BMN, seperti tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh negara. Risiko ini akan terealisasi jika terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lanjutan. Selain dampak finansial, tuntutan hukum yang tidak ditangani dengan cermat juga dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan langkah mitigasi yang efektif untuk meminimalkan risiko tersebut.

Dalam rangka menghadapi potensi tuntutan hukum, Pemerintah melakukan upaya mitigasi risiko dengan pendekatan yang komprehensif dan terukur. Salah satu langkah utamanya adalah menerapkan upaya maksimal dalam menghadapi perkara-perkara hukum dengan tetap berpegang pada prinsip kecermatan dan kehati-hatian sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pendekatan ini mencakup: (i) Penyusunan Tim Hukum yang Kompeten; (ii) Evaluasi dan Penelaahan Putusan *Inkracht*; (iii) Peningkatan Kepatuhan Administratif dan Kontraktual, serta (iv) Penguatan Aspek Kehati-hatian.

Risiko Bencana Alam

Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia rawan bencana. Lokasi geografi Indonesia yang terletak pada tiga lempeng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (*ring of fire*), menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan. Pertumbuhan daerah urban dan pembangunan

infrastruktur yang masif menjadikan risiko kerugian ekonomi akibat bencana alam semakin tinggi.

Pendanaan risiko bencana dan perlindungan keuangan negara akibat dampak bencana dapat diimplementasikan melalui instrumen pendanaan yang bersifat reaktif dan preventif. Instrumen pendanaan yang bersifat reaktif (*ex-post financing*) misalnya dana cadangan bencana, alokasi/realokasi anggaran K/L dan pemerintah daerah, pinjaman, dan bantuan dari lembaga donor. Sedangkan instrumen yang bersifat preventif (*ex-ante financing*) misalnya asuransi bencana, pinjaman siaga, dan skema baru Dana Bersama Penanggulangan Bencana/*Pooling Fund Bencana*. Adapun instrumen pendanaan yang sudah diimplementasikan antara lain alokasi/realokasi anggaran di K/L dan pemerintah daerah, dana cadangan bencana, pinjaman siaga, dan asuransi (asuransi BMN/BMD dan mikro seperti asuransi pertanian) yang dilaksanakan oleh K/L dan beberapa pemerintah daerah.

Risiko Pembangunan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi

Dalam rangka mendukung implementasi program pengembangan energi terbarukan, Pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk eksplorasi panas bumi melalui Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP). Fasilitas PISP diharapkan dapat mengatasi kendala tingginya risiko eksplorasi melalui fitur Penanggungan Risiko (*derisking*) untuk eksplorasi wilayah kerja yang masih dimiliki Pemerintah serta wilayah kerja yang dimiliki BUMN yang membutuhkan dukungan pendanaan.

Program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *derisking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pada tahun 2025, proyek dukungan eksplorasi bersama dengan kementerian sektor (*Government Drilling*) untuk Wilayah Kerja Jailolo akan memasuki tahap pengeboran eksplorasi dengan estimasi penggunaan dana PISP sebesar USD17 juta. Diterbitkannya PMK Nomor 5 Tahun 2025 terkait Penjaminan atas Penanggungan Risiko (*derisking*) oleh PT PII, dapat mengurangi terjadinya *direct exposure* kepada APBN. Upaya mitigasi risiko perlu dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko eksplorasi melalui penguatan peran Komite Bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis *stop and go* pada fase pengeboran eksplorasi.

7.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Terdapat dua risiko utama yang merupakan hasil analisis dari Neraca konsolidasi sektor publik, yaitu dalam jangka pendek terdapat potensi risiko ketidakcukupan cadangan devisa untuk mengantisipasi tekanan neraca pembayaran serta dalam jangka menengah dan jangka panjang terdapat potensi risiko penurunan *net worth* Neraca Konsolidasi Sektor Publik. Neraca Konsolidasi sektor publik menyajikan gambaran yang holistik terkait kondisi neraca di tingkat negara, tidak lagi menggunakan perspektif parsial yang hanya berfokus pada entitas tertentu, mengingat terdapat hubungan transaksi keuangan yang signifikan antar entitas sektor publik, baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, maupun BUMN yang berpotensi menjadi media transmisi risiko antarsektor.

Untuk risiko jangka pendek, adanya potensi ketidakcukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan valas dan operasi moneter, dapat berdampak pada pelemahan

Rupiah. Hal tersebut menyebabkan tambahan realisasi defisit APBN akibat kenaikan belanja valas yang lebih besar dari pendapatan valas. Untuk risiko jangka menengah dan jangka panjang, terdapat risiko penurunan *net worth* yang dikarenakan pertumbuhan kewajiban lebih besar dari pertumbuhan aset. Hal tersebut dapat berdampak terhadap penurunan kepercayaan investor dan stakeholder lain, sehingga berpotensi meningkatkan *sovereign risk premium* yang terefleksi pada peningkatan *cost of fund* instrumen pembiayaan seluruh entitas sektor publik. Pada entitas Pemerintah Pusat, hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan belanja bunga pada APBN.

Sejalan dengan hasil identifikasi risiko neraca konsolidasi sektor publik, hasil analisis risiko pada neraca Pemerintah Umum, terdapat risiko yang perlu mendapat perhatian dan dimitigasi pada tahun 2026. Risiko pada neraca konsolidasi sektor publik tersebut, yang merupakan neraca konsolidasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, adalah penurunan *Net Financial Worth* (NFW) dimana total kewajiban lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset keuangan yang dimiliki. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan kewajiban Pemerintah Umum lebih besar dibandingkan pertumbuhan aset keuangannya, sehingga tren NFW mengalami penurunan.

Risiko neraca konsolidasi sektor publik untuk tahun 2026 masih cukup terkendali. Namun demikian, terdapat beberapa faktor risiko global yang perlu diwaspadai mengingat dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian seperti perlambatan ekonomi global dan *Trump Effect 2.0* yang akan berpengaruh pada seluruh entitas sektor publik, meskipun meredanya konflik di Ukraina dan Timur Tengah diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap stabilitas ekonomi makro. Kebijakan efisiensi anggaran ditahun 2025 untuk belanja produktif yang semakin berkualitas juga diharapkan dapat memberikan stimulus bagi perekonomian dan APBN yang lebih sehat.

Dalam rangka mengelola risiko pada neraca konsolidasi sektor publik secara komprehensif, diperlukan mitigasi pada berbagai aspek dan entitas. Pada aspek liabilitas, perlu pengendalian utang yang prudent oleh entitas Pemerintah Pusat dan BUMN, misalnya penerapan instrumen pembiayaan kreatif yang lebih luas untuk mendanai berbagai program pembangunan nasional, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN untuk belanja pembangunan dan PMN pada BUMN. Pemerintah Pusat dan BUMN juga harus menerapkan manajemen portofolio utang yang lebih aktif seperti *debt switch*, *buyback*, *reprofiling*, *private placement* dengan memperhatikan indikator ekonomi yang cukup dinamis, sehingga neraca Pemerintah Pusat, BUMN, dan negara (*sovereign*) menjadi semakin sehat.

Untuk meningkatkan cadangan devisa pada level yang aman, diperlukan strategi yang terintegrasi baik dari sisi kebijakan moneter maupun fiskal. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan surplus NPI melalui pengelolaan utang luar negeri pemerintah dan swasta, mengendalikan stabilitas nilai tukar Rupiah, mendorong peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Penguatan NPI juga perlu didorong melalui peningkatan investasi asing, pengembangan pariwisata nasional, dan penyelenggaraan *international events*. Selain itu, diperlukan peningkatan kerja sama internasional melalui penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) dan penguatan digitalisasi ekonomi melalui *e-commerce* global.

7.5. Risiko Fiskal Daerah

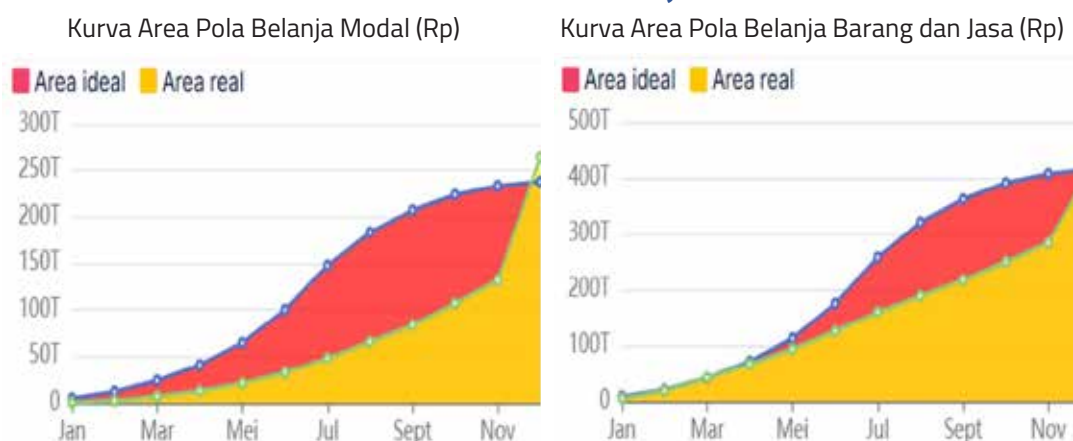
Pemerintah daerah sering dihadapkan pada berbagai risiko fiskal yang dapat memberikan dampak kepada fiskal Pemerintah Pusat (APBN). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dasar melalui belanja daerah. Namun pada realisasinya, pemerintah daerah cenderung memiliki pola belanja yang bersifat lambat di awal tahun sehingga dapat menimbulkan risiko inefisiensi belanja. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki risiko kontingensi atas pembiayaan utang daerah yang mereka lakukan. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan pelemahan posisi fiskal pemerintah daerah dimana nantinya pelemahan posisi keuangan pemerintah daerah tersebut dapat mengakibatkan tekanan pada fiskal pusat atau APBN yang dapat digambarkan sebagai berikut:

7.5.1. Risiko Implementasi Belanja Daerah yang Belum Sepenuhnya Efisien

Serapan belanja daerah cenderung lambat di awal tahun dan melonjak di akhir tahun. Indeks pola belanja mencerminkan tren ini, naik dari 64,8 persen pada 2023 menjadi 65,5 persen di 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pola belanja berkat upaya Pemerintah. Ke depan, pemantauan lebih rinci per jenis belanja, seperti belanja modal dan barang/jasa, akan memudahkan mitigasi dan perbaikan pola belanja daerah.

Pemantauan pola belanja daerah krusial untuk meningkatkan kualitas belanja. Saat ini, pemanfaatan belanja daerah masih kurang disiplin, efisien, dan akuntabel, menghambat penyerapan anggaran dan efek pengganda ekonomi. Dampaknya, penerimaan pajak dari transaksi pemerintah daerah turut terpengaruh. Untuk mengatasi ini, UU HKPD mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas dan berbasis kinerja agar belanja lebih responsif, optimal, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Grafik 57. Kurva Area Pola Belanja Daerah



Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko implementasi belanja daerah yang belum sepenuhnya efisien. Strategi tersebut antara lain: (i) harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dilakukan sesuai dengan prioritas Pemerintah; (ii) penyaluran transfer berbasis kinerja diterapkan dengan menekankan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan dan pelaporan dana; serta (iii) pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer difokuskan pada *output* dan *outcome* untuk memastikan efektivitasnya.

Selain itu, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik menjadi langkah penting dalam optimalisasi penggunaan dana. Upaya perbaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah terus didorong, termasuk menyeimbangkan belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan belanja daerah dapat lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

7.5.2. Risiko Pinjaman Daerah

Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, salah satu bentuk risiko yang berasal dari risiko kontingensi pembiayaan utang/pinjaman daerah adalah tidak terbayarnya kewajiban pembayaran kembali (gagal bayar). Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang tidak optimal. Likuiditas dan solvabilitas yang terkendala akan menyebabkan penyelesaian tagihan (*outstanding*) pembiayaan utang daerah (pinjaman daerah) terhambat sehingga terdapat potensi risiko terkait dana jaminan penugasan. Hal ini dikarenakan, mekanisme pemotongan TKD untuk melunasi pinjaman daerah yang berasal dari PT SMI mungkin tidak mencukupi untuk penyelesaian tunggakan sehingga perlu ada tambahan dari dana jaminan penugasan. Dan ketika dana jaminan penugasan tidak mencukupi maka diperlukan tambahan suntikan dana dari APBN untuk menambah dana jaminan penugasan tersebut.

Strategi mitigasi risiko kontingensi pembiayaan utang daerah mencakup penguatan penilaian untuk persetujuan utang secara berkala, serta pemantauan dan evaluasi alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pembayaran pokok dan bunga. Selain itu, peningkatan *risk awareness* di kalangan pemerintah daerah didorong agar mitigasi risiko dapat dilakukan sejak dini. Sinergi dengan SMV juga diperkuat untuk meminimalkan risiko pinjaman daerah melalui pemantauan alokasi pembayaran dalam APBD, penilaian keuangan dan kesesuaian proyek dengan prioritas Pemerintah, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam pengelolaan pinjaman dan risiko fiskal guna menjaga *cash flow* APBD.

LAMPIRAN

1. Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan TA 2026

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
1. Aceh	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,66%	4,28%- 4,51%	5,0%- 5,3%	14,23%	12%-13%	9,46%- 10,46%	119,26	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	105,94	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	70,67	Diatas rata-rata Nasional	80-89	77,78	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran I (Indeks Regional Wellbeing di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran I (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Mendorong belanja infrastruktur konektivitas			• Optimalisasi APBD untuk mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti sawit, kelapa dan gas bumi; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Mengalokasikan belanja fungsi ekonomi dalam rangka penguatan kawasan sentra produksi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif; • Meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah; • Mematuhi pemenuhan <i>earmarking</i> PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	• Pemanfaatan TKD & sinergi pendanaan serta creative financing untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, akses layanan internet, sektor perumahan untuk masyarakat; • Dukungan perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan masyarakat miskin; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar. • Dukungan APBD dalam pengembangan UMKM untuk naik kelas melalui program pendampingan, transformasi digital, dan integrasi ke dalam rantai pasok nasional dan global • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban <i>earmarking</i> pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI	creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting.	sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan; • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBPN agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi	dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	lengkap serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. • Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
		guna mengurangi beban masyarakat miskin. • Selektif dalam memberikan insentif PDRD				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
2. Sumatera Utara	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5,03%	5,2%-5,4%	5,6%-6,2%	7,99%	6,96%-7,46%	4,6%-5,6%	119,26	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	105,94	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	66,68	Diatas rata-rata Nasional	70-79	85,02	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	Kudran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			Kudran II (Indeks Regional Wellbeing di bawah rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			Kudran I (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Tinggi) NTP di atas rata-rata			Kudran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTN di bawah rata-rata			Kudran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			Kudran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; Peningkatan belanja fungsi ekonomi berfokus pada kenaikan nilai tambah produk andalan dalam kerangka hilirisasi; Mendorong transformasi struktural yang berkaitan dengan penataan dan peningkatan kualitas wilayah metropolitan Medan;			Optimalisasi APBD untuk mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada sektor perumahan untuk masyarakat, akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan			Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; Penguatan kerja sama antar daerah; Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan			Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; Penguatan kerja sama antar daerah; Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi			Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD,			Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - Peningkatan belanja infrastruktur untuk mendukung konektivitas Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif selaras dengan RPJMN; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- pemberantasan penyakit menular. - Dukungan perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan masyarakat miskin; - Dukungan penguatan akses permodalan masyarakat di desa melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi; - Dukungan APBD untuk pengembangan UMKM untuk naik kelas melalui program pendampingan, transformasi digital, dan integrasi ke dalam rantai pasok nasional dan global; - Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	- spesifik dalam rangka penurunan stunting; - Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.	kebijakan dengan PNBK agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	- untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
3. Sumatera Barat	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,36%	4,69%-5,19%	5,2%-5,7%	5,97%	4,5%-5,1%	3,39%-4,39%	123,74	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	95,64	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	74,41	Diatas rata-rata Nasional	80-89	86,10	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran IV (Indeks <i>Regional Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTP di atas rata-rata			Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTN di bawah rata-rata			Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian seperti kelapa, kelapa sawit; Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan komoditas			Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan			Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; Penguatan kerja sama antar daerah;			Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; Penguatan kerja sama antar daerah; Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi			Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain			Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; Meningkatkan persentase earmarking pajak		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- unggulan perikanan budidaya dan tambak rakyat; - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - Mendorong penguatan reformasi struktural seperti kemudahan izin ekspor serta jaminan untuk pelaku UMKM; - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- pemberantasan penyakit menular; - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; - Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; - Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.	kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	- melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan	- rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
4. Riau	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	3,52%	3,90%- 4,23%	4,4%- 4,7%	6,67%	5,19%- 6,19%	4,65%- 5,65%	173,22	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	104,44	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	74,24	Diatas rata-rata Nasional	80-89	86,49	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			Kuadran I (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			● Kuadran IV (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Rendah) ● NTP di atas rata-rata			● Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) ● NTN di atas rata-rata			Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	● Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; ● Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan koridor industri prioritas hilirisasi kelapa, industri makanan minuman, industri kimia, industri energi, industri kosmetik dan farmasi (sesuai RPJMN); ● Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga			● Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; ● Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada sektor perumahan untuk masyarakat, memperluas akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan			● Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian; ● Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; ● Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian; ● Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya			● Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun <i>creative financing</i> antara lain untuk peningkatan infrastruktur; ● Penguatan kerja sama antar daerah; ● Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			● Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; ● Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; ● Penguatan DAU <i>earmarked</i> dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; ● Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD,			● Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; ● Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; ● Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Peningkatan alokasi belanja ekonomi untuk mendukung kawasan pariwisata, ekonomi biru dan ekonomi kreatif; • Peningkatan alokasi belanja infrastruktur konektivitas seperti mendukung pembangunan jalan tol (sesuai RPJMN); • Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular; • Dukungan perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan masyarakat miskin; • Dukungan APBD dalam meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin; • Selektif dalam memberikan insentif PDRD.	• Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opser PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya • Penguatan kerja sama antar daerah		untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infra layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
5. Jambi																		
Kinerja	4,51%	4,81%- 5,11%	5%-5,4%	7,10%	6,3%- 6,8%	5,34%- 6,34%	156,14	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	101,18	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	69,02	Diatas rata-rata Nasional	70-79	84,64	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	- Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; - Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang berfokus pada pembangunan kawasan pariwisata ekonomi kreatif Jambi; - Peningkatan alokasi APBD yang berkaitan dengan hilirisasi sawit, hilirisasi kelapa, hilirisasi batubara untuk kebutuhan industri;			- Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; - Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan			- Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; - Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; - Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; - Penguatan kerja sama antar daerah; - Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi			- Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; - Penguatan kerja sama antar daerah; - Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.			- Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; - Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;			- Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; - Meningkatkan persentase earmarking pajak		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	• Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Peningkatan belanja APBD yang mendukung kawasan perkebunan dan kualitas produksi komoditas andalan yang berbasis teknologi • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	pemberantasan penyakit menular; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja	pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		• Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
		sama dengan aparat penegak hukum; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
6. Sumatera Selatan	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5,03%	5,3%-5,5%	5,8%-6,3%	10,97%	9,37%-10,37%	9,07%-10,07%	120,84	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	117,43	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	67,29	Diatas rata-rata Nasional	70-79	87,32	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran II (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran I (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Alokasi belanja ekonomi yang mendukung hilirisasi komoditas pertanian sawit, karet, kelapa dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan. Sektor prioritas lainnya adalah industri kimia, industri energi, perikanan serta makanan dan minuman; • Mendukung Pembangunan jalan tol untuk kebutuhan konektivitas Kawasan metropolitan dan pengembangan industri melalui belanja infrastruktur;			• Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan masyarakat miskin; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor kesehatan dan akses layanan internet;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Insentif PBB P2 untuk lahan produksi pangan untuk menjaga luas lahan produktif dan mencegah alih fungsi lahan; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Meningkatkan persentase Earmarking Pajak		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	• Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Memperkuat reformasi struktural melalui percepatan transformasi digital baik pada kelembagaan maupun layanan publik digital serta reformasi birokrasi; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	• Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. • Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
7. Bengkulu	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,62%	4,55- 4,86%	4,8%- 5,8%	13,56%	13,1%- 13,6%	11,01%- 12,00%	181.9	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	106.63	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	65.38	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	91.25	Diatas rata-rata Nasional	Di atas rata-rata nasional
Karakteristik	Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			•Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) •NTP di atas rata-rata			Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) NTN di atas rata-rata			Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur untuk konektivitas industri; • Meningkatkan belanja APBD terkait dengan pembangunan dan pengelolaan tampungan air dan penyediaan air berkelanjutan untuk produksi komoditas andalan yaitu sawit, kopi dan karet; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;			• Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui, pengelolaan sistem mitigasi			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Menjaga kepatuhan pemenuhan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Memperkuat transformasi struktural melalui percepatan transformasi digital baik pada kelembagaan maupun layanan publik digital; - Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan kriminalitas dan kekerasan; - Dukungan perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan masyarakat miskin; - Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		- Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
8. Lampung	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,57%	4,90%- 5,30%	5,50%- 5,70%	10,69%	9,5%- 10%	8,9%-9,9%	124.98	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	109.99	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	65.13	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	93.71	Diatas rata-rata Nasional	Di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Alokasi belanja ekonomi yang mendukung hilirisasi Pengembangan koridor industri kelapa, hilirisasi tebu, dan industri makanan dan minuman;			• Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat			Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Penguatan kerja sama antar daerah Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	• Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi biru seperti sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap, pantai dan pesisir; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk	dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Dukungan belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Dukungan APBD untuk ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum;	meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
9. Kep. Bangka Belitung	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	0,77%	4,46%- 5,10%	2,90%- 4%	4,55%	2,92%- 3,92%	3,5%-3,9%	133.8	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	109.78	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	71.04	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	93.31	Diatas rata-rata Nasional	Di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek strategis nasional; • Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri melalui hilirisasi timah dan bauksit,			• Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi,			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi,			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan layanan dasar kesehatan; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	hilirisasi kelapa sawit, dan industri makanan dan minuman; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Peningkatan dukungan belanja infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas Kawasan pariwisata; • Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas; • Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.	pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Penguatan kerja sama antar daerah	terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan Pembiayaan Utang Daerah dan TKD dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
10. Kep. Riau	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5,02%	5,25%- 5,53%	5,8%- 6,4%	5,37%	4,4%- 4,9%	3%-4%	104.81	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	105.51	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata- rata Nasional	73.55	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	95.01	Diatas rata-rata Nasional	Di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek; • Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal;			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Penguatan kerja sama antar daerah			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Menjaga kepatuhan pemenuhan <i>earmarking</i> Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Pembangunan infrastruktur konektivitas dalam hal transportasi darat dan perikanan sesuai dengan RPJMN; - Meningkatkan persentase pemenuhan <i>earmarking</i> PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas; - Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.	Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.			- Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative <i>financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
11. DKI Jakarta	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,90%	4,98%- 5,23%	5,6%- 6%	4,30%	3,55%- 3,85%	3,8%- 3,9%	106.49	Diatas rata- rata Nasional	Diatas rata- rata Nasional	105.28	Diatas rata- rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	84,47	Diatas rata- rata Nasional	90-99	95.15	Diatas rata- rata Nasional	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)			• Kuadran I (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran I (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran I (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Mengalokasikan belanja infrastruktur pada Pengembangan Kawasan aglomerasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas seperti MRT, LRT, Jalan tol; • Pengembangan koridor industri untuk penguatan rantai pasok industri baik lokal maupun global; • Percepatan transformasi digital melalui perluasan			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan Earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPd, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	infrastruktur digital dan jaringan broadband di seluruh pelosok wilayah Jakarta; - Memperkuat transformasi struktural dalam hal reformasi hukum, korupsi, dan tata kelola transformasi pemerintahan digital; - Meningkatkan persentase kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas; - Pemberian insentif PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.	kerja sama dengan aparat penegak hukum; Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	meningkatkan nilai tambah produk pertanian; Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.		- Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
12. Jawa Barat	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,95%	4,96%- 5,37%	5,78%- 6,2%	7,46%	5,85%- 6,46%	5,5%-6%	112.17	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	112.45	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	73,44	Diatas rata-rata Nasional	80-89	88.50	Diatas rata-rata Nasional	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran I (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran I (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran I (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran I (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Fasilitasi perluasan market dan kapasitas industri andalan; • Promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi; • Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk imunisasi dasar lengkap, persalinan, serta penguatan layanan kesehatan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPd,		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; • Mempertahankan alokasi belanja produktif untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri di daerah; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem	meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan <i>stunting</i>; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.	• Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	• Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
		mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban <i>earmarking</i> pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
13. Jawa Tengah	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4,95%	4,9%-5,6%	5,7%-6%	10,47%	9%-9,66%	8,53%-8,7%	114.21	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	101	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	77,27	Diatas rata-rata Nasional	80-89	96.19	Diatas rata-rata Nasional	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran I (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran I (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran I (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran I (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah; • Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi sektor andalan dalam rangka perluasan market dan kapasitas industri; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD,			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan; • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%–4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.	pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
14. DI Yogyakarta	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5.03%	5,3%- 5,8%	5,5%- 6,1%	10.4%	10%- 10,5%	8,92%- 9,92%	104,86	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	116,69	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	83,74	Diatas rata-rata Nasional	90-99	96,38	Diatas rata-rata Nasional	Di atas kenaikan rata- rata nasional
Karakteristik	• Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan yang berfokus pada perluasan market dan kapasitas industri; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Penguatan kawasan industri dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui, peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN); • Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana	• Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.					

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
15. Jawa Timur	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.93%	5,1%-5,4%	5,7%-6,3%	9.56%	7,58%-8,08%	7,5%-8%	104,86	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	116,69	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	73,39	Diatas rata-rata Nasional	80-89	92,82	Diatas rata-rata Nasional	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran I (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran I (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran I (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran I (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti fasilitas perluasan market dan kapasitas industri; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD,			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan; • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran coding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi; • Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. • Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan	dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.	pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.					

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
16. Banten	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.79%	5,30%	5,6%- 6,2%	5.7%	4,5%- 5,5%	4,25%- 4,85%	108,76	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	96,51	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	70,19	Diatas rata-rata Nasional	80-89	86,15	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran I (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan proyek investasi publik; • Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan melalui fasilitasi perluasan market dan kapasitas industri; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD,		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN); • Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas;	• Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Menjaga kepatuhan earmarking kewajiban pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin. •	• Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		• Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	• Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.					

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
17. Bali	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5.48%	5,3%- 6,3%	6,3%- 6,9%	3.8%	2,2%- 2,7%	2,99%- 3,5%	101,51	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	91,65	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	81,09	Diatas rata-rata Nasional	90-99	100	Diatas rata- rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan proyek investasi publik; • Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi sektor andalan melalui fasilitas perluasan market dan kapasitas industri; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN); - Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; - Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas..	guna mengurangi beban masyarakat miskin.	pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
18. Nusa Tenggara Barat	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5.3%	6%-7,5%	6%-6,6%	11.91%	11,68%-12,18%	11,05%-11,61%	121,20	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	103,26	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	61,72	Diatas rata-rata Nasional	70-79	88,72	Diatas rata-rata Nasional	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi pelaksanaan proyek; • Peningkatan alokasi belanja APBD terkait peningkatan kapasitas produksi dengan teknologi, penguatan kawasan sentra produksi dan			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun untuk peningkatan infrastruktur; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN); • Peningkatan belanja infrastruktur atau belanja modal yang produktif pada APBD dalam mendukung hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan	• Memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui penguatan Satpol PP, peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan kriminalitas dan kekerasan; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting.	sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNPB agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas; • Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.					

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
19. Nusa Tenggara Timur	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	3.73%	4,8%-5,4%	4,4%-5%	19.02%	15,32%-15,82%	17%-18%	99,60	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	89,49	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	60,71	Diatas rata-rata Nasional	70-79	90,03	Diatas rata-rata Nasional	Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi pelaksanaan proyek; • Meningkatkan belanja APBD terkait peningkatan kapasitas produksi komoditas nilai tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi, penguatan kawasan sentra			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	produksi serta promosi ekspor (sesuai RPJMN); • Peningkatan alokasi belanja infrastruktur atau belanja modal yang produktif pada APBD dalam mendukung hilirisasi sektor andalan; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,	• Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, akses layanan internet, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah; • Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin; • Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu	• Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Insentif PBB P2 untuk lahan produksi pangan untuk menjaga luas lahan produktif dan mencegah alih fungsi lahan; • Penguatan kerja sama antar daerah.	meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNPB agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	untuk mendukung konektivitas; • Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.					

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
20. Kalimantan Barat	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.90%	5,30%-5,65%	5,20%-6,20%	6.25%	5,65%-6,15%	4,75%-5,75%	154,98	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	100,21	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	68,52	Diatas rata-rata Nasional	70-79	82,62	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan dukungan belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; • Penguatan kawasan sentra produksi komoditas andalan (sawit, karet, kelapa, hasil laut dan perikanan);			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah; • Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) untuk mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, persalinan, dan imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	• Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang efektif menaikkan nilai tambah produk; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi market produk dan sertifikasi yang memadai; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Penguatan kerja sama antar daerah.		melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan Pembiayaan Utang Daerah dan TKD dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
21. Kalimantan Tengah	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.46%	5,60%-6,20%	5,40%-5,80%	5.26%	4,11%-4,61%	3,5%-4,5%	125,89	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	96,51	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	71,36	Diatas rata-rata Nasional	80-89	80,39	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	Kudran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			Kudran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kudran IV (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Rendah) NTP di atas rata-rata			Kudran IV (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Rendah) NTN di atas rata-rata			Kudran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			Kudran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	- Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui e-planning dan e-budgeting dalam proyek investasi publik; - Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, dan kopi, perkebunan, batu bara dan bijih zirkonium); - Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi sektor andalan dan potensial			- Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; - Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat; - Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi			- Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian; - Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; - Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian; - Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;			- Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan; - Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; - Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.			- Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; - Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar masyarakat; - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;			- Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar layanan dasar kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap, persalinan, dan penguatan layanan kesehatan; - Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	daerah serta kolaborasi BUMDes dan koperasi dalam memperkuat rantai komoditas lokal; • Peningkatan kapasitas SDM lokal melalui literasi digital dalam marketisasi produk serta kewirausahaan UMKM; • Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Insentif PBB P2 untuk lahan produksi pangan untuk menjaga luas lahan produktif dan mencegah alih fungsi lahan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya.		• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan pendidikan.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
22. Kalimantan Selatan	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5.05%	5,00%-5,30%	5,60%-6,40%	4.02%	3,44%-3,94%	2,46%-3,46%	115,12	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Kenaikan Nasional	99,04	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	76,69	Diatas rata-rata Nasional	80-89	87,58	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			• Kuadran II (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			• Kuadran IV (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran IV (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; • Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor			• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;			• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; • Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk pelayanan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan; • Mematuhi pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	sawit, karet, kopi, ikan haruan, kepiting mangrove, dll); • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Mematuhi pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya.		• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
23. Kalimantan Timur	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	6.17%	6,3%-6,5%	6,6%-7,2%	5.51%	4,2%-5,1%	3,5%-4,3%	137,94	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	99,71	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	78,13	Diatas rata-rata Nasional	80-89	91,10	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			Kuadran I (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata			• Kuadran IV (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Rendah) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran I (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Tinggi) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran I (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; • Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja			• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya;			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan; • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kualitas layanan pendidikan ; • Perlu penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, batubara, kayu,dll); • Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang efektif menaikkan nilai tambah produk; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi market produk dan sertifikasi yang memadai; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	• Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya; • Penguatan kerja sama antar daerah.	pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan ; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan pendidikan.	• Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
24. Kalimantan Utara	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.57%	5,30%- 5,60%	5,40%- 5,60%	5.38%	4,3%- 5,1%	3,11%- 4,3%	112,81	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	105,59	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata- rata Nasional	74,03	Diatas rata-rata Nasional	80-89	91,80	Diatas rata-rata Nasional	Di atas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; • Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat.; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.			• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; • Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	andalan lebih stabil (kelapa sawit, udang, kepiting, rumput laut, batubara, bijih besi, dan intan); • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi market produk dan sertifikasi yang memadai; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.			• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan ; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan pendidikan.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
25. Sulawesi Utara	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5,39%	5,4%-5,8%	5,7%-6,7%	6.7%	5,59%-6,19%	4,5%-5%	114,14	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	107,68	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	63,57	Diatas rata-rata Nasional	70-79	91,04	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	○ Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) ○ Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			● Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			● Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) ● NTP di bawah rata-rata			● Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) ● NTN di atas rata-rata			● Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)			● Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	○ Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; ○ Peningkatan belanja fungsi ekonomi yang efektif menaikkan nilai tambah produk; ○ Mendorong transformasi struktural yang didasarkan pada roadmap industri yang strategis dari sektor primer ke sekunder;			○ Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; ○ Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah;			○ Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; ○ Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; ○ Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; ○ Penguatan kerja sama antar daerah;			○ Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; ○ Penguatan kerja sama antar daerah; ○ Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;			○ Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; ○ Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; ○ Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk			○ Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan; ○ Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; ○ Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- o Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - o Dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi market produk dan sertifikasinya; - o Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; - o Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- o Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; - o Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; - o Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; - o Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna	o Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		- o penyediaan sarana prasarana pendidikan; - o Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- o Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPd, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - o Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
		mengurangi beban masyarakat miskin.				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
26. Sulawesi Tengah	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	9.89%	12,72-13,28	10,3%-12,1%	11.77	9%-9,5%	9,18%-10,18%	117,96	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	93,61	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	64,23	Diatas rata-rata Nasional	70-79	85,24	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	o Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran IV (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	o Fasilitasi perluasan market dan kapasitas industri andalan; o Promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi; o Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; o Mempertahankan alokasi belanja produktif untuk meningkatkan nilai tambah			o Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri o Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses			o Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian o Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian o Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian o Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.			o Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan. o Penguatan kerja sama antar daerah o Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; o Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan			o Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan ; o Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; o Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam			o Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan dan dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, serta penguatan layanan kesehatan; o Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; o Meningkatkan persentase Earmarking Pajak		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	dan kualitas produk industri di daerah; - Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah - Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, dan pengembangan UMKM, - Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	- Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya; - Penguatan kerja sama antar daerah.	Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBPN agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi	RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan ; Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan .	Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	Pertanian			Perikanan			2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
27. Sulawesi Selatan	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5.02%	5,50%- 6,30%	5,9%- 6,5%	8.06%	7,30%- 7,89%	6,5%-7%	117.87	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata- rata Nasional	111.92	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	67,94	Diatas rata-rata Nasional	70-79	90.27	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	- Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) - Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran II (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata)			- Kuadran I (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Tinggi) - NTP di bawah rata-rata			- Kuadran I (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Tinggi) - NTN di atas rata-rata			Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	- Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek - Peningkatan belanja APBD terkait peningkatan kapasitas produksi komoditas nilai tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi			- Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri - Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses			- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian - Penguatan kerja sama antar daerah - Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya - Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat			- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan. - Penguatan kerja sama antar daerah - Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. - Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan			- Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; - Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) serta mempertahankan			- Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; - Menjaga kepatuhan pemenuhan Earmarking Pajak Rokok untuk		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Monitoring proyek strategis daerah dan kolaborasi dengan swasta dan Pemerintah Pusat terkait pendanaan - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah - Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. - Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah	permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah - Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat dan perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan, pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar - Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	meningkatkan nilai tambah produk pertanian Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian	Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi	kinerja layanan dasar pendidikan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM, Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
28. Sulawesi Tenggara	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5.40%	5,96%-6,46%	6%-6,6%	11.21%	10,04%-10,54%	8,77%-9,77%	114.06	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	96.98	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	66,66	Diatas rata-rata Nasional	70-79	87.08	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	● Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)			● Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) ● NTP di bawah rata-rata			Kuadran I (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Tinggi) ● NTN di bawah rata-rata			● Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			● Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	● Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek ● Peningkatan alokasi belanja APBD terkait meningkatkan kapasitas produksi komoditas nilai tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi			● Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri ● Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja			● Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; ● Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian ● Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting			● Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan. ● Penguatan kerja sama antar daerah ● Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. ● Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan ● Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi,			● Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; ● Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) serta mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;			● Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan; ● Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; ● Meningkatkan persentase Earmarking Pajak		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Monitoring proyek strategis daerah dan kolaborasi dengan swasta dan Pemerintah Pusat terkait pendanaan - Peningkatan alokasi belanja infrastruktur atau belanja modal yang produktif pada APBD - Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. - Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah	sama dengan BUMD dan koperasi daerah - Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, pendidikan, serta akses layanan internet - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar	- Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya - Penguatan kerja sama antar daerah	terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi	- Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. - Penguatan DAU earmarked, evaluasi <i>mandatory spending</i>, dan belanja PDRD untuk belanja sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
29. Gorontalo	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.13%	5,23%- 5,46%	5%-5,4%	14.57%	14,21%- 14,5%	11,8%- 12,8%	109.04	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	96.48	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata- rata Nasional	62,77	Diatas rata-rata Nasional	70-79	90.14	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata nasional
Karakteristik	• Kuadran I (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran IV (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek • Meningkatkan belanja APBD terkait peningkatan kapasitas produksi produk nilai tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi • Monitoring proyek strategis daerah dan kolaborasi dengan swasta dan			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; • Menjaga kepatuhan pemenuhan Earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	Pemerintah Pusat terkait pendanaan • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah • Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. • Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah	sama dengan BUMD dan koperasi daerah • Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet • Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan	• Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.		RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
		guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu • Mempertahankan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
30. Sulawesi Barat	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.76%	5,23%-5,79%	5%-5,6%	11.21%	9%-9,73%	8,5%-9,2%	144.62	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	97.05	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	61,6	Diatas rata-rata Nasional	70-79	81.68	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di atas rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)			• Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM - Alokasi belanja untuk penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan stabil dan terjangkau - Pembiayaan dan investasi ekosistem usaha daerah melalui BUMD, swasta dan koperasi/BPR - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah - Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsi PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan	melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah - Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar - Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu	- Penguatan kerja sama antar daerah; - Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; - Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting.		- Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- Meningkatkan persentase Earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

2. Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 Berdasarkan Program

No. BA			Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
Lampiran					246
1.	001	MPR			695,1
				Program Dukungan Manajemen	194,1
				Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	501,0

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	Pertanian			Perikanan			2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
31. Maluku	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	5.34%	5.26%- 5.51%	6,2%- 6,6%	16.05%	13,01%- 13,51%	14%-14,5%	102.34	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	114.24	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	57,72	Diatas rata-rata Nasional	60-69	72.67	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	- Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) - Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			- Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) - NTP di bawah rata-rata			- Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) - NTN di atas rata-rata			Kuadran III (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda	- Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik - Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan			- Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri - Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan			- Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; - Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian - Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan dari pada tarif untuk lahan lainnya;			- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan. - Penguatan kerja sama antar daerah - Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; - Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan			- Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD,			- Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	potensi daerah serta kewirausahaan UMKM - Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan yaitu perikanan lebih memiliki nilai tambah yang lebih baik. - Pembiayaan dan investasi ekosistem usaha daerah melalui BUMD, swasta dan koperasi/BPR - Peningkatan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah - Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan, serta akses layanan internet. - Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar. - Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	Penguatan kerja sama antar daerah.	Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi	untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah - Meningkatkan persentase earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
32. Maluku Utara	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	13.73%	14,9%- 16%	12,1%- 13,8%	6.32%	4,95%- 5,15%	4%-4,5%	103.42	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	100.38	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata- rata Nasional	48,17	Diatas rata-rata Nasional	60-69	78.64	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran IV (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran II (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya • Penguatan kerja sama antar daerah			• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan • Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan. • Penguatan kerja sama antar daerah			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, stunting serta penguatan layanan kesehatan; • Mematuhi pemenuhan earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan. - Pembiayaan dan investasi ekosistem usaha daerah melalui BUMD, swasta dan koperasi/BPR - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah - Mematuhi pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular, pendidikan, serta akses layanan internet. - Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar - Meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu - Mematuhi pemenuhan <i>earmarking</i> pajak rokok untuk dukungan			infrastruktur layanan dasar pendidikan.	RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
		pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.				

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
33. Papua Barat	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	20.80%	5,19%-5,48%	12,3%-12,5%	21.66%	19,62%-20,12%	19,29%-20,29%	100.26	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	95.8	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	27,87	Diatas rata-rata Nasional	60-69	78.15	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran II (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM.			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya • Penguatan kerja sama antar daerah			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan. • Penguatan kerja sama antar daerah • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi,			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, stunting, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD,		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	• Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah • Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	• Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular • Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan. • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.		terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBK agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi	infrastruktur layanan dasar pendidikan.	untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
34. Papua Barat Daya	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	3.60%	3,7%-4,5%	4,9%-5,4%	18.13%	17,6%-18%	15,50%-16,0%	99.9	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	95.1	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	66,29	Diatas rata-rata Nasional	70-79	-	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) NTP di bawah rata-rata			Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) NTN di bawah rata-rata			Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)			Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya • Penguatan kerja sama antar daerah			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan			• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi <i>mandatory spending</i> sektor pendidikan;			• DOB, sesuai Kuadran Daerah Induk. • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, stunting, serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase Earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	• Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan yaitu sektor pariwisata lebih memiliki nilai tambah yang lebih baik. • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah • Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	• Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular • Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin • Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar			• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	• Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
35. Papua	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.11%	4,4%- 4,9%	5%-5,7%	17.26%	16%-16,5%	15,8%- 16,5%	101.38	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	107.17	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata- rata Nasional	50,05	Diatas rata-rata Nasional	60-69	76.25	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di bawah rata-rata			• Kuadran II (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM • Pembiayaan dan investasi ekosistem usaha daerah			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya • Insentif PBB P2 untuk lahan produksi pangan untuk menjaga			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, stunting, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD,		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	melalui BUMD, swasta dan koperasi/BPR • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	untuk masyarakat puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, pendidikan serta akses layanan internet • Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin	luas lahan produktif dan mencegah alih fungsi lahan • Penguatan kerja sama antar daerah			untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
36. Papua Selatan	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.55%	4,91%-5,3%	5,0%-5,4%	17.44%	16,5%-17%	16,50%-16,93%	101.58	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	112.28	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	9,31	Diatas rata-rata Nasional	60-69	-	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) • NTP di bawah rata-rata			• Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTN di atas rata-rata			• Kuadran II (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah			• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah;			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah;			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk percepatan penyediaan			• DOB, sesuai Kuadran Daerah Induk. • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, stunting, serta penguatan layanan kesehatan; • Mematuhi pemenuhan earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Pembiayaan dan investasi ekosistem usaha daerah melalui BUMD, swasta dan koperasi/BPR - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah - Mematuhi pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah - Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan - Mematuhi pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar - Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu	- Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya - Insentif PBB P2 untuk lahan produksi pangan untuk menjaga luas lahan produktif dan mencegah alih fungsi lahan		infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
37. Papua Tengah	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.36%	6,17%-6,87%	5,7%-7,2%	29.76%	26,5%-27%	24,5%-25,5%	99.94	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	108.63	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	52,09	Diatas rata-rata Nasional	60-69	-	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kuadran IV (Belanja Pangan Tinggi, Produktivitas Rendah) NTP di bawah rata-rata			Kuadran IV (Belanja Perikanan Tinggi, Produktivitas Rendah) NTN di atas rata-rata			Kuadran II (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)			Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah			• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi • Optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan infrastruktur pertanian • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya			• Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan • Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan. • Penguatan kerja sama antar daerah			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan			• DOB, sesuai Kuadran Daerah Induk. • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, stunting, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase Earmarking Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan yaitu pertambangan lebih memiliki nilai tambah yang lebih baik. - Pembiayaan dan investasi ekosistem usaha daerah melalui BUMD, swasta dan koperasi/BPR - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah - Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat, puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah. - Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan - Dukungan Alokasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu - Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	- Menjaga kepatuhan pemenuhan <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dengan wilayah distribusinya - Penguatan kerja sama antar daerah		penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan <i>creative financing</i> untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
38. Papua Pegunungan	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTN)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Kinerja	4.75%	4,87%- 5,38%	4,9%- 5,6%	32.97%	30%-31%	27,50%- 28,00%	100.85	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	-	Diatas rata-rata Nasional	-	-	Diatas rata-rata Nasional	60-69	-	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Karakteristik	• Kuadran IV (Inefisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) • Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			• Kuadran III (Indeks Regional <i>Wellbeing</i> di bawah rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			• Kuadran III (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Rendah) • NTP di bawah rata-rata			-			• Kuadran II (SPM Pendidikan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)			• Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)		
Dukungan Pemda	• Akselerasi investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik • Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti membangun sarana prasarana konektivitas. • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM			• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri • Dukungan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal, insentif bagi UMKM, dan penguatan akses permodalan melalui kerja sama dengan BUMD dan koperasi daerah			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Pelatihan dan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Penguatan kerja sama antar daerah			• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Pelatihan dan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian • Penguatan kerja sama antar daerah			• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan akselerasi peningkatan kinerja layanan dasar pendidikan. • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative <i>financing</i> untuk percepatan			• *DOB, sesuai Kuadran Daerah Induk. • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, stunting, serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> Pajak Rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;		

Provinsi	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Pembiayaan dan investasi ekosistem usaha daerah melalui BUMD, swasta dan koperasi/BPR - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah - Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	- Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat - Dukungan APBD untuk perbaikan kualitas data untuk pensasaran bantuan - Dukungan Alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu - Meningkatkan persentase <i>earmarking</i> pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.			penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	- Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan kesehatan.

serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah	pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu		
Meningkatkan persentase earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan			

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

2. Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 Berdasarkan Program

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
				Lampiran
1.	001	MPR		695,1
			Program Dukungan Manajemen	194,1
			Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	501,0
2.	002	DPR		6.552,6
			Program Dukungan Manajemen	3.108,4
			Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.444,1
3.	004	BPK		6.835,0
			Program Dukungan Manajemen	3.703,9
			Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.131,0
4.	005	MA		10.878,4
			Program Dukungan Manajemen	10.878,4
			Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-
5.	006	KEJAKSAAN		8.965,0
			Program Dukungan Manajemen	8.617,1
			Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	347,9
6.	007	KEMENSETNEG		2.136,9
			Program Dukungan Manajemen	2.126,9
			Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	10,0
7.	010	KEMENDAGRI		3.244,2
			Program Dukungan Manajemen	1.414,5
			Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	149,2
			Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	134,5
			Program Tata Kelola Kependudukan	1.545,9
8.	011	KEMENLU		7.933,1
			Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	-
			Program Dukungan Manajemen	7.299,7
			Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	189,7
			Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	-
			Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	443,7
9.	012	KEMENHAN		167.400,0
			Program Dukungan Manajemen	75.673,0
			Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	24,7

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	71.919,5
			Program Pelaksanaan Tugas TNI	3.145,2
			Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	293,1
			Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	13.849,6
			Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	2.495,0
10.	015	KEMENKEU		47.132,9
			Program Dukungan Manajemen	45.485,6
			Program Kebijakan Fiskal	-
			Program Pengelolaan Belanja Negara	-
			Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.460,8
			Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	186,5
11.	018	KEMENTAN		13.757,1
			Program Dukungan Manajemen	2.538,7
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	10.450,8
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	758,1
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	9,5
12.	019	KEMENPERIND		1.936,9
			Program Dukungan Manajemen	1.552,3
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	305,0
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	79,5
13.	020	KEMEN ESDM		8.118,0
			Program Dukungan Manajemen	3.065,2
			Program Energi dan Ketenagalistrikan	4.379,4
			Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	227,0
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	366,5
			Program Pertambangan Mineral dan Batubara	79,8
14.	022	KEMENHUB		24.406,0
			Program Dukungan Manajemen	10.286,3
			Program Infrastruktur Konektivitas	12.267,5
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.852,2
15.	024	KEMENKES		104.354,7
			Program Dukungan Manajemen	7.546,5
			Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	257,5
			Program Kesehatan Masyarakat	2.374,6
			Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	87.850,8
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.216,1

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.109,2
16.	025	KEMENAG		75.214,1
			Program Dukungan Manajemen	43.148,2
			Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.298,4
			Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.053,5
			Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.707,1
			Program Pendidikan Tinggi	8.006,8
17.	026	KEMENAKER		3.716,9
			Program Dukungan Manajemen	1.167,4
			Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.892,9
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	656,6
18.	027	KEMENSOS		76.038,9
			Program Dukungan Manajemen	768,5
			Program Perlindungan Sosial	75.270,4
19.	032	KEMEN KP		3.606,8
			Program Dukungan Manajemen	2.547,1
			Program Kualitas Lingkungan Hidup	50,0
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	52,5
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	88,8
			Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	868,4
20.	035	KEMENKO- PEREKONOMIAN		203,1
			Program Dukungan Manajemen	203,1
			Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
21.	036	KEMENKO-PMK		106,9
			Program Dukungan Manajemen	106,9
			Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
22.	041	KEMEN BUMN		150,5
			Program Dukungan Manajemen	150,5
			Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	-
23.	047	KEMEN PP & PA		133,1
			Program Dukungan Manajemen	133,1
			Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	-
24.	048	KEMEN PAN RB		208,2
			Program Dukungan Manajemen	166,7
			Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	41,5
25.	050	BIN		3.951,7
			Program Dukungan Manajemen	1.257,8

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalian Keamanan Negara	2.693,9
26.	051	BSSN		2.963,9
			Program Dukungan Manajemen	384,3
			Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	2.579,6
27.	054	BPS		3.692,1
			Program Dukungan Manajemen	3.326,5
			Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	365,6
28.	055	KEMENPPN /BAPPENAS		764,5
			Program Dukungan Manajemen	556,8
			Program Perencanaan Pembangunan Nasional	207,7
29.	056	KEMEN ATR/BPN		7.786,1
			Program Dukungan Manajemen	5.302,0
			Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	2.151,9
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	332,1
30.	057	PNRI		266,7
			Program Dukungan Manajemen	266,6
			Program Perpustakaan dan Literasi	0,1
31.	059	KEMENKOMDIGI		7.745,7
			Program Dukungan Manajemen	1.567,0
			Program Komunikasi Publik	-
			Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	81,7
			Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital	6.097,0
32.	060	POLRI		109.672,1
			Program Dukungan Manajemen	71.636,5
			Program Modernisasi Alimatsus dan Sarana Prasarana Polri	17.738,2
			Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	14.789,6
			Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.579,8
			Program Profesionalisme SDM Polri	1.927,9
33.	063	BPOM		1.166,0
			Program Dukungan Manajemen	1.069,0
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	97,0
34.	064	LEMHANNAS		115,7
			Program Dukungan Manajemen	115,7
			Program Pembinaan Ketahanan Nasional	-

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
35.	065	KEMEN INVESHIL		435,2
			Program Dukungan Manajemen	435,2
			Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	-
36.	066	BNN		1.015,8
			Program Dukungan Manajemen	999,4
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	16,4
37.	068	KKKBN/BKKBN		3.223,0
			Program Dukungan Manajemen	3.214,6
			Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	8,4
38.	074	KOMNAS HAM		132,6
			Program Dukungan Manajemen	113,8
			Program Pemajuan dan Penegakan HAM	18,7
39.	075	BMKG		1.894,3
			Program Dukungan Manajemen	1.045,6
			Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	848,7
40.	076	KPU		2.768,8
			Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-
			Program Dukungan Manajemen	2.768,8
41.	077	MK		260,9
			Program Dukungan Manajemen	135,8
			Program Penanganan Perkara Konstitusi	125,1
42.	078	PPATK		199,0
			Program Dukungan Manajemen	199,0
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	-
43.	083	BIG		2.197,9
			Program Dukungan Manajemen	133,7
			Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	2.064,3
44.	084	BSN		177,8
			Program Dukungan Manajemen	133,7
			Program Standardisasi Nasional	44,1
45.	085	BAPETEN		110,0
			Program Dukungan Manajemen	98,4
			Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	11,7
46.	086	LAN		264,3
			Program Dukungan Manajemen	217,3

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif
				Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	47,1
47.	087	ANRI		254,3
			Program Dukungan Manajemen	178,1
			Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	76,2
48.	088	BKN		574,8
			Program Dukungan Manajemen	555,3
			Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	19,4
49.	089	BPKP		2.075,9
			Program Dukungan Manajemen	1.899,6
			Program Pengawasan Pembangunan	176,4
50.	090	KEMENDAG		1.100,4
			Program Dukungan Manajemen	1.082,5
			Program Perdagangan Dalam Negeri	15,5
			Program Perdagangan Luar Negeri	2,3
51.	092	KEMENPORA		248,7
			Program Dukungan Manajemen	215,7
			Program Keolahragaan	33,0
			Program Kepemudaan	-
52.	093	KPK		878,0
			Program Dukungan Manajemen	878,0
			Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	-
53.	095	DPD		871,2
			Program Dukungan Manajemen	539,7
			Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	331,5
54.	100	KY RI		82,6
			Program Dukungan Manajemen	82,6
			Program Penegakan Integritas Hakim	-
55.	103	BNPB		200,1
			Program Dukungan Manajemen	200,1
			Program Ketahanan Bencana	-
56.	104	KPPM/BPPM		285,8
			Program Dukungan Manajemen	283,3
			Program Penempatan dan Pelindungan PMI	2,5
57.	106	LKPP		94,5
			Program Dukungan Manajemen	94,5
			Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	-
58.	107	BASARNAS		1.011,8

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Dukungan Manajemen	732,1
			Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	279,7
59.	108	KPPU		68,3
			Program Dukungan Manajemen	59,6
			Program Pengawasan Persaingan Usaha	8,7
60.	110	OMBUDSMAN RI		152,6
			Program Dukungan Manajemen	152,6
			Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-
61.	111	BNPP		131,1
			Program Dukungan Manajemen	131,1
			Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	-
62.	112	BPKPB & PB BATAM		2.447,9
			Program Dukungan Manajemen	1.099,0
			Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.348,9
63.	113	BNPT		1.659,8
			Program Dukungan Manajemen	223,5
			Program Penanggulangan Terorisme	1.436,3
64.	115	BAWASLU		1.987,4
			Program Dukungan Manajemen	1.987,4
			Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-
65.	116	LPP RRI		783,9
			Program Dukungan Manajemen	768,1
			Program Penyiaran Publik	15,9
66.	117	LPP TVRI		824,0
			Program Dukungan Manajemen	743,8
			Program Penyiaran Publik	80,1
67.	118	BPKPB & PB SABANG		36,5
			Program Dukungan Manajemen	31,4
			Program Pengembangan Kawasan Strategis	5,1
68.	119	BAKAMLA		1.650,7
			Program Dukungan Manajemen	208,6
			Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	1.442,2
69.	122	BPIP		107,8
			Program Dukungan Manajemen	107,8
			Program Pembinaan Ideologi Pancasila	-
70.	123	LPSK		70,7

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Dukungan Manajemen	70,7
			Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-
71.	124	BRIN		4.271,7
			Program Dukungan Manajemen	3.637,6
			Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	634,2
72.	125	BAPANAS		79,4
			Program Dukungan Manajemen	79,4
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-
73.	126	OIKN		5.050,0
			Program Dukungan Manajemen	553,0
			Program Pengembangan Kawasan Strategis	4.497,1
74.	127	BARANTIN		1.503,1
			Program Dukungan Manajemen	1.038,5
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	464,6
75.	128	BGN		217.860,2
			Program Dukungan Manajemen	7.450,6
			Program Pemenuhan Gizi Nasional	210.409,6
76.	129	KEMENKOPOLKAM		126,6
			Program Dukungan Manajemen	126,6
			Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
77.	130	KEMENKO-KUM-HAM-IMIPAS		124,6
			Program Dukungan Manajemen	90,8
			Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	33,8
78.	131	KEMENKO-PANG		137,0
			Program Dukungan Manajemen	137,0
			Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
79.	132	KEMENKO-INFRAWIL		115,7
			Program Dukungan Manajemen	115,7
			Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
80.	134	KEMENKO PM		223,9
			Program Dukungan Manajemen	223,9
			Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
81.	135	KEMENKUM		3.930,0
			Program Dukungan Manajemen	3.147,3
			Program Pembentukan Regulasi	51,3
			Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	731,3
82.	136	KEMENHAM		718,1

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Dukungan Manajemen	583,1
			Program Pemajuan dan Penegakan HAM	135,1
83.	137	KEMEN IMIPAS		17.152,3
			Program Dukungan Manajemen	11.374,9
			Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5.777,4
84.	138	KEMENDIKDASMEN		33.651,8
			Program Dukungan Manajemen	2.768,4
			Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	11.706,2
			Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	-
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4,7
			Program Wajib Belajar 13 Tahun	19.172,4
85.	139	KEMENDIKTISAINTEK		55.452,5
			Program Dukungan Manajemen	15.426,9
			Program Pendidikan Tinggi	39.025,6
			Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.000,0
86.	140	KEMENBUD		827,4
			Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	62,3
			Program Dukungan Manajemen	765,1
			Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	-
87.	141	BPH		156,0
			Program Dukungan Manajemen	92,9
			Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan	63,1
88.	142	BPJPH		216,1
			Program Dukungan Manajemen	66,1
			Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan	150,0
89.	143	KEMENHUT		4.933,3
			Program Dukungan Manajemen	3.574,4
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	86,3
			Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.272,6
90.	144	KEMEN-LH		1.075,8
			Program Dukungan Manajemen	842,7
			Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	40,9
			Program Kualitas Lingkungan Hidup	192,2
91.	145	KEMEN PU		70.855,5
			Program Dukungan Manajemen	5.465,0
			Program Infrastruktur Konektivitas	29.840,0
			Program Ketahanan Sumber Daya Air	18.837,2
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	11,2

No.	BA	Kementerian /Lembaga	Uraian Program	Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2026 (Rp miliar)
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.269,7
			Program Prasarana Strategis	13.432,4
92.	146	KEMEN PKP		1.824,8
			Program Dukungan Manajemen	753,1
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.071,7
93.	147	KEMENPAR		926,1
			Program Dukungan Manajemen	657,5
			Program Pariwisata	116,5
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	152,1
94.	148	KEMENKRAF		428,5
			Program Dukungan Manajemen	428,5
			Program Ekonomi Kreatif	-
95.	149	KEMENKOP		311,7
			Program Dukungan Manajemen	85,7
			Program Perkoperasian	226,0
96.	150	KEMEN UMKM		196,7
			Program Dukungan Manajemen	179,5
			Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan	17,2
97.	151	KEMENDES-PDT		1.591,8
			Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.138,2
			Program Dukungan Manajemen	453,6
98.	152	KEMENTRANS		1.902,0
			Program Dukungan Manajemen	564,4
			Program Transmigrasi	1.337,6